



Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD)
Kabupaten Karangasem
Tahun 2021





**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
(LPPD)**

**KABUPATEN KARANGASEM
TAHUN 2021**



BUPATI KARANGASEM

KATA PENGANTAR

Puja Pengastuti dan Angayu Bagya, puji dan syukur saya haturkan kehadapan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*/Tuhan Yang Maha Esa karena atas *Asung Kertha Wara Nugraha-Nya*, penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Karangasem Tahun 2021 telah dapat diselesaikan tepat waktu, untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur Bali guna memenuhi ketentuan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

LPPD Kabupaten Karangasem Tahun 2021 merupakan Laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama 1 (satu) tahun anggaran yang dilaksanakan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karangasem Tahun 2021, sebagai bahan evaluasi dan koreksi untuk mewujudkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas serta transparansi sesuai prinsip Tata Pemerintahan yang baik.

Adapun substansi dari laporan ini mencakup latar belakang, capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan, penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal, dan penutup. Dalam perjalanan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Karangasem selama tahun 2021, walaupun dengan segala keterbatasan dan penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan akibat mewabahnya pandemi Covid-19, secara umum roda pemerintahan berjalan dengan cukup baik.

Semoga LPPD Kabupaten Karangasem Tahun 2021 ini dapat dijadikan bahan evaluasi oleh Pemerintah terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Karangasem serta dijadikan sebagai referensi dan pijakan bagi pelaksanaan pembangunan kedepan di Kabupaten Karangasem. Hasil evaluasi baik berupa analisis, pandangan, catatan, masukan maupun saran sangat dibutuhkan untuk

memantapkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya di Kabupaten Karangasem pada tahun-tahun mendatang.

Om Santhi, Santhi, Santhi, Om.

Amlapura, 21 Maret 2022
Bupati Karangasem,

I Gede Dana, S.Pd., M.Si



DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Gambar	viii
Daftar Grafik	ix
BAB I Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Penjelasan Umum	1
a. Undang-undang Pembentukan Daerah.....	1
b. Data Geografis Wilayah.....	2
c. Jumlah Penduduk.....	5
d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan.....	7
e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah.....	8
f. Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah	12
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah	15
a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah	16
b. Visi dan Misi Kepala Daerah	17
c. Program Pembangunan Daerah berdasarkan Perencanaan Jangka Menengah	24
d. Kegiatan Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan.....	46
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal.....	53
1. Pendidikan	55
2. Kesehatan	56
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	59
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	60
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	60
6. Sosial.....	62

BAB II	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	68
2.1	Capaian Kinerja Makro.....	68
1.	Indeks Pembangunan Manusia.....	68
2.	Angka Kemiskinan	69
3.	Angka Pengangguran.....	70
4.	Pertumbuhan Ekonomi	71
5.	Pendapatan Per Kapita	72
6.	Indeks Gini Rasio (Ketimpangan Pendapatan).....	73
2.2	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.....	75
2.2.1	Indikator Kinerja kunci Keluaran	75
2.2.2	Indikator Kinerja Kunci Hasil	138
2.2.3	Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.....	155
2.3	Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah.....	158
a.	Target kinerja dalam perjanjian kinerja	158
b.	Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja	166
c.	Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya	176
d.	Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah	192
e.	Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai	199
f.	Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja	208
BAB III	Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan	219
3.1	Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten	219
3.2	Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten	219

BAB IV Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.....	220
4.1 Urusan Pendidikan.....	220
4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan.....	220
4.1.2 Target Capaian SPM serta Realisasi Urusan Pendidikan	221
4.1.3 Alokasi Anggaran Urusan Pendidikan.....	223
4.1.4 Dukungan Personil Urusan Pendidikan.....	224
4.1.5 Permasalahan dan Solusi Urusan Pendidikan	224
4.2 Urusan Kesehatan	226
4.2.1 Jenis Layanan Dasar Urusan Kesehatan.....	226
4.2.2 Target Pencapaian dan Realisasi SPM Urusan Kesehatan	226
4.2.3 Alokasi Anggaran Urusan Kesehatan.....	228
4.2.4 Dukungan Personil Urusan Kesehatan.....	229
4.2.5 Permasalahan dan Solusi Urusan Kesehatan	230
4.3 Urusan Pekerjaan Umum.....	231
4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum.....	231
4.3.2 Target Pencapaian dan Realisasi SPM Urusan Pekerjaan Umum	231
4.3.3 Alokasi Anggaran Urusan Pekerjaan Umum.....	232
4.3.4 Dukungan Personil Urusan Pekerjaan Umum.....	233
4.3.5 Permasalahan dan Solusi Urusan Pekerjaan Umum	233
4.4 Urusan Perumahan Rakyat	235
4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat.....	235
4.4.2 Target Pencapaian dan Realisasi SPM Urusan Perumahan Rakyat	235
4.4.3 Alokasi Anggaran Urusan Perumahan Rakyat.....	236
4.4.4 Dukungan Personil Urusan Perumahan Rakyat.....	239
4.4.5 Permasalahan dan Solusi Urusan Perumahan Rakyat	239
4.5 Urusan Ketentraman, Ketertinan Umum dan Perlindungan Masyarakat	240
4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar urusan Trantibumlinmas.....	240
4.5.2 Target Pencapaian dan Realisasi SPM urusan Trantibumlinmas	240
4.5.3 Alokasi Anggaran urusan Trantibumlinmas.....	243
4.5.4 Dukungan Personil urusan Trantibumlinmas.....	246
4.5.5 Permasalahan dan Solusi urusan Trantibumlinmas	247

4.6	Urusan Sosial	251
4.6.1	Jenis Pelayanan Dasar Urusan Sosial	251
4.6.2	Target dan Realisasi SPM Urusan Sosial.....	252
4.6.3	Alokasi Anggaran Urusan Sosial	253
4.6.4	Dukungan Personil Urusan Sosial	254
4.6.5	Permasalahan dan Solusi Urusan Sosial.....	254
4.7	Program dan Kegiatan	255
4.7.1	Bidang Urusan Pendidikan	255
4.7.2	Bidang Urusan Kesehatan	257
4.7.3	Bidang Urusan Pekerjaan Umum	258
4.7.4	Bidang Urusan Perumahan Rakyat	259
4.7.5	Bidang Urusan Trantibumlinmas.....	261
4.7.6	Bidang Urusan Sosial.....	271
BAB V	Penutup	272

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Administrasi Kabupaten Karangasem Per Kecamatan.....	4
------------	-----------------------------------------------------------	---

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Peningkatan Jumlah Penduduk Kab. Karangasem Tahun 2017-2021	6
Grafik 2.1	IPM Kabupaten Karangasem Tahun 2017-2021.....	69
Grafik 2.2	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karangasem Tahun 2015-2021.....	71
Grafik 2.3	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab. Karangasem	72
Grafik 2.4	Indeks Gini Ratio Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021	74

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Luas Wilayah Kabupaten Karangasem Menurut Kecamatan, Tahun 2021	2
Tabel 1.2	Perkembangan Penduduk Kabupaten Karangasem Tahun 2017-2021.....	5
Tabel 1.3	Persebaran Penduduk per Kecamatan Tahun 2021	7
Tabel 1.4	Jumlah Desa/Kelurahan, Desa Adat, Banjar Adat/Banjar Dinas dan Lingkungan di Kabupaten Karangasem Menurut Kecamatan, Tahun 2021.....	7
Tabel 1.5	Perangkat Daerah di Kabupaten Karangasem	8
Tabel 1.6	Rekapitulasi Jumlah PNS Kabupaten Karangasem Tahun 2021	11
Tabel 1.7	Realisasi Pendapatan APBD Kabupaten Karangasem Tahun 2021	12
Tabel 1.8	Realisasi Belanja APBD Kabupaten Karangasem Tahun 2021	13
Tabel 1.9	Realisasi Pembiayaan APBD Kabupaten Karangasem Tahun 2021	14
Tabel 1.10	Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026	25
Tabel 2.1	Perkembangan Kemiskinan Kabupaten Karangasem Tahun 2017-2021.....	69
Tabel 2.2	Perbandingan PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku	73
Tabel 2.3	Rekapan Capaian Kinerja Makro	74
Tabel 2.4	Target Kinerja dalam perjanjian kinerja	158
Tabel 2.5	Capaian Kinerja Tujuan 1, Meningkatkan jangkauan, ketersediaan pelayanan, dan kesetaraan dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas.....	166
Tabel 2.6	Capaian Kinerja Tujuan 2, Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).....	167
Tabel 2.7	Capaian Kinerja Tujuan 3, Meningkatkan jangkauan, ketersediaan pelayanan, dan kesetaraan dalam bidang kesehatan yang berkualitas.....	167
Tabel 2.8	Capaian Kinerja Tujuan 4, Meningkatnya peran pelayanan aparatur sipil negara yang berkarakter, bersih, berwibawa dan profesional.....	168
Tabel 2.9	Capaian Kinerja Tujuan 5, Meningkatnya kualitas sikap mental dan kultur masyarakat dalam mendukung gerakan Karangasem Bersih dan Bermartabat	168
Tabel 2.10	Capaian Kinerja Tujuan 6, Meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan.....	169

Tabel 2.11	Capaian Kinerja Tujuan 7, Meningkatnya produktivitas dan skala usaha hasil pertanian dalam arti luas.....	170
Tabel 2.12	Capaian Kinerja Tujuan 8, Meningkatnya investasi dan daya saing produk industri terutama agroindustri dan meningkatnya iklim perdagangan.....	170
Tabel 2.13	Capaian Kinerja Tujuan 9, Meningkatnya produktivitas dan pengembangan usaha kecil, menengah dan koperasi.....	171
Tabel 2.14	Capaian Kinerja Tujuan 10, Meningkatkan destinasi pariwisata dan kunjungan wisatawan	171
Tabel 2.15	Capaian Kinerja Tujuan 11, Meningkatnya kualitas pariwisata yang berbasis budaya dan kearifan lokal.....	172
Tabel 2.16	Capaian Kinerja Tujuan 12, Meningkatnya pengendalian ruang dan harmonisasi rencana tata ruang sesuai dengan perkembangan teknologi, sosial ekonomi masyarakat	172
Tabel 2.17	Capaian Kinerja Tujuan 13, Meningkatnya pembangunan infrastruktur perdesaan	173
Tabel 2.18	Capaian Kinerja Tujuan 14, Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana infrastruktur	173
Tabel 2.19	Capaian Kinerja Tujuan 15, Meningkatnya pembangunan dan kualitas sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pelayanan publik perdesaan.....	174
Tabel 2.20	Capaian Kinerja Tujuan 16, Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama, pendidikan agama, serta sarana dan prasarana sosial dan keagamaan.....	174
Tabel 2.21	Capaian Kinerja Tujuan 17, Meningkatnya kualitas kehidupan sosial dan kesejahteraan masyarakat	175
Tabel 2.22	Capaian Kinerja Tujuan 18, Meningkatnya kualitas seni dan budaya masyarakat	175
Tabel 2.23	Capaian Kinerja Tujuan 19, Terwujudnya peningkatan Wawasan Kebangsaan dan pemahaman demokrasi	176
Tabel 2.24	Capaian Kinerja Tujuan 1, Meningkatkan jangkauan, ketersediaan pelayanan, dan kesetaraan dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas.....	177
Tabel 2.25	Capaian Kinerja Tujuan 2, Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).....	178
Tabel 2.26	Capaian Kinerja Tujuan 3, Meningkatkan jangkauan, ketersediaan pelayanan, dan kesetaraan dalam bidang kesehatan yang berkualitas.....	178
Tabel 2.27	Capaian Kinerja Tujuan 4, Meningkatnya peran pelayanan aparatur sipil negara yang berkarakter, bersih, berwibawa dan profesional.....	179

Tabel 2.28	Capaian Kinerja Tujuan 5, Meningkatnya kualitas sikap mental dan kultur masyarakat dalam mendukung gerakan Karangasem Bersih dan Bermartabat	180
Tabel 2.29	Capaian Kinerja Tujuan 6, Meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan.....	181
Tabel 2.30	Capaian Kinerja Tujuan 7, Meningkatnya produktivitas dan skala usaha hasil pertanian dalam arti luas.....	181
Tabel 2.31	Capaian Kinerja Tujuan 8, Meningkatnya investasi dan daya saing produk industri terutama agroindustri dan meningkatnya iklim perdagangan.....	182
Tabel 2.32	Capaian Kinerja Tujuan 9, Meningkatnya produktivitas dan pengembangan usaha kecil, menengah dan koperasi.....	183
Tabel 2.33	Capaian Kinerja Tujuan 10, Meningkatkan destinasi pariwisata dan kunjungan wisatawan	184
Tabel 2.34	Capaian Kinerja Tujuan 11, Meningkatnya kualitas pariwisata yang berbasis budaya dan kearifan lokal.....	185
Tabel 2.35	Capaian Kinerja Tujuan 12, Meningkatnya pengendalian ruang dan harmonisasi rencana tata ruang sesuai dengan perkembangan teknologi, sosial ekonomi masyarakat	186
Tabel 2.36	Capaian Kinerja Tujuan 13, Meningkatnya pembangunan infrastruktur perdesaan	187
Tabel 2.37	Capaian Kinerja Tujuan 14, Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana infrastruktur	187
Tabel 2.38	Capaian Kinerja Tujuan 15, Meningkatnya pembangunan dan kualitas sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pelayanan publik perdesaan.....	188
Tabel 2.39	Capaian Kinerja Tujuan 16, Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama, pendidikan agama, serta sarana dan prasarana sosial dan keagamaan.....	188
Tabel 2.40	Capaian Kinerja Tujuan 17, Meningkatnya kualitas kehidupan sosial dan kesejahteraan masyarakat.....	189
Tabel 2.41	Capaian Kinerja Tujuan 18, Meningkatnya kualitas seni dan budaya masyarakat	190
Tabel 2.42	Capaian Kinerja Tujuan 19, Terwujudnya peningkatan Wawasan Kebangsaan dan pemahaman demokrasi	191
Tabel 2.43	Rata-Rata Capaian dan Kategori Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2021.....	191
Tabel 2.44	Capaian Kinerja Tujuan 1, Meningkatkan jangkauan, ketersediaan pelayanan, dan kesetaraan dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas.....	192
Tabel 2.45	Capaian Kinerja Tujuan 2, Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).....	193

Tabel 2.46	Capaian Kinerja Tujuan 3, Meningkatkan jangkauan, ketersediaan pelayanan, dan kesetaraan dalam bidang kesehatan yang berkualitas.....	193
Tabel 2.47	Capaian Kinerja Tujuan 4, Meningkatnya peran pelayanan aparatur sipil negara yang berkarakter, bersih, berwibawa dan profesional.....	193
Tabel 2.48	Capaian Kinerja Tujuan 5, Meningkatnya kualitas sikap mental dan kultur masyarakat dalam mendukung gerakan Karangasem Bersih dan Bermartabat	194
Tabel 2.49	Capaian Kinerja Tujuan 6, Meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan.....	194
Tabel 2.50	Capaian Kinerja Tujuan 7, Meningkatnya produktivitas dan skala usaha hasil pertanian dalam arti luas.....	194
Tabel 2.51	Capaian Kinerja Tujuan 8, Meningkatnya investasi dan daya saing produk industri terutama agroindustri dan meningkatnya iklim perdagangan.....	195
Tabel 2.52	Capaian Kinerja Tujuan 9, Meningkatnya produktivitas dan pengembangan usaha kecil, menengah dan koperasi.....	195
Tabel 2.53	Capaian Kinerja Tujuan 10, Meningkatkan destinasi pariwisata dan kunjungan wisatawan	195
Tabel 2.54	Capaian Kinerja Tujuan 11, Meningkatnya kualitas pariwisata yang berbasis budaya dan kearifan lokal.....	196
Tabel 2.55	Capaian Kinerja Tujuan 12, Meningkatnya pengendalian ruang dan harmonisasi rencana tata ruang sesuai dengan perkembangan teknologi, sosial ekonomi masyarakat	196
Tabel 2.56	Capaian Kinerja Tujuan 13, Meningkatnya pembangunan infrastruktur perdesaan	196
Tabel 2.57	Capaian Kinerja Tujuan 14, Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana infrastruktur	197
Tabel 2.58	Capaian Kinerja Tujuan 15, Meningkatnya pembangunan dan kualitas sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pelayanan publik perdesaan.....	197
Tabel 2.59	Capaian Kinerja Tujuan 16, Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama, pendidikan agama, serta sarana dan prasarana sosial dan keagamaan.....	197
Tabel 2.60	Capaian Kinerja Tujuan 17, Meningkatnya kualitas kehidupan sosial dan kesejahteraan masyarakat.....	197
Tabel 2.61	Capaian Kinerja Tujuan 18, Meningkatnya kualitas seni dan budaya masyarakat	198
Tabel 2.62	Capaian Kinerja Tujuan 19, Terwujudnya peningkatan Wawasan Kebangsaan dan pemahaman demokrasi	198

Tabel 2.63	Tingkat Efisiensi Tujuan 1, Meningkatkan jangkauan, ketersediaan pelayanan, dan kesetaraan dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas.....	199
Tabel 2.64	Tingkat Efisiensi Tujuan 2, Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).....	200
Tabel 2.65	Tingkat Efisiensi Tujuan 3, Meningkatkan jangkauan, ketersediaan pelayanan, dan kesetaraan dalam bidang kesehatan yang berkualitas.....	200
Tabel 2.66	Tingkat Efisiensi Tujuan 4, Meningkatnya peran pelayanan aparatur sipil negara yang berkarakter, bersih, berwibawa dan profesional.....	200
Tabel 2.67	Tingkat Efisiensi Tujuan 5, Meningkatnya kualitas sikap mental dan kultur masyarakat dalam mendukung gerakan Karangasem Bersih dan Bermartabat	201
Tabel 2.68	Tingkat Efisiensi Tujuan 6, Meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan	202
Tabel 2.69	Tingkat Efisiensi Tujuan 7, Meningkatnya produktivitas dan skala usaha hasil pertanian dalam arti luas.....	202
Tabel 2.70	Tingkat Efisiensi Tujuan 8, Meningkatnya investasi dan daya saing produk industri terutama agroindustri dan meningkatnya iklim perdagangan.....	203
Tabel 2.71	Tingkat Efisiensi Tujuan 9, Meningkatnya produktivitas dan pengembangan usaha kecil, menengah dan koperasi.....	203
Tabel 2.72	Tingkat Efisiensi Tujuan 10, Meningkatkan destinasi pariwisata dan kunjungan wisatawan	204
Tabel 2.73	Tingkat Efisiensi Tujuan 11, Meningkatnya kualitas pariwisata yang berbasis budaya dan kearifan lokal.....	204
Tabel 2.74	Tingkat Efisiensi Tujuan 12, Meningkatnya pengendalian ruang dan harmonisasi rencana tata ruang sesuai dengan perkembangan teknologi, sosial ekonomi masyarakat	204
Tabel 2.75	Tingkat Efisiensi Tujuan 13, Meningkatnya pembangunan infrastruktur perdesaan	205
Tabel 2.76	Tingkat Efisiensi Tujuan 14, Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana infrastruktur	205
Tabel 2.77	Tingkat Efisiensi Tujuan 15, Meningkatnya pembangunan dan kualitas sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pelayanan publik perdesaan.....	205
Tabel 2.78	Tingkat Efisiensi Tujuan 16, Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama, pendidikan agama, serta sarana dan prasarana sosial dan keagamaan.....	205
Tabel 2.79	Tingkat Efisiensi Tujuan 17, Meningkatnya kualitas kehidupan sosial dan kesejahteraan masyarakat.....	206

Tabel 2.80	Tingkat Efisiensi Tujuan 18, Meningkatnya kualitas seni dan budaya masyarakat	206
Tabel 2.81	Tingkat Efisiensi Tujuan 19, Terwujudnya peningkatan Wawasan Kebangsaan dan pemahaman demokrasi	207
Tabel 2.82	Program yang mendukung capaian Kinerja	208
Tabel 3.1	Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten Karangasem	218
Tabel 3.2	Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten Karangasem	219
Tabel 4.1	Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Karangasem Tahun 2021	221
Tabel 4.2	Alokasi Anggaran Yang Mendukung Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Karangasem	224
Tabel 4.3	Target dan Realisasi SPM bidang kesehatan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem tahun 2021.....	226
Tabel 4.4	Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2021	228
Tabel 4.5	Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Urusan Kesehatan ...	229
Tabel 4.6	Target dan Capaian SPM Dinas PUPR Kabupaten Karangasem ...	231
Tabel 4.7	Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang PU tahun 2021.....	232
Tabel 4.8	Target dan Realisasi Pemenuhan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2021.....	235
Tabel 4.9	Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat	236
Tabel 4.10	Rekapitulasi Klasifikasi Pegawai DPKP Kab. Karangasem.....	239
Tabel 4.11	Target dan Realisasi SPM Satpol PP Karangasem Tahun 2021.....	241
Tabel 4.12	Target dan Realisasi SPM BPBD Kab. Karangasem Tahun 2021	242
Tabel 4.13	Target dan Realisasi SPM Dinas Pemadam Kebakaran Kab. Karangasem Tahun 2021.....	243
Tabel 4.14	Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Satpol PP Kabupaten Karangasem Tahun 2021	243
Tabel 4.15	Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM BPBD Kabupaten Karangasem Tahun 2021	244
Tabel 4.16	Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Karangasem Tahun 2021	245
Tabel 4.17	Realisasi SPM Bidang Sosial Tahun 2021.....	252
Tabel 4.18	Alokasi Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2021	253
Tabel 4.19	Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2021	256
Tabel 4.20	Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2021	257

Tabel 4.21	Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2021	258
Tabel 4.22	Program, Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2021	270
Tabel 4.23	Program, Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Dinas Sosial Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2021.....	271

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum

a. Undang-undang Pembentukan Daerah

Dalam perjalanan sejarahnya asal mula terbentuknya Kabupaten Karangasem sebagai daerah Otonom diawali saat terbentuknya Negara Indonesia Timur dimana muncul daerah-daerah yang dikenal dengan istilah Swapraja. Salah satunya adalah “Daerah Swapraja Karangasem” yang merupakan bagian dari “Daerah Bali” sesuai dengan Peraturan Pembentukan Negara Indonesia Timur (Staatsblad 1946 No. 143).

Seiring dengan lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah untuk seluruh Wilayah Republik Indonesia sejak tanggal 18 Januari 1957 maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 9 Agustus 1958 ((Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655)). Dalam substansi undang-undang ini keberadaan daerah Swapraja Karangasem secara resmi dibubarkan dengan pembentukan daerah-daerah tingkat II, termasuk dalam Daerah tingkat I Bali, dengan diberi nama-nama :

1. Daerah Tingkat II Buleleng;
2. Daerah Tingkat II Jembrana;
3. Daerah Tingkat II Badung;
4. Daerah Tingkat II Tabanan;
5. Daerah Tingkat II Gianyar;
6. Daerah Tingkat II Klungkung;
7. Daerah Tingkat II Bangli.
8. Daerah Tingkat II Karangasem.

Dalam bagian selanjutnya dijelaskan bahwa tempat kedudukan (ibu kota) pemerintah daerah-daerah tersebut untuk daerah tingkat II Karangasem berkedudukan di Karangasem. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 merupakan dasar pembentukan Kabupaten Karangasem yang menjadi dasar hukum keberadaan daerah otonom dimana sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan pemerintahan daerah, kini Daerah Tingkat II Karangasem dikenal dengan Kabupaten Karangasem, sehingga dalam setiap produk hukum baik peraturan daerah maupun peraturan bupati, selalu mereferensi Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) sebagai dasar pembentukan Kabupaten Karangasem.

b. Data Geografis Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Karangasem mencapai 839,54 km² atau 83.954 Ha (14,90% luas Pulau Bali) dan merupakan kabupaten terluas ketiga di Provinsi Bali setelah Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana. Kabupaten Karangasem memiliki 8 (delapan) Kecamatan, Dari delapan kecamatan tersebut, Kecamatan Kubu merupakan wilayah paling luas yaitu mencapai 234,72 Km². Selengkapnya disajikan pada tabel berikut :

Tabel 1.1

Luas Wilayah Kabupaten Karangasem Menurut Kecamatan, Tahun 2021

No.	Kecamatan	Luas (Km ²)	Hektar (Ha)	Persentase (%)
1	Rendang	109,7	10.970	13,07
2	Sidemen	31,15	3.515	4,79
3	Manggis	69,83	6.983	8,32
4	Karangasem	94,23	9.423	11,22
5	Abang	134,05	13.405	15,97
6	Bebandem	81,51	8.151	9,71
7	Selat	80,36	8.035	9,57
8	Kubu	234,72	23.472	27,95
	Jumlah	839,54	83.954	100,00

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2021

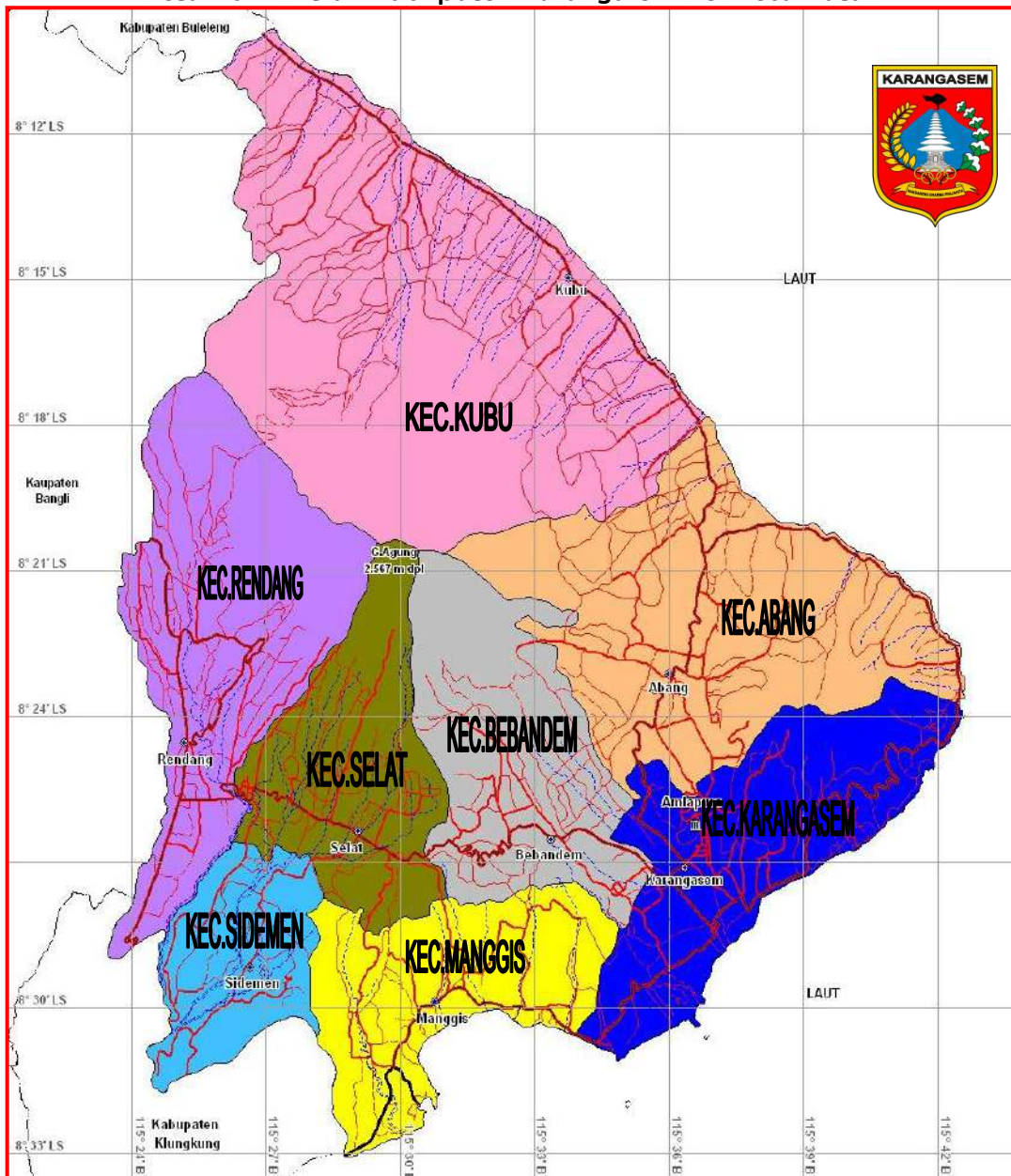
Kabupaten Karangasem merupakan satu dari sembilan kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi Bali. Secara astronomis, Kabupaten Karangasem yang dikenal dengan Kabupaten “Lahar” (akibat letusan Gunung Agung) berada pada posisi $8^{\circ} 00' 00''$ - $8^{\circ} 41' 37,8''$ Lintang Selatan, dan $115^{\circ} 35' 9,8''$ - $115^{\circ} 54' 8,9''$ Bujur Timur. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Karangasem adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Bali;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Klungkung, Bangli, dan Buleleng; dan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Lombok.

Lokasi Kabupaten Karangasem yang berada pada ujung Timur Pulau Bali menjadikan daerah ini menjadi salah satu akses transportasi barang yang utama antara Pulau Bali dan Pulau Lombok dengan keberadaan Pelabuhan Padangbai di Kabupaten ini.

Secara administrasi kewilayahan, kabupaten dengan luas wilayah mencapai $839,54 \text{ km}^2$ terbagi kedalam 8 kecamatan, 3 kelurahan dan 75 desa. Dari luas wilayah tersebut, sebagian besar merupakan lahan kering dengan luas mencapai $768,14 \text{ km}^2$ (91,50%), sementara lahan basah berupa persawahan hanya seluas $71,4 \text{ km}^2$ (8,50%).

Gambar 1.1
Peta Administrasi Kabupaten Karangasem Per Kecamatan



Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kab. Karangasem 2021

Dari sisi topografis, daratan Kabupaten Karangasem umumnya berupa perbukitan dimana 43,5 % wilayahnya memiliki ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Bentangan pantai yang dimiliki kabupaten ini cukup panjang, yang mencapai 87 kilometer karena wilayah Karangasem memang dikelilingi dengan lautan dari sisi Utara, Timur dan Selatan.

c. Jumlah Penduduk

Dari segi demografis, Kabupaten Karangasem memiliki potensi penduduk yang strategis dengan jumlah yang selalu meningkat tiap tahunnya. Sisi positif dari pertumbuhan penduduk adalah tersedianya tenaga kerja potensial bagi peningkatan produktivitas karangasem, sementara dari sisi negatif pertumbuhan penduduk juga dapat menjadi beban apabila tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan dan produksi pangan yang cukup.

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, pertumbuhan penduduk Kabupaten Karangasem dalam periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mengalami fluktuasi dengan penurunan hingga hanya mencapai 12,16 % di tahun 2018 atau menurun sejumlah 62.123 jiwa, ini diakibatkan adanya pendataan dan pemuktahiran data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Karangasem. Jumlah sampai dengan akhir tahun 2021 jumlah penduduk Kabupaten Karangasem yakni sejumlah 522.217 orang.

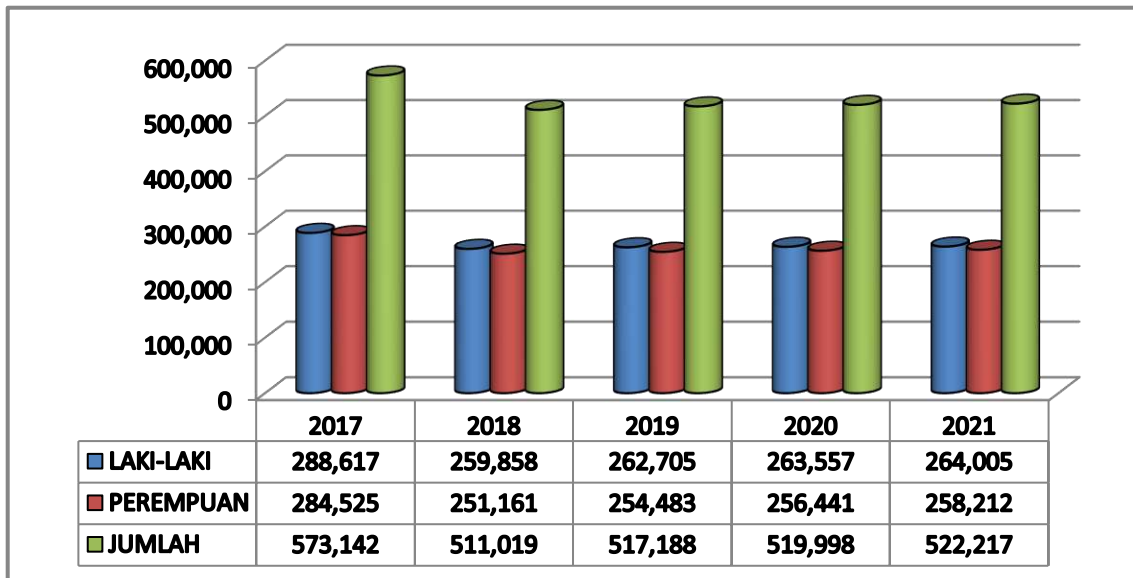
Tabel 1.2
Perkembangan Penduduk Kabupaten Karangasem Tahun 2017-2021

TAHUN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	BERTAMBAH/BERKURANG	%
2017	288.617	284.525	573.142	2.936	0,51
2018	259.858	251.161	511.019	-62.123	-12,16
2019	262.705	254.483	517.188	6.169	1,19
2020	263.557	256.441	519.998	2.810	0,54
2021	264.005	258.212	522.217	2.219	0,43

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Karangasem 2021

Grafik 1.1

Peningkatan Jumlah Penduduk Kab. Karangasem Tahun 2017-2021



Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Karangasem 2021

Persebaran penduduk tersebut per kecamatan juga masih menunjukkan adanya persebaran yang kurang merata dengan tingkat kepadatan penduduk terendah sejumlah 372 jiwa per kilometer persegi di Kecamatan Kubu, sementara kepadatan tertinggi berada di kecamatan Sidemen dengan tingkat kepadatan mencapai 1.119 Jiwa per kilometer persegi dari luas wilayah 35,15 Km² . Rendahnya tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Rendang dan Kubu disebabkan oleh kondisi topografi kedua kecamatan tersebut yang sebagian besar berupa bukit dan gunung serta lahan kering. Rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Karangasem sejumlah 1108 Jiwa per kilometer persegi. Kurang meratanya persebaran penduduk ini juga membawa permasalahan adanya permukiman kumuh, terutama di kantung-kantung permukiman yang padat.

Tabel 1.3
Persebaran Penduduk per Kecamatan Tahun 2021

NO	KECAMATAN	PENDUDUK		TOTAL	LUAS WILAYAH	KEPADATAN PER KM2
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN			
1	ABANG	43.978	42.632	86.610	134,05	646
2	BEBANDEM	29.214	28.617	57.831	81,51	709
3	KARANGASEM	52.608	51.776	104.384	94,23	1108
4	KUBU	44.659	42.746	87.405	234,72	372
5	MANGGIS	28.771	28.460	57.231	69,83	820
6	RENDANG	21.809	21.235	43.044	109,7	392
7	SELAT	23.233	23.156	46.389	80,35	577
8	SIDEMEN	19.733	19.590	39.323	35,15	1119
TOTAL		264.005	258.212	522.217	839,54	5744
Rata-rata Total						622

Sumber : diolah dari data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Karangasem 2021

d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Kabupaten Karangasem terdiri dari 8 kecamatan yaitu Kecamatan Rendang, Kecamatan Sidemen, Kecamatan Manggis, Kecamatan Karangasem, Kecamatan Abang, Kecamatan Bebandem, Kecamatan Selat, dan Kecamatan Kubu. Di Kabupaten Karangasem terdapat 78 Desa/Kelurahan yang terdiri dari 75 Desa Definitif, dan 3 Kelurahan, sedangkan desa adat terdapat sebanyak 190 desa adat yang meliputi 714 banjar adat. Banjar dinas sebanyak 539 banjar dinas/dusun, dan 52 lingkungan. Selengkapnya disajikan pada tabel berikut :

Tabel 1.4
Jumlah Desa/Kelurahan, Desa Adat, Banjar Adat/Banjar Dinas dan Lingkungan di Kabupaten Karangasem Menurut Kecamatan, Tahun 2021

No.	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Desa Adat	Banjar Adat	Banjar Dinas	Lingkungan
1	Rendang	6	-	26	66	62	-
2	Sidemen	10	-	19	71	51	-
3	Manggis	12	-	20	82	59	-
4	Karangasem	8	3	23	179	76	52
5	Abang	14	-	20	97	96	-
6	Bebandem	8	-	15	68	70	-
7	Selat	8	-	27	97	66	-
8	Kubu	9	-	41	81	74	-
Jumlah		75	3	190	741	554	52

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2021

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah 40 (empat puluh) Organisasi Perangkat Daerah yang dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 1.5

Perangkat Daerah di Kabupaten Karangasem

No	Nama Perangkat Daerah	Sub Bagian Dari Perangkat Daerah	Keterangan
1.	Sekretariat Daerah Kab. Karangasem	- Bagian Pemerintahan - Bagian Hukum - Bagian Protokol dan Kopim - Bagian Perekonomian dan SDA - Bagian Kesejahteraan Rakyat - Bagian Administrasi Pembangunan - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa - Bagian Perencanaan Keuangan - Bagian Organisasi - Bagian Umum	
2.	Sekretariat DPRD Kab. Karangasem		
3.	Inspektorat Daerah Kab. Karangasem		
	DINAS DAERAH KAB. KARANGASEM		
4.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Karangasem		
5.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Karangasem		
6.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Karangasem		
7.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Karangasem		
8.	Dinas Pertanian Kab. Karangasem		
9.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karangasem		
10.	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Karangasem		
11.	Dinas Kesehatan Kab. Karangasem		
12.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Karangasem		
13.	Dinas Sosial Kab. Karangasem		

14. Dinas Ketenagakerjaan Kab. Karangasem
15. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Karangasem
16. Dinas Lingkungan Hidup Kab. Karangasem
17. Dinas Perhubungan Kab. Karangasem
18. Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Karangasem
19. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kab. Karangasem
20. Dinas Kebudayaan Kab. Karangasem
21. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Karangasem
22. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Karangasem
23. Dinas Pariwisata Kab. Karangasem
24. Dinas Pemadam Kebakaran Kab. Karangasem
25. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Karangasem
26. Dinas Ketahanan Pangan Kab. Karangasem
27. Dinas Perikanan Kab. Karangasem

BADAN DAERAH

28. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Karangasem
29. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Karangasem
30. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Karangasem

KECAMATAN

31. Kecamatan Karangasem
32. Kecamatan Kubu
33. Kecamatan Abang
34. Kecamatan Bebandem

35. Kecamatan Selat
36. Kecamatan Manggis
37. Kecamatan Rendang
38. Kecamatan Sidemen

PEMERINTAHAN UMUM

39. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Karangasem

PENANGGULANGAN BENCANA

40. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Karangasem

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Karangasem, Tahun 2021

Dalam menjalankan pemerintahannya, tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Karangasem didukung oleh 5.848 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 4.910 Pegawai Non ASN/ Kontrak yang tersebar pada berbagai instansi. Berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat PNS di Kabupaten Karangasem pada jenjang SD sebanyak 51 orang, jenjang SMP sebanyak 122 orang, jenjang Pendidikan SMA sebanyak 577, jenjang pendidikan SMK sebanyak 317 orang, jenjang pendidikan Diploma sebanyak 582, Jenjang pendidikan Sarjana sebanyak 3782 orang, dan jenjang pendidikan Pasca Sarjana sebanyak 411 orang. Jika dilihat berdasarkan Jenis Kelamin maka dapat dilihat PNS di Kabupaten Karangasem berjenis kelamin laki-laki sebanyak 3281 orang, sedangkan berjenis kelamin perempuan sebanyak 2561 orang. Selengkapnya disajikan pada Tabel Rekapitulasi berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2021 berikut.

Tabel 1.6
Rekapitulasi Jumlah PNS Kabupaten Karangasem Tahun 2021

NO	UNIT KERJA	JENJANG PENDIDIKAN							JENIS KELAMIN		JUMLAH
		SD	SMP	SMA	SMK	DIPLOMA	S1	S2	PRIA	WANITA	
1	Sekretariat Daerah	0	0	0	0	0	0	6	6	0	6
2	Bagian Kesra	0	0	1	1	0	5	0	5	2	7
3	Bagian Pemerintahan	0	0	5	0	0	2	3	4	6	10
4	Bagian Hukum	0	0	3	0	0	6	1	8	2	10
5	Bagian Administrasi Pembangunan	0	1	1	1	0	2	1	4	2	6
6	Bagian Perekonomian dan SDA	0	0	3	1	0	2	2	3	5	8
7	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	0	0	4	0	0	6	1	7	4	11
8	Bagian Perencanaan dan Keuangan	0	0	0	0	0	3	1	2	2	4
9	Bagian Organisasi	0	0	3	0	0	4	1	3	5	8
10	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	0	0	1	0	0	8	1	5	5	10
11	Bagian Umum	2	7	8	1	0	21	0	23	16	39
12	Sekretariat DPRD	1	0	8	1	1	17	9	21	16	37
13	Inspektorat Daerah	0	1	9	1	0	19	8	27	11	38
14	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	0	4	29	3	1	36	17	63	27	90
15	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	0	2	11	3	0	19	5	25	15	40
16	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0	1	3	3	0	15	7	20	9	29
17	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	1	1	51	9	0	26	2	86	4	90
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1	1	7	2	1	16	5	23	10	33
19	Dinas Pertanian	3	4	12	15	0	74	10	88	30	118
20	Dinas Perikanan	1	5	7	1	0	11	5	25	5	30
21	Dinas Pariwisata	0	0	4	1	0	8	2	9	6	15
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1	0	4	1	0	6	5	12	5	17
23	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	0	3	1	2	9	5	8	12	20
24	Dinas Kebudayaan	0	3	8	2	0	13	3	21	8	29
25	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	2	2	3	2	0	13	1	13	10	23
26	Dinas Komunikasi dan Informatika	0	1	4	2	1	15	4	19	8	27
27	Dinas Perhubungan	0	3	13	1	3	11	1	29	3	32
28	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0	3	10	0	0	11	4	19	9	28
29	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2	0	3	1	0	15	1	11	11	22
30	Dinas Lingkungan Hidup	2	5	5	1	2	16	2	27	6	33
31	Dinas Ketahanan Pangan	1	2	2	1	0	5	3	8	6	14
32	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	0	2	5	1	2	5	3	13	5	18
33	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0	2	2	0	0	11	1	9	7	16

34	Dinas Pemadam Kebakaran	0	0	8	0	0	6	5	14	5	19
35	Dinas Ketenagakerjaan	1	0	3	4	10	14	7	30	9	39
36	Dinas Sosial	1	4	3	1	0	10	3	16	6	22
37	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	5	1	4	0	0	6	5	14	7	21
38	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9	10	35	19	0	28	13	96	18	114
39	Dinas Kesehatan	1	5	47	79	272	148	12	202	362	564
40	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	10	21	127	112	149	2957	190	1925	1641	3566
41	UPTD Rumah Sakit Umum Daerah	2	10	34	16	134	88	35	122	197	319
42	Kecamatan Abang	1	2	16	0	1	5	1	20	6	26
43	Kecamatan Bebandem	0	4	5	3	0	9	1	18	4	22
44	Kecamatan Karangasem	0	1	8	3	0	7	2	18	3	21
45	Kecamatan Kubu	1	3	6	1	1	5	3	19	1	20
46	Kecamatan Manggis	0	1	9	1	2	8	1	19	3	22
47	Kecamatan Rendang	0	2	9	5	0	14	1	26	5	31
48	Kecamatan Selat	1	0	9	5	0	7	2	20	4	24
49	Kecamatan Sidemen	0	0	6	8	0	8	1	20	3	23
50	Kelurahan Karangasem	1	0	3	0	0	4	0	8	0	8
51	Kelurahan Padangkerta	0	1	1	0	0	5	1	6	2	8
52	Kelurahan Subagan	0	2	2	0	0	6	0	8	2	10
68	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	1	6	2	0	3	3	13	2	15
69	Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Linmas	1	4	4	2	0	14	5	21	9	30
	JUMLAH	51	122	577	317	582	3782	411	3281	2561	5842

Sumber : BKPSDM Kab. Karangasem Tahun 2021

f. Realisasi Anggaran Pendapatan Belaja Daerah

- Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Pendapatan Daerah tahun 2021 terealisasi sebesar Rp.1.553.846.948.850,48 dari yang ditargetkan sebesar Rp.1.569.539.967.359,82 atau 99,00% dari yang ditargetkan. Secara rinci, realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.7
Realisasi Pendapatan APBD Kabupaten Karangasem Tahun 2021

No.	Jenis Pendapatan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
I.	Pendapatan Asli Daerah	219.880.880.649,82	250.734.664.481,16	114,03
1	Hasil Pajak Daerah	77.092.600.000,00	85.660.356.296,00	111,11
2	Hasil Retribusi Daerah	9.402.542.000,00	9.187.712.781,00	97,72
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.012.682.396,00	10.759.415.258,47	97,70
4	Lain-Lain PAD Yang Sah	122.373.056.253,82	145.127.180.145,69	118,59

II.	Dana Transfer	1.271.394.033.216,00	1.218.932.970.246,13	95,87
1	Dana Transfer Pemerintah Pusat	1.119.639.083.000,00	1.097.820.639.495,00	98,05
a	Dana Perimbangan	976.023.282.000,00	954.204.838.495,00	97,76
b	Dana Insentif Daerah (DID)	58.326.553.000,00	58.326.553.000,00	100,00
c	Dana Desa	85.289.248.000,00	85.289.248.000,00	100,00
2	Dana Transfer Antar Daerah	151.754.950.216,00	121.112.330.751,13	79,81
a	Pendapatan Bagi Hasil	116.917.039.826,00	88.024.000.926,13	75,29
b	Bantuan Keuangan	34.837.910.390,00	33.088.329.825,00	94,98
III.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	78.265.053.494,00	84.179.314.123,19	107,56
1	Pendapatan Hibah	-	2.673.080.227,38	-
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	78.265.053.494,00	81.506.233.895,81	104,14
	JUMLAH =	1.569.539.967.359,82	1.553.846.948.850,48	99,00

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Bulan Desember 2021, *unaudited*

Tabel diatas menyajikan bahwasannya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mampu melampaui target yang disesuaikan dalam Perubahan APBD, yaitu terealisasi sebesar Rp.250.734.664.481,16 dari yang ditargetkan sebesar Rp.219.880.880.649,82 atau 114,03%. Sedangkan Dana Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah masing-masing terealisasi lebih kecil dari yang ditargetkan (kurang dari 100%).

- Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Belanja Daerah setelah sembilan kali mengalami penyesuaian melalui Perubahan Penjabaran APBD, target dan realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2021 dapat disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1.8
Realisasi Belanja APBD Kabupaten Karangasem Tahun 2021

No.	Jenis Belanja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
I.	BELANJA OPERASI	1.309.437.843.875,20	1.203.413.811.344,39	91,90
1	Belanja Pegawai	763.329.296.062,03	741.068.177.715,16	97,08
2	Belanja Barang dan Jasa	518.029.808.135,17	438.928.776.924,40	84,73
3	Belanja Bunga	0	0	0
4	Belanja Hibah	21.942.839.678,00	18.086.736.704,83	82,43
5	Belanja Bantuan Sosial	6.135.900.000,00	5.330.120.000,00	86,87
II.	BELANJA MODAL	168.258.733.691,80	142.630.153.643,15	84,77
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	58.907.508.813,80	47.534.014.880,63	80,69

2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20.012.143.108,00	15.610.877.716,52	78,01
3	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	82.807.044.921,00	75.199.136.576,00	90,81
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.532.036.849,00	4.286.124.470,00	65,62
III	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.274.793.775,00	2.119.880.311,00	20,63
1	Belanja Tidak Terduga	10.274.793.775,00	2.119.880.311,00	20,63
IV	BELANJA TRANSFER	954.204.838.495,00	191.366.126.333,58	99,94
1	Belanja Bagi Hasil	12.177.319.998,00	12.055.086.912,23	99,00
2	Belanja Bantuan Keuangan	179.299.612.500,00	179.311.039.421,35	100,01
	JUMLAH =	1.679.448.303.840,00	1.539.529.971.632,12	91,67

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Bulan Desember 2021, *unaudited*

Dari total belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp.1.679.448.303.840,00 terealisasi sebesar Rp. 1.539.529.971.632,12 atau 91,67%. Secara lebih rinci, realisasi belanja daerah yang realisasinya sangat rendah diantaranya dari Belanja Tak Terduga terealisasi 20,63%.

- Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Daerah direncanakan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 113.908.336.480,00 dan terealisasi sebesar Rp. 113.908.336.480,00 atau 100,00%.

Tabel 1.9
Realisasi Pembiayaan APBD Kabupaten Karangasem Tahun 2021

No.	Jenis Pembiayaan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
I.	Penerimaan Pembiayaan	113.908.336.480,00	113.908.336.480,00	100,00%
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	113.908.336.480,00	113.908.336.480,00	100,00%
II.	Pengeluaran Pembiayaan	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100%
1	Penyertaan Modal Daerah	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100%
	Pembiayaan netto =	109.908.336.480,00	109.908.336.480,00	100,00%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Bulan Desember 2021, *unaudited*

Sedangkan dari sisi pengeluaran Pembiayaan direncanakan Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp.4.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.4.000.000.000,00 atau 100%.

Dari ringkasan total Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah maka dapat diketahui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran berkenaan adalah sebesar Rp. 124.225.313.698,36.

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sesuai dengan kewenangannya daerah menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Sebagai upaya untuk menciptakan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, terukur, efektif, efisien, dan akuntabel, proses perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Secara substantif perencanaan pembangunan daerah juga harus menggunakan pendekatan yang holistik, tematik, integratif, dan spasial.

Penyusunan perencanaan pembangunan daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

a. Permasalahan Strategi Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi, serta adanya permasalahan akibat perubahan kebijakan pemerintah atau belum optimalnya pelaksanaan kebijakan di daerah. Permasalahan pembangunan Kabupaten Karangasem diidentifikasi berdasarkan interaksi dan dinamika perkembangan berbagai sektor yang terjadi, baik pada skala lokal, regional maupun global. Adapun permasalahan mendasar pembangunan daerah Kabupaten Karangasem sesuai dengan pendekatan kondisi alam, sumber daya manusia dan budaya yang disusun berdasarkan atas gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan yang telah dilaksanakan periode 2016-2020. Permasalahan tersebut dapat dikelompokkan pada empat pendekatan yaitu:

- a. Permasalahan yang berkaitan dengan kondisi geografi dan demografi yaitu pengelolaan kondisi lingkungan alam dan penduduk yang belum optimal;
- b. Permasalahan yang berkaitan dengan aspek kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat masih rendah;
- c. Permasalahan yang berkaitan dengan aspek pelayanan publik yang belum optimal, dan
- d. Permasalahan yang berkaitan dengan kondisi daya saing daerah yang masih rendah.

b. Visi dan Misi Kepala Daerah

1. Visi Kepala Daerah

VISI :

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 adalah penjabaran terakhir atau periode keempat RPJPD Kabupaten Karangasem Tahun 2006-2025. Adapun Visi RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 berdasarkan Visi Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Terpilih Tahun 2021-2026 yaitu :

“NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI”

DI KARANGASEM

Melalui

POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA

Menuju

KARANGASEM ERA BARU YANG PRADNYAN, KERTHA, SHANTI DAN NADI

(“KARANGASEM PRAKERTHI NADI”)

Visi tersebut mengandung makna Menjaga Kesucian Dan Keharmonisan Alam Karangasem Beserta Isinya, Untuk Mewujudkan Kehidupan Krama Karangasem Yang Sejahtera dan Bahagia, Sekala Niskala Menuju Kehidupan Krama dan Gumi Karangasem Sesuai dengan Prinsip Tri Sakti Bung Karno : Berdaulat Secara Politik, Berdikari Secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan Melalui Pembangunan Secara Terpola, Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan Terintegrasi. Dengan Konsep Karangasem Prakertchi Nadi (Pradnyan, Kertha, Shanti Dan Nadi) yaitu :

- a. Karangasem Pradnyan adalah Karangasem yang cerdas dan bijaksana, Karangasem yang kompetitif / berdaya bersaing, dan Karangasem yang visioner, kreatif, inovatif, produktif, terbuka dan tetap “metaksu” yang senantiasa menjaga kesucian dan kesakralan.
- b. Karangasem Kertha adalah Karangasem yang sejahtera / sukerta, sehat dan bahagia

- c. Karangasem shanti adalah Karangasem yang **Nyaman, Aman, Damai dan Indah**.

Jadi Karangasem “PRAKERTHI-NADI” adalah Karangasem yang kuat/sakti, Karangasem yang agung, Karangasem yang suci dan Karangasem “metaksu”. “PRAKERTHI-NADI” juga akronim dari Pradnyan, Kerta, Shanti-Nyaman, Aman, Damai dan Indah. Kondisi ini adalah gambaran sebuah harmoni semesta yang agung dan suci simbol dari gunung agung dan kahyangan jagat.

Setidaknya ada 3 (tiga) unsur utama yang harus dipahami secara komprehensif tentang Karangasem yaitu :

1. Krama Karangasem / SDM (Pawongan) Pembangunan Krama Karangasem/SDM (pawongan) adalah pembangunan SDM Karangasem yang “Cerdas (pradnyan)” dan “Unggul”. SDM cerdas yang dimaksud adalah bukan hanya kecerdasan intelektual tetapi Krama Karangasem juga harus cerdas spritual, cerdas emosional dan cerdas sosial. Singkatnya adalah membangun SDM yang bijaksana, jujur, berkarakter dan berbudaya. Caranya dengan membenahi pendidikan (kurikulum) yaitu pendidikan agama dan pendidikan budi pekerti menjadi pendidikan yang utama. SDM unggul adalah SDM yang kompetitif / berdaya bersaing, visioner, kreatif, inovatif, produktif dan terbuka dengan senantiasa menjaga kesucian dan kesakralan; sehingga melahirkan Krama Karangasem yang “metaksu”
2. Alam Karangasem (Palemahan) Pembangunan Alam Karangasem (Palemahan) adalah pembangunan Karangasem Shanti untuk mewujudkan Karangasem NADI (Nyaman, Aman, Damai dan Indah).
3. Kebudayaan Karangasem yang mencakup agama, tradisi, seni dan adat istiadat (Parhayangan).

Ketiga hal inilah yang disebut Prakerthi (unsur utama) dalam membangun Karangasem. Ketiga unsur utama tersebut menjadi satu kesatuan tata cara kehidupan Krama Karangasem yang berkebudayaan tinggi.

Sebagaimana halnya manusia pada umumnya, Krama Karangasem memerlukan kehidupan layak yang harus dipenuhi dengan tuntutan kebutuhan yang semakin meningkat berupa kebutuhan dasar, yang meliputi pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik. Meningkatnya kebutuhan yang bersifat mendasar/wajib, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, sejalan dengan meningkatnya aspirasi dan harapan dalam memenuhi kehidupan yang terus berkembang.

Dalam memenuhi kehidupan tersebut Negara telah hadir sebagaimana tujuan kemerdekaan Indonesia yang telah diamanatkan dalam pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi : untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Orientasi, arah kebijakan dan program pembangunan Karangasem kedepan merupakan suatu proses pembangunan yang berlangsung secara sistematis, masif, dan dinamis dalam tataran lokal, nasional, dan global haruslah bisa memastikan setidaknya menyangkut 3 (tiga) hal yang sangat penting dan strategis bagi masa depan Krama Karangasem yaitu :

pertama, bisa menjaga / memelihara keseimbangan alam, Krama (Manusia) dan Kebudayaan Bali (Budaya dan Adat Istiadat Karangasem);

kedua, bisa memenuhi kebutuhan, harapan, dan aspirasi Krama Karangasem

dalam berbagai aspek kehidupan; dan

ketiga, memiliki kesiapan yang cukup dalam mengantisipasi / menghadapi munculnya permasalahan dan tantangan baru dalam tataran lokal, nasional, dan global yang akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap kondisi di masa yang akan datang, dan merupakan suatu manajemen resiko (risk management) dalam mengantisipasi terjadinya permasalahan dan tantangan baru di masa yang akan datang

Sejalan dengan orientasi dan arah kebijakan tersebut, pembangunan tata kehidupan Krama Karangasem harus ditempatkan sebagai pilar utama pembangunan Karangasem dalam berbagai sektor/bidang secara

komprehensif atau mengarusutamakan budaya/tata kelola dalam berbagai aspek pembangunan Karangasem serta pembangunan pertanian dan kebudayaan Karangasem harus diposisikan sebagai fundamental atau pilar utama dalam membangun perekonomian Karangasem.

Dalam segala keterbatasan yang dimiliki, ke depan, arah regulasi daerah dan kebijakan pembangunan sumber daya Karangasem terutama sektor pertanian dan kebudayaan harus mampu menghasilkan dan memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, termasuk kebutuhan dasar air bagi Krama Karangasem. Oleh karena itu, orientasi, arah kebijakan dan program pembangunan Karangasem kedepan harus ditata kembali yang diselenggarakan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah dan terintergerasi dalam satu kesatuan wilayah Karangasem yang berpihak dan taat asas pada Budaya Karangasem yaitu dengan menerapkan konsep Pola Pembangunan Semesta Berencana guna mewujudkan kehidupan Krama Karangasem yang sejahtera dan bahagia serta mewujudkan Gumi / wilayah Karangasem yang sesuai dengan Prinsip Tri Sakti Bung Karno, Bapak Proklamator dan Bapak Bangsa yaitu : berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan dalam koridor Ideologi Pancasila, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika. Orientasi, arah kebijakan dan program pembangunan Karangasem di masa datang yang diselenggarakan dengan menerapkan Pola Pembangunan Semesta Berencana, merupakan untaian benang merah yang menghubungkan Karangasem dalam dimensi waktu menurut konsep Tri Semaya : Atita (masa lalu), Nagata (Masa Kini), dan Wartamana (Masa Datang), yaitu kondisi Karangasem di masa lalu, kondisi Karangasem di masa kini dan kondisi Karangasem di masa datang. Karangasem dimasa lalu ditandai oleh masa keemasan kerajaan Karangasem, sebagai masa romantika; Karangasem di masa kini ditandai oleh dinamika pembangunan yang hasilnya memberi manfaat bagi kesejahteraan Krama Karangasem, namun sekaligus juga menimbulkan masalah dan tantangan baru, sebagai masa dinamika; dan Karangasem di masa datang merupakan suatu kondisi

baru (Sintesis) yang dirumuskan berdasarkan suatu proses dan hasil dari tesis dan antitesis terhadap kondisi Karangasem di masa lalu, dan kebutuhan serta permasalahan dan tantangan Karangasem di masa datang, sebagai masa Dialektika.

Dengan pola pembangunan demikian, akan terbangun kondisi yang diyakini mampu mengantarkan Karangasem menuju Era Baru, yaitu suatu Era yang ditandai dengan tatanan kehidupan baru : Karangasem yang Kawista, Karangasem kang tata-titi tentram kerta raharja, gemah ripah lohjinawi, yakni tatanan kehidupan holistik yang meliputi 3 (tiga) dimensi utama :

Dimensi Pertama : terpeliharanya keseimbangan alam, Krama dan Budaya Karangasem (Bali)

Alam Karangasem :

Memelihara dan melestarikan keagungan, kesucian, dan taksu alam Karangasem : Tempat – tempat suci, laut, danau, sungai, sumber mata air lain, gunung, hutan, tumbuh-tumbuhan (pertanian dan perkebunan), dan lingkungan alam niskala dengan melaksanakan upacara/upacara pakertih yadnya secara periodik, yaitu : *Atma Kertih, Segara Kertih, Wana Kertih, Danu Kertih, Jana Kertih, dan Jagat Kertih.*

Sedangkan secara sekala, upaya memelihara dan melestarikan alam Karangasem dilaksanakan dengan regulasi, kebijakan, dan program untuk konserfasi alam : perlindungan tempat-tempat suci, laut, danau, sungai, sumber mata air lain, gunung, hutan, tumbuh-tumbuhan (pertanian dan perkebunan), dan lingkungan alam sehingga alam Karangasem menjadi Nyaman, Aman, Damai, Indah.

Krama Karangasem :

a. Mengembangkan tata kehidupan Krama Karangasem berdasarkan nilai- nilai filsafat Sad Kertih baik secara sekala maupun niskala; *Atma Kertih, Segara Kertih, Wana Kertih, Danu Kertih, Jana Kertih, dan Jagat Kertih.*

- b. Mengembangkan Jatidiri, integritas, dan kualitas Krama Karangasem sesuai dengan nilai – nilai adat istiadat, tradisi, seni, dan budaya, serta kearifan lokal masyarakat Karangasem, yaitu :

Pertama, tampilnya jatidiri Krama Karangasem dalam bentuk rasa syukur, bahagia, dan bangga dilahirkan sebagai orang Karangasem.

Kedua, tampilnya integritas Krama Karangasem dalam bentuk karakter positif, etika, moralitas, kejujuran, disiplin, ketekunan/keuletan, dan kecintaan dalam setiap aktifitas kehidupan

Ketiga, tampilnya kualitas Krama Karangasem dalam bentuk kompetensi, profesional, kreatif, inovatif, dan memiliki daya saing dengan semangat pantang menyerah.

Budaya Karangasem :

- a. Memajukan Budaya Karangasem dari hulu sampai ke hilir yang meliputi; adat istiadat, agama, tradisi, seni, dan budaya, serta kearifan lokal Karangasem melalui upaya perlindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan obyek pemajuan kebudayaan.
- b. Menjadikan budaya Karangasem sebagai hulu pembangunan Karangasem yang menjiwai segala aspek pembangunan Karangasem mengarusutamakan budaya dalam berbagai aspek pembangunan Karangasem.
- c. Menjadikan Budaya Karangasem sebagai basis dan pilar utama pembangunan perekonomian masyarakat Karangasem.

Dimensi Kedua : terpenuhinya kebutuhan, harapan, dan aspirasi **Krama Karangasem** dalam berbagai aspek kehidupan.

- a. Terpenuhinya kebutuhan dasar Krama Karangasem : pangan, sandang, papan, air, listrik, kesehatan, dan pendidikan dalam jumlah dan kualitas yang memadai
- b. Terpenuhinya jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja Krama Karangasem
- c. Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dalam pelaksanaan kehidupan adat, agama, tradisi, seni, dan budaya bagi Krama Karangasem : Sarana-prasarana, transportasi, dan infrastruktur yang memadai.

- d. Terpenuhinya pendapatan perkapita, dan tersedianya lapangan kerja sesuai dengan kebutuhan bagi Krama Karangasem
- e. Terpenuhinya rasa Nyaman, Aman, Damai dan Indah bagi kehidupan Krama Karangasem

Dimensi Ketiga : memiliki kesiapan yang cukup (suatu manajemen resiko) dalam mengantisipasi/menghadapi munculnya permasalahan dan tantangan baru, dalam tataran lokal, nasional, dan global yang akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap kondisi di masa yang akan datang.

- a. Bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Bali dalam Penguatan dan pelebagaan adat, agama, tradisi, seni, dan budaya agar tetap kokoh
- b. Pengarusutamaan sumber daya lokal Karangasem dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam pengembangan dan pengelolaan perekonomian.
- c. Peningkatan daya saing Krama Karangasem
- d. Membangkitkan kembali rasa Jengah sebagai orang Karangasem dan rasa tindh terhadap Karangasem
- e. Memperkuat rasa kebersamaan, budaya gotong royong, dan sikap – sikap kolektif Krama Karangasem.

2. Misi Kepala Daerah

Dalam rangka mewujudkan Visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” di Karangasem melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Karangasem Era Baru yang Pradnyan, Kertha, Shanti dan Nadi (Karangasem Prakerthi Nadi), maka ditempuh melalui 6 (enam) misi sebagai berikut :

- Misi 1. Membangun Pertanian yang Tangguh dan Mandiri Dalam Rangka Mewujudkan Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani serta Nelayan
- Misi 2. Mengembangkan SDM yang Handal, Berdaya Saing Tinggi, dan Sistem Pelayanan Kesehatan yang Terjangkau, Adil dan Berkualitas.
- Misi 3. Mengembangkan Sektor Ekonomi, Sosial dan Budaya Secara Konfrehensif dan Terintegrasi

- Misi 4. Membangun Pariwisata yang Handal melalui Pembangunan Destinasi dan Promosi yang Ditunjang dengan Infrastruktur Pedesaan yang Memadai dan Terkoneksi
- Misi 5. Mengembangkan Sistem Keamanan dan Ketertiban Secara Terpadu
- Misi 6. Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bebas Korupsi serta Pelayanan Publik yang Prima

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Program pembangunan daerah adalah Program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang secara langsung mendukung capaian sasaran pembangunan daerah, sehingga menjadi program yang diprioritaskan untuk dilaksanakan tiap tahunnya. Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2022-2026 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1.10
Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program RPJMD Semesta Berencana
Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026

NO	MISI		INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/outcome)	SATUAN	KONDISI AWAL (sd 2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANCKAT DAERAH			
	TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.	
1	Misi 1	:	Membangun pertanian yang tangguh dan mandiri dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani serta nelayan																
	Tujuan 1	:	Terpenuhinya Kebutuhan Pangan Krama Karangasem dengan Kualitas Layak																
	Indikator Tujuan	:	1	Konsumsi Perkapita Penduduk Karangasem	Nilai (BP5)													Dinas Ketahanan Pangan	
	Indikator Tujuan	:		Ketersediaan Pangan Utama	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Ketahanan Pangan	
	sasaran	:																	
	1	Meningkatnya ketahanan pangan bagi Krama Karangasem		Persentase stok pangan aman	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Ketahanan Pangan	
				Indeks ketahanan pangan	Indeks	78,25	79	79,25	79,5	80	81	81	81	81	81	81	81	Dinas Ketahanan Pangan	
	Program	:																	
	1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDALULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN		persentase peningkatan produksi pangan lokal sumber karbohidrat non beras (jagung, ubi kayu, ubi jalar)	Persentase (%)	1,43	1,6	10.000.000	1,7	20.000.000	1,8	30.000.000	1,9	100.000.000	2	200.000.000	2	360.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
	2	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		persentase daerah bebas rawan pangan (desa tahan pangan prioritas 6 pada Peta FSVA)	Persentase (%)	20,5	25	663.620.050	28	722.651.240	30	1.193.448.875	33	1.500.000.000	35	1.600.000.000	35	5.679.720.165	Dinas Ketahanan Pangan
																		-	
	3	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		Persentase PSAT lulus uji lab (beamanan)	Persentase (%)	100	100	48.022.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	200.000.000	100	300.000.000	100	668.022.000	Dinas Ketahanan Pangan
	4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	Persentase (%)	3	3	147.585.050	3	1.550.000.000	3	1.612.000.000	4	1.666.250.000	5	1.744.897.000	5	6.720.732.050	Dinas Perikanan
	5	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	Persentase (%)	3	3	395.703.500	3	500.000.000	3	520.000.000	3	537.500.000	3	562.870.000	3	2.516.073.500	Dinas Perikanan
	sasaran	:																	
	2	Terendalinya Stabilitas Harga Pangan		Persentase Fluktuasi harga komoditas pangan	Persentase (%)	23	19,60		19,20		18,83		18,45		18,08		18,08		Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Program																	
1	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	persentase fluktuasi harga komoditas bapokting	Persentase (%)	7	6,86	217.768.475	6,72	115.472.435	6,58	130.102.179	6,38	143.525.096	6,19	250.000.000	6,19	856.868.185	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Tujuan 2		Terwujudnya Swasembada Pangan, Bahan Baku Sandang Krama Karangasem, dan Daya Saing Pertanian															
Indikator Tujuan	1	Rasio produksi pangan dengan konsumsi pangan	Persentase (%)														Dinas Pertanian
Indikator Tujuan		Persentase peningkatan Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Persentase (%)	0,56	0,58		0,59		0,61		0,63		0,64		3,05		Dinas Pertanian
sasaran																	
3	Meningkatnya diversifikasi dan optimalisasi potensi sumber daya pangan lokal	Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan per hektar	Persentase (%)	0,30	0,30		0,40		0,50		0,60		0,70		2,50		Dinas Pertanian
		Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura per hektar	Persentase (%)		0,010		0,010		0,010		0,010		0,010		0,050		Dinas Pertanian
		Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan per hektar	Persentase (%)		0,018		0,018		0,018		0,018		0,018		0,088		Dinas Pertanian
Program																	
1	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan	skor	85,46	86,5	676.988.300	87	700.000.000	87,5	800.000.000	88	1.000.000.000	88,5	1.300.000.000	88,5	4.476.988.300	Dinas Ketahanan Pangan
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase pemenuhan sarana pertanian yang mendukung pertanian organik	Persentase (%)	100	100	1.833.279.900	100	2.325.635.053	100	2.266.885.218	100	2.493.573.740	100	2.781.796.465	100	11.701.170.376	Dinas Pertanian
		persentase peningkatan produksi tanaman kapas sebagai bahan baku tenun	Persentase (%)	1	1		1		1		1		1		1		Dinas Pertanian
sasaran																	
4	Meningkatnya kualitas pertanian Krama Karangasem	1	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor Produk Pertanian	Persentase (%)													Dinas Pertanian
		2	Nilai Tambah Produk Pertanian (NTDP)	Persentase (%)	19,54	21,55		22,62		23,76		24,94		26,19		26,19	
4	Meningkatnya kualitas pertanian Krama Karangasem	Nilai Tambah Produk Pertanian (NTDP)	Persentase (%)	19,54	21,55		22,62		23,76		24,94		26,19		26,19		Dinas Pertanian
Program																	
1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase (%)	100	100	2.504.554.900	100	10.317.500.000	100	6.606.925.000	100	6.757.617.500	100	9.243.379.250	100	35.429.976.650	Dinas Pertanian
		persentase peningkatan sertifikasi pertanian organik	Persentase (%)	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Pertanian
2	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase (%)	95	95	1.337.623.400	95	1.746.750.000	95	1.781.685.000	95	1.959.853.500	95	2.155.838.850	95	8.981.750.750	Dinas Pertanian

3	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase (%)	95	95	512.150.400	95	577.500.000	95	606.375.000	95	667.012.500	95	733.713.750	95	3.096.751.650	Dinas Pertanian
sasaran :																	
5	Meningkatnya Kapasitas Pertanian SDM Krama Karangasem	Proporsi angkatan kerja di sektor pertanian/ lebih ditekankan pada kualitas SDM pertanian	Persentase (%)	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Pertanian
Program :																	
1	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase pelaksanaan penyuluhan pertanian	Persentase (%)	100	100	1.399.457.350	100	1.836.500.000	100	1.809.180.000	100	2.180.626.750	100	2.388.689.425	100	9.614.453.525	Dinas Pertanian
Misi 2 :		Mengembangkan SDM yang handal, berdaya saing tinggi, dan sistem pelayanan kesehatan yang terjangkau, adil dan berkualitas.															
Tujuan 3 :		Meningkatnya Derajat Kesehatan Krama Karangasem															
Indikator Tujuan	Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	72	72		73		73		74		74		74			Dinas Kesehatan
sasaran :																	
6	Terjaminnya akses pelayanan kesehatan seluruh Krama Karangasem	Persentase Peningkatan Akses Masyarakat terhadap pelayanan Kesehatan	Persentase (%)	16,67	33,33		50,00		66,67		83,33		100,00		100,00		Dinas Kesehatan
Program :																	
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Menurunnya Prevalensi Stunting	Persentase (%)	24,1	18,4	191.973.692.599,00	16	196.693.718.592,00	14	199.538.585.916,00	13	210.243.618.028,00	12	236.434.757.578,00	12	1.034.884.372.713,00	Dinas Kesehatan
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan bersalin	Persentase (%)	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persentase (%)	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
		Cakupan pelayanan kesehatan Balita sesuai standar	Persentase (%)	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persentase (%)	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
		Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persentase (%)	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persentase (%)	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
		Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase (%)	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
		Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase (%)	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
		Persentase ODG berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persentase (%)	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
		Persentase Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	Persentase (%)	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan

				Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	Persentase (%)	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
sasaran :																			
7	Meningkatnya standar pelayanan kesehatan Krama Karangasem	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	Persentase (%)	78	82		85		87		90		92		92				Dinas Kesehatan
Program :																			
1	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki sertifikat kompetensi	Persentase (%)	10	25	68.196.800,00	30	273.000.000,00	45	281.190.000,00	50	289.625.700,00	55	312.632.675,00	60	1.224.645.175,00		Dinas Kesehatan	
2	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi syarat	Persentase (%)	45	55	528.594.466,00	60	515.491.692,00	65	530.956.200,00	70	546.884.886,00	75	590.846.800,00	80	2.712.774.044,00		Dinas Kesehatan	
sasaran :																			
8	Meningkatnya peserta dalam sistem jaminan kesehatan masyarakat	Cakupan kepesertaan Krama Karangasem dalam Krama Bali Sejahtera (KBS)	Persentase (%)	98	100		100		100		100		100		100			Dinas Kesehatan	
Program :																			
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase peserta jamkesmas yang bisa mengakses sarana kesehatan saat mereka butuh	Persentase (%)	100	100	483.258.303,00	100	506.904.574,00	100	522.111.708,00	100	537.774.760,00	100	962.174.700,00	100	3.012.224.045,00		Dinas Kesehatan	
Tujuan 4 :		Terwujudnya Wajib Belajar 12 Tahun yang Berkualitas																	
Indikator Tujuan	1	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	6,31	7,06		7,46		7,75		8,12		8,42		8,42			Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
	2	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,42	12,44		12,45		12,46		12,47		12,47		12,47			Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
sasaran :																			
9	Meningkatnya pelayanan pendidikan dasar dan menengah pertama yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 6 sd 18 tahun	Tahun	99,42	99,55		99,65		99,75		99,85		99,95		99,95			Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
Program :																			
1	PROGRAM PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN	Persentase Pendidik yang memenuhi standar uji kompetensi	Persentase (%)	58,25	0	-	71,51	105.000.000	72,22	110.250.000	72,95	115.762.000	73,68	121.550.625	73,68	452.562.625		Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
		Persentase Pendidik bersertifikat	Persentase (%)	58,25	60,7515		61,359015		61,97260515		62,5923312		63,21825451		63,21825451			Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
		Jumlah Kepala Sekolah mendapatkan pelatihan calon kepala sekolah	Jumlah	80	90		95		100		105		105		105			Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
		Jumlah Tenaga pendidik dan kependidikan yang meraih prestasi tingkat provinsi dan nasional	Jumlah	15	25		30		35		40		40		40			Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	

sasaran																	
10	Meningkatnya Mutu Pelayanan pendidikan dasar dan menengah pertama yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas	1	Angka Melanjutkan SD ke SMP	Persentase (%)	95	96,1	97,1	98,1	99,1	100,0	100	Dinas Pendidikan dan Olahraga					
		2	Angka Melanjutkan SMP ke SMA	Persentase (%)	94	95,9	96,8	97,8	98,8	99,8	99,8	Dinas Pendidikan dan Olahraga					
		3	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Persentase (%)	0,1	0,101	0,09	0,089	0,067	0,062	0,062	Dinas Pendidikan dan Olahraga					
		4	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Persentase (%)	0,34	0,33	0,28	0,27	0,26	0,25	0,25	Dinas Pendidikan dan Olahraga					
		5	Angka Melele Huruf	Persentase (%)	90	94,40	95,81	97,25	98,71	99,69	99,69	Dinas Pendidikan dan Olahraga					
		6	Angka Ditematkan	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan dan Olahraga					
Program																	
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase APK SD / MI	Persentase (%)	111,97	115,35	131.156.034.150	116,51	128.167.451.500	117,67	130.400.224.175	118,85	133.817.796.734	120,04	148.758.212.452	120,04	672.299.719.010	Dinas Pendidikan dan Olahraga
		Persentase APM SD/MI	Persentase (%)	99,42	102,42		103,45		104,48		105,53		106,58		106,58	Dinas Pendidikan dan Olahraga	
		Persentase APK SMP / MTs	Persentase (%)	107,37	110,61		111,72		112,84		113,96		115,10		115,10	Dinas Pendidikan dan Olahraga	
		Persentase APM SMP / MTs	Persentase (%)	83,95	86,49		87,35		88,22		89,11		90,00		90,00	Dinas Pendidikan dan Olahraga	
		Persentase Angka Putus Sekolah SD/MI/Paket A	Persentase (%)	0,1	0,101		0,09		0,089		0,067		0,062		0,062	Dinas Pendidikan dan Olahraga	
		Persentase Angka Putus Sekolah SMP/MTs/Paket B	Persentase (%)	0,34	0,33		0,28		0,27		0,26		0,25		0,25	Dinas Pendidikan dan Olahraga	
		Jumlah SD/MI yang sudah memenuhi SNP	Jumlah	183	225		250		300		325		325		325	Dinas Pendidikan dan Olahraga	
		Jumlah SMP/MTs yang sarana prasarannya sudah memenuhi SNP	Jumlah	5	15		20		25		30		30		30	Dinas Pendidikan dan Olahraga	
2	PROGRAM PENGENDALIAN PERZINIAN PENDIDIKAN	Persentase lembaga pendidikan PAUD yang berijin	Persentase (%)	67	100	204.400.000	100	325.500.000	100	362.625.000	100	373.068.750	100	383.842.500	100	1.649.436.250	Dinas Pendidikan dan Olahraga
		Persentase lembaga pendidikan SD yang berijin	Persentase (%)	9	100		100		100		100		100		100	Dinas Pendidikan dan Olahraga	
		Persentase lembaga pendidikan SMP yang berijin	Persentase (%)	85,4	100		100		100		100		100		91	Dinas Pendidikan dan Olahraga	

Tujuan 5	:	Terwujudnya karakter Krama Karangasem unggul sebagai individu dan sosial yang berbasis kearifan lokal															
Indikator Tujuan	:	Persentase nilai-nilai Ajaran Hindu yang diintegrasikan dalam pendidikan formal/non formal	Persentase (%)	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
sasaran	:																
11	Meningkatnya pelayanan pendidikan karakter berbasis Keagamaan pada tingkat sekolah dasar sampai dengan menengah di Sekolah maupun desa adat dalam bentuk pasraman	1	Persentase Pendidikan Formal yang menerapkan Muatan Lokal	Persentase (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
		2	Persentase Pendidikan Non formal dalam bentuk pasraman di Desa Adat	Persentase (%)	0	1		2		3		4		4		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
Program	:																
1	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Sekolah yang mengimplementasikan Kurikulum Muatan Lokal	Persentase (%)	0,84	4,21	45.573.000	7,56	52500000	10,95	55125000	14,32	57881250	17,4	60775313	17,4	271.854.563	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		Persentase satuan pendidikan Jenjang SD yang berpartisipasi dalam pasraman di Desa Adat	Persentase (%)	0	42,13		64,88		76,40		87,92		100		100	-	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		Persentase satuan pendidikan Jenjang SD yang berpartisipasi dalam pasraman di Desa Adat	Persentase (%)	0	14,5		29,16		43,75		58,33		97,91		97,91	-	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase Sekolah yang mengimplementasikan Bahasa dan sastra Bali dalam KBM	Persentase (%)	50	75	100.000.000	85	105.000.000	90	109.725.000	95	115.211.250	100	120.971.813	100	550.908.063	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Tujuan 6	:	Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Karangasem yang unggul dan berdaya saing tinggi															
Indikator Tujuan	:	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Persentase (%)	67,35	68,99		69,62		70,23		70,84		71,45		71,45		Bappeltbang dan
sasaran	:																
12	Meningkatnya Daya Saing SDM Krama Karangasem	Indeks Daya Saing SDM Krama Karangasem	Indeks	N/A	66,54		67,20		67,88		68,55		69,24		69,24		Bappeltbang dan
Program	:																
1	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persentase (%)	73,00%	75,04	1.050.500.000	76,66	1.103.025.000	78,28	1.158.176.250	79,9	1.216.085.063	81,52	1.276.889.316	81,52	5.804.675.629	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		Persentase wirasaha muda	Persentase (%)	1,98	2,20		2,40		2,60		2,80		3,00		3,00	-	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan pembinaan olahraga	Persentase (%)	22,58	29,03	5.000.000.000	35,48	5.140.000.000	41,93	5.140.000.000	48,38	5.140.000.000	54,83	6.077.531.250	54,83	26.497.531.250	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		Cakupan Pelatih yang bersertifikat	Persentase (%)	60,93	62,93		64,93		66,93		68,93		70,93		70,93	-	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

			asi															
			Cakupan pembinaan atlet muda	Persentase (%)	42,00	47,00		52,00		57,00		62,00		69,00		69,00	-	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
			Jumlah atlet berprestasi	Jumlah	147	152		157		162		167		172		172	-	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
			Jumlah prestasi olahraga	Jumlah	17	18		19		20		21		22		22	-	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		Persentase Kegiatan Kepramukaan yang terfasilitasi	Persentase (%)	100	100	250.000.000	100	462.500.000	100	484.625.000	100	508.856.250	100	534.299.063	100	2.240.280.313	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
4	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		Persentase Peserta KB aktif (PA)	Persentase (%)	80	82	318.400.000	83	321.880.000	84	337.974.000	85	361.631.750	90	390.560.600	90	1.730.446.350	DPPKB
			Angka kelahiran Remaja Usia 15-19 tahun (Age specific fertility rate/ASFR 15-19 tahun)	per mil	21	18		17		15		14		14		14	-	DPPKB
5	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		Persentase kontrasepsi modern (mCPR)	Persentase (%)	90,16	92	2.949.024.600	93	321.880.000	94	3.111.374.500	95	3.329.164.800	95	3.595.497.000	95	13.306.940.900	DPPKB
			Un meet need	Persentase (%)	20,08	18		17		16		15		15		15	-	DPPKB
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		Persentase terbentuknya Kelompok Kegiatan Tri Bina, PIK-R di Kampung KB	Persentase (%)	40	60	303.397.600	70	303.397.600	80	318.566.600	100	340.866.000	100	368.134.000	100	1.634.361.800	DPPKB
			Persentase Terbinanya Kelompok Kegiatan Tri Bina, PIK-R di Kampung KB	Persentase (%)	40	60		70		80		100		100		100	-	DPPKB
	Tujuan 7	:	Terwujudnya tenaga kerja yang berkompeten dan berdaya saing															
	Indikator Tujuan	:	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase (%)	2,42	2,29		2,15		1,81		1,28		0,65		0,65		Dinas Ketenagakerjaan
	sasaran	:																
13	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	:	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persentase (%)	80,75	80,00		82,00		82,00		82,00		82,00		82,00		Dinas Ketenagakerjaan
	Program	:																
1	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		Persentase tersusunnya dokumen perencanaan tenaga kerja	Persentase (%)	-	-		100	40.000.000	-		-		-		100	40.000.000	Dinas Ketenagakerjaan
2	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Persentase Tenaga Kerja yang memiliki kompetensi	Persentase (%)	13	13	300.000.000	14	360.000.000	15	550.000.000	16	940.000.000	16	1.300.000.000	16	3.450.000.000	Dinas Ketenagakerjaan
	sasaran	:																
14	Meningkatnya kesempatan kerja di dalam dan diluar negeri	:	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	Persentase (%)	97,57	90,00		95,00		95,00		95,00		95,00		95,00		Dinas Ketenagakerjaan

Program :																	
1	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan	Persentase (%)	81,00	82,00	250.000.000	82,00	300.000.000	83,00	420.000.000	83,00	780.000.000	84,00	1.180.000.000	84,00	2.930.000.000	Dinas Ketenagakerjaan
Tujuan 8 : Terwujudnya jaminan ketenagakerjaan yang terjangkau, bermutu dan berkelanjutan																	
Indikator Tujuan	Persentase kepesertaan program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Ketenagakerjaan		Persentase (%)	71,2	75		80		80		85		85		85		Dinas Ketenagakerjaan
sasaran :																	
15	Meningkatnya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	Persentase tenaga kerja yang mendapat jaminan sosial Ketenagakerjaan	Persentase (%)	71,2	75		80		80		85		85		85		Dinas Ketenagakerjaan
Program :																	
1	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama	Persentase (%)	100	100	100.000.000	100	150.000.000	100	283.000.000	100	363.000.000	100	540.000.000	100	1.436.000.000	Dinas Ketenagakerjaan
3 Misi 3 : Mengembangkan sektor ekonomi, sosial dan budaya secara komprehensif dan terintegrasi																	
Tujuan 9 : Terwujudnya kesejahteraan sosial Krama Karangasem																	
Indikator Tujuan	Persentase Kemiskinan		Persentase (%)	5,91	5,22		5,07		4,87		4,61		4,38		4,38		Bappelitbangda
	Indeks Gini/ Gini ratio		Indeks	0,34	0,3201		0,3153		0,3105		0,3059		0,3013		0,3013		Bappelitbangda
	Indeks Pembangunan Gender		Indeks	88,87	88,89		88,93		88,95		88,98		89,00		89,00		Bappelitbangda
sasaran :																	
16	Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan kesejahteraan sosial	1	Indeks kepuasan pelayanan perlindungan kesejahteraan sosial	Persentase (%)	0	100		100		100		100		100		100	Dinas Sosial
		2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	60,77	70		70,1		70,2		70,3		70,4		70,4	DP3A
Program :																	
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Meningkatnya Taraf Hidup Organisasi Masyarakat, TKSK, dan PSM.	Persentase (%)	-	100	810.000.000	100	824.000.000	100	1.124.000.000	100	1.424.000.000	100	1.574.000.000	100	5.756.000.000	Dinas Sosial
2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS Khususnya disabilitas terlantar, lansia terlantar, anak terlantar, gelandangan dan pengemis terlantar yang mendapat bantuan penanganan sosial	Persentase (%)	5	11,6	1.740.000.000	17,4	1.754.000.000	23,2	2.054.000.000	29	2.454.000.000	100	2.754.000.000	100	10.756.000.000	Dinas Sosial
3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase terfasilitasinya Bantuan sosial PMKS, Santimas (Santunan Kematian Masyarakat) dan terpenuhinya pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah yang valid	Persentase (%)	-	100	1.100.000.000	100	1.114.000.000	100	1.414.000.000	100	1.764.000.000	100	1.964.000.000	100	7.356.000.000	Dinas Sosial
4	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase fasilitasi bantuan sosial bencana dan Pasca Bencana	Persentase (%)	-	100	200.000.000	100	214.000.000	100	314.000.000	100	514.000.000	100	614.000.000	100	1.856.000.000	Dinas Sosial
5	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase pemeliharaan dan pengelolaan taman makam pahlawan (Taman/Tugu)	Persentase (%)	100	100	100.000.000	100	114.000.000	100	214.000.000	100	414.000.000	100	514.000.000	100	1.356.000.000	Dinas Sosial

6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk yang terakses air minum	Persentase (%)	77,98	100,00	16.318.395.900	100	14.811.195.490	100	10.630.315.039	100	11.239.346.542	100	9.238.281.198	100	62.237.534.169	Dinas PUJR
7	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Perangkat Daerah yang Responsif Gender	Persentase (%)	20	40	118.364.942	60	177.321.734	70	187.124.076	80	248.347.668	90	227.267.326	100	958.425.746	DP3A
8	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Ketuntasan Penanganan Korban Tindak Kekeerasan terhadap Perempuan pada Tahun Berkecukupan	Persentase (%)	100	100	57.161.200	100	93.550.000	100	103.470.000	100	83.800.000	100	69.550.000	100	407.531.200	DP3A
9	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase (%)	100	100	16.856.250	100	24.663.100	100	26.213.100	100	31.763.100	100	28.763.100	100	128.258.650	DP3A
10	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Ketersediaan Data Gender dan Anak	Tersedia/Tidak	Tidak	Tersedia	10.786.600	Tersedia	16.000.000	Tersedia	15.700.000	Tersedia	103.850.000	Tersedia	101.550.000	Tersedia	247.886.600	DP3A
11	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Terpenuhinya Indikator Kabupaten Layak Anak	Persentase (%)	50	60	125.433.750	65	182.577.150	75	191.435.150	80	260.557.150	85	225.857.150	100	985.860.350	DP3A
12	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Ketuntasan Penanganan Korban Tindak Kekeerasan terhadap Anak pada Tahun Berkecukupan	Persentase (%)	100	100	85.932.100	100	120.570.000	100	122.400.000	100	111.350.000	100	97.100.000	100	537.352.100	DP3A
13	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase masyarakat yang mendapat penyuluhan untuk ikut program transmigrasi	Persentase (%)	50	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	50	55.000.000	50	100.000.000	50	305.000.000	Dinas Ketenagakerjaan
sasaran :																	
17	Meningkatnya rasio rumah tangga Krama Karangasem memiliki rumah layak huni	Rasio peningkatan rumah layak huni	Ratio	N/A	0,22		0,41		0,61		0,8		1		1		Dinas Perumahan dan Permukiman
Program :																	
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Ketuntasan Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan yang tertangani	persentase (%)	-	100	285.000.000	100	300.000.000	100	350.000.000	100	460.000.000	100	540.000.000	100	1.935.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
2	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Terpetakannya kawasan permukiman kumuh oleh KSM yang terbentuk	persentase (%)	0	40	315.000.000	60	300.000.000	80	689.000.000	100	530.000.000	100	455.000.000	100	2.289.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
3	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase RTLH yang tertangani	persentase (%)	0	24,1	19.750.000.000	43,08	47.461.593.347	62,06	30.400.806.335	81,04	77.565.874.453	100	65.602.776.295	100	240.781.050.430	Dinas Perumahan dan Permukiman
4	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase PSU yang tertangani	persentase (%)	0	33,33	1.000.000.000	50,00	1.785.000.000	66,67	2.280.000.000	83,33	4.580.000.000	100,00	5.530.000.000	100	15.175.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
5	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN	Persentase ketuntasan koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembangan perumahan	persentase (%)	N/A	0	-	100	40.000.000	100	40.000.000	100	80.000.000	100	80.000.000	100	240.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman

		KAWASAN PERMUKIMAN																	
6		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase tingkat pengembangan infrastruktur permukiman pada kawasan strategis kabupaten	persentase (%)	0	3,57	413.969.100	7,14	537.866.010	10,71	736.652.610	14,29	735.317.872	17,86	733.849.659	17,86	3.157.655.251	Dinas PUPR	
	Tujuan I		Terwujudnya Pemajuan Kebudayaan di Kabupaten Karangasem																
	Indikator Tujuan	1	Persentase obyek yang diduga cagar budaya yang ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat Kabupaten	persentase	20,53	23,82		25,34		26,77		28,13		29,43		29,43		Dinas Kebudayaan	
		2	Persentase Obyek Pemajuan Kebudayaan yang ditetapkan sebagai warisan Budaya Tak Benda Indonesia	persentase	28,07	31,17		32,18		32,99		33,64		34,19		34,19		Dinas Kebudayaan	
	sasaran																		
18		Terwujudnya pemajuan kebudayaan melalui peningkatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan Bali di Kabupaten Karangasem	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang dilindungi, dibina, dimanfaatkan dan dikembangkan	Jumlah	-	70		105		140		175		210		210		Dinas Kebudayaan	
	Program																		
1		PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian TRADISIONAL	Persentase pelaku kesenian yang dibina untuk peningkatan tata lola lembaga kesenian tradisional	Persentase (%)	0	2,67	192.248.600	4,00	392.500.000	5,33	475.000.000	6,67	750.000.000	8,00	1.275.000.000	8,00	3.084.748.600	Dinas Kebudayaan	
2		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase pembinaan sejarah di Kabupaten Karangasem yang dilaksanakan setiap tahun	Persentase (%)	-	33,33	73.497.000	50,00	98.500.000	66,67	125.000.000	83,33	150.000.000	100,00	175.000.000	100,00	621.997.000	Dinas Kebudayaan	
3		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase objek diduga cagar budaya yang dilestarikan	Persentase (%)	20,53	23,82	142.387.250	25,34	204.500.000	26,77	270.000.000	28,13	330.000.000	29,43	390.000.000	29,43	1.336.887.250	Dinas Kebudayaan	
4		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Museum yang ada di Kabupaten Karangasem yang terkelola dengan baik	Persentase (%)	-	100,00	97.523.400	100,00	158.000.000	100,00	220.000.000	100,00	280.000.000	100,00	340.000.000	100,00	1.095.523.400	Dinas Kebudayaan	
5		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Pelestarian Naskah Kuno melalui Pendataan dan Pengalihmediaan	Persentase (%)	26,23	45,26	99.880.925	54,73	109.000.000	64,20	151.000.000	79,67	202.000.000	100,00	259.000.000	100,00	820.880.925	Dinas Perpustakaan	
	Tujuan II		Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi																
	Indikator Tujuan		Indeks Kesejahteraan	Indeks	N/A	71,32		72,60		73,88		75,16		76,44		76,44		Bappeltbang da	
	sasaran																		
19		Meningkatnya kualitas tata kehidupan Krama Karangasem berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi	1	Persentase Krama Karangasem yang mengimplementasikan nilai-nilai Sad Kerthi dalam tata kehidupan sakala	Persentase (%)	30	50		60		70		80		90		90		Bappeltbang da
			2	Persentase Krama Karangasem yang melaksanakan kegiatan Sad Kerthi secara nisakala dalam	Persentase (%)	60	80		90		100		100		100		100		Bappeltbang da

bentuk ritual																	
Program																	
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Upacara Vadnya (termasuk atma kert) yang terfasilitasi	Persentase (%)	100	100	7.917.049.250	100	8.635.032.550	100	10.712.736.590	100	12.594.736.590	100	20.935.465.074	100	60.795.020.054,00	Sekretariat Daerah
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase ketersediaan dan pengelolaan sumber daya air	Persentase (%)	59,00	66,70	12.197.434.700	80,70	12.829.721.329	82,90	12.332.180.575	85,30	13.591.918.170	86,20	13.035.461.009	86,20	63.986.715.783,00	Dinas PUPR
Tujuan 12	Terwujudnya Penguatan Desa Adat dalam menyelenggarakan kehidupan Krama Karangasem berdasarkan Sad Kerthi																
Indikator Tujuan	1	Persentase desa adat yang memiliki dan/atau pararem yang berdasarkan Nilai-Nilai Sad Kerthi secara tertulis	Persentase (%)	-	60			70		80			90		100		Dinas Kebudayaan
	2	Persentase Subak yang memiliki awig-awig dan/atau pararem yang berdasarkan Nilai-Nilai Sad Kerthi secara tertulis	Persentase (%)	-	60			70		80			90		100		Dinas Kebudayaan
sasaran																	
20	Menguatnya kedudukan, dan fungsi Desa Adat dan Subak	1	Persentase desa adat yang dikelola berdasarkan / mengintegrasikan nilai-nilai Sad Kerthi	Persentase (%)	-	33,68		50,53		67,37			84,21		100		Dinas Kebudayaan
		2	Persentase Subak yang berkembang berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi	Persentase (%)	-	33,49		50,23		66,98			83,72		100		Dinas Kebudayaan
Program																	
1	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase pelestarian kebudayaan	Persentase (%)	N/A	32,71	2.871.045.800	48,37	3.386.000.000	63,60	3.660.000.000	78,40	4.145.000.000	92,27	5.430.000.000	92,27	19.492.045.800	Dinas Kebudayaan
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase terwujudnya desa yang difasilitasi penataan kelembagaan dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase (%)	100	100	620.000.000	100	585.500.000	100	835.109.034	100	799.209.124	100	895.946.200	100	3.735.764.358	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
3	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase terwujudnya penataan desa	Persentase (%)	100	100	200.000.000	100	220.000.000	100	230.037.500	100	241.400.000	100	295.540.000	100	1.186.977.500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
Tujuan 13	Terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karangasem																
Indikator Tujuan	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karangasem		Persentase (%)	-4,45	3,28		3,40		3,59		3,78		3,99		3,99		Bappelitbang da
sasaran																	
21	Meningkatnya Investasi yang di Kabupaten Karangasem	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten Karangasem	Persentase (%)	-12,10	1		1		1		1		1		1		DPMPSTP

Program :																	
1	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan perkembangan penanaman modal	Persentase (%)	-0,2	5	267.743.900	6	273.750.000	7	319.700.000	8	819.700.000	9	339.568.000	9	2.020.461.900	DPMPTSP
2	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase pelaku usaha yang mengajukan permohonan penanaman modal	Persentase (%)	50,66	50	293.933.050	50	295.500.000	51	296.000.000	51	296.000.000	51	572.000.000	51	1.753.433.050	DPMPTSP
3	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase penanam modal yang melaporkan LKPM	Persentase (%)	5	5	433.027.450	5	435.823.000	6	486.000.000	6	552.900.000	7	630.000.000	7	2.537.750.450	DPMPTSP
4	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase fasilitasi investasi pemda pada BUMD	Persentase (%)	0	100	1.448.895.500	100	1.154.100.375	100	1.769.657.302	100	2.800.598.394	100	4.016.179.008	100	11.189.430.579	Sekretariat Daerah
sasaran :																	
2	2	Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Lokal	1	Persentase Pertokoan Krama Bali di Kabupaten Karangasem milik Desa Adat (BUMda)	Persentase (%)	0	15	20	20	20	20	25	100			Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			2	Persentase Pertokoan Milik UMKM	Persentase (%)	0	15	20	20	20	20	25	100			Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			3	Jumlah Pertokoan Milik Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	Jumlah	0	10	15	15	15	15	20	75			Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			4	Jumlah Pertokoan Milik Badan Usaha Koperasi	Jumlah	0	40	50	70	77	77	90	327			Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
Program :																	
1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase (%)	0	2	394.966.675	4	432.000.000	5	475.199.850	6	732.964.865	7	960.500.000	25	2.995.631.390	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Persentase (%)	25	20	2.629.619.500	20	2.845.611.400	20	4.270.603.346	25	6.365.431.946	25	12.950.000.000	100	29.061.266.192	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan Alat UTTT	Persentase (%)	3,65	4,45	100.000.000	5,04	177.500.000	5,33	230.250.000	5,04	552.325.000	7,11	740.000.000	31,12	1.800.075.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Tujuan 14	Berkembangnya perekonomian berbasis budaya Bali																
Indikator Tujuan	Persentase Nilai Ekspor di Kabupaten Karangasem		Persentase (%)	0,72	4,00		5,30		6,80		8,40		10,00		10,00		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
sasaran :																	

2 3	Meningkatnya kualitas produk IKM branding Bali di Karangasem yang berorientasi Ekspor	1	Persentase Peningkatan Nilai Produksi IKM Branding Bali yang berorientasi Ekspor di Kabupaten Karangasem	Persentase (%)	0,01	0,02		0,50		0,80		1,00		1,20		1,20		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		2	Persentase produk IKM branding Karangasem yang berkualifikasi Indie 4.0 di kabupaten Karangasem	Persentase (%)	1,04	1,88		2,51		3,13		3,55		4,18		4,18		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
Program :																			
1	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah Produk IKM Unggulan Kabupaten Karangasem yang dipromosikan	Jumlah Produk IKM	0	35	517.984.575	38	430.000.000	40	600.000.000	45	1.060.000.000	48	1.300.000.000	236	3.907.984.575		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
2	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah Produk IKM Kabupaten Karangasem yang dipromosikan dan dipasarkan guna peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Jumlah Produk IKM	12	17	39.817.000	19	70.000.000	21	100.000.000	23	160.000.000	25	200.000.000	120	569.817.000		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
sasaran :																			
2 4	Meningkatnya pusat-pusat perekonomian kecil dan menengah Krama karangasem	Jumlah Pusat-pusat perekonomian lokal berbasis koperasi dan UMKM	Jumlah	1	1		1		1		1		1		6			Dinas Koperasi UMKM	
Program :																			
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Pelaku Usaha UMKM yang Berkembang	Persentase (%)	0,41	0,8	323.338.014	1,1	380.000.000	1,25	434.686.816	1,8	450.000.000	5,5	750.000.000	5,5	2.338.024.830		Dinas Koperasi UMKM	
2	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP yang Sehat	Persentase (%)	52	75	277.000.000	78	296.788.014	82	300.000.000	94	350.015.921	100	596.826.044	100	1.820.629.979		Dinas Koperasi UMKM	
3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Kualitas Menejemennya bagus	Persentase (%)	63	65	291.000.000	72	295.000.000	80	340.000.000	92	749.000.000	100	550.000.000	100	2.225.000.000		Dinas Koperasi UMKM	
Tujuan IS :		Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi mendukung pertumbuhan perekonomian baru																	
Indikator Tujuan :		Rasio konektivitas kabupaten		Rasio	77,78	80		81		82		83		84		84		Dinas Perhubungan	
sasaran :																			
2 5	Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi	Indeks kepuasan masyarakat (transportasi)	Indeks	75,96	77		77,5		78		78,5		79		79			Dinas Perhubungan	
Program :																			
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase layanan angkutan darat	Persentase (%)	27	29	3.534.522.400	30	4.438.000.000	31	5.886.120.000	32	7.504.625.000	33	11.679.225.000	33	33.042.492.400		Dinas Perhubungan	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase kemandapan jalan kabupaten	Persentase (%)	70,87	80,03	131.754.297.725	84,6	138.077.180.937	89,18	139.048.448.887	93,76	148.427.568.696	98,34	134.672.084.338	98,34	691.979.580.583		Dinas PUJPR	

3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase pengurangan kawasan genangan air di wilayah Kabupaten	Persentase (%)	0	1	121.604.600	15	250.000.000	10	645.891.566	20	1.005.480.723	30	1.005.028.795	30	3.028.005.684	Dinas PUJPR
Tujuan 16	:	Terwujudnya Tata Kehidupan Krama Karangasem yang harmonis															
Indikator Tujuan	:	Koefisien Wilayah Terbangun (KWT)	Persentase (%)	<6,35	<9,85		<11,60		<13,35		<15,10		<16,85		<16,85		Dinas PUJPR
Sasaran	:																
26	Meningkatnya keharmonisan tata kehidupan Krama Karangasem berbasis wilayah dan lingkungan	Daya dukung lingkungan	Rasio	N/A	1		1		1		1		1		1		Dinas Lingkungan Hidup
Program	:																
1	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang terusun	Persentase (%)	100	100	121.670.900	100	123.670.900	100	129.670.900	100	336.670.900	100	612.000.000	100	1.323.683.600	Dinas Lingkungan Hidup
2	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PDLH)	Persentase tingkat keatahan pelaku usaha yang dibina dan diawasi setiap tahunnya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase (%)	100	100	29.039.000	100	35.039.000	100	40.039.000	100	41.039.000	100	50.000.000	100	195.156.000	Dinas Lingkungan Hidup
3	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Tingkat Penanganan Pengaduan dan Sengketa Lingkungan	Persentase (%)	100	100	20.504.600	100	21.000.000	100	22.000.000	100	23.000.000	100	30.000.000	100	116.504.600	Dinas Lingkungan Hidup
4	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase masyarakat/kelompok yang mendapat penghargaan lingkungan hidup	Persentase (%)	N/A	N/A	-	N/A	-	20	50.000.000	30	50.000.000	40	50.000.000	40	150.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
5	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase penataan bangunan dan lingkungannya	Persentase (%)	0	20	146.676.350	40	209.090.215	60	687.974.825	80	689.818.758	100	621.188.024	100	2.354.748.172	Dinas PUJPR
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang di Kabupaten Karangasem	Persentase (%)	31	76	2.977.843.300	84	2.867.000.000	92	4.353.700.000	100	3.769.000.000	100	1.893.600.000	100	15.861.143.300	Dinas PUJPR
Tujuan 17	:	Terwujudnya wilayah dan lingkungan hidup yang bersih, hijau dan indah															
Indikator Tujuan	:	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	66,27	66,40		66,45		66,46		66,50		66,50		66,50		Dinas Lingkungan Hidup
Sasaran	:																
27	Terwujudnya ekosistem yang berkelanjutan	1	Indeks kualitas air	Indeks	50,00	50,00		50,00		50,00		50,00		50,00		50,00	Dinas Lingkungan Hidup
		2	Indeks kualitas udara	Indeks	91,51	91,51		91,51		91,51		91,51		91,51		91,51	Dinas Lingkungan Hidup
		3	Indeks kualitas tutupan lahan	Indeks	47,56	47,56		47,56		47,56		47,56		47,56		47,56	Dinas Lingkungan Hidup

			4	Mitigasi Gas Rumah Kaca (GRK)	Persentase (%)													Dinas Lingkungan Hidup
Program :																		
1	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase tingkat pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase (%)	100	100	261.749.750	100	279.763.800	100	483.000.000	100	483.000.000	100	484.500.000	100	1.992.013.550	Dinas Lingkungan Hidup	
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase tingkat pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)	Persentase (%)	100	100	1.175.613.247	100	1.175.613.247	100	1.919.292.000	100	3.732.018.213	100	2.641.792.000	100	10.644.328.707	Dinas Lingkungan Hidup	
3	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase tingkat pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)	Persentase (%)	N/A	100	38.038.100	100	35.038.100	100	38.038.100	100	38.038.100	100	38.038.100	100	187.190.500	Dinas Lingkungan Hidup	
4	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase cakupan masyarakat dengan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup yang dapat ditingkatkan	Persentase (%)	N/A	N/A	-	N/A	-	14	50.000.000	16	50.000.000	18	50.000.000	18	150.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	
5	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase tingkat pengelolaan persampahan	Persentase (%)	100	100	8.663.066.903	100	8.915.331.951	100	9.080.000.000	100	9.080.000.000	100	11.548.367.031	100	47.286.765.885	Dinas Lingkungan Hidup	
6	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase sarana dan prasarana pengelolaan sampah masyarakat	Persentase (%)	0	21	742.224.400	50	881.446.840	79	1.040.591.524	100	1.289.650.677	100	1.288.615.744	100	5.242.529.185	Dinas PUPR	
7	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase penduduk yang terlayani sistem pengelolaan air limbah	Persentase (%)	89,96	100	744.051.350	100	1.808.456.485	100	2.512.802.133	100	2.562.082.347	100	2.561.290.582	100	10.188.682.897	Dinas PUPR	
4 Misi 4 : Membangun pariwisata yang handal melalui pembangunan destinasi dan promosi yang ditunjang dengan infrastruktur pedesaan yang memadai dan terkoneksi																		
Tujuan 8 : Berkembangnya destinasi dan produk pariwisata budaya berbasis komunitas																		
Indikator Tujuan	1	Persentase Penataan Destinasi Pariwisata berbasis Desa Adat	Persentase (%)	0	20		20		20		20		20		100		Dinas Pariwisata	
	2	Persentase produk pariwisata berbasis ekonomi kreatif di Kabupaten Karangasem	Persentase (%)	0	6		6		6		6		6		35		Dinas Pariwisata	
sasaran :																		
28	Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata budaya berbasis Desa Adat	Persentase tingkat kepuasan wisatawan berdasarkan hasil survei	Persentase (%)	0	72		75		77		80		82		82		Dinas Pariwisata	
Program :																		

1	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase peningkatan daya tarik destinasi pariwisata budaya berbasis desa adat di Kabupaten Karangasem	Persentase (%)	0	5	4.826.282.750	5	5.765.000.000	5	6.093.000.000	6	7.177.094.843	6	7.858.983.352	6	31.720.360.945	Dinas Pariwisata
sasaran :																	
29	Berkembangnya produk pariwisata yang kreatif dan inovatif berbasis budaya di Kab Karangasem	1	Jumlah produk pariwisata berbasis budaya	Produk Wisata	650	650		655		665		675		685		685	Dinas Pariwisata
		2	Jumlah produk pariwisata berkualifikasi Indie 4.0	Produk	650	650		655		665		675		685		685	Dinas Pariwisata
Program :																	
1	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase produk ekonomi kreatif yang dilindungi Hak Kekayaan Intelektualnya	Persentase (%)	0	6	46.104.100	6	55.000.000	6	60.000.000	6	70.000.000	6	100.000.000	35	331.104.100	Dinas Pariwisata
2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase sumber daya manusia bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang bersertifikasi	Persentase (%)	0	6	946.469.950	8	1.035.000.000	9	1.120.000.000	11	1.190.000.000	12	1.360.000.000	46	5.651.188.700	Dinas Pariwisata
Tujuan 19 :		Meningkatnya Kualitas pelayanan dan pasar pariwisata Kabupaten Karangasem															
Indikator Tujuan :		Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB		Persentase (%)	8,4	9		11		11,5		11,7		12		12	Dinas Pariwisata
sasaran :																	
30	Meningkatnya Promosi pasar pariwisata Kabupaten Karangasem baik di pasar domestik dan global	1	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara	Persentase (%)	-82	50		67		80		96		113		113	Dinas Pariwisata
		2	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten Karangasem	Persentase (%)	-3	10		12		14		16		18		18	Dinas Pariwisata
Program :																	
1	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara	Persentase (%)	-82	50	362.423.900	67	540.000.000	80	610.000.000	96	750.000.000	113	1.050.000.000	113	3.312.423.900	Dinas Pariwisata
			Persentase peningkatan kunjungan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten Karangasem	Persentase (%)	-3	10		12		14		16		18		18	
Misi 5 :		Mengembangkan sistem keamanan dan ketertiban secara terpadu															
Tujuan 20 :		Terwujudnya stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Karangasem dan Wisatawan															

Indikator Tujuan	:	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase (%)	100	100		100		100		100		100		100		Satpolpp	
sasaran	:																	
31		Meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya	Persentase Penyelesaian pelanggaran ketentraman, kenyamanan dan ketertiban umum	Persentase (%)	100	100		100		100		100		100		100	Satpolpp	
Program	:																	
1		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) yang terselesaikan	Persentase (%)	99	100	1.800.000.000	100	2.099.000.000	100	2.142.000.000	100	2.712.000.000	100	2.995.000.000	100	11.748.000.000	Satpolpp
			Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	Persentase (%)	94	100		100		100		100		100		100	Satpolpp	
			Cakupan petugas perlindungan masyarakat	Persentase (%)	0,66	0,69		0,70		0,72		0,73		0,75		0,75	Satpolpp	
2		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana	Persentase (%)	100	100	1.570.000.000	100	1.806.411.271	100	1.924.271.387	100	3.149.271.387	100	3.703.277.632	100	12.153.231.677	BPBD
			Persentase Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase (%)	36,79	100		100		100		100		100		100		
			Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase (%)	67,36	100		100		100		100		100		100		
3		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase (%)	30,3	100	3.693.400.000	100	2.358.050.215	100	2.660.334.318	100	3.402.334.318	100	3.870.780.935	100	15.984.899.786	Dinas Pemadam Kebakaran
4		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Cakupan Pelaksanaan Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Persentase (%)	100	100	727.000.000	100	789.250.000	100	873.750.000	100	969.400.000	100	1.054.500.000	100	4.413.900.000	Kesbangpol
5		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan tertiban umum	Persentase (%)	100	100	66.000.000	100	95.375.000	100	107.875.000	100	127.000.000	100	185.000.000	100	581.250.000	Kecamatan
Tujuan 21	:	Terwujudnya tata kehidupan Krama Karangasem yang Madani sesuai dengan nilai-nilai Budaya Bali																
Indikator Tujuan	:	1	Indeks Demokrasi	Persentase (%)	75	83		87		90		92		95		95	Kesbangpol	
sasaran	:																	
32		Meningkatnya peran serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis	Persentase partisipasi masyarakat Karangasem dalam setiap Pemilu/Pilkada	Persentase (%)	71,03	71,03		71,03		81,25		81,25		81,25		81,25	Kesbangpol	

			Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	60,77	70,00		70,10		70,20		70,30		70,40		70,40		DP3A
Program	:																	
1		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase cakupan pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase (%)	100	100	551.000.000	100	588.750.000	100	618.750.000	100	729.400.000	100	840.000.000	100	3.327.900.000	Kesbangpol
2		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase cakupan pelaksanaan Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase (%)	100	100	1.030.500.000	100	1.128.750.000	100	52.893.750.000	100	1.339.400.000	100	1.446.500.000	100	57.838.900.000	Kesbangpol
3		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Persentase (%)	100	100	167.500.000	100	180.600.000	100	207.750.000	100	256.900.000	100	307.500.000	100	1.120.250.000	Kesbangpol
4		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase cakupan pelaksanaan Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase (%)	100	100	399.000.000	100	425.300.000	100	476.250.000	100	550.900.000	100	624.500.000	100	2.475.950.000	Kesbangpol
5		PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Perangkat Daerah yang Responsif Gender	Persentase (%)	20	40	118.364.942	60	177.321.734	70	187.124.076	80	248.347.668	90	227.267.326	100	958.425.746	DP3A
6		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Ketuntasan Penanganan Korban Tindak Kekeerasan terhadap Perempuan pada Tahun Berkenaan	Persentase (%)	100	100	57.161.200	100	93.550.000	100	103.470.000	100	83.800.000	100	69.550.000	100	407.531.200	DP3A
7		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase (%)	100	100	16.856.250	100	24.663.100	100	26.213.100	100	31.763.100	100	28.763.100	100	128.258.650	DP3A
8		PROGRAM PENGELOLAAN DATA GENDER DAN ANAK	Ketersediaan Data Gender dan Anak	Tersedia/Tidak	Tidak	Tersedia	10.786.600	Tersedia	16.000.000	Tersedia	15.700.000	Tersedia	103.850.000	Tersedia	101.550.000	Tersedia	247.886.600	DP3A
9		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Terpenuhinya Indikator Kabupaten Layak Anak	Persentase (%)	50	60	125.433.750	65	182.577.150	75	191.435.150	80	260.557.150	85	225.857.150	100	985.860.350	DP3A
10		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Ketuntasan Penanganan Korban Tindak Kekeerasan terhadap Anak pada Tahun Berkenaan	Persentase (%)	100	100	85.932.100	100	120.570.000	100	122.400.000	100	111.350.000	100	97.100.000	100	537.352.100	DP3A
11		PROGRAM PENVELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMLUM	Persentase Ketuntasan Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase (%)	100	100	155.000.000	100	157.125.000	100	159.125.000		186.625.000	100	242.500.000	100	900.375.000	Kecamatan
6	Misi 6	:	Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik, bebas korupsi serta pelayanan publik yang prima															
	Tujuan 22	:	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik															

Indikator Tujuan	:	Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi	indeks	N/A	80		83		85		87		90		90		Sekretariat Daerah		
sasaran	:																		
3	3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	60 (B)	68 (B)		70 (B)		73 (BB)		75 (BB)		76 (BB)		76 (BB)	Sekretariat Daerah	
			2	Opini BPK	Opini	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP	Inspektorat Daerah	
			3	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai	65 (B)	71 (BB)		72 (BB)		73 (BB)		75 (BB)		75 (BB)		75 (BB)	Sekretariat Daerah	
			4	Nilai Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK RI	Nilai	83,48	90,00		92,00		93,00		93,00		94,00		94,00	Inspektorat Daerah	
			5	Indeks Daya Saing daerah	Indeks	2.3493	2.5959		2.7192		2.8425		2.9658		3.0891		3.0891	Bappelitbang da	
			6	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	65 (B)	71 (BB)		72 (BB)		73 (BB)		75 (BB)		76 (BB)		76 (BB)	Sekretariat Daerah	
Program	:																		
1		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase (%)	100	100	1.034.000.000	100	1.072.400.000	100	1.101.200.000	100	1.177.231.200	100	1.475.831.200	100	5.860.662.400	Kecamatan
2		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Persentase (%)	97	98	1.484.060.475	98,5	1.448.162.750	99	1.572.000.000	99,5	1.730.000.000	99,5	1.730.000.000	99,5	7.964.223.225	Dinas Kependudukan dan CAPIL
3		PROGRAM PENCATATAN SIPIL		Cakupan kepemilikan akta-akta pencatatan Sipil	Persentase (%)	90	95	457.211.350	97	470.456.000	98	515.000.000	100	713.000.000	100	715.000.000	100	2.870.667.350	Dinas Kependudukan dan CAPIL
4		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		Ketersediaan Data Informasi Administrasi Kependudukan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	304.883.275	Tersedia	316.500.000	Tersedia	415.500.000	Tersedia	570.000.000	Tersedia	670.000.000	Tersedia	2.276.883.275	Dinas Kependudukan dan CAPIL
5		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		Tersedianya Buku Profil Kependudukan	Ada	Ada	Ada	7.480.600	Ada	10.000.000	Ada	20.000.000	Ada	50.000.000	Ada	60.000.000	Ada	147.480.600	Dinas Kependudukan dan CAPIL
6		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Persentase layanan dan pengendalian komunikasi, informasi dan media massa yang terpenuhi	Persentase (%)	100	100	400.000.000	100	515.000.000	100	555.000.000	100	675.000.000	100	850.000.000	100	2.995.000.000	Dinas Kominfo
7		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		Persentase informasi data elektronik yang terpenuhi	Persentase (%)	100	100	2.907.900.000	100	1.810.000.000	100	2.910.000.000	100	4.375.000.000	100	6.112.000.000	100	18.114.900.000	Dinas Kominfo
8		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Persentase statistik sektoral dan metadata yang tersusun	Persentase (%)	100	100	100.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	275.000.000	100	450.000.000	100	1.225.000.000	Dinas Kominfo
9		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Persentase izin yang diterbitkan berdasarkan permohonan	Persentase (%)	95	96	642.640.075	96	678.530.000	96	786.500.000	96	934.300.000	96	1.088.700.000	96	4.130.670.075	DPMPITS
10		PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP		Persentase terlayannya permohonan ijin penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Persentase (%)	N/A	100	29.999.100	100	25.000.000	100	25.000.000	100	40.000.000	100	50.000.000	100	169.999.100	Dinas Perpustakaan
11		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		Tenaga Pengelola perpustakaan yang dibina	Persentase (%)	26,32	50,94	1.043.288.175	63,25	1.084.300.000	75,56	1.242.300.000	87,87	1.441.300.000	100	1.654.300.000	100	6.465.488.175	Dinas Perpustakaan

12	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase peningkatan permohonan izin usaha oleh masyarakat	Persentase (%)	0	11,59	113.841.900	14,49	135.000.000	17,39	110.000.000	21,74	155.000.000	26,09	155.000.000	100	668.841.900	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
13	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Pelaku IKM difasilitasi pendaftaran perijinannya dan pengawasannya	Persentase (%)	0	100	96.190.700	100	86.999.700	100	88.999.700	100	100.000.000	100	120.000.000	100	492.190.100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
14	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase IKM yang masuk dalam SINAS (Sistem Informasi Industri Nasional)	Persentase (%)	0	3,34	120.550.125,00	5,01	83.741.125	6,68	85.741.125,00	8,35	87.741.125	10,02	90.000.000	33,4	467.773.500	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
15	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Penataan Bangunan Gedung di Kabupaten Karangasem	Persentase (%)	0	38	362.290.650	51	1.240.174.620	64	3.696.799.686	82	3.695.479.655	100	3.694.027.621	100	12.688.772.232	
16	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang menggunakan sistem aplikasi	Persentase (%)	62	75	28.366.600	81	28.367.000	87	32.300.000	94	48.200.000	96	62.000.000	96	199.233.600	DPMP/TSP
17	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase permohonan perizinan usaha pertanian yang difasilitasi	Persentase (%)	100	100	273.483.450	100	345.000.000	100	351.900.000	100	378.292.500	100	406.884.375	100	1.755.560.325	Dinas Pertanian
18	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase tercapainya sasaran pembangunan daerah	persen(%)	100	100	449.172.000	100	756.988.681	100	926.064.817	100	1.370.000.000	100	1.571.124.703	100	5.073.350.201	Bappelitbang da
19	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	persentase kesesuaian Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Program Perencanaan Perangkat Daerah	persen(%)	100	100	359.640.400	100	600.000.000	100	700.000.000	100	976.064.817	100	1.500.000.000	100	4.135.705.217	Bappelitbang da
20	PROGRAM PENGELOLAAN KELUANGAN DAERAH	Persentase ketersediaan dokumen keuangan yang akuntabel	persen(%)	100	100	232.726.964.611	100	248.044.574.753	100	261.302.553.562	100	267.946.899.575	100	269.819.969.489	100	1.279.840.961,90	BPKAD
21	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase ketersediaan dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah	persen(%)	100	100	500.000.000	100	712.000.000	100	778.800.000	100	856.680.000	100	985.182.000	100	3.832.662.000	BPKAD
22	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai Sistem Merit	Nilai	102	175	1.100.000.000,00	212	1.760.000.000,00	250	1.847.500.000,00	287	2.748.000.000,00	287	3.462.000.000,00	287	10.917.500.000	BKPSDM
23	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase pengembangan kompetensi Aparatur	persentase (%)	5%	0,55	550.000.000,00	0,63	675.000.000,00	0,71	710.000.000,00	0,79	3.500.000.000,00	0,87	3.500.000.000,00	0,87	8.935.000.000	BKPSDM
24		Persentase SDM ASN yang mendapat sertifikasi kompetensi manajerial dan fungsional															
25	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	persentase (%)	70	75,00	1.338.737.600	80,00	1.550.000.000	85,00	1.700.000.000	90,00	2.000.000.000	95,00	2.700.000.000	95,00	9.288.737.600,00	Bappelitbang da
26	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase temuan Hasil Pemeriksaan eksternal dan Internal yang ditindaklanjuti	persentase (%)	100	92	576.352.103	94	761.035.107	96	1.376.000.000	98	2.097.000.000	100	1.398.000.000	100	6.208.387.210	Inspektorat Daerah
27	PROGRAM PERUMJUSAN KEBIAKARAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Ketersediaan dokumen Rekomendasi Kebijakan Teknis, Pendampingan dan Asistensi	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	450.000.000	Ada	550.000.000	Ada	572.000.000	Ada	776.100.000	Ada	584.000.000	ada	2.932.100.000	Inspektorat Daerah
28	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Terwujudnya Tertib Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase (%)	100	100	4.025.272.864	100	2.310.800.150	100	2.093.673.000	100	3.249.409.418	100	2.782.747.292	100	14.461.902.724	Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa

29	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Fasilitas Kerjasama Desa	Persentase (%)	100	100	50.000.000	100	68.500.000	100	83.187.500	100	89.391.900	100	118.550.000	100	409.629.400	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
30	PROGRAM PENVELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase sumber daya persandian yang terpenuhi untuk pengamanan informasi	Persentase (%)	100	100	100.000.000	100	125.000.000	100	125.000.000	100	200.000.000	100	250.000.000	100	800.000.000	Dinas Kominfo
31	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENVELAMATAN ARSIP	Jumlah lembar arsip yang masuk dalam aplikasi JIKN/SIKN	Jumlah	891	941	44.999.875	981	45.000.000	1021	80.000.000	1061	110.000.000	1101	145.000.000	1101	424.999.875	Dinas Perpustakaan
32	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase instansi yang telah mendapatkan pembinaan tata kelola kearsipan	Persentase (%)	12,71	38,13	99.999.600	50,85	130.000.000	63,55	195.000.000	80,5	275.000.000	100	365.000.000	100	1.064.999.600	Dinas Perpustakaan
33	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Persentase terpenuhinya pelayanan Administrasi Umum	persentase (%)	100	100	36.449.435.809	100	36.550.658.208	100	39.323.264.000	100	40.955.064.000	100	49.880.197.017	100	203.158.619.034	Sekretariat Daerah
34	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan administrasi umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota yang akuntabel	persentase (%)	100%	100	39.533.470.628	100	40.719.474.747	100	43.404.780.071	100	47.225.334.989	100	50.186.601.738	100%	221.069.662.173	Sekretariat DPRD
35	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang berkualitas	persentase (%)	100%	100	21.231.706.602	100	22.045.702.483	100	23.588.901.657	100	24.768.346.740	100	32.286.939.435	100%	123.921.596.917	Sekretariat DPRD
36	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase (%)	100	100	4.379.804.931	100	4.653.342.025	100	555.034.473	100	4.648.600.030	100	5.028.965.231	100	19.265.746.690	Kecamatan
37	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase (%)	100	100	504.700.000	100	503.700.000	100	574.000.000	100	663.800.000	100	834.000.000	100	3.080.200.000	Kecamatan
38	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Perkembangan Jasa konstruksi di Kabupaten Karangasem	Persentase (%)	36,8	89,13	355.326.600	89,50	368.262.821	89,88	370.514.930	90,00	389.437.835	90,25	354.986.581	90,25	1.838.528.766,08	Dinas PUPR
sasaran :																	
34	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Persentase (%)	0	2,80		9,30		9,59		9,88		10,17		49,07		BPKAD
Program :																	
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tingkat capaian target penerimaan komponen pendapatan asli daerah	Persentase (%)	100	100	8.397.172.708,00	100	4.719.270.253,00	100	5.191.197.279,00	100	5.710.317.110,00	100	6.566.864.673	100	30.584.822.023	BPKAD

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Adapun isu strategis nasional, isu strategis Provinsi Bali dan isu strategis Kabupaten Karangasem yang menjadi dasar dalam perumusan tema serta prioritas dan sasaran pembangunan di Kabupaten Karangasem Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Isu Strategis Nasional :

- 1) Mewabahnya kasus pandemi Covid-19 di Indonesia,
- 2) Pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat dan cenderung stagnan
- 3) Infrastruktur masih terbatas
- 4) Karakter Bangsa (melemahnya nilai budaya)
- 5) Kewilayahan (Ketimpangan antar wilayah dan pemanfaatan ruang belum sesuai dengan peruntukannya
- 6) Lingkungan Hidup dan Bencana (Penurunan kualitas lingkungan hidup dan tingginya resiko bencana)
- 7) Politik, hukum, pertahanan dan keamanan (belum optimalnya penegakan hukum serta Belum Optimalnya Kinerja Kelembagaan Birokrasi dan Pelayanan Publik)

2. Isu Strategis Provinsi Bali :

- 1) Kesenjangan antar wilayah dan antar sektor
- 2) Daya Saing
- 3) Nilai Tambah
- 4) Sustainability
- 5) Reformasi Birokrasi dan Pelayanan umum
- 6) Perubahan Iklim Penanganan Bencana

3. Isu Strategis Daerah Kabupaten Karangasem :

1) Mewabahnya kasus pandemi Covid-19 di Indonesia termasuk di Provinsi Bali dan Kabupaten Karangasem khususnya, membawa dampak yang besar terhadap perekonomian masyarakat yang berujung pada dampak social sehingga memerlukan perhatian dan penanganan khusus dari pemerintah.

2) Tingginya angka kemiskinan serta rendahnya kualitas dan daya saing SDM.

Masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Karangasem yang dipengaruhi oleh masih rendahnya capaian rata-rata lama sekolah, tingginya angka mengulang sekolah, tingginya buta aksara, masih adanya stunting, belum optimalnya mutu dan akses pelayanan kesehatan, masih banyaknyarumah tidak layak huni dan masih banyaknya masyarakat yang rentan social serta adanya kemiskinan kultural.

Rendahnya kualitas dan daya saing SDM di Kabupaten Karangasem ditunjukkan dengan capaian IPM Kabupaten Karangasem yang masih berada dibawah rata-rata capaian Provinsi Bali dan nasional.

3) Pertumbuhan ekonomi yang stagnan dan masih rendahnya investasi.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karangasem selama lima tahun terakhir menunjukkan angka pada kisaran 5 sampai dengan 6 persen. Bahkan pada tahun 2018 mengalami perlambatan akibat bencana erupsi Gunung Agung pada tahun 2017.

Perkembangan realisasi investasi di Kabupaten Karangasem belum didukung oleh regulasi yang memadai. Sampai saat ini revisi perda RTRW belum tuntas sebagai salah satu payung hukum di bidang penanaman modal.

- 4) Belum meratanya infrastruktur yang berakibat ketimpangan wilayah.

Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Karangasem setiap tahun terus dibangun khususnya untuk memudahkan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar serta kemudahan pergerakan ekonomi. Keterbatasan anggaran sebagai sumber pembiayaan pembangunan mengakibatkan belum meratanya pembangunan infrastruktur di Kabupaten Karangasem. Pemerintah daerah terus mengupayakan sumber-sumber pembiayaan tidak hanya dari APBD tetapi juga dari APBD Provinsi, APBN, maupun sumber pembiayaan lainnya khususnya kerjasama dengan pihak lain melalui dana CSR dan lain sebagainya.

- 5) Menurunnya kualitas lingkungan dan meningkatnya resiko bencana.

Menurunnya kualitas lingkungan yaitu menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan tidak hanya karena alih fungsi lahan maupun eksploitasi lahan galian mineral bukan logam, tetapi juga pencemaran lingkungan khususnya akibat sampah plastik serta masih rendahnya ketaatan masyarakat terhadap tata ruang wilayah Kabupaten Karangasem.

Meningkatnya resiko bencana karena Kabupaten Karangasem merupakan Kabupaten yang memiliki resiko bencana ke 92 tertinggi di Indonesia berdasarkan data IRBI, serta kabupaten yang memiliki resiko bencana tertinggi di Provinsi Bali (gunung meletus, tanah longsor dan kebakaran hutan).

- 6) Belum optimalnya tata kelola pemerintahan.

Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dilihat dari masih adanya tumpang tindih pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, proses administrasi yang berbelit-belit,

program dan kegiatan yang dilaksanakan masih berorientasi pada output bukan hasil dan dampaknya sehingga diperlukan penyederhanaan birokrasi.

Berdasarkan isu strategis yang berkembang baik isu strategis nasional, provinsi maupun isu strategis Kabupaten Karangasem serta dengan memperhatikan :

1. Tema RKP Tahun 2021 yaitu : **“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”**;
2. Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2021 yaitu : **“Peningkatan Daya Saing Perekonomian Bali Didorong Pemajuan Kebudayaan Menuju Pemerataan Pembangunan”**; serta
3. Pencapaian sasaran tahun kelima RPJMD Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021, maka tema Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 yaitu :
“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Sosial melalui Peningkatan Industri, Pariwisata, Investasi, Kesehatan, Jaring Pengaman Sosial, Ketahanan Bencana dan Kompetensi Sumber Daya Manusia”

Makna Tema :

Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Sosial :

Merupakan upaya untuk pemulihan perekonomian masyarakat dengan mempercepat penanganan pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) yang membahayakan perekonomian daerah yang berampak terhadap kondisi social masyarakat.

Peningkatan Industri :

Dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan keunggulan kompetitif daerah secara berkelanjutan dengan mendorong

perkembangan industri kecil dan menengah serta ekonomi kreatif.

Peningkatan Pariwisata :

Merupakan upaya untuk mendorong perkembangan sektor pariwisata sebagai sektor yang memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Karangasem didukung oleh pengembangan industri dan pertanian dalam arti luas.

Peningkatan Investasi :

Merupakan upaya untuk mendorong kemudahan investasi di Kabupaten Karangasem dengan memperhitungkan dan memperhatikan potensi saat ini dan masa depan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Kesehatan:

Merupakan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya dalam menghadapi pandemi Corona Virus Disease (Covid-19).

Jaring Pengaman Sosial :

Dimaknai sebagai upaya atau program pemerintah yang bertujuan untuk membantu membangun ketahanan keluarga miskin agar tidak jatuh ke dalam kemiskinan yang lebih dalam.

Ketahanan Bencana :

Dimaknai sebagai upaya untuk membangun ketahanan masyarakat terhadap bencana sehingga mampu beradaptasi dengan cara bertahan dan meningkatkan kapasitasnya untuk mengurangi resiko bencana.

Kompetensi Sumber Daya Manusia :

Dimaknai sebagai upaya untuk membentuk Sumber Daya Manusia yang berkualitas, profesional, berwawasan Ilmu pengetahuan dan teknologi serta loyalitas dan mental spriritual yang kuat dalam upaya menjadikan masyarakat Kabupaten Karangasem sebagai subyek pembangunan dan

bukan obyek pembangunan sehingga lebih siap dalam menghadapi tantangan global.

Memperhatikan agenda prioritas dan sasaran pembangunan nasional, provinsi dan sasaran pembangunan daerah maka pada pembangunan daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 ditetapkan ke dalam 6 (Enam) prioritas yaitu :

Prioritas 1 : Industri, Pariwisata dan Investasi

- a. Diarahkan untuk pengembangan industri kecil dan menengah, ekonomi kreatif serta pengembangan sektor pertanian dalam arti luas dalam upaya peningkatan ketahanan ekonomi dan dukungan terhadap sektor pariwisata.
- b. Diarahkan untuk pengembangan pariwisata berbasis desa adat dan potensi unggulan daerah dengan mengedepankan kearifan lokal.
- c. Diarahkan investasi yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, kemudahan perijinan, serta penyederhanaan regulasi

Prioritas 2 : Kesehatan dan Jaring Pengaman Sosial

- a. diarahkan untuk peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan khususnya dalam rangka pencegahan dan penanganan pasca pandemi covid 19 melalui gerakan masyarakat hidup sehat, pengendalian penyakit, dan perbaikan gizi masyarakat, serta diarahkan untuk peningkatan kesehatan ibu, bayi, balita, menekan angka kematian ibu, angka kematian bayi, penanganan stunting, serta pengawasan obat dan makanan.
- b. Diarahkan untuk peningkatan perlindungan sosial masyarakat terutama terhadap masyarakat miskin yang mengalami dampak pandemi covid

19 melalui program-program sistem jaminan sosial, bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran.

Prioritas 3 : Ketahanan Bencana dan Lingkungan Hidup

Diarahkan untuk pencegahan dini dan penanggulangan bencana serta peningkatan kualitas dan daya dukung lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran lingkungan, ketaatan terhadap regulasi terutama tata ruang wilayah.

Prioritas 4 : Pembangunan SDM, Adat dan Budaya

- a. Diarahkan untuk membangun sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, terampil dan inovatif serta berkarakter melalui peningkatan kualitas pendidikan baik formal maupun informal, peningkatan keterampilan masyarakat, penguasaan IPTEK, pengembangan inovasi dan kreativitas serta penanaman sikap mental dan spiritual.
- b. Diarahkan untuk pemajuan dan pelestarian adat dan budaya melalui revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat serta peningkatan kualitas kehidupan beragama.

Prioritas 5 : Infrastruktur

Diarahkan untuk membangun infrastruktur rakyat untuk memudahkan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar dan dalam rangka pemerataan ekonomi masyarakat

Prioritas 6 : Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Diarahkan dalam upaya mewujudkan good governance melalui peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,

pengawasan, regulasi, penyederhanaan birokrasi, peningkatan kapasitas aparatur untuk mewujudkan pelayanan publik prima.

Prioritas daerah tersebut diselesaikan melalui program dan kegiatan RKPD Kabupaten Karangasem Tahun 2021 dengan menggunakan kriteria sebagai berikut :

- 1) Memenuhi kriteria holistik-tematik, integratif dan spasial;
- 2) Program/kegiatan harus merupakan kewenangan Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah Pusat, serta sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- 3) Memiliki korelasi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021;
- 4) Merupakan respon relevan terhadap isu strategis dan masalah yang mendesak dan faktual yang dihadapi pada tahun 2021;
- 5) Program dan kegiatan merupakan program/kegiatan yang menyentuh secara langsung bagi usaha pemecahan masalah mendasar yang dihadapi oleh masyarakat;
- 6) Selaras dan konsisten dengan kebijakan pemerintah pusat untuk mengantisipasi penyelesaian target-target pembangunan nasional; dan
- 7) Sesuai dengan pagu anggaran indikatif sementara.

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 (1) dan pasal 18 (1) terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk memprioritaskan 6 urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang pelaksanaannya ditetapkan dengan standar pelayanan minimal (SPM) yang ditetapkan oleh setiap kementerian/lembaga.

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Dimana pelayanan minimal dimaksud mengacu pada batas minimal tingkat cakupan dan kualitas pelayanan dasar yang harus mampu dicapai oleh setiap daerah pada batas waktu yang ditentukan. Adapun laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM di daerah memberikan informasi mengenai capaian kinerja pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib pemerintahan daerah.

Adapun penyusunan laporan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) ini dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai kondisi awal pencapaian kinerja dan penerapan SPM yang telah dilaksanakan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem pada tahun 2021.

Sasaran capaian Tahun 2021 diharapkan setiap OPD dapat mengintegrasikan program SPM Nasional tersebut ke dalam dokumen perencanaan dan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem.

Tujuan dari pelaporan penerapan SPM ini adalah untuk memperoleh informasi yang aktual tentang perkembangan pelaksanaan dan pencapaian SPM di Kabupaten Karangasem, sehingga kedepan diharapkan setiap tahapan dalam penerapan SPM dapat dilaksanakan secara utuh mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan mengevaluasi pencapaiannya sebagai bahan kajian pelaksanaan pelayanan dasar dalam rangka perbaikan kualitas pelayanan publik pada tahun berikutnya.

Adapun dasar hukum dalam penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu :

- a. UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

- b. PP No. 12 Tahun 2017 tentang Binwas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- c. PP NO.2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
- d. PERMENDAGRI NO.100 Tahun 2018 tentang Penerapan SPM.

Kebijakan Umum Pemerintah Kabupaten Karangasem adalah sesuai dengan yang tertuang dalam visi Misi Kabupaten Karangasem di Dalam RPJMD Kabupaten Karangasem 2021-2026. Adapun Visi Kabupaten Karangasem 2021-2026 adalah :

“Nangun Sat Kerthi Loka Bali di Karangasem melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Karangasem Era Baru yang Pradnyan, Kertha, Shanti dan Nadi”

Sedangkan Misi Kabupaten Karangasem adalah :

1. Membangun Pertanian yang Tangguh dan Mandiri Dalam Rangka Mewujudkan Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani serta Nelayan
2. Mengembangkan SDM yang Handal, Berdaya Saing Tinggi, dan Sistem Pelayanan Kesehatan yang Terjangkau, Adil dan Berkualitas.
3. Mengembangkan Sektor Ekonomi, Sosial dan Budaya Secara Konfrehensif dan Terintegrasi
4. Membangun Pariwisata yang Handal melalui Pembangunan Destinasi dan Promosi yang Ditunjang dengan Infrastruktur Pedesaan yang Memadai dan Terkoneksi
5. Mengembangkan Sistem Keamanan dan Ketertiban Secara Terpadu Misi
6. Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bebas Korupsi serta Pelayanan Publik yang Prima

Kebijakan Umum Penyelenggaraan Bidang Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Kebijakan umum yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 dalam melaksanakan bidang urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar pendidikan. Pendidikan erat kaitannya dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Sesuai arah kebijakan dan pembangunan yang berkaitan dengan pendidikan, berorientasi pada upaya pemenuhan kualitas yang memadai untuk kebutuhan Krama Karangasem di fokuskan tuntas wajib belajar 9 Tahun serta melalui program penyelenggaraan pendidikan terfokus pada pembagunan TK/PAUD yang berbasis Hindu.

Pembangunan disektor pendidikan meliputi penyediaan fasilitas pendidikan berupa gedung sekolah, tenaga pengajar, kelengkapan literatur, serta sarana penunjang lainnya. Jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Karangasem sebanyak 78 dan yang tersedia Pos PAUD (69 sekolah), TK (133 sekolah), SD (364 sekolah), SMP (51 sekolah), SMA (20 sekolah), dan SMK (18 sekolah). Untuk tingkat pendidikan tinggi, yang mempunyai (1) sekolah Akademi/Perguruan Tinggi . Untuk pendidikan luar biasa, SD Luar Biasa (1sekolah), SMP Luar Biasa (1 sekolah), SMA Luar Biasa (1 sekolah). Untuk pendidikan berbasis Agama, Pondok Pesantren (5 sekolah), dan Madrasah Diniyah (3 sekolah).

2. Kesehatan

a) Ketersediaan Sarana Kesehatan

Perencanaan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan sudah dituangkan ke dalam RPJMD Kabupaten Karangasem dengan target pencapaian kinerja sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Pembangunan kesehatan di Kabupaten Karangasem diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi- tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian,

adil dan merata dengan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu hamil, bayi, anak, lanjut usia dan keluarga miskin.

Pembangunan bidang kesehatan semakin tahun semakin menjadi prioritas bagi kebijakan Pemerintah baik pusat maupun daerah, hal ini tercermin dari kebijakan kebijakan pemerintah yang mengedepankan pembangunan di bidang kesehatan. Selain itu bidang kesehatan saat ini merupakan isu yang sangat peka yang dapat mempengaruhi kredibilitas dari semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Penyediaan fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit Umum (RSU) baik pemerintah maupun swasta, puskesmas, dan klinik merupakan upaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Di Kabupaten Karangasem terdapat 3 buah Rumah Sakit Umum, 8 Poliklinik, 12 Puskesmas, 61 Puskesmas Pembantu, 16 buah Apotik.

b) Pelayanan Tenaga Kesehatan

Pelayanan di bidang kesehatan di Puskesmas dan di Rumah Sakit di Kabupaten Karangasem dilakukan oleh 47 orang dokter umum di Puskesmas dan 48 orang di Rumah Sakit. Dokter Gigi sebanyak 20 orang bertugas di Puskesmas dan 4 orang di Rumah Sakit. Jumlah dokter spesialis sebanyak 61 orang yang semuanya bertugas di Rumah Sakit. Jumlah dokter umum maupun dokter spesialis di Kabupaten Karangasem masih sedikit dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Bali

c) Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit

Beberapa Indikator standar terkait dengan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit yang dipantau antara lain pemanfaatan tempat tidur (Bed Occupancy Rate/BOR) rata-rata lama hari perawatan (Length of Stay/LOS), rata-rata tempat tidur dipakai (Bed Turn Over/BTO), rata-rata selang waktu pemakaian tempat tidur (Turn of Interval/TOI), persentase pasien keluar yang

meninggal (Gross Death Rate/GDR), dan persentase pasien keluar yang meninggal > 48 jam perawatan (Net Death Rate/NDR).

BOR adalah persentase pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu, Indikator ini memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur RS, BOR ideal mencapai (60-80%) dan untuk RSUD Amlapura Tahun 2020 nilai BOR sebesar 35,4%. BOR RS BaliMed Karangasem 37,6%, sedangkan untuk RS Pratama Kuba sebesar 10,5%

LOS adalah rata-rata lama rawat (hari) seorang pasien. Indikator ini memberikan gambaran tentang tingkat efisiensi dan mutu pelayanan, apabila diterapkan pada diagnosis tertentu dapat dijadikan hal yang perlu pengamatan lebih lanjut. Nilai LOS yang ideal antara 6-9 hari. Sedangkan TOI adalah rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah digunakan sampai saat digunakan kembali (rata-rata lama tempat tidur kosong antara pasien satu dengan pasien berikutnya). Idealnya tempat tidur kosong pada kisaran 1-3 hari.

GDR adalah angka kematian umum setiap 1.000 penderita keluar Rumah Sakit. Pada GDR, tidak melihat berapa lama pasien berada di Rumah Sakit dari masuk sampai meninggal. Nilai ideal GDR adalah <45 per 1.000 pasien keluar. NDR adalah angka kematian pasien setelah dirawat > 48 jam per

1.000 pasien keluar. Indikator ini memberikan gambaran mutu pelayanan di Rumah Sakit. Asumsinya jika pasien meninggal setelah mendapatkan perawatan 48 jam berarti ada faktor pelayanan Rumah Sakit yang terlibat dengan kondisi meninggalnya pasien. Namun jika pasien meninggal < 48 jam masa perawatan, dianggap faktor keterlambatan pasien datang ke Rumah Sakit yang menjadi penyebab utama pasien meninggal. Nilai NDR yang ideal adalah < 25 per 1.000 pasien keluar.

Pencapaian NDR tahun 2020 untuk RSUD Karangasem belum ideal. Pada Tahun 2020 angka GDR di RSUD Kabupaten Karangasem lebih besar dari nilai ideal yaitu sebesar 38,2 per 1000 pasien keluar dan NDR 17,7 per 1.000 pasien keluar.

d) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM)

Di Kabupaten Karangasem Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) pra bayar yang dikelola oleh pemerintah meliputi JKN dan JKBM. Pada Tahun 2020 cakupan peserta JKN adalah sebesar 509.335 orang, Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN sebesar 152.690 orang, Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD sebesar 208.746, pekerja penerima upah sebanyak 88.740 orang. Pekerja bukan penerima upah (PBPU)/mandiri sebesar 55.230 orang. Bukan Pekerja sebesar 3.929 orang.

e) Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan

Masyarakat Sesuai arah kebijakan dan program pembangunan yang berkaitan dengan kesehatan, berorientasi pada upaya pemenuhan kualitas yang memadai dengan kegiatan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan salah satunya yaitu menyediakan mobil keliling pelayanan kesehatan ke desa-desa (pelayanan kegawat darurat) atau antar jemput pasien dengan kegiatan operasional pelayanan fasilitas kesehatan di 8 Kecamatan.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kebijakan umum yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 dalam melaksanakan bidang urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar pekerjaan umum dan penataan ruang. Pekerjaan umum mencakup penyediaan sarana dan prasarana yang dapat mempermudah akses masyarakat. Sebagai sektor penunjang, urusan pekerjaan umum berperan besar dalam mendukung keberhasilan pembangunan pertanian, membuka isolasi wilayah, serta pembangunan sektor-sektor lainnya. Kebijakan pembangunan infrastruktur dilaksanakan melalui pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan infrastruktur

dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan dalam bidang irigasi bertujuan untuk meningkatkan jaringan saluran irigasi untuk memberikan peningkatan kebutuhan akan air kepada masyarakat petani dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional. Di beberapa kecamatan di Kabupaten Karangasem program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi mempunyai dampak yang positif terhadap persawahan, ladang, dan kehidupan masyarakat. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Perairan di realisasikan dengan kegiatan utama yaitu Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi. Dari data jaringan irigasi, luas daerah jaringan irigasi di Kabupaten Karangasem yakni 5.476 ha yang mengairi 116 Daerah Irigasi (DI). Keberhasilan dari program Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Perairan diukur dari terpenuhinya 53 paket pekerjaan yang tersebar di 7 (tujuh) kecamatan atau sebanyak sebanyak 4,3% mencapai realisasi fisik 600% dari target yang ditetapkan.

Dalam memperlancar kegiatan perekonomian suatu daerah, jalan merupakan sarana sangat penting untuk mempermudah mobilitas dan memperlancar arus perdagangan antar daerah khususnya melalui darat. Jalan yang ada di Kabupaten Karangasem terdiri dari Jalan Negara (97,97 Km), Jalan Provinsi (145,77 Km) dan Jalan Kabupaten (1.202,54 Km). Kabupaten Karangasem paling banyak memiliki jalan kabupaten/kota demikian juga paling banyak memiliki panjang jalan mencapai 1.423,99 Km.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Kebijakan umum yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 dalam melaksanakan bidang urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar perumahan rakyat dan kawasan pemukiman. Sesuai arah kebijakan dan program pembangunan yang berkaitan dengan program kawasan permukiman, berorientasi pada

upaya pemenuhan dalam jumlah dan peningkatan kualitas kawasan permukiman, salah satunya pemberian bantuan untuk membangun/merehabilitasi rumah yang tidak layak huni untuk masyarakat miskin melalui kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (sepuluh) Ha. Pada Tahun 2021 sesuai data BDT (TNP2K) yang dimasukkan kedalam basis data e-RTLH sebanyak 2.635 unit.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Kebijakan umum yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 dalam melaksanakan bidang urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

a) Pelayanan Trantibum Linmas

Target pencapaian pelayanan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Karangasem belum mencapai target optimal yang telah ditetapkan berdasarkan Permendagri Nomor 62 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten/Kota khususnya pada indikator cakupan Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten/ Kota yang mencapai 75 dari target 95. Sementara indikator capaian pelayanan dari sisi Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten/ Kota dan Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat/ Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) sudah mencapai kinerja 100%. Untuk memenuhi target capaian yang belum optimal maka pemerintah Kabupaten Karangasem melakukan strategi pemberdayaan masyarakat desa dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta linmas di wilayah masing-masing.

b) Penanggulangan bencana.

Kabupaten Karangasem merupakan wilayah resiko kebencanaan yang tertinggi di Bali. Berdasarkan data BPBD Provinsi

Bali, Karangasem masuk pada potensi rawan sedang bencana Tsunami. Berbagai program pokok yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karangasem antara lain: Program Peningkatan Peran Kehumasan dengan kegiatan Peningkatan Peran Pusdalops dalam penyampaian informasi kebencanaan / Publikasi dan Interaksi Media; Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam, dengan kegiatan sebagai berikut :a. Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman /korban bencana alam; b. Pos Emergency Service Respon di Kabupaten Karangasem; c. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana; d. Pementukan Sekolah Aman Bencana (SAB); e. Peningkatan Kapasitas Logistik dan Peralata; f. Monitorung dan Evaluasi Pasca Bencana; g. Operasional Tim Siaga Bencana; h. Mitigasi Bencana; dan i. Pengadaan logistik di Pos Komando;

Program Pendidikan dan Pelatihan Kepada Aparat Penyelenggara Penanggulangan Bencana Daerah, dengan kegiatan sebagai berikut: a. Orientasi Manajemen Penanggulangan Bencana Bidang Penampungan Darurat; b. Orientasi Manajemen Penanggulangan Bencana; c. Orientasi Manajemen Penanggulangan Bencana Bidang Assesment; dan d. Pembentukan Relawan Penanggulangan Bencana; Program Pendidikan dan Pelatihan Kepada Masyarakat, dengan kegiatan Pembentukan Desa Tangguh Bencana; Program Peringatan Dini, dengan kegiatan Pembangunan Sistem Peringatan Dini; dan Program Pengembangan Kemitraan, dengan kegiatan sebagai berikut : a. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Kepemanduan Wisata Tirta; dan b. Pembangunan Pos Pengawas Pantai untuk Kebencanaan di Pantai

c) Pelayanan Kebakaran

Kinerja pelayanan Pemadam Kebakaran di Kabupaten Karangasem belum dapat dilakukan secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari Respond time 15 menit yang baru bisa tercapai 28,12 menit di Tahun 2020 dengan persentase kasus kebakaran yang ditangani

sebesar 87,88%. Hal ini disebabkan karena Pos pelayanan pemadam Kebakaran belum ada merata di seluruh kecamatan. Pos pemadam yang sudah ada yaitu di Kecamatan Karangasem, Kubu, dan Abang. Kedepan dengan pembangunan pos pelayanan yang ada di masing-masing kecamatan, didukung dengan ketersediaan SDM serta sarana prasarana yang memadai maka kinerja pelayanan kebakaran dapat mencapai target SPM yang ditetapkan.

6. Sosial

Kebijakan umum yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 dalam melaksanakan bidang urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar sosial. Pembangunan bidang sosial dan ketenagakerjaan merupakan bagian pembangunan nasional memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya. Oleh karena itu pembangunan bidang sosial dan ketenagakerjaan diarahkan untuk memberikan kontribusi yang nyata dan terukur dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, kesejahteraan bagi masyarakat yang kurang beruntung dan rentan atau disebut Penyandang Masalah Sosial (PMKS).

Jumlah Panti Asuhan sampai tahun 2020 sebanyak 3 buah, terdiri dari Panti Asuhan Yasa Kerti, Panti asuhan Yassika dan Panti Asuhan Widayasih VII. Jumlah anak asuh yang ada pada ketiga panti asuhan sebanyak 89 orang, penghuni 89 orang dan kapasitas tampung 89 orang.

Sesuai arah kebijakan dan program pembangunan yang berkaitan dengan jaminan sosial, berorientasi pada upaya pemenuhan kebutuhan Krama Karangasem melalui program rehabilitasi sosial salah satunya yaitu pemberian Santunan Kematian Masyarakat (Santimas) yang berorientasi pada kegiatan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial/PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial.

Arah kebijakan dan program pembangunan yang berkaitan dengan jaminan sosial lainnya yaitu fasilitas dan pemberian bantuan (subsidi) untuk pelaksanaan upacara Pitra Yadnya Ngaben Gotong Royong serta pemberian santunan dan tunjangan kepada penderita cacat permanen dan lanjut usia.

Sesuai dengan RPJPD Kabupaten Karangasem Tahun 2006-2025, arah kebijakan pembangunan daerah difokuskan kepada terwujudnya masyarakat Karangasem yang sejahtera, dan berkeadilan berdasarkan budaya Bali. Untuk mewujudkan hal tersebut, Kabupaten Karangasem masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang dihadapi seperti kondisi geografis wilayah dengan minim sumber daya air, kehidupan sosial masyarakat saat ini, perubahan-perubahan yang terjadi di daerah lain, keterbatasan sumber-sumber pendapatan daerah, pertumbuhan antar sektor yang kurang seimbang, kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan, sistem perdagangan dan perekonomian domestik yang semakin bebas dan persaingan global yang semakin ketat.

Dalam upaya mengatasi tantangan tersebut, Kabupaten Karangasem memiliki potensi sumberdaya alam (lahan, hutan, perairan/ laut, keanekaragaman hayati, iklim tropis) yang masih kaya dan belum dimanfaatkan secara optimal dan sumber daya manusia yang dilandasi oleh nilai-nilai budaya Agama Hindu (tenaga, pikiran, waktu, nilai-nilai budaya/adat dan agama Hindu dan moral). Kedua sumber daya tersebut merupakan keunggulan komparatif (*comparative advantages*) sehingga arah kebijakan pembangunan Kabupaten Karangasem lima tahun mendatang diselenggarakan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah dan terintergerasi dalam satu kesatuan wilayah Karangasem, yang berpihak dan taat asas pada Budaya Karangasem yaitu dengan menerapkan konsep Pola Pembangunan Semesta Berencana guna mewujudkan kehidupan Krama Karangasem yang sejahtera dan bahagia serta mewujudkan Gumi / wilayah Karangasem yang sesuai dengan Prinsip Tri Sakti Bung Karno, yaitu berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan dalam koridor Ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.

Orientasi, arah kebijakan dan program pembangunan Karangasem di masa datang yang diselenggarakan dengan menerapkan Pola Pembangunan Semesta Berencana, merupakan untaian benang merah yang menghubungkan Karangasem dalam dimensi waktu menurut konsep Tri Semaya : Atita (masa lalu), Nagata (masa kini), dan Wartamana (masa datang), yaitu kondisi Karangasem di masa lalu, kondisi Karangasem di masa kini dan kondisi Karangasem di masa datang. Karangasem di masa lalu ditandai oleh masa keemasan Kerajaan Karangasem sebagai masa romantika. Karangasem di masa kini ditandai oleh dinamika pembangunan yang hasilnya memberi manfaat bagi kesejahteraan Krama Karangasem, namun sekaligus juga menimbulkan masalah dan tantangan baru sebagai masa dinamika. Karangasem di masa datang merupakan suatu kondisi baru (sintesis) yang dirumuskan berdasarkan suatu proses dan hasil dari tesis dan antitesis terhadap kondisi Karangasem di masa lalu, kebutuhan serta permasalahan dan tantangan Karangasem di masa datang sebagai masa dialektika.

Langkah awal dalam implementasi SPM yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem adalah melakukan sosialisasi konsep penetapan dan petunjuk teknis pelaksanaan yang dilakukan. Langkah berikutnya melakukan pemetaan kondisi awal SPM terkait penerapan dan pencapaiannya. Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan Pemetaan kondisi awal SPM Penerapan dan pencapaian SPM pada tahun berjalan dan tahun berikutnya hingga memenuhi standar capaian SPM secara nasional.

Dari sisi waktu pencapaiannya, melalui Bagian Organisasi Setda Kabupaten Karangasem terus mengarahkan dan memantau pelaksanaan dan capaian tingkat cakupan yang minimal sama atau bahkan lebih cepat dibandingkan batas waktu yang telah ditetapkan Pemerintah untuk masing-masing indikator SPM masing-masing OPD.

Mengkoordinasikan dalam proses capaian tujuan dari SPM pada masing-masing OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten merupakan salah satu peran dan tugas koordinatif melalui Surat Keputusan Bupati Karangasem Nomor

421/HK/2020 Tanggal 29 Desember 2020, tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2021.

Tim mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan kepada seluruh OPD terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM yang meliputi :

- a. Menyusun rencana aksi penerapan SPM;
- b. Melakukan koordinasi penerapan SPM dengan perangkat daerah pengampu;
- c. Mengkoordinasikan pendataan, pemuktahiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;
- d. Mengkoordinasikan integrasi SPM kedalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
- e. Mengkoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam APBD kabupaten;
- f. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM daerah kabupaten;
- g. Mengkoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM Daerah;
- h. Mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM Daerah;
- i. Melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
- j. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM Daerah, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui system informasi pembangunan daerah yang terintegritasi;
- k. Mengkoordinasikan pencapaian berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.

Rencana pencapaian dan penerapan SPM disusun dan diterapkan dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem yang berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai dengan peraturan

perundang-undangan. Berikut 6 urusan pemerintahan wajib yang menjadi prioritas pelaporan SPM pada Tahun 2021 serta penanggung jawab dalam pencapaian dan penerapan SPM di Kabupaten Karangasem :

- 1) Bidang Pendidikan, pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karangasem,
- 2) Bidang Kesehatan, pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem,
- 3) Bidang Pekerjaan Umum, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Karangasem,
- 4) Bidang Perumahan Rakyat, pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Karangasem.
- 5) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, pada Sat. Pol PP Kab. Karangasem, Dinas Pemadam Kebakaran dan Unsur terkait sesuai jenis layanan dasarnya,
- 6) Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Karangasem.

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

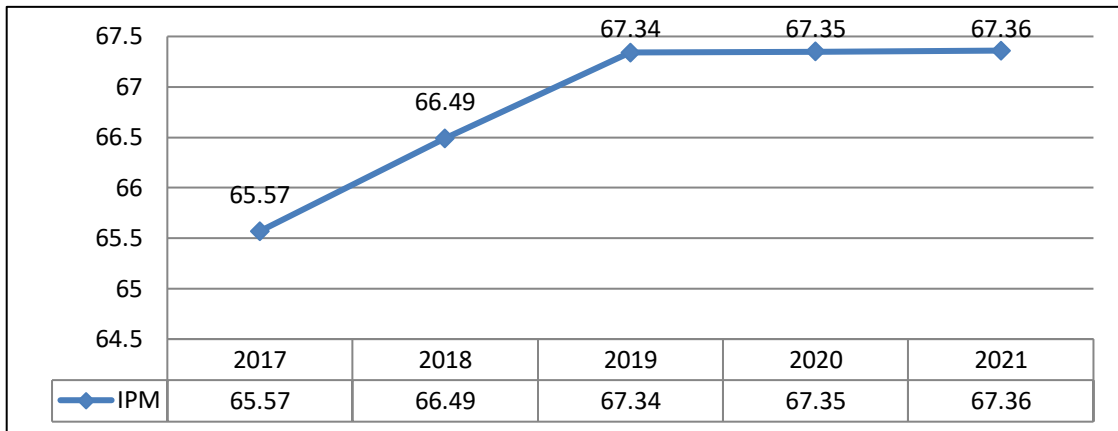
Aspek kesejahteraan ekonomi yang penting diukur adalah laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karangasem atau laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010, PDRB perkapita Atas Dasar Harga Berlaku, PDRB perkapita Atas Dasar Harga Konstan 2010, Penduduk miskin dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

IPM Kabupaten Karangasem periode tahun 2017-2021 terus mengalami peningkatan dimana pada tahun 2019 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Karangasem mencapai 67,34 dan IPM tahun 2021 sebesar 67,36 Secara rinci perkembangan IPM Kabupaten Karangasem dapat dilihat pada Grafik dibawah ini :

Garfik 2.1
IPM Kabupaten Karangasem Tahun 2017-2021



Sumber : Bappelitbangda Kab. Karangasem, 2021

2. Angka Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan demikian penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. BPS menggunakan beberapa indikator dalam pengukuran tingkat kemiskinan, yaitu Garis Kemiskinan (GK), persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan serta indeks keparahan kemiskinan.

Perkembangan kemiskinan di Kabupaten Karangasem selama kurun waktu 2017-2021 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.1
Perkembangan Kemiskinan Kabupaten Karangasem Tahun 2017-2021

Kemiskinan	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	27.020	26.020	25.990	24.690	28.520
Persentase Penduduk Miskin (%)	6,55	6,28	6,25	5,91	6,78

Sumber Data: BPS Provinsi Bali, BPS Kab. Karangasem, 2021

Dalam kurun waktu 2017-2020 Jumlah penduduk Miskin Kabupaten Karangasem mengalami penurunan dimana pada tahun 2017 jumlah penduduk miskin sebanyak 27.020 jiwa (6,55%) turun menjadi 24.690 jiwa (5,91%) pada tahun 2020, hal ini disebabkan karena beberapa program dan

kebijakan pemerintah sudah dapat berjalan seperti bedah rumah, program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi pada tahun 2021 tingkat kemiskinan di Kabupaten Krangasem mengalami peningkatan, ini diakibatkan persebaran virus covid-19 yang massif di Kabupaten Karangasem.

3. Angka Pengangguran

Pengangguran masih menjadi masalah utama setiap daerah terutama di negara sedang berkembang. Pengangguran terjadi karena terbatasnya kesempatan kerja dan masih rendahnya daya saing tenaga kerja. Demikian juga di Kabupaten Karangasem, penurunan jumlah penduduk yang bekerja meningkatkan jumlah pengangguran.

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Karangasem tahun 2020 mencapai 2,42 persen dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 80,75 persen. Tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Bali tahun 2020 mencapai 5,63 persen dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 74,32 persen.

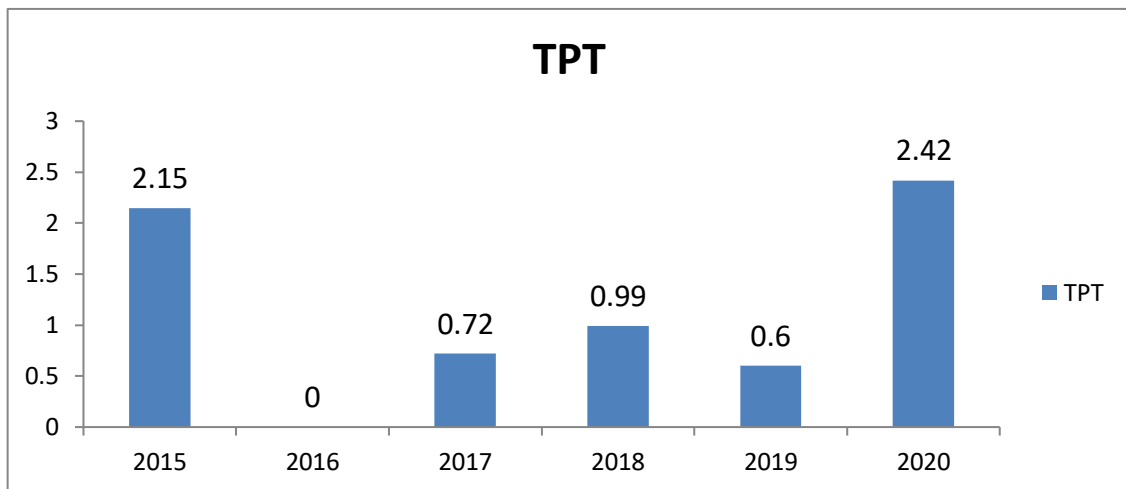
Berdasarkan data tersebut, permasalahan utama yang dihadapi Kabupaten Karangasem dalam lima tahun mendatang dalam upaya pengurangan pengangguran adalah:

1. Masih rendahnya penyerapan tenaga kerja di sektor lapangan usaha.
2. Peningkatan jumlah penduduk usia kerja belum mampu diimbangi dengan pembukaan lapangan kerja.
3. Masih rendahnya investasi yang bersifat padat karya di daerah.

Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota se Bali, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karangasem Tahun 2019 Terendah di Bali. Terhadap hal ini mengindikasikan bahwa angkatan kerja yang ada sebagian besar sudah terserap di sektor formal maupun non formal, tahun 2016 tidak dilaksanakan survei, seperti dalam Tabel Berikut :

Grafik 2.2

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karangasem Tahun 2015-2020



Sumber : Bappelitbangda Kab. Karangasem, 2021

4. Pertumbuhan Ekonomi

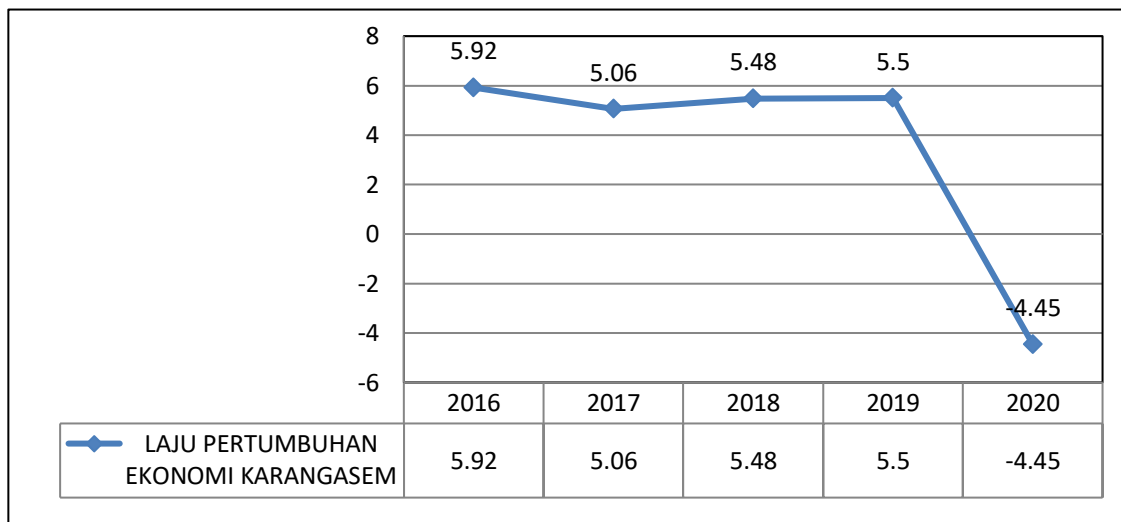
Perubahan nilai PDRB terutama atas dasar harga konstan (riil) yang juga dikenal sebagai laju pertumbuhan ekonomi dinilai sebagai salah satu indikator kemajuan pembangunan di suatu daerah disamping nilai absolut PDRB yang menunjukkan besarnya produksi barang dan jasa di suatu daerah atau wilayah.

Laju pertumbuhan ekonomi ini bahkan dirasa lebih penting oleh banyak kalangan karena lebih dikenal dan lebih sering digunakan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Suatu daerah atau wilayah dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan PDRB riil (PDRB atas dasar harga konstan) di daerah atau wilayah tersebut. Teori ekonomi klasik juga mengisyaratkan bahwa indikator pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang paling penting untuk menilai tingkat keberhasilan pembangunan di suatu daerah atau wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang dalam hal ini ditunjukkan oleh pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan.

Selama tahun 2016-2020, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karangasem cenderung fluktuatif. Di tahun 2016, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karangasem mencapai 5,92 mengalami perlambatan di tahun 2017 menjadi 5,06 %, naik di tahun 2018 menjadi 5,48% dan tahun 2019 menjadi 5,50% dan di tahun 2020 mengalami penurunan hingga - 4,45% Semenjak awal tahun 2020 sampai saat ini, wabah pandemi Covid-19 masih terus menjangkiti Indonesia. Bahkan jumlah kasus baru yang terkena penyakit ini semakin meningkat. Berdasarkan data

Satgas Penanganan Covid-19 per 31 Desember 2020, jumlah kasus baru harian yang terkonfirmasi mencapai sekitar 8 ribu kasus, dan masih menunjukkan pola grafik yang terus meningkat. Tidak hanya menyerang bidang kesehatan namun pandemi ini juga telah meluluhlantakkan persendian perekonomian. Berbagai usaha pemerintah yang telah dilakukan pada tahun 2020, nyatanya belum mampu menahan kontraksi ekonomi seperti yang disajikan pada Grafik 2.3

Grafik 2.3
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab. Karangasem



Sumber : Bappelitbangda Kab. Karangasem, 2021

5. Pendapatan Per Kapita

Besarnya PDRB per kapita atas dasar harga berlaku terus meningkat. Tahun 2016 mencapai Rp 32,65 juta. Angka ini menunjukkan bahwa secara rata-rata, setiap penduduk di Kabupaten Karangasem menerima pendapatan sebesar Rp 32,65 juta selama tahun 2016. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, rata-rata pendapatan per Kapita penduduk Karangasem mencapai Rp 39,31 juta atau sebesar 3,27 juta per bulan. Secara kasar, dapat dikatakan bahwa dari waktu ke waktu, kesejahteraan penduduk Kabupaten Karangasem dari sisi perekonomian terlihat semakin membaik. Sementara itu, laju peningkatan PDRB per kapita kabupaten Karangasem atas dasar harga konstan juga menunjukkan peningkatan selama tahun 2016-2019 dan di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 25,41 juta per rupiah, Selengkapnya perkembangan pendapatan perkapita tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Perbandingan PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku

PDRB Perkapita Kabupaten Karangasem (ribu rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
ADHB (Atas Dasar Harga Berlaku)	32,65	35,36	38,30	41,01	39,31
ADHK (Atas Dasar Harga Konstan)	23,18	24,24	25,43	26,72	25,41

Sumber : Bappelitbangda Kab. Karangasem, 2021

6. Indeks Gini Rasio (Ketimpangan Pendapatan)

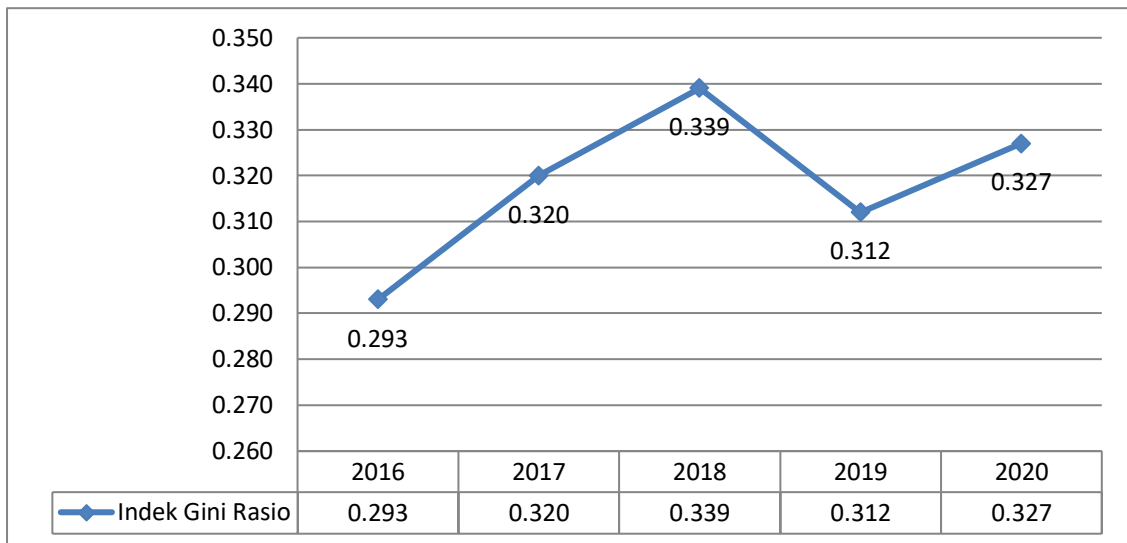
Ketimpangan pendapatan diukur dengan besaran koefisien Gini atau lebih dikenal dengan Gini Ratio (GR). Indeks Gini atau Koefisien Gini dinyatakan dalam bentuk rasio yang nilainya antara 0 dan 1. Nilai 0 menunjukkan pemerataan yang sempurna dimana semua nilai sama sedangkan nilai 1 menunjukkan ketimpangan yang paling tinggi yaitu satu orang menguasai semuanya sedangkan yang lainnya nihil. Kategori Indeks Gini berdasarkan publikasi BPS terdiri dari:

- $GR \leq 0,20$ -kelompok penduduk dengan Ketimpangan Sangat Rendah.
- $0,20 < GR \leq 0,39$ - kelompok penduduk dengan Ketimpangan Rendah.
- $0,39 < GR \leq 0,59$ - kelompok penduduk dengan Ketimpangan Sedang.
- $0,59 < GR \leq 0,79$ - kelompok penduduk dengan Ketimpangan Tinggi.
- $GR > 0,79$ - kelompok penduduk dengan Ketimpangan Sangat Tinggi.

Indeks Gini Kabupaten Karangasem termasuk dalam kategori ketimpangan rendah dengan nilai tahun 2020 sebesar 0,327. Nilai ini masih berada di bawah ketimpangan pendapatan Provinsi Bali 0,369. Indeks Gini Rasio paling tinggi adalah Kabupaten Klungkung (0,357) dan paling kecil adalah Kabupaten Bangli (0,283). Selengkapnya disajikan pada grafik 2.4 berikut :

Grafik 2.4

Indeks Gini Ratio Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2020



Sumber : Bappelitbangda Kab. Karangasem, 2020

Tabel 2.3
Rekapan Capaian Kinerja Makro

No	INDikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N	Perubahan (%)
1	2	3	4	5
1	Indek Pembangunan Manusia	67,34	67,35	0,01
2	Angka Kemiskinan	25.990	24.690	-1300
3	Angka Pengangguran	0,60	2,42	1,82
4	Pertumbuhan Ekonomi	5,50	-4,45	-9,95
5	Pendapatan Per Kapita	41,01	39,31	-1,70
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,312	0,327	0,015

Sumber : Bappelitbangda Kab. Karangasem, 2021

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	65 Satuan Pendidikan	Disdikpora	
		Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	4.298 Peserta Didik	Disdikpora	
		Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	4.298 Peserta Didik	Disdikpora	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	303 Kebutuhan Minimal	Disdikpora	
		Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	303 Pendidik	Disdikpora	
		Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	303 Pendidik	Disdikpora	
		Jumlah kepala Sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD	0 Kepala Sekolah	Disdikpora	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah			
		Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	356 SD dan SMP	Disdikpora	
		Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	44.875 Peserta Didik	Disdikpora	
		Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	20.797 Peserta Didik	Disdikpora	
		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	44.875 Peserta Didik	Disdikpora	
		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	20.797 Peserta Didik	Disdikpora	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	2.084 Kebutuhan	Disdikpora	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	1.200 Kebutuhan	Disdikpora	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	3.293 Pendidik	Disdikpora	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	1.198 Pendidik	Disdikpora	
		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	712 Tenaga Kependidikan	Disdikpora	
		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	240 Tenaga Kependidikan	Disdikpora	
		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	625 Tenaga Kependidikan	Disdikpora	
		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	348 Tenaga Kependidikan	Disdikpora	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	3.116 Pendidik	Disdikpora	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	1.060 Pendidik	Disdikpora	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	356 Kepala Sekolah	Disdikpora	
		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat Pendidikan dan Pelatihan calon kepala sekolah	48 Kepala Sekolah	Disdikpora	
		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	0 (Tidak ada data)	Disdikpora	
		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	2 Tenaga Penunjang	Disdikpora	
		Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	48 SD dan SMP	Disdikpora	
		Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	44.875 Peserta Didik	Disdikpora	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	20.797 Peserta Didik	Disdikpora	
		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	44.875 Peserta Didik	Disdikpora	
		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	20.797 Peserta Didik	Disdikpora	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	2.084 Kebutuhan	Disdikpora	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	1.200 Kebutuhan	Disdikpora	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	3.293 Pendidik	Disdikpora	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	1.198 Pendidik	Disdikpora	
		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	712 Kebutuhan	Disdikpora	
		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	240 Kebutuhan	Disdikpora	
		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	625 Tenaga Kependidikan	Disdikpora	
		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	348 Tenaga Kependidikan	Disdikpora	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	3.116 Pendidik	Disdikpora	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	1.060 Pendidik	Disdikpora	
		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	356 Kepala Sekolah	Disdikpora	
		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	48 Kepala Sekolah	Disdikpora	
		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	0 (Tidak ada data)	Disdikpora	
		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	2 Tenaga Penunjang	Disdikpora	
		Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	14 Satuan Pendidikan	Disdikpora	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima Perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	998 (Tidak ada data)	Disdikpora	
		Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	998 Peserta Didik	Disdikpora	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	312 Kebutuhan	Disdikpora	
		Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	312 Pendidik	Disdikpora	
		Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	195 Pendidik	Disdikpora	
		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	356 Kepala Sekolah	Disdikpora	
		Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	14 Kepala Sekolah	Disdikpora	
2	Kesehatan	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	3 RS	Diskes	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	3 RS	Diskes	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	306.378 logistik	Diskes	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	132 orang	Diskes	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	8.070 Logistik	Diskes	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	161 Orang	Diskes	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	14.772 Logistik	Diskes	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	205 Orang	Diskes	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	8.387 Logistik	Diskes	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	139 Orang	Diskes	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	614 Logistik	Diskes	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	262 Orang	Diskes	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	76 Unit Posbindu KIT	Diskes	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	36 Orang	Diskes	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	2.712 Logistik	Diskes	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	60 Orang	Diskes	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	76 Unit Posbindu KIT	Diskes	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	36 Orang	Diskes	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	76 Unit Posbindu KIT	Diskes	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	36 Orang	Diskes	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	24 Alat Fiksasi	Diskes	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	36 Orang	Diskes	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	17.533 Logistik	Diskes	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	80 Orang	Diskes	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1.987 Logistik	Diskes	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	83 Orang	Diskes	
3	Pekerjaan Umum	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/ kota (ha)	3.713,75 Ha	Dis PUPR	
		Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	50.554,06 m	Dis PUPR	
		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	3.984,44 Ha	Dis PUPR	
		Panjang pantai di kawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	31.250 m	Dis PUPR	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/ rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	0	Dis PUPR	
		Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	0	Dis PUPR	
		Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	Panjang bangunan pantai : 0 m Panjang bangunan sungai : 229,31 m	Dis PUPR	
		Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	3.713,75 Ha	Dis PUPR	
		Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	50.554,06 m	Dis PUPR	
		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	3.984,44 Ha	Dis PUPR	
		Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	31.250 m	Dis PUPR	
		Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/ rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	0	Dis PUPR	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	0	Dis PUPR	
		Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	Panjang bangunan pantai : 0 m Panjang bangunan sungai : 229,31 m	Dis PUPR	
		Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik (m) 243.948,65 m ----- x 100% = 79,10% Panjang jaringan irigasi primer (m) 308.415,00 m	Dis PUPR	
		Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik (m) 12.594,7 m ----- x 100% = 66,94% Panjang jaringan irigasi sekunder (m) 18.814,7 m	Dis PUPR	
		Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik (m) ----- x 100% = 0% Panjang jaringan irigasi tersier (m)	Dis PUPR	
		Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota	1 Dokumen (Perbup Karangasem Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (RI-SPAM) Kabupaten Karangasem Tahun 2014-2034)	Dis PUPR	
		Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota	Pemuktakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Karangasem	Dis PUPR	
		Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota Penyelenggaraan SPAM	1 BUMD (Perda Kabupaten Karangasem Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum)	Dis PUPR	
		Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	0/ (Tidak Ada)	Dis PUPR	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.	2 Dokumen Perjanjian Kerjasama	Dis PUPR	
		Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	123.861 Rumah (KK)	Dis PUPR	
		Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	3.407 Rumah	Dis PUPR	
		Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	127.268 Rumah (KK)	Dis PUPR	
		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	139 Rumah	Dis PUPR	
		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	139 Rumah	Dis PUPR	
		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	127.268 Rumah (KK)	Dis PUPR	
		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	$\frac{\text{Rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tanki septik}}{\text{Rumah di wilayah pengembangan SPALD dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun < 25 jiwa/ha}} \times 100\% = \frac{123.861 \text{ KK}}{141.281 \text{ KK}} \times 100\% = 87,67\%$	Dis PUPR	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	$\frac{\Sigma \text{ rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT}}{\Sigma \text{ rumah di wilayah pengembangan SPALDS dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun} > 25 \text{ jiwa/ha}} = \frac{139 \text{ KK}}{141.281 \text{ KK}} \times 100\% = 0,10\%$	Dis PUPR	
		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	$\frac{\Sigma \text{ rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD}}{\Sigma \text{ rumah di wilayah pengembangan SPALDT}} = \frac{3.407 \text{ KK}}{141.281 \text{ KK}} \times 100\% = 2,41\%$	Dis PUPR	
		Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	$\frac{\Sigma \text{ rumah yang memiliki akses unit pengolahan setempat}}{\Sigma \text{ jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S}} = \frac{123.861 \text{ KK}}{141.281 \text{ KK}} \times 100\% = 87,67\%$	Dis PUPR	
		Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	$\frac{\Sigma \text{ jumlah sarana pengangkutan yang tersedia}}{\Sigma \text{ jumlah sarana pengangkutan yang dibutuhkan kab/kota}} = \frac{3 \text{ Unit}}{3 \text{ Unit}} \times 100\% = 100\%$	Dis PUPR	
		Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	$\frac{\Sigma \text{ jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang tersedia}}{\Sigma \text{ jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang dibutuhkan kab/kota}} = \frac{1,4 \text{ m}^3/\text{hari}}{30 \text{ m}^3/\text{hari}} \times 100\% = 4,67\%$	Dis PUPR	
		Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	$\frac{\Sigma \text{ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah yang tersambung dengan IPALD}}{\Sigma \text{ jumlah rumah yang dilayani dengan SPALD-T pada kab/kota}} = \frac{3.407 \text{ KK}}{141.281 \text{ KK}} \times 100\% = 2,41\%$	Dis PUPR	
		Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	$\frac{\Sigma \text{ jumlah rumah yang tangki septiknya sudah disedot}}{\Sigma \text{ jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S}} = \frac{139 \text{ KK}}{141.281 \text{ KK}} \times 100\% = 0,10\%$	Dis PUPR	
		Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	$\frac{\Sigma \text{ Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi yang berlaku}}{\Sigma \text{ Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana)}} \times 100\% = 0\%$	Dis PUPR	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	2.316 IMB	Dis PUPR	
		Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	Perda Kabupaten Karangasem Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung	Dis PUPR	
		Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/ Gedung	Tidak Ada	Dis PUPR	
		Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	6 Buah Bagunan Gedung Bangunan Gedung yang ditetapkan Bupati untuk dilindungi dan dilestarikan : 1. Bale Gili Taman Soekasada Ujung 2. Bale Lunjuk Taman Soekasada Ujung 3. Bale Warak Taman Soekasada Ujung 4. Puri Gede Karangasem 5. Pura Dukuh Lumpadang 6. Bangunan Bale Kambang, Halaman Bertingkat, Kolam, Bangunan Bale Bunder dan Bangunan Bale Kapal Taman Soekasada Ujung	Dis PUPR	
		Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	0/(Tidak Ada)	Dis PUPR	
		Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	455	Dis PUPR	
		Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/ dirawat	455	Dis PUPR	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota	1.202,54 Km	Dis PUPR	
		Panjang jalan yang dibangun	5,492 Km	Dis PUPR	
		Panjang jembatan yang dibangun	55,800 m	Dis PUPR	
		Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	29,49 Km	Dis PUPR	
		Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	0/Tidak Ada	Dis PUPR	
		Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	29,49 Km	Dis PUPR	
		Panjang jembatan yang direhabilitasi	0/Tidak Ada	Dis PUPR	
		Panjang jalan yang dipelihara	198,010 Km	Dis PUPR	
		Panjang jembatan yang dipelihara	66,500 m	Dis PUPR	
		Jumlah Pelatihan Tenaga operator /teknisi / analis di wilayah Kabupaten/kota	1 Pelatihan	Dis PUPR	
		Jumlah tenaga kerja operator/teknisi /analis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	29 Orang	Dis PUPR	
		Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analis di wilayah kabupaten/kota	25 Orang	Dis PUPR	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	1 SISTEM (SIPIAKI)	Dis PUPR	
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	70 dari APBD	Dis PUPR	
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	10 dari DAK	Dis PUPR	
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	3 dari PKB	Dis PUPR	
		Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	124 Paket Pekerjaan	Dis PUPR	
		Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/ Kota	1 SISTEM (SIPIAKI)	Dis PUPR	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/ analis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.	482 orang	Dis PUPR	
		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/ analis	25 sertifikat	Dis PUPR	
		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/ analis di wilayah kab/kota	482 orang	Dis PUPR	
		Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/ kota	65 Badan Usaha	Dis PUPR	
		Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	1 (Lembar Kendali Persyaratan IUJK)	Dis PUPR	
		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk	1 Paket Konsultansi Pengawasan Bidang Bina Marga 2 Paket Konsultansi Pengawasan Bidang Sumber Daya Air 3 Paket Konsultansi Pengawasan Bidang Cipta Karya	Dis PUPR	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya			
		Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	1 Paket Pekerjaan Fisik Bidang Bina Marga 2 Paket Pekerjaan Fisik Bidang Sumber Daya Air 3 Paket Pekerjaan Fisik Bidang Cipta Karya	Dis PUPR	
		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak Ada/Tidak ditemukan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha 1 Paket Pekerjaan Fisik Bidang Bina Marga 2 Paket Pekerjaan Fisik Bidang Sumber Daya Air 3 Paket Pekerjaan Fisik Bidang Cipta Karya	Dis PUPR	
		Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	121 Badan Usaha	Dis PUPR	
		Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	289 Usaha	Dis PUPR	
		Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	65 Badan Usaha	Dis PUPR	
		Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	65 Badan Usaha	Dis PUPR	
		Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	22 Rekomendasi IUJK	Dis PUPR	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah pengawasan Terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	184 Paket Pekerjaan	Dis PUPR	
		Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	(Tidak Ada)	Dis PUPR	
		Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	(Tidak Ada)	Dis PUPR	
4	Perumahan Rakyat	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	331 Rumah	Dis Perkim	
		Jumlah rumah yang terkena bencana alam	331 Rumah	Dis Perkim	
		Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	331 Rumah/KK	Dis Perkim	
		Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	0/(Tidak Ada)	Dis Perkim	
		Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	0/(Tidak Ada)	Dis Perkim	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	0/(Tidak Ada)	Dis Perkim	
		Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	0/(Tidak Ada)	Dis Perkim	
		Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	Ada (331 KK/rumah)	Dis Perkim	
		Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	Ada 1 (Perjanjian Pinjam Pakai antara Pemrov Bali dengan Pemkab Karangasem Nomor 593/1552/UPT/P2.BPKAD tentang Pinjam Pakai Penguasaan Pemrov Bali yang terletak di Desa Rendang dan Desa Nongan Kec. Rendang Kab. Karangasem untuk Hunian Sementara Pengungsi, Perjanjian berlaku sampai 20 Maret 2023)	Dis Perkim	
		Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0/(Tidak Ada)	Dis Perkim	
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0/(Tidak Ada)	Dis Perkim	
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0/(Tidak Ada)	Dis Perkim	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0/(Tidak Ada)	Dis Perkim	
		Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0/(Tidak Ada)	Dis Perkim	
		Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	0/(Tidak Ada)	Dis Perkim	
		Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	12,41 Ha	Dis Perkim	
		Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	179 Unit	Dis Perkim	
		Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	0,86775 Ha	Dis Perkim	
		Jumlah rumah di kab/kota	114.781 Rumah	Dis Perkim	
		Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	179 Unit	Dis Perkim	
		Jumlah rumah tidak layak huni	10.859 Unit	Dis Perkim	
		Jumlah rumah yang tidak dihuni	0/(Tidak Ada)	Dis Perkim	
		Rasio rumah dan KK	$\frac{\text{Jumlah KK}}{\text{Jumlah total unit rumah}} = \frac{141.281}{114.781} = 123,52\%$	Dis Perkim	
		Jumlah rumah pembangunan baru	0/(Tidak Ada)	Dis Perkim	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	37 Perumahan	Dis Perkim	
		Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	113.853 Rumah	Dis Perkim	
		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	93 Rumah	Dis Perkim	
		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	127.268 Rumah	Dis Perkim	
		Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	0/(Tidak Ada)	Dis Perkim	
		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	0/(Tidak Ada)	Dis Perkim	
		Jumlah pengembang yang tersertifikasi	37 Pengembang	Dis Perkim	
		Jumlah pengembang yang teregistrasi	37 Pengembang	Dis Perkim	
		Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	37 Pengembang	Dis Perkim	
5	Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	Jumlah pengaduan yang ditangani = 70 -----x 100% = 100% Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk = 70	SatPol PP	
		Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	Satlinmas yang dikukuhkan = 2864 ----- x 100% = 100% Satlinmas yang terlatih = 2864	SatPol PP	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda / Perkada yang memuat Sanksi yang ditegakkan = 11 -----x 100% = 100% Jumlah keseluruhan Perda / Perkada yang memuat Sanksi = 11	SatPol PP	
		Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	Jumlah Polisi Pamong Praja yang Memiliki kualitas PPNS = 1 -----x 100% = 1,08% Jumlah Polisi Pamong Praja = 93	SatPol PP	
		Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	Ada	SatPol PP	
		Tersedianya sarana prasarana minimal	Ada	SatPol PP	
		Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	<i>Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun</i> -----x 100%= 0 <i>Jumlah satu dokumen KRB yang lengkap dan sudah disahkan</i>	BPBD	
		Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	<i>Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana</i> = 423.058 -----x 100%= 81,01 % <i>Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana</i> = 522.217	BPBD	
		Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	<i>Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun</i> -----x 100%= 0 <i>Jumlah satu dokumen RPB yang lengkap dan sudah disahkan</i>	BPBD	
		Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	<i>Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun</i> -----x 100%= 0 <i>Jumlah satu dokumen renkon yang lengkap dan sudah disahkan</i>	BPBD	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	<i>Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan</i> 82.529 -----x 100%= -----= 15,80% <i>Jumlah aparatur dengan warga negara di kawasan rawan bencana</i> 522.217	BPBD	
		Persentase warga negara yang ikut pelatihan	<i>Jumlah warga negara yang ikut pelatihan</i> 1.603 -----x 100%= -----= 0,31% <i>Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana</i> 522.217	BPBD	
		Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	<i>Jumlah warga negara yang mendapat layanan pusdalops</i> 522.217 -----x 100%= 100% <i>Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana</i> 522.217	BPBD	
		Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	<i>Jumlah warga negara yang mendapat layanan peralatan perlindungan</i> 207.949 -----x 100%= 39,82 % <i>Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana</i> 522.217	BPBD	
		Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	<i>Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB</i> -----x 100%= 0% <i>Jumlah seluruh penetapan status KLB</i>	BPBD	
		Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	<i>Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan darurat bencana</i> 1 -----x 100%= 100% <i>Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana</i> 1	BPBD	
		Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	<i>Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana</i> 84 -----x 100%= 100 % <i>Jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat bencana</i> 84	BPBD	
		Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	<i>Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi</i> 141 -----x 100%= 100 % <i>Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana</i> 141	BPBD	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	Jenis Layanan = 15 Layanan Jumlah Layanan = 93 Layanan	Dis Damkar	
		Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	Ada	Dis Damkar	
		Tersedianya aparaturnya selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	Ada	Dis Damkar	
		Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	Ada = 2 Pos	Dis Damkar	
		Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	Ada	Dis Damkar	
		Jumlah aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	Ada = 49 Orang	Dis Damkar	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	0	Dis Damkar	
		Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	0	Dis Damkar	
6	Sosial	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	0	Dis Sosial	
		Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	0	Dis Sosial	
		Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	0	Dis Sosial	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	611 Orang	Dis Sosial	
		Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	5 Unit Kendaraan	Dis Sosial	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	0	Dis Sosial	
		Jumlah rumah singgah/ shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	0	Dis Sosial	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	20 Orang	Dis Sosial	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	21 Orang	Dis Sosial	
		Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	0	Dis Sosial	
		Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia	0	Dis Sosial	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	0	Dis Sosial	
		Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah	0	Dis Sosial	
		Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	1 Peksos, 8 TKSK, 34 Yayasan, 78 Karangtaruna, 6 Orang Peksos LK3, dan 9 Pelopor Perdamaian.	Dis Sosial	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	0	Dis Sosial	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	7 Kasus	Dis Sosial	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	0	Dis Sosial	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	0	Dis Sosial	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	611 Orang	Dis Sosial	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	0	Dis Sosial	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	6 Orang	Dis Sosial	
		Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	124 Orang	Dis Sosial	
		Jumlah korban bencana yang menerima	0	Dis Sosial	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		paket sandang			
		Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	0	Dis Sosial	
		Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	0	Dis Sosial	
		Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	0	Dis Sosial	
		Jumlah pekerja sosial professional/ tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	54 Orang	Dis Sosial	
7	Tenaga Kerja	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.	Ada (Rencana Tata Kerja Kab. Karangasem Tahun 2018-2023)	Disnaker	
		Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	$\frac{\text{Realisasi indikator} - \text{target indikator}}{\text{Realisasi}} \times 100\% = \text{(Tidak ada)}$	Disnaker	
		Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota	(Tidak Ada)	Disnaker	
		Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	$\frac{\text{Jumlah penerapan program PBK kualifikasi KKNl atau okupasi pada tahun n}}{\text{keseluruhan program pelatihan baik kualifikasi kompetensi maupun klaster pada tahun n}} \times 100\% = 100\%$	Disnaker	
		Persentase instruktur Bersertifikat kompetensi	$\frac{\text{Jumlah instruktur bersertifikat kompetensi pada tahun n}}{\text{jumlah instruktur seluruhnya pada tahun n}} \times 100\% = 100\%$	Disnaker	
		Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	$\frac{\text{jumlah instruktur pada tahun n}}{\text{jumlah peserta pelatihan pada tahun n}} = 2,86\%$	Disnaker	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Persentase LPK yang terakreditasi	<i>Jumlah LPK yang terakreditasi pada tahun n</i> 8 ----- x100%= 40% <i>Jumlah seluruh LPK pada tahun n</i> 20	Disnaker	
		Persentase LPK yang memiliki perizinan	<i>Jumlah LPK yang memiliki perizinan pada tahun n</i> 20 ----- x100%= 100% <i>Jumlah LPK yang terdata pada tahun n</i> 20	Disnaker	
		Jumlah penganggur yang dilatih	384 Orang		
		Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	<i>Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat pelatihan pada tahun n</i> 384 ----- x100%= 100% <i>Jumlah orang yang dilatih pada tahun n</i> 384	Disnaker	
		Persentase penyerapan lulusan	<i>Jumlah lulusan yang bekerja pada tahun n</i> 207 ----- x100%= 53,90 % <i>Jumlah lulusan pada tahun n</i> 384	Disnaker	
		Lulusan bersertifikat kompetensi	<i>Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat kompetensi pada tahun n</i> 242 ----- x100%= 63,02% <i>Jumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun n</i> 384	Disnaker	
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	<i>ΣCPMI dilatih</i> 0 ----- x100%= 0% <i>ΣCPMI terdaftar</i> 537	Disnaker	
		Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	0/ (Tidak Ada)	Disnaker	
		Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	<i>Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas pada tahun n</i> 0 ----- x100%= 0% <i>Jumlah perusahaan pada tahun n</i>	Disnaker	
		Data tingkat produktivitas total	Pertumbuhan ekonomi dikurangi (pertumbuhan modal+pertumbuhan tenaga kerja). (Tidak Ada)	Disnaker	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	<i>Jumlah perusahaan yang telah memiliki PP pada tahun n</i> 28 ----- <i>Jumlah perusahaan yg memiliki tenaga kerja 10 orang atau lebih</i> 319 ----- x100%= 8,78%	Disnaker	
		Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	<i>Jumlah perusahaan yang telah memiliki PKB pada tahun n</i> 12 ----- <i>Jumlah perusahaan yang memiliki SP/SB</i> 19 ----- x100%= 63,16%	Disnaker	
		Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	19	Disnaker	
		Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	<i>Jumlah perusahaan yang sudah menyusun struktur dan skala upah</i> ----- x100%= (Tidak Ada) <i>jumlah perusahaan yang telah mengatur syarat kerja (yang diatur dalam PP atau PKB).</i>	Disnaker	
		Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	<i>Jumlah perusahaan yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan</i> 1.418 ----- <i>jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajib lapor</i> 3.892 ----- x100%= 36,43%	Disnaker	
		Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	<i>Jumlah perusahaan yang berselisih</i> 4 ----- <i>jumlah perusahaan pada tahun n</i> 3.892 ----- x100%= 0,077%	Disnaker	
		Jumlah mogok kerja	0	Disnaker	
		Jumlah penutupan perusahaan	24 Perusahaan	Disnaker	
		Jumlah perselisihan kepentingan	0	Disnaker	
		Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	0	Disnaker	
		Jumlah perselisihan PHK	40	Disnaker	
		Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	129	Disnaker	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah perselisihan yang Diselesaikan melalui Perundingan bipartite	0	Disnaker	
		Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	1	Disnaker	
		Persentase perselisihan Hubungan industrial yang Diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	$\frac{\text{Jumlah Perjanjian Bersama}}{\text{Jumlah kasus perselisihan}} = \frac{3}{4} \times 100\% = 75\%$	Disnaker	
		Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	22 Loker	Disnaker	
		Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	1.154 Pencaker	Disnaker	
		Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	5	Disnaker	
		Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	0	Disnaker	
		Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	0	Disnaker	
		Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	1	Disnaker	
		Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota	341	Disnaker	
		Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	929	Disnaker	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	$\frac{\Sigma CPMI/CTKI \text{ yang mendapatkan sosialisasi}}{\Sigma CPMI/CTKI} = \frac{231}{537} \times 100\% = 43,01\%$	Disnaker	
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	537	Disnaker	
		Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	$\frac{\Sigma \text{fasilitasi PMI yang dipulangkan}}{\Sigma \text{PMI yang pulang}} = \frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$	Disnaker	
		Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	$\frac{\Sigma \text{PMI/TKI yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja}}{\Sigma \text{PMI/TKI}} = \frac{0}{537} \times 100\% = 0\%$	Disnaker	
		Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	$\frac{\Sigma \text{PMI atau TKI purna dan keluarganya yang diberdayakan}}{\Sigma \text{PMI/TKI purna dan keluarganya}} \times 100\% = 0$	Disnaker	
		Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	$\frac{\Sigma \text{LTSA yang terbentuk}}{\text{jumlah daerah kantong PMI/TKI}} \times 100\% = 0$	Disnaker	
8	Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/ kota yang telah dilatih PUG	Jumlah Perangkat Desa yang terlatih sebanyak 26 Orang	Dis P3A	
		Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	(Tidak ada Kegiatan)	Dis P3A	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	1 WEB (dpppa.karangasembkab.go.id)	Dis P3A	
		Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	1 Lembaga (DPPA Kabupaten Karangasem), SOP	Dis P3A	
		Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	$\frac{\text{Jumlah korban kekerasan anak yang dilayani}}{\text{Jumlah korban kekerasan anak di tingkat provinsi}} \times 100\% = \frac{14}{14} \times 100\% = 100\%$	Dis P3A	
		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	4 Desa (SK Penetapan Peserta Pelatihan Aktivitas Perlindungan Anak Terpadu)	Dis P3A	
		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	(Tidak ada Kegiatan)	Dis P3A	
		Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	Jumlah Perempuan yang mendapatkan pembinaan dalam mengembangkan ekonomi keluarga sebanyak 240 Orang	Dis P3A	
		Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	(Tidak ada Kegiatan)	Dis P3A	
		Jumlah lembaga layanan Pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	(Tidak ada Kegiatan)	Dis P3A	
		Jumlah lembaga layanan Pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	(Tidak ada Kegiatan)	Dis P3A	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	1 Program (SK TPPO)	Dis P3A	
		Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi	1 Lembaga (DPPPA Kabupaten Karangasem), SOP	Dis P3A	
		Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	$\frac{\text{jumlah korban kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan}}{\text{jumlah korban kekerasan terhadap perempuan}} = \frac{15}{15} \times 100\% = 100\%$	Dis P3A	
9	Pangan	Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	10 Gubang Cadangan Pangan	Dis Pangan	
		Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Sesuai hasil pemantauan ketersediaan pangan utama (Surplus)	Dis Pangan	
		Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	(Tidak ada)	Dis Pangan	
		Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Pembinaan pada 25 KWT	Dis Pangan	
		Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Tersusunnya peta FSVA (Food Security and Vinerability Atlas)	Dis Pangan	
		Tertanganinya kerawanan pangan	Pembinaan pada kelompok kawasan mandiri pangan	Dis Pangan	
		Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Perda Nomor 2 Tahun 2020	Dis Pangan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Melalui uji lab (100%)	Dis Pangan	
10	Pertanahan	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	<i>Jumlah izin lokasi yang diterbitkan+ jumlah surat penolakan permohonan izin lokasi setelah melalui proses (ditolak seluruhnya)</i> 33 -----x100%= 71,74 % <i>Jumlah permohonan izin lokasi dalam 1 tahun</i> 46	Dis PUPR	
		SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	<i>Jumlah penerbitan SK Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari tanah kelebihan maksimum absentee</i> -----x100%= 0 <i>Jumlah permohonan yang diusulkan Panitia Pertimbangan Landreform</i>	Dis PUPR	
		SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee	<i>Jumlah luas tanah yang telah dibayarkan ganti rugi kepada bekas pemilik tanah kelebihan maksimum/absentee</i> -----x100%= 0 <i>Jumlah luas tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah obyek landreform yang berasal dari tanah kelebihan maksimum absentee dan daftar subyek</i>	Dis PUPR	
		Dokumen Izin membuka tanah	<i>Jumlah dokumen izin membuka tanah yang disetujui+jumlah Izin Membuka Tanah yang ditolak</i> -----x100%= 0 <i>Jumlah dokumen izin membuka tanah yang dimohon dalam 1 tahun</i>	Dis PUPR	
		Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik</i> -----x100%= 0 <i>Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik yang direncanakan dalam 1 tahun</i>	Dis PUPR	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
11	Lingkungan Hidup	Hasil perhitungan kabupaten terhadap : a. Indeks kualitas air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) b. Indeks tutupan hutan (ITH) c. Indeks Tutupan Hutan (ITH)	Indeks Kualitas Air (IKA) Karangasem = 50 Indek Kualitas Udara (IKU) Karangasem = 24,25 Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Karangasem = 47,46 TH = Tutupan Hutan	Dis LH	
		Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	1. Tersedianya informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbulan sampah = 28 ANGKUTAN DAN 3 ALAT BERAT PENGELOLA SAMPAH 2. Tersedianya informasi terkait kapasitas TPA terhadap volume timbulan sampah = 2 TPA DENGAN VOLUME 120 M2 DAN 19M2 3. Tersedianya informasi terkait jumlah TPST dibagi jumlah sampah pada masing2 lingkungan = 16 TPST/TPS3R	Dis LH	
		Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	<i>Izin lingkungan,izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota</i> 39 -----x100%=100% <i>jumlah usulan permohonan yang teregstrasi</i> 39	Dis LH	
		Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	<i>jumlah PPLHD yang ada</i> 0 -----x100%= ---x100% = 0% <i>jumlah kegiatan dan atau usaha yang izin lingkungan,izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota</i> 25	Dis LH	
		Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota	<i>jmlh MHA yg diakui</i> 190 -----x100%= ---x100%= 100% <i>jmlh usulan MHA</i> 190	Dis LH	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	$\frac{\text{jmlh MHA yg mendapatkan pelatihan}}{\text{jmlh MHA yg ada}} \times 100\% = \frac{47}{190} \times 100\% = 52,22\%$	Dis LH	
		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	$\frac{\text{jmlh lembaga kemasyarakatan yg diberikan diklat/rencana}}{\text{target lembaga kemasyarakatan yg akan diberikan diklat}} \times 100\% = 0$	Dis LH	
		Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani	$\frac{\text{Pengaduan masyarakat yg ditangani}}{\text{total jumlah pengaduan masyarakat yang teregristrasi}} \times 100\% = \frac{5}{5} \times 100\% = 100\%$	Dis LH	
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penerbitan akta perkawinan	$\frac{\text{Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan}}{\text{Peristiwa perkawinan yang dilaporkan}} \times 100\% = \frac{3.982}{3.982} \times 100\% = 100\%$	Dis Dukcapil	
		Penerbitan akta perceraian	$\frac{\text{Jumlah akta perceraian yang diterbitkan}}{\text{Peristiwa perceraian yang dilaporkan}} \times 100\% = \frac{195}{195} \times 100\% = 100\%$	Dis Dukcapil	
		Penerbitan akta kematian	$\frac{\text{Jumlah akta kematian yang diterbitkan}}{\text{Peristiwa kematian yang dilaporkan}} \times 100\% = \frac{4.195}{4.195} \times 100\% = 100\%$	Dis Dukcapil	
		Penyajian data kependudukan	$\frac{\text{Jumlah penyajian data kependudukan skala kabupaten kota dalam satu tahun}}{\text{2 tahun}} \times 100\% = \frac{63}{116} \times 100\% = 54,31\%$	Dis Dukcapil	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	0 Desa	Dis PMD	
		Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	0 Desa	Dis PMD	
		Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	0 Desa	Dis PMD	
		Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	0 Desa	Dis PMD	
		Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	0 Desa	Dis PMD	
		Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	0 Desa	Dis PMD	
		Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	6 Desa	Dis PMD	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	2 Desa	Dis PMD	
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	Tersedia (GDPK) Kabupaten Karangasem Tahun 2018	Dis PPKB	
		Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	20,0 (berdasarkan indikator biren Susenas 2019)	Dis PPKB	
		Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	$ASFR_i = \frac{b_i}{p_i} \times k = 38,59$ per 1.000 (berdasarkan indikator biren Susenas 2019)	Dis PPKB	
		Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (advokasi dan KIE)}}{\text{jumlah sasaran masyarakat program KKBPK (advokasi dan KIE)}} \times 100\% = 100\%$	Dis PPKB	
		Jumlah stakeholders/ Pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	18 Perangkat Daerah (sesuai SK Bupati No 94/HK/2019)	Dis PPKB	
		Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	$\frac{\text{Jumlah faskes yang siap melayani KB MKJP}}{\text{Jumlah faskes}} \times 100\% = 100\%$	Dis PPKB	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Persentase Peserta KB Aktif (PA)Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	$\frac{\text{Jumlah Peserta KB Aktif}}{\text{Jumlah PUS}} = \frac{76.406}{89.103} \times 100\% = 85,75\%$	Dis PPKB	
		Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	8 Kampung KB	Dis PPKB	
		Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	$\frac{\text{jumlah peserta KB pasca persalinan menurut metode kontrasepsi cara modern}}{\text{jumlah sasaran peserta KB pasca persalinan}} = \frac{1.065}{1.439} \times 100\% = 74\%$	Dis PPKB	
		Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	$\frac{2.050+686}{2.526+787} = 82,58\%$	Dis PPKB	
		Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	$\frac{\text{jumlah peserta KB pada Keluarga Penerima PBI}}{\text{jumlah Keluarga PBI}} = \frac{3.879}{3.879} \times 100\% = 100\%$	Dis PPKB	
15	Perhubungan	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	$\frac{\text{Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C yang tersedia}}{\text{Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan jalan}} = \frac{11}{15} \times 100\% = 73,33\%$	Dishub	
		Terlaksananya pelayanan uji berkala	$\frac{\text{Jumlah kendaraan yang diuji per tahun}}{\text{jumlah kendaraan wajib uji}} = \frac{4.308}{6.452} \times 100\% = 66,77\%$	Dishub	
		Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	$\frac{\text{Jumlah penetapan tarif lintas penyeberangan}}{\text{jumlah lintas penyeberangan dalam Kabupaten atau Kota}} = \frac{10}{18} \times 100\% = 55,56\%$	Dishub	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	<i>Jumlah pemasangan perlengkapan jalan Kabupaten/Kota</i> 1.507 -----x100%=12,53 % <i>Target kebutuhan perlengkapan jalan Kabupaten/Kota</i> 12.030	Dishub	
		Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah pemasangan perlengkapan jalan Kabupaten atau Kota</i> 1.507 -----x100%=12,53 % <i>Target kebutuhan perlengkapan Jalan Kabupaten atau Kota</i> 12.030	Dishub	
16	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	<i>Jumlah perangkat daerah yang saling terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo</i> 53 -----x100%= 100% <i>Jumlah Perangkat Daerah</i> 53	Diskominfo	
		Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	<i>Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan dinas kominfo</i> 53 -----x100%= 100% <i>Jumlah Perangkat Daerah</i> 53	Diskominfo	
		Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	Website, Repeater, Videotron	Diskominfo	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015	<p><i>Jumlah kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015</i></p> <p>41 -----x100%= 77,36 %</p> <p><i>Jumlah Kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah</i></p> <p>53</p>	Diskominfo	
		Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	<p><i>Jumlah perangkat daerah yang memiliki portaldan situs web yang sesuai standar</i></p> <p>41 -----x100%= 77,36%</p> <p><i>Jumlah Perangkat Daerah</i></p> <p>53</p>	Diskominfo	
		Persentase perangkat daerah yang Mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	<p><i>Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan</i></p> <p>53 -----x100%= 100%</p> <p><i>Jumlah Perangkat Daerah</i></p> <p>53</p>	Diskominfo	
		Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	<p><i>Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik</i></p> <p>-----x100%= 0%</p> <p><i>Jumlah layanan</i></p>	Diskominfo	
		Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	<p><i>Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik</i></p> <p>-----x100%= 0%</p> <p><i>Jumlah layanan</i></p>	Diskominfo	
		Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	<p><i>Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</i></p> <p>-----x100%= 0%</p> <p><i>Jumlah sistem elektronik</i></p>	Diskominfo	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	<i>Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah</i> -----x100%= 0 % <i>Jumlah layanan publik dan layanan administrasi</i>	Diskominfo	
		Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	<i>Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah</i> 50 -----x100%= 94,34% <i>Jumlah perangkat daerah</i> 53	Diskominfo	
		Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	<i>Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat</i> 31 -----x100%= 58,49% <i>Jumlah perangkat daerah</i> 53	Diskominfo	
		Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	<i>Jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis datanya</i> 41 -----x100%= 77,36% <i>Jumlah perangkat daerah</i> 53	Diskominfo	
		Persentase data yang dapat berbagi pakai	<i>Jumlah data yang dapat berbagi pakai</i> -----x100%= 0% <i>Jumlah data yang dimiliki pemerintah daerah</i>	Diskominfo	
		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	<i>Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city</i> 40 -----x100%= 75,47% <i>Jumlah perangkat daerah</i> 53	Diskominfo	
		Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	<i>Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan dinas kominfo</i> 2 -----x100%= 100% <i>Jumlah ASN Pengelola TIK</i> 2	Diskominfo	
		Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi egovernment	Perbup Karangasem Nomor 44 Tahun 2015	Diskominfo	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	<p><i>Σ komunitas masyarakat atau mitra strategis Pemerintah Daerah Provinsi yang telah menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah</i> 78</p> <p>-----x100% = 100%</p> <p><i>Σ komunitas masyarakat atau Mitra Komunikasi Pemerintah Daerah Provinsi</i> 78</p>	Diskominfo	
		Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	<p><i>Σ konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)</i> 100</p> <p>-----x100% = 100%</p> <p><i>Σ konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Provinsi)</i> 100</p>	Diskominfo	Di informasikan di web. Pemkab krsm
		Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	<p><i>Σ Diseminasi dan layanan Informasi Publik yang dilaksanakan sesuai dengan Strategi Komunikasi (STRAKOM) dan SOP</i> 9</p> <p>-----x100% = 90%</p> <p><i>Σ Diseminasi dan layanan Informasi Publik</i> 10</p>	Diskominfo	
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	<p><i>Jumlah penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi pada tahun yang dilaporkan</i> 59</p> <p>-----x100%=35,11%</p> <p><i>Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang belum mempunyai izin usaha simpan pinjam</i> 168</p>	Diskoperasi	
		Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	<p><i>Jumlah penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan</i> 0</p> <p>-----x100%= 0</p> <p><i>Jumlah permohonan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan</i></p>	Diskoperasi	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	<i>Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi</i> 7 -----x100%= 3,08 % <i>Jumlah koperasi yang ada</i> 227	Diskoperasi	
		Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	<i>Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya</i> 52 -----x100%= 22,91% <i>Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang ada</i> 227	Diskoperasi	
		Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	<i>Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan</i> 66 -----x100%= 29,07% <i>Jumlah koperasi yang ada</i> 227	Diskoperasi	
		Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	<i>Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian</i> 0 -----x100%=0% <i>Jumlah anggota koperasi yang ada</i> 0	Diskoperasi	
		Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	<i>Jumlah koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan</i> 0 -----x100%=0% <i>Jumlah koperasi yang ada</i> 227	Diskoperasi	
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan	0	Diskoperasi	
		Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah	<i>Jumlah koperasi yang telah diterbitkan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK)</i> 201 -----x100%=88,55% <i>Jumlah koperasi yang ada</i> 227	Diskoperasi	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		kabupaten/kota			
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	<i>Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan</i> = 0 <i>Jumlah koperasi yang ada</i> = 227 $\frac{0}{227} \times 100\% = 0\%$	Diskoperasi	
		Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	<i>Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran</i> = 0 <i>Jumlah koperasi yang ada</i> = 227 $\frac{0}{227} \times 100\% = 0\%$	Diskoperasi	
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	<i>Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha</i> = 8 <i>Jumlah koperasi yang ada</i> = 227 $\frac{8}{227} \times 100\% = 22,94\%$	Diskoperasi	
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	<i>Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan</i> = 0 <i>Jumlah koperasi yang ada</i> = 227 $\frac{0}{227} \times 100\% = 0\%$	Diskoperasi	
		Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	<i>Jumlah pertumbuhan wirausaha baru</i> = 415 <i>Jumlah wirausaha yang ada</i> = 50.717 $\frac{415}{50.717} \times 100\% = 0,82\%$	Diskoperasi	
		Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	<i>Jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem data online (ODS)</i> = 4.213 <i>Jumlah usaha mikro yang ada</i> = 50.717 $\frac{4.213}{50.717} \times 100\% = 8,31\%$	Diskoperasi	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	<i>Jumlah usaha mikro yang bermitra</i> 16.744 -----x100%= 33,01% <i>Jumlah usaha mikro yang ada</i> 50.717	Diskoperasi	
		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	<i>Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi</i> 16.549 -----x100%= 98,84% <i>Jumlah usaha mikro yang belum memiliki standar dan sertifikasi produk</i> 16.744	Diskoperasi	
		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	<i>Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran</i> 179 -----x100%= 55,87% <i>Jumlah usaha mikro yang belum mendapatkan dukungan pemasaran</i> 242	Diskoperasi	
		Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	<i>Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan</i> 50 -----x100%= 0,10% <i>Jumlah usaha mikro yang ada</i> 50.717	Diskoperasi	
		Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui Lembaga pendampingan	<i>Jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha</i> 195 -----x100%= 0,38% <i>Jumlah usaha mikro yang ada</i> 50.717	Diskoperasi	
18	Penanaman Modal	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	(Tidak Ada)	DPMPPTSP	
		Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	(Tidak Ada)	DPMPPTSP	
		Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	(Tidak Ada)	DPMPPTSP	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	7 Kali	DPMPTSP	
		Kegiatan pameran penanaman modal	(Tidak Ada)	DPMPTSP	
		Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	1 Kali Pertemuan	DPMPTSP	
		Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	49 Orang	DPMPTSP	
		Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	2.542 Buah Izin	DPMPTSP	
		Laporan realisasi penanaman modal	Rp. 192.011.049.006	DPMPTSP	
		Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	17 Orang	DPMPTSP	
		Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	65 Perusahaan	DPMPTSP	
		Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi kabupaten/kota	7/7 = 100%	DPMPTSP	
19	Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	33 Orang	Disdikpora	
		Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	0 (Tidak ada)	Disdikpora	
		Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	21 orang	Disdikpora	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	0 (Tidak ada)	Disdikpora	
		Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	40 Orang	Disdikpora	
		Jumlah penyelenggaraan event Olah Raga prestasi tingkat daerah	0 (Tidak ada)	Disdikpora	
20	Statistik	Tersedianya buku profil daerah	Ada (Buku Karangasem Membangun)	Diskominfo	
		Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	(Tidak Ada)	Diskominfo	
		Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	(Tidak Ada)	Diskominfo	
		Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	(Tidak Ada)	Diskominfo	
		Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	(Tidak Ada)	Diskominfo	
		Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	$\frac{\text{Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral}}{\text{Jumlah kegiatan statistik sektoral}} \times 100\% = \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	Diskominfo	
		Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	$\frac{\text{Jumlah metadata indikator statistik sektoral}}{\text{jumlah indikator statistik sektoral}} \times 100\% = 0\%$	Diskominfo	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
21	Persandian	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	$\frac{\text{Jumlah kegiatan strategis teramankan}}{\text{Jumlah kegiatan strategis yang ada}} \times 100\% = 0$	Diskominfo	
		Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsipprinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	$\frac{\text{Jumlah SE yang menerapkan SMKI dan diamankan sertifikat elektronik}}{\text{Jumlah SE yang ada}} \times 100\% = 0$	Diskominfo	
		Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	$\frac{\text{Jumlah SE atau aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah}}{\text{Jumlah SE yang ada}} \times 100\% = 0$	Diskominfo	
		Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	$\frac{\text{Jumlah titik teramankan}}{\text{Jumlah titik pada PHKS}} \times 100\% = 0$	Diskominfo	
22	Kebudayaan	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	Ada 6 obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi	Disbud	
		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan ,pengkajian,penayaan keberagaman	Pengkajian sebanyak 1 Objek Pemajuan Kebudayaan	Disbud	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	15 Obyek Pemajuan Kebudayaan	Disbud	
		Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	138 Orang	Disbud	
		Register cagar budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	26 Cagar Budaya	Disbud	
		Perlindungan cagar budaya kabupaten/kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	(tidak ada)	Disbud	
		Layanan perijinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	(tidak ada)	Disbud	
		Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	(tidak ada)	Disbud	
		Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	3 Situs Cagar Budaya	Disbud	
		Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	(tidak ada)	Disbud	
		Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan	(tidak ada)	Disbud	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	<i>Jumlah kunjungan pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan baik secara online maupun onsite</i> 741 ----- x100%= 0,14% <i>Jumlah penduduk di wilayahnya</i> 522.217	Dis Pustaka Arsip	
		Rasio ketercukupan tenaga Perpustakaan dengan penduduk	<i>Ketersediaan tenaga perpustakaan di berbagai perpustakaan di wilayahnya</i> 509 ----- x100%= 0,097% <i>Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)</i> 522.217	Dis Pustaka Arsip	
		Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	<i>Jumlah perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan</i> 509 ----- x100%= 0,097% <i>Jumlah perpustakaan dari berbagai jenis yang terdapat di wilayahnya</i> 522.217	Dis Pustaka Arsip	
		Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	100 Orang		
		Jumlah naskah kuno yang diakuisisi /dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	(Tidak Ada)	Dis Pustaka Arsip	
		Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	54 Naskah	Dis Pustaka Arsip	
		Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	375 Item	Dis Pustaka Arsip	
24	Kearsipan	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	<i>Jumlah arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip</i> 149 ----- x100%= 100% <i>Jumlah seluruh arsip aktif</i> 149	Dis Pustaka Arsip	
		Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	<i>Jumlah arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip</i> 1.034 ----- x100%= 100% <i>Jumlah seluruh arsip inaktif</i> 1.034	Dis Pustaka Arsip	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	<i>Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik</i> 0 ----- -----x100%=0% <i>Jumlah seluruh arsip statis</i> 0	Dis Pustaka Arsip	
		Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	<i>Jumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN</i> 95 ----- -----x100%=100% <i>Jumlah seluruh arsip dinamis dan arsip statis pemerintahan provinsi</i> 95	Dis Pustaka Arsip	
		Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	(Tidak Ada)	Dis Pustaka Arsip	
		Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	(Tidak Ada)	Dis Pustaka Arsip	
		Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/Kelurahan yang sesuai NSPK di provinsi	(Tidak Ada)	Dis Pustaka Arsip	
		Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota yang sesuai NSPK	(Tidak Ada)	Dis Pustaka Arsip	
		Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	(Tidak Ada)	Dis Pustaka Arsip	
		Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK	(Tidak Ada)	Dis Pustaka Arsip	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
25	Kelautan dan Perikanan	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	(Tidak ada data)	Dis Perikanan	
		Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	$\frac{\text{Jumlah TPI yang operasional}}{\text{Jumlah seluruh TPI yang ada di wilayah Kabupaten Kota}} \times 100\% = 0$	Dis Perikanan	
		Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	10 Ijin Usaha Perikanan	Dis Perikanan	
		Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan Pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/ Penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/ dan penguatan kelembagaan)	10 Kelompok Pembudidaya Ikan	Dis Perikanan	
		Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	586.000 benih budidaya ikan	Dis Perikanan	
26	Pariwisata	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	77 DTW	Dispar	
		Jumlah kelengkapan Infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	6 DTW	Dispar	
		Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/ kota	33 TUDP	Dispar	
		Jumlah wisatawan Mancanegara per kebangsaan	1.032 Wisatawan	Dispar	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	1 Kali	Dispar	
		Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten/kota	0 (Tidak event yang diikuti)	Dispar	
		Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	0 Industri Pariwisata	Dispar	
		Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	<i>Jumlah tenaga kerja pariwisata tersertifikasi</i> 0 -----x100%= 0% <i>Jumlah tenaga kerja pariwisata</i> 0	Dispar	
		Persentase SDM peserta Pembekalan sektor kepariwisataan	<i>Jumlah peserta pembekalan sektor kepariwisataan</i> 120 -----x100%=100% <i>Jumlah sasaran pembekalan sektor kepariwisataan</i> 120	Dispar	
		Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	1 Lokasi	Dispar	
27	Pertanian	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	1. Jumlah Sarana Pertanian = 16 Jenis Sarana yang diberikan 2. Jumlah Prasarana Pertanian = 62 Jenis Prasarana yang diberikan	Dis Pertanian	
		Prasaran pertanian yang digunakan	Semua Prasarana 62 Jenis yang disalurkan oleh Dinas Pertanian digunakan oleh petani	Dis Pertanian	
		Penerbitan izin usaha pertanian	(Tidak Ada)	Dis Pertanian	
		Persentase prasarana yang digunakan	<i>Jumlah prasarana yang aktif digunakan</i> 62 -----x100%= 100% <i>Jumlah prasarana yang dibangun</i> 62	Dis Pertanian	
		Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kab/kota	<i>Jumlah usulan yang difasilitasi</i> -----x100%= 0 <i>Jumlah usulan usaha pertanian</i>	Dis Pertanian	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Persentase fasilitasi Penanggulangan bencana	$\frac{\text{Jumlah area yang dapat ditanggulangi}}{\text{Luas area terkena bencana}} \times 100\% = \frac{1.032}{1.082} \times 100\% = 95,38\%$	Dis Pertanian	
28	Kehutanan	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	O/ Tidak Ada	DLH	
		Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	O/ Tidak Ada	DLH	
		Pemulihan ekosistem pada Tahura	O/ Tidak Ada	DLH	
		Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	O/ Tidak Ada	DLH	
29	Energi dan Sumber Daya Mineral	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	O/ Tidak Ada	Bag. Ekonomi	
30	Perdagangan	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : a. Pusat perbelanjaan b. Toko swalayan	$\frac{\text{Jumlah izin pusat perbelanjaan yang diterbitkan } \leq 5 \text{ hari kerja}}{\text{Jumlah permohonan izin pusat perbelanjaan yang dokumennya sudah lengkap dan benar}} \times 100\% = 0\%$ $\frac{\text{Jumlah izin toko swalayan yang diterbitkan } \leq 5 \text{ hari kerja}}{\text{Jumlah permohonan izin toko swalayan yang dokumennya sudah lengkap dan benar}} \times 100\% = 0\%$	Disperindag	
		Persentase penerbitan TDG	$\frac{\text{Jumlah penerbitan TDG } \leq 5 \text{ hari kerja}}{\text{Jumlah permohonan penerbitan TDG}} \times 100\% = \frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$	Disperindag	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG	<p><i>Jumlah penerbitan TDG</i> 0 -----x100%=0%</p> <p><i>Jumlah gudang yang ada di Kab Kota</i> 0</p>	Disperindag	
		<p>Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :</p> <p>a) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri</p> <p>b) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri</p> <p>c) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri</p>	<p><i>Jumlah STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar</i> -----x100%= 0%</p> <p><i>Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri</i></p> <p><i>Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar</i> -----x100%= 0%</p> <p><i>Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri</i></p> <p><i>Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba luar negeri yang terbit ≤2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar</i> -----x100%= 0%</p> <p><i>Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri</i></p>	Disperindag	
		Persentase pemeriksaan Fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kab/Kota	<p><i>Jumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah Kab Kota</i> -----x100%= 0%</p> <p><i>Jumlah permohonan SIUP Bahan Berbahaya bagi Pengecer</i></p>	Disperindag	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	<p><i>Jumlah SKA yang terbit ≤1 hari kerja (1 x 24 jam)</i> $\frac{\text{Jumlah permohonan penerbitan SKA yang dokumennya telah diterima dengan lengkap dan benar}}{\text{Jumlah SKA yang terbit}} \times 100\% = 0\%$</p>	Disperindag	
		Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana Distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	$K = (a + b) \times 100\% = (0,5+0,5) \times 100\% = 100\%$	Disperindag	
		Persentase koefisien variasi harga antar waktu	8,23	Disperindag	
		Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	158.343,30 Ton	Dis Pertanian	
		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	<p><i>Jumlah total UTTP yang ditera dan ditera ulang pada tahun berjalan</i> 427 $\frac{427}{\text{Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah Kab Kota}} \times 100\% = 4,90\%$</p>	Disperindag	
		Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	<p><i>Jumlah sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan sesuai ketentuan yang berlaku</i> $\frac{\text{Total sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan}}{\text{Total sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan}} \times 100\% = 0\%$</p>	Disperindag	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
31	Perindustrian	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah realisasi izin yang diterbitkan}}{\text{Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk}} \times 100\% = 0\%$	Disperindag	
		Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkan menjadi PERDA	0%	Disperindag	
		Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	$\frac{\text{Jumlah realisasi izin yang diterbitkan}}{\text{Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk}} = \frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$	Disperindag	
		Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	$\frac{\text{Jumlah realisasi izin yang diterbitkan}}{\text{Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk}} \times 100\% = 0\%$	Disperindag	
		Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kab Kota di SIINas}}{\text{Total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kab Kota}} \times 100\% = \frac{7}{12.729} \times 100\% = 0,051\%$	Disperindag	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
32	Transmigrasi	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	0	Disnaker	
		Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	0	Disnaker	
		Jumlah satuan pemukiman yang dibina	0	Disnaker	

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	$\frac{\text{jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD } 4.296}{\text{jumlah anak usia 5-6 tahun pada provinsi yang bersangkutan } 12.428} \times 100\% = 34,57\%$	Disdikpora	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	$\frac{\text{jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar } 40.084}{\text{jumlah anak usia 7-12 tahun pada provinsi yang bersangkutan } 40.504} \times 100\% = 98,96\%$	Disdikpora	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan	$\frac{\text{jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama } 16.669}{\text{jumlah anak usia 13-15 tahun pada provinsi yang bersangkutan } 20.197} \times 100\% = 82,53\%$	Disdikpora	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar	$\frac{\text{jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan } 871}{\text{jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada provinsi yang bersangkutan } 82.596} \times 100\% = 1,05\%$	Disdikpora	
2	Kesehatan	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	$\frac{\text{jumlah daya tampung rumah sakit rujukan } 380}{\text{jumlah penduduk di kabupaten/kota } 522.217} \times 100\% = 0,073\%$	Diskes	
		Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/ kota yang terakreditasi	$\frac{\text{jumlah RS Rujukan yang terakreditasi } 3}{\text{jumlah RS di kabupaten/kota } 3} \times 100\% = 100\%$	Diskes	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	<i>Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan</i> 6.204 -----x100%= 89,72 % <i>Jumlah ibu hamil di kabupaten/kota</i> 6.915	Diskes	
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	<i>Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan</i> 6.716 -----x100%= 104,11% <i>Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota</i> 6.451	Diskes	
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	<i>Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar</i> 6.531 -----x100%= 107,28% <i>Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota</i> 6.088	Diskes	
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	<i>Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar</i> 22.853 -----x100%= 93,62% <i>Jumlah balita di kabupaten/kota</i> 24.411	Diskes	
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai	<i>Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar</i> 57.006 -----x100%= 92,28% <i>Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota</i> 61.773	Diskes	
		Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	<i>Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar</i> 211.918 -----x100%= 83,70% <i>Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota</i> 253.300	Diskes	
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai	<i>Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar</i> 44.055 -----x100%= 64,34% <i>Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas di kabupaten/kota</i> 68.468	Diskes	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	<p><i>Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i> 51.993</p> <p>-----x100%= 59,91%</p> <p><i>Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota</i> 86.791</p>	Diskes	
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	<p><i>Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i> 4.044</p> <p>-----x100%= 91,35%</p> <p><i>Jumlah penderita DM di kabupaten/kota</i> 4.427</p>	Diskes	
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	<p><i>Jumlah penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i> 1.140</p> <p>-----x100%= 90,80%</p> <p><i>Jumlah penderita ODGJ di kabupaten/kota</i> 1.255</p>	Diskes	
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	<p><i>Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i> 895</p> <p>-----x100%= 31,20%</p> <p><i>Jumlah penderita TBC di kabupaten/kota</i> 2.865</p>	Diskes	
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	<p><i>Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar</i> 5.960</p> <p>-----x100%= 77,40%</p> <p><i>Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota</i> 7.669</p>	Diskes	
3	Pekerjaan Umum	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur	<p><i>Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha)</i> 258,11 Ha</p> <p>-----x100%=6,95%</p> <p><i>Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha)</i> 3.713,75 Ha</p>	Dis PUPR	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	<i>Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (m)</i> 116.300 ----- $\times 100\% = 0,29\%$ <i>Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan kabupaten/kota (m)</i> 39.844.390	Dis PUPR	
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	<i>Luas irigasi kewenangan kab kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara (ha)</i> 2,15 Ha ----- $\times 100\% = 0,15\%$ <i>luas daerah irigasi kewenangan kabupaten kota</i> 1.403,83 Ha	Dis PUPR	
		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	<i>Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota</i> 455,413 Jiwa ----- $\times 100\% = 96,52\%$ <i>Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut</i> 471.820 Jiwa	Dis PUPR	
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	<i>Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD</i> 127.268 ----- $\times 100\% = 90,08\%$ <i>Jumlah rumah di Kabupaten Kota</i> 141.281 KK	Dis PUPR	
		Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	<i>Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya</i> 2.316 ----- $\times 100\% = 100\%$ <i>Jumlah IMB yang berlaku</i> 2.316	Dis PUPR	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	<i>Panjang jalan kewenangan provinsi yang mantap</i> 852,27 Km ----- <i>Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten/kota</i> 1.202,54 Km ----- -----x100%= 70,87%	Dis PUPR	
		Rasio tenaga operator/teknisi/ analis yang memiliki sertifikat kompetensi	<i>Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analis</i> 25 ----- <i>Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analis di wilayah Kabupaten/Kota</i> 30 ----- -----x100%= 83,33%	Dis PUPR	
		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	<i>Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi</i> 95 ----- <i>Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya</i> 95 ----- -----x100%= 100%	Dis PUPR	
4	Perumahan Rakyat	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	<i>Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n</i> 331 ----- <i>Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n</i> 331 ----- -----x100%= 100%	Dis Perkim	
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	<i>Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni</i> 179 ----- <i>Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan</i> 179 ----- -----x100%= 100%	Dis Perkim	
		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	<i>Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)</i> 8,6775 ha ----- <i>Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha</i> 12,41 ha ----- -----x100%= 69,92%	Dis Perkim	
		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	<i>Jumlah unit rumah tidak layak huni.</i> 10.859 ----- <i>Jumlah total unit rumah kabupaten/kota</i> 114.781 ----- -----x100%=9,46%	Dis Perkim	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran = $1.590/58 = 27,41$ Menit	Dis Damkar	
6	Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 41 -----x100%= 0,64 % Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis 6.455	Disos	
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran 124 -----x100%=62 % Kabupaten kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten kota 200	Disos	
7	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD 32 -----x100%= 94,12 % jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota 34	Disnaker	
		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi 2.481 -----x100%= 12,39 % jumlah tenaga kerja keseluruhan 20.021	Disnaker	
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) 10.635.788.950.000 -----x100%= 52.649.814.118,11% jumlah tenaga kerja 20.021	Disnaker	
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak 1.418 -----x100%= 36,43 % jumlah perusahaan 3.892	Disnaker	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	<p><i>Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan</i> 929</p> <p>-----x100%= 80,50%</p> <p><i>Jumlah pencaker yang terdaftar</i> 1.154</p>	Disnaker	
8	Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	<p><i>Jumlah ARG pada belanja langsung APBD</i> 193.977.750</p> <p>-----x100%= 0,037%</p> <p><i>Jumlah seluruh belanja langsung di APBD</i> 518.029.808.135,17</p>	DP3A	
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	<p><i>Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi</i> 14</p> <p>-----x100%= 0,0094 %</p> <p><i>Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun)</i> 148.349</p>	DP3A	
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	<p><i>Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan</i> 15</p> <p>-----x100%= 0,0058 %</p> <p><i>Jumlah penduduk perempuan</i> 258.212</p>	DP3A	
9	Pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	<p><i>Jumlah cadangan pangan</i> 79.270,91</p> <p>-----x100%=138,78%</p> <p><i>Jumlah kebutuhan pangan</i> 57.118,60</p>	Dis Pangan	
10	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	<p><i>Luas tanah sesuai peruntukkan ijin lokasi</i> 153.653 M2</p> <p>-----x100%= 100%</p> <p><i>Seluruh luas tanah yang diberikan ijin lokasi</i> 153.653 M2</p>	Dis PUPR	
		Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	<p><i>Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum</i> -----x100%= 0</p> <p><i>Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum</i></p>	Dis PUPR	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	<i>Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi</i> 153.653 M2 -----x100%= 100% <i>Luas izin lokasi yang diterbitkan</i> 153.653 M2	Dis PUPR	
		Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	<i>Jumlah penerima tanah obyek landreform dngan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha</i> 1 -----x100%= 11,11% <i>Jumlah penerima tanah obyek landreform</i> 9	Dis PUPR	
		Tersedianya tanah untuk masyarakat	<i>Luas tanah yang telah dimanfatatkan berdasarkan izin membuka tanah</i> -----x100%= 0 <i>Luas izin membuka tanah yang diterbitkan</i>	Dis PUPR	
		Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	<i>Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani</i> 2 -----x100%=100% <i>Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan</i> 2	Dis PUPR	
11	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	<i>IKLH Kab/Kota = (IKA 30%) + (IKD 30%) + (ITH 40%) = 66,27</i> <i>IKA = Indeks Kualitas Air</i> <i>IKD = Indeks Kualitas Udara</i> <i>ITH = Indeks Tutupan Hutan</i>	Dis LH	
		Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	<i>Total volume sampah yang dapat ditangani</i> 1.322.055,45 kg -----x100%= 59,01% <i>total volume timbunan sampah kabupaten/kota</i> 2.240.254,10 kg	Dis LH	
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	<i>Jumlah penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan,dan izin PPLH yang diterbitkan pemerintah kab/kota</i> 0 -----x100%=0% <i>usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan</i> 25	Dis LH	
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perekaman KTP Elektronik	<i>jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP</i> 374.497 -----x100%= 98,86% <i>Jumlah penduduk17 tahun ke atas</i> 378.813	Disdukcapil	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	<i>Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA</i> 30.634 -----x100%= -----x 100% = 21,36% <i>Jumlah anak usia 0-17 tahun</i> 143.418	Disdukcapil	
		Kepemilikan akta kelahiran	<i>Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir</i> 146.628 ----- x100%= -----x 100% = 93,59% <i>Jumlah anak usia 0-18 tahun</i> 156.677	Disdukcapil	
		Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	<i>Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama</i> 9 -----x100%= -----x 100% = 22,50 % <i>Jumlah OPD</i> 40	Disdukcapil	
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	<i>Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun</i> -----x100%= 0% <i>Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n)</i>	Dis PMD	
		Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	<i>Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun</i> 8 -----x100%= 14,29% <i>Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n)</i> 56	Dis PMD	
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)	$TFR_{Karangasem} = 2,39$ $s \sum_{i=1}^7 ASFR_i$ $ASFR_i = \frac{b_i}{p_i} \times k$ <p> <i>TFR = Angka Kelahiran Total</i> <i>ASFR = Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur</i> <i>b_i = Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur i pada tahun tertentu</i> <i>p_i = Jumlah penduduk perempuan kelompok umur i pada pertengahan tahun yang sama</i> <i>i = kelompok umur (i=1 untuk kelompok umur 15-19, i=2 untuk</i> </p>	Dis PPKB	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			<i>kelompok umur 20-24,....., i=7 untuk kelompok Umur 45-49</i> <i>K = Bilangan Konstanta biasanya 1000</i>		
		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	<i>jumlah peserta KB aktif modern</i> 76.406 ----- <i>jumlah Pasangan Usia Subur</i> 89.103 -----x100%= 85,75%	Dis PPKB	
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	12.697 -----x100%= 14,25% 89.103	Dis PPKB	
15	Perhubungan	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	<p><i>Rasio konektivitas Kabupaten/Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pd kabupaten/kota x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kota tersebut) ▪ IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan)= jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd kabupaten/kota tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten/kota tersebut) <p>Keterangan:</p> <p>IK1 (Angkutan Jalan)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP ▪ Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu <p>IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasa perintis ditambah lintasan komersil ▪ Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu <p>Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30) 2. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50) 3. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70) 4. Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100) <p>Bobot Trayek atau Lintas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1 b. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8 	Dishub	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			c. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), Bobot = 0.5 <i>Rasio konektivitas Kabupaten Karangasem (0,55x50)+(1x50) = 77,78</i>		
		V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	V/C ratio di jalan Kabupaten Karangasem (0,60<V/C<0,70)	Dishub	
16	Komunikasi dan Informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	<i>Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo</i> 53 -----x100%= 100% <i>Jumlah OPD</i> 53	Diskominfo	
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	<i>Jumlah Layanan Publik diselenggarakan secara online dan terintegrasi</i> 0 -----x100%= 0% <i>Jumlah Layanan Publik</i> 0	Diskominfo	
		Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik,mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan peimerintah kabupaten/kota</i> 475.103 -----x100%=90,98 % <i>Jumlah penduduk</i> 522217	Diskominfo	
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	<i>Jumlah koperasi yang m.eningkat kualitasnya berdasarkan RAT,volume usaha dan aset</i> 158 -----x100%=69,60% <i>Jumlah seluruh koperasi</i> 227	Dis Koperasi	
		Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	<i>Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha</i> 415 -----x100%=0,82% <i>Jumlah usaha mikro keseluruhan</i> 50.717	Dis Koperasi	
18	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	<i>(Jumlah inestasi tahun n-jumlah investasi tahun n-1)di kabupaten/kota</i> (131.084.028,743 - 259.778.669,265) -----x100%= -49,54% <i>Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten/kota</i> (259.778.669,265)	DPMPPTSP	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
19	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	<i>(Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kabupaten/kota</i> 30 ----- <i>Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota</i> 84,848 ----- x100%= 0,04%	Disdikpora	
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial	<i>(Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial masyarakat di kabupaten/kota</i> 78 ----- <i>Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota</i> 84.848 ----- x100%=0,09%	Disdikpora	
		Peningkatan Prestasi Olahraga	<i>Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional = 0 (Tidak Ada Data)</i>	Disdikpora	
20	Statistik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	<i>(Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah</i> 0 ----- <i>Jumlah OPD</i> 0 ----- x100%=0 %	Diskominfo	
		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	<i>(Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah</i> 0 ----- <i>Jumlah OPD</i> 0 ----- x100%= 0 %	Diskominfo	
21	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	<i>Jumlah nilai per area keamanan informasi</i> ----- <i>Jumlah area penilaian</i> ----- x100%= 0%	Diskominfo	
22	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	<i>Jumlah cagar budaya yang dilestarikan</i> 70 ----- <i>Jumlah cagar budaya yang terdata</i> 367 ----- x100%= 19,07%	Disbud	
23	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	<i>Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat = (0)</i>	Dis Pustaka Arsip	Surat Keterangan belum
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	<i>Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM) = (0)</i> UPLM 1 = Pemerataan layanan perpustakaan UPLM 2 = Ketercukupan koleksi	Dis Pustaka Arsip	Surat Keterangan belum

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			<p>UPLM 3 = Ketercukupan tenaga perpustakaan UPLM 4 = Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan UPLM 5 = Perpustakaan ber-SNP UPLM 6 = Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan UPLM 7 = Anggota perpustakaan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat =</p> $\sum \frac{UPLM}{ALM} \times 100$		
24	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	<p>$T = (a + i + s + j)/4 = (100+100+0+63)/4 = 64,5 \%$ T = Tingkat ketersediaan arsip a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip i = Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN</p>	Dis Pustaka Arsip	
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	<p>$T = (m + b + g + a + c + i)/6 = (0)$ $T = (100\%+0\%+0\%+0\%+0\%+0\%)/6 = 16,67\%$ T = Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b = Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g = Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK a = Tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK c = Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK i = Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK</p>	Dis Pustaka Arsip	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
25	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	<i>Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota (sumber data: one data KKP)</i> 26.463,75 Ton	Dis Perikanan	
26	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Jumlah wisatawan tahun n- Jumlah wisatawan tahun n-1 1.032-171.353 ----- X100%=-99,40 % Jumlah wisatawan tahun n-1 171.353	Dispar	
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	Jumlah wisatawan tahun n- Jumlah wisatawan tahun n-1 4.269-368.570 ----- X100%=-98,84 % Jumlah wisatawan tahun n-1 368.570	Dispar	
		Tingkat Hunian Akomodasi	Jumlah kamar yang terjual 80 ----- X100%= 2,11 % Jumlah kamar yang tersedia 3.794	Dispar	
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	<i>Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku</i> = 1.378.240.400.000,00	Dispar	
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	<i>Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD</i> Sektor Pariwisata 123.455.000 ----- x100%= 7,21% Total PAD 250.734.664.481,16	Dispar	
27	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	<i>Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun</i> 7,08 ----- X100%= 0,03 % <i>Luas panen</i> 23.158,19	Dis Pertanian	
		Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	<i>Jumlah kejadian penyakit kasus tahun berjalan (t) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya</i> 8.705-10.036 ----- X100%=-13,26 % <i>Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)</i> 10.036	Dis Pertanian	
28	Kehutanan	-			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
29	Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	$\frac{\text{Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin}}{\text{Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi}} \times 100\% = 0\%$	Bag. Ekonomi	
30	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	$\frac{\text{Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah pelaku usaha di wilayah kab/kota}} \times 100\% = 0\%$	Disperindag	
		Persentase kinerja realisasi pupuk	$\frac{\text{Realisasi RDKK}}{\text{RDKK}} \times 100\% = 39,26\%$	Disperindag	
		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	$\frac{\text{Jumlah UTTP bertanda tera yang berlaku pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kab/kota}} \times 100\% = 4,90\%$	Disperindag	
31	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah Industri kecil dan menengah tahun } n - \text{jumlah industri kecil dan menengah tahun } n-1}{\text{Jumlah industri kecil dan menengah}} \times 100\% = -14,73\%$	Disperindag	
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator	<p><i>Jika terdapat N indikator pembangunan industri dalam RPIK maka nilai masing-masing bobot indikator adalah (100/N)%</i> <i>Untuk masing-masing penilaian indikator adalah persentase capaian indikator dibagi target dikali (100/N)%</i> <i>Nilai akhir adalah akumulasi dari N indikator tersebut = 0%</i></p>	Disperindag	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	$\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\% = 100\%$	Disperindag	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	$\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\% = 0\%$	Disperindag	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\% = 0\%$	Disperindag	
		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	<p>1) Keterkinian informasi industri : 0</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%) - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%) - Tidak menyampaikan informasi industri (0%) <p>2) Kelengkapan informasi industri meliputi : 0</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%) - Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%) - Informasi bahan bakar/energy (10%) - Informasi tenaga kerja (10%) - Informasi investasi (10%) <p>Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1 + 2) (25%+40%)=65%</p>	Disperindag	DATA DARI BUKU INDAG

2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Perencanaan Keuangan	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan}}{\text{Jumlah APBD}} \times 100\% = 15,22\%$	BPKAD	
		Rasio PAD	$\frac{\text{Jumlah PAD}}{\text{Jumlah APBD Non Migas}} \times 100\% = 1,64\%$	BPKAD	
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	Itda	
		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	Itda	
		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	$\frac{\text{Jumlah belanja urusan pemerintahan-transfer expenditures}}{\text{Jumlah belanja APBD}} \times 100\% = 76,65\%$	BPKAD	
		Opini Laporan Keuangan	Tahun 2010 Opini Disclaimer Tahun 2011 Opini Wajar dengan pengecualian Tahun 2012 Opini Wajar dengan pengecualian Tahun 2013 Opini Wajar dengan pengecualian Tahun 2014 Opini Wajar dengan pengecualian Tahun 2015 Opini Wajar tanpa pegecualian Tahun 2016 Opini Wajar tanpa pegecualian Tahun 2017 Opini Wajar tanpa pegecualian Tahun 2018 Opini Wajar tanpa pegecualian Tahun 2019 Opini Wajar tanpa pegecualian Tahun 2020 Opini Wajar tanpa pegecualian	BPKAD	

No	Fungsdi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
2	Pengadaan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	<i>Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n</i> ----- 0 -----x100%= 0% <i>Jumlah kontrak keseluruhan tahun n</i> 86	Bag. Pengadaan Barang dan Jasa	
		Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	<i>Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif</i> ----- 86 -----x100%= 3,75 % <i>Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif</i> 2.293	Bag. Pengadaan Barang dan Jasa	
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	<i>Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan</i> ----- 114.345.557.225,00 -----x100%=6,95 % <i>Total belanja langsung</i> 1.645.990.790.607,20	Bag. Pengadaan Barang dan Jasa	
3	Kepegawaian	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	<i>Jumlah pegawai menurut pendidikan PT teratas</i> ----- 4.775 Orang -----x100%=447,52% <i>Seluruh jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah</i> 1.067 Orang	BKPSDM	
		Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	<i>Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan)</i> ----- 140 Orang -----x100%= 7,62% <i>Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)</i> 1.838 Orang	BKPSDM	
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	<i>Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi</i> ----- 140 Orang -----x100%= 100% <i>Seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)</i> 140 Orang	BKPSDM	

No	Fungsdi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
4	Manajemen Keuangan	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	$\left[\left(\frac{1.539.529.971.632,12}{1.645.990.790.607,20}\right)-1\right] \times 100\% = -6,47 \%$	BPKAD	
		Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	$\left[\left(\frac{250.734.664.481,16}{258.110.008.272,00}\right)-1\right] \times 100\% = -2,86 \%$	BPKAD	
		Assets Management	1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak) 4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)	BPKAD	
		Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	<i>Nilai realisasi SiLPA Total</i> 124.225.313.698,36 ----- = -----x100% = 8,48 % <i>belanja anggaran tahun sebelumnya</i> 1.464.635.320.648,62	BPKAD	
5	Transparansi dan Partisipasi Publik	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	<i>Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda</i> 1.649.478.457.490,00 ----- = -----x100% = 109,23% <i>realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda</i> 1.510.077.736.341,12	BPKAD	
		Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	<i>Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website pemda</i> 12 ----- = -----x100% = 100% <i>Total jumlah dokumen yang telah dirinci</i> 12	BPKAD	

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah

a. Target kinerja dalam perjanjian kinerja

Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Karangasem yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran tingkat pencapaian target sasaran dari masing - masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karangasem 2016-2021 disesuaikan dengan kemampuan anggaran belanja daerah tahun 2021 yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Bupati Karangasem tahun 2021. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kabupaten Karangasem.

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun yang termuat dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yakni adanya Target Kinerja dalam perjanjian kinerja, yang dapat dijabarkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.4

Target Kinerja dalam perjanjian kinerja

NO	MISI		INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/outcome)	SATUAN	Target 2021
	TUJUAN/INDIKATOR	TUJUAN/SASARAN			
1	Misi 1	:	Membentuk sumber daya manusia yang cerdas, sehat, bermartabat dan unggul melalui pencapaian wajib belajar 9 (sembilan) tahun dan pelayanan kesehatan yang terjangkau, murah, ramah dan paripurna.		
	Tujuan 1	:	Meningkatkan jangkauan, ketersediaan pelayanan, dan kesetaraan dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas		
	Indikator Tujuan	:	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	6,4
	sasaran	:			
	1	Meningkatnya angka melek huruf dan tuntasnya wajib belajar 9 (sembilan) tahun.	Persentase Penduduk Buta Aksara	Persentase (%)	12

	2	Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur pendidikan SD sampai dengan SMP yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal.	Persentase satuan pendidikan formal tingkat SD terakreditasi minimal B	Persentase (%)	100
			Persentase satuan pendidikan formal tingkat SMP terakreditasi minimal B	Persentase (%)	100
	3	Menurunnya angka putus sekolah dan meningkatnya tingkat kelulusan SD-SMP dan SMA/SMK atau sederajat.	Persentase kelulusan SD/MI paket A	Persentase (%)	100
			Persentase kelulusan SMP/MTs, Paket B	Persentase (%)	100
	4	Meningkatnya prestasi murid SD dan SMP serta meningkatnya angka partisipasi sekolah.	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	Persentase (%)	100
			Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	Persentase (%)	99
	5	Meningkatnya lulusan perguruan tinggi di Kabupaten Karangasem.	APK Perguruan Tinggi	Persentase (%)	15
Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM)					
Indikator Tujuan		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		angka	68,31
sasaran :					
	6	Meningkatnya rata-rata lama sekolah dan derajat pendidikan.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,42
		Konsumsi perkapita	Pengeluaran Perkapita/pertahun	Ribu Rp	10731
Tujuan 3 : Meningkatkan jangkauan, ketersediaan pelayanan, dan kesetaraan dalam bidang kesehatan yang berkualitas					
Indikator Tujuan		Umur Harapan hidup		Tahun	70,65
sasaran :					
	10	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan masyarakat	Persentase pelayanan kesehatan Goes To Banjar (Pusling)	Persentase (%)	100
	11	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	Persentase (%)	7
			Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 KH	90
			Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	Per 1000 KH	8
			Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup	Per 1000 KH	8
	12	Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang memenuhi standar kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	Persentase (%)	95
2	Misi 2	: Mewujudkan kultur masyarakat dan tata kelola pemerintahan yang berkarakter melayani, bebas dari			

			praktik korupsi, kolusi, nepotisme, budaya suap.		
	Tujuan 4	:	Meningkatnya peran pelayanan aparatur sipil negara yang berkarakter, bersih, berwibawa dan profesional.		
	Indikator Tujuan	:	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	indeks	3,5
			Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Status	WTP
	sasaran	:			
	13	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik perangkat daerah.	Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawas Internal dan Eksternal yang ditindaklanjuti	Persentase (%)	90
	14	Meningkatnya disiplin PNS	Persentase penyelesaian kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS/Aparatur	Persentase (%)	100
	15	Meningkatnya kompetensi dan profesional PNS	Persentase lelang jabatan untuk eselon tertentu sesuai dengan kebutuhan	Persentase (%)	70
	16	Meningkatnya kinerja laporan keuangan perangkat daerah	Nilai Evaluasi AKIP	Peringkat	A
	17	Meningkatnya prestasi PNS dan menurunnya jumlah penerima sanksi	Persentase aparatur yang disiplin	Persentase (%)	100
	7	Meningkatnya kualitas aparatur desa melalui bintek dan pelatihan	Persentase desa yang terbina aparat pemerintah desanya	Persentase (%)	100
	8	Meningkatnya kesejahteraan aparatur desa sesuai peraturan perundang-undangan.	Jumlah aparatur desa yang menerima penghargaan	Orang	275
	9	Meningkatnya pendampingan teknis pengelolaan pembangunan bagi Desa Pekraman.	Jumlah desa yang melaksanakan BBGRM	Desa	75
	Tujuan 5	:	Meningkatnya kualitas sikap mental dan kultur masyarakat yang Bersih dan Bermartabat.		
	Indikator Tujuan	:	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	3
	sasaran	:			
	18	Meningkatnya partisipasi Desa Pekraman dan organisasi tradisional dan kemasyarakatan dalam pengembangan budaya yang mendukung Karangasem Bersih dan Bermartabat	Jumlah organisasi tradisional (kelompok seni) yang ikut berpartisipasi dalam pagelaran seni budaya per tahun	Sekaa	50
	19	Meningkatnya kompetensi lembaga tradisional dan organisasi kemasyarakatan yang mampu mengelola keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Jumlah penghargaan kepada lembaga tradisional dan organisasi kemasyarakatan yang mampu mengelola keuangan Daerah	Lembaga	9
	20	Meningkatnya partisipasi para tokoh masyarakat lembaga pemerintah, lembaga adat dan	Jumlah tokoh masyarakat/kelompok masyarakat/lembaga pemerintah/lembaga adat	Kelompok	8

		kelompok lainnya yang mendukung gerakan Karangasem Bersih dan Bermartabat	yang berprestasi dalam bidang lingkungan hidup		
3	Misi 3	:	Menurunkan angka kemiskinan dengan menitikberatkan pada penyiapan lapangan kerja, pengembangan sektor ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dalam arti luas, usaha kecil dan menengah		
	Tujuan 6	:	Meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan.		
	Indikator Tujuan	:	Persentase penduduk di atas garis kemiskinan	Persentase (%)	94,25 (angka kemiskinan 5,75)
			Koefisien Gini (Indeks Gini)	Angka	0,3224
	sasaran	:			
	21	Meningkatnya pemerataan pemenuhan kebutuhan pangan dan rumah layak huni bagi keluarga miskin	Persentase tertatanya lingkungan sehat perumahan	Persentase (%)	10
			Rasio rumah layak huni	Rasio	0,00238
	22	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana utilitas umum, panjang jalan dalam kondisi baik	Terbangunnya Jalan Kabupaten (Km)	Km	873,326
			Jumlah Desa Rawan Air (Desa)	Desa	0
	23	Meningkatnya usaha ekonomi produktif bagi keluarga miskin.	Jumlah keluarga miskin dan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi yang ditangani	Orang	6935
	Tujuan 7	:	Meningkatkan produktivitas dan skala usaha hasil pertanian dalam arti luas.		
	Indikator Tujuan	:	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	Persentase (%)	26,25
			Nilai Tukar Petani (NTP)	Nilai	101,53
	sasaran	:			
	24	Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan/pertanian (produksi sektor pertanian).	Jumlah produksi tanaman pangan (padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah)	Ton	283119,63
	25	Meningkatnya sarana produksi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan	Jumlah prasarana yang disalurkan	unit/klp)	700
			Jumlah sarana yang disalurkan	Ton	130,479
	26	Meningkatnya pengembangan menghasilkan varietas baru tanaman pertanian	Persentase luas pertanaman aman dari serangan organisme pengganggu tumbuhan/dampak perubahan iklim dengan teknologi ramah lingkungan	Persentase (%)	97
	27	Meningkatnya angka kecukupan pangan	Persentase Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Persentase (%)	98,75
	28	Meningkatnya produksi perikanan	Jumlah produksi perikanan	Ton	28660
	Tujuan 8	:	Meningkatkan investasi dan daya saing produk industri terutama agroindustri serta memperbaiki iklim perdagangan.		
	Indikator Tujuan	:	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persentase (%)	5,75

	sasaran	:			
	29	Meningkatnya kemudahan pelayanan perizinan	Rata-rata lama pelayanan perizinan (hari)	Hari	3
	30	Meningkatnya jumlah investasi.	Jumlah Investasi Asing (PMA) US\$	US\$	2661052
			Nilai investasi dalam negeri	Juta Ruoiah	170065
	31	Meningkatnya industri kecil menengah dan kerajinan rumah tangga	Persentase Peningkatan Kualitas dan Kuantitas IKM	Persentase (%)	19,44
	32	Meningkatnya perdagangan dalam negeri.	Persentase terpenuhinya stabilitas harga barang kebutuhan pokok dengan berkembangnya tertib usaha perdagangan serta kepastian perlindungan terhadap konsumen	Persentase (%)	100
	33	Meningkatnya kinerja pengelolaan BUMD	Tingkat cakupan pelayanan PDAM	Persentase (%)	50,84
	34	Meningkatnya daya saing pasar tradisional	Rasio Pasar Tradisional yang memenuhi standar	Persentase (%)	100
	Tujuan 9	:	Meningkatkan produktivitas dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah dan koperasi.		
	Indikator Tujuan	:	Persentase Usaha Mikro Kecil dan menengah	Persentase (%)	98,9
	sasaran	:			
	35	Meningkatnya modal usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi	Persentase Pembinaan Koperasi yang Berprestasi	Persentase (%)	100
	36	Meningkatnya koperasi yang aktif.	Persentase Koperasi aktif	Persentase (%)	90
	37	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi	Persentase penguatan kualitas dan Pertumbuhan UMKM melalui pendampingan dan pelatihan	Persentase (%)	100
	38	Meningkatnya penyaluran kredit perbankan pada petani, nelayan, dan pedagang kecil	Cakupan perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi yang dibantu kredit perbankan	Persentase (%)	100
4	Misi 4	:	Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan menitikberatkan pada program perluasan kesempatan kerja, pariwisata kerakyatan dan peningkatan investasi yang berwawasan lingkungan		
	Tujuan 10	:	Meningkatkan destinasi pariwisata dan kunjungan wisatawan.		
	Indikator Tujuan	:	PAD sektor pariwisata	Persentase (%)	6,46
	sasaran	:			
	39	Meningkatnya daya tarik wisata yang sedang berkembang	Jumlah daya tarik wisata yang dikembangkan	DTW	25
	40	Meningkatnya penataan kawasan pariwisata dan daya tarik wisata	Jumlah data tarik wisata yang tertata	DTW	17
	41	Meningkatnya promosi pariwisata baik dalam negeri maupun luar negeri	Persentase tingkat kunjungan wisatawan ke Kabupaten Karangasem	Persentase (%)	25
	Tujuan 11	:	Meningkatkan kualitas pariwisata yang berbasis budaya dan kearifan lokal.		

	Indikator Tujuan	:	Jumlah wisatawan mancanegara	Orang	420.000
			Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Orang	220.000
	sasaran	:			
	42	Meningkatnya pengembangan pariwisata spiritual	Jumlah Desa Wisata yang dikembangkan sebagai daerah tujuan wisata alternatif	DTW	15
	43	Meningkatnya pengembangan pariwisata yang berwawasan lingkungan	Jumlah kelompok wisata yang sadar wisata dan menjalankan sapta pesona	Kelompok	18
	Tujuan 12	:	Meningkatkan pengendalian ruang dan harmonisasi rencana tata ruang sesuai dengan perkembangan teknologi, sosial ekonomi masyarakat.		
	Indikator Tujuan	:	Ketaatan terhadap RTRW	Persentase (%)	90
	sasaran	:			
	44	Meningkatnya ketersediaan perencanaan tata ruang	Terpenuhinya penyelenggaraan penataan dan pengendalian penataan ruang	Persentase (%)	100
	45	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup, dan perlindungan sumber daya alam	Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	68,5
	46	Meningkatnya efektivitas pengelolaan konservasi dan rehabilitasi eks galian C	Cakupan pengusaha bidang pertambangan bahan galian C yang terbina (pengusaha)	%	100
5	Misi 5	:	Membangun infrastruktur wilayah yang merata, berkeadilan dan tepat guna serta mengembangkan wilayah berbasis potensi lokal perdesaan.		
	Tujuan 13	:	Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan.		
	Indikator Tujuan	:	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persentase (%)	100
			Persentase penduduk berakses air minum	Persentase (%)	100
	sasaran	:			
	47	Meningkatnya infrastruktur jalan, jembatan, air bersih, listrik, sanitasi, irigasi terutama kawasan perdesaan	Persentase terlaksananya pembangunan Infrastruktur	Persentase (%)	90
	Tujuan 14	:	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur.		
	Indikator Tujuan	:	Persentase areal kawasan kumuh	Persentase (%)	55
	sasaran	:			
	48	Meningkatnya pengelolaan persampahan	Persentase meningkatnya pengelolaan persampahan di Kota Amlapura	Persentase (%)	85
	49	Meningkatnya kualitas ruas jalan yang mendukung kegiatan ekonomi produktif	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Km/unit	1.482,36 Km / 232.203 unit
	Tujuan 15	:	Meningkatkan pembangunan dan kualitas sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pelayanan publik perdesaan.		
	Indikator Tujuan	:	Persentase terlaksananya pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Persentase (%)	100
	sasaran	:			

	50	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor desa/kelurahan.	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	Persentase (%)	88
	51	Meningkatnya kualitas trotoar, penerangan jalan dan taman	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas	Kasus	Tidak diukur
6	Misi 6	:	Mengembangkan peri kehidupan rakyat yang religius, toleran, berkarakter dan bermartabat melalui peningkatan program pembangunan di bidang keagamaan, sosial budaya, politik dan kesejahteraan sosial.		
	Tujuan 16	:	Meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama, pendidikan agama, serta sarana dan prasarana sosial dan keagamaan.		
	Indikator Tujuan	:	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	Rasio	9,271
	sasaran	:			
	52	Meningkatnya bantuan keuangan kepada lembaga agama dan adat	Persentase lembaga agama dan adat yang terfasilitasi penerimaan bantuan keuangan	Persentase (%)	100
	53	Meningkatnya kualitas dan peranan lembaga agama dan adat melalui pembinaan dan penyuluhan	Persentase pembinaan sekaa truna di tingkat kecamatan, kabupaten dan propinsi	Persentase (%)	100
	54	Meningkatnya koordinasi serta peran Forum Komunikasi Antar Umat Beragama dalam mewujudkan Karangasem yang Bermartabat	Jumlah pertemuan FKUB	kali per tahun	2
	55	Meningkatnya kapasitas lembaga pesraman di masing-masing Desa Pekraman	Jumlah kawasan desa yang dibentuk/dibina		8
	56	Meningkatnya sarana dan prasarana tempat ibadah	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	Rasio	9,271
	57	Meningkatnya sarana dan prasarana sosial kemasyarakatan	Jumlah perpustakaan dan taman bacaan	Unit	10
	Tujuan 17	:	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial dan kesejahteraan masyarakat, pemuda dan olahraga.		
	Indikator Tujuan	:	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Persentase (%)	0,48
	sasaran	:			
	58	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dan kesejahteraan kepada fakir miskin, anak terlantar dan kaum lansia	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMKs) yang mengalami peningkatan kualitas hidup,kemandirian dan keberfungsian sosial	Orang	900
	59	Meningkatnya kualitas layanan terhadap kaum perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender	Persentase (%)	61,98
			Indeks Pembangunan Gender	Angka	76,92
	60	Meningkatnya kualitas perlindungan terhadap perempuan dan anak	Proporsi perempuan dan anak perempuan yang mengalami kekerasan	Persentase (%)	50
	61	Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan, generasi muda,	Angka Kelahiran pada Remaja 15-19 tahun (ASFR=Age Spesific Fertility Rate)	Per 1000 Penduduk	30 per 1000

		kepemudaan dan keolahragaan			
			Persentase penduduk Karangasem yang tertib administrasi kependudukan	Persentase (%)	95
	Tujuan 18	:	Meningkatnya kualitas seni dan budaya masyarakat.		
	Indikator Tujuan	:	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	3
	sasaran	:			
	62	Meningkatnya kualitas dan pengembangan seni dan budaya yang hampir punah	Persentase terpenuhinya perlindungan, pelestarian dan pengembangan nilai-nilai tradisi warisan budaya dan pemanfaatan bidang kesenian	Persentase (%)	1
	63	Meningkatnya perlindungan aset-aset pusaka dan kearifan lokal yang ada di masyarakat	Persentase tercapainya penyelamatan Dokumen Arsip daerah	Persentase (%)	100
	64	Meningkatnya kreativitas dan atraksi seni dan budaya	Jumlah gelar seni budaya yang dilaksanakan	Kali/tahun	13
	65	Meningkatnya seni budaya berbasis Desa Pekraman dalam rangka mendukung PKB	Jumlah peserta kelompok-kelompok seni budaya berbasis Desa Pekraman yang ikut Pesta Kesenian Bali	Orang	200
	66	Meningkatnya penghargaan terhadap para seniman, budayawan dan penggiat seni lainnya	Jumlah seniman yang mendapat penghargaan	Orang	112
	Tujuan 19	:	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan dan pemahaman demokrasi.		
	Indikator Tujuan	:	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (Persentase meningkatnya swadaya murni masyarakat dalam membangun desa)	Persentase (%)	100
	sasaran	:			
	67	Meningkatnya wawasan kebangsaan dan demokrasi	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilukada	Persentase (%)	95
	68	Meningkatnya advokasi dan pendidikan politik masyarakat.	Persentase Terlaksananya Penyuluhan Politik Masyarakat	Persentase (%)	100
	69	Meningkatnya ketertiban dan keamanan berbasis kearifan lokal	Persentase desa/kelurahan dengan keamanan dan kenyamanan lingkungan terkendali	Persentase (%)	80

b. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja

Adapun pengukuran capaian kinerja masing - masing sasaran dan indikator sasaran dibandingkan dengan target perjanjian kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Capaian Kinerja Tujuan 1
Meningkatkan jangkauan, ketersediaan pelayanan, dan kesetaraan dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas

Indikator Sasaran		Satuan	2021		
			Target	Realisasi	Target
1	Persentase Penduduk Buta Aksara	12	12	1,91	628,27
2	Persentase satuan pendidikan formal tingkat SD terakreditasi minimal B	100	100	53,37	53,37
3	Persentase satuan pendidikan formal tingkat SMP terakreditasi minimal B	85	85	31,25	36,76
4	Persentase kelulusan SD/MI paket A	100	100	100	100
5	Persentase kelulusan SMP/MTs paket B	100	100	100	100
6	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	100	100	0	0
7	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	99	99	0	0
Rata- rata capaian Kinerja					131,20

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 131,20 % yang dikategorikan baik sekali, Peningkatan ini dipengaruhi oleh ini dipengaruhi oleh Persentase Penduduk Buta Aksara yang meningkat menjadi 1,91 %.

Tabel 2.6
Capaian Kinerja Tujuan 2
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM)

Indikator Sasaran		Satuan	2021		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,42	12,42	100
Rata- rata capaian Kinerja					

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja pada tahun 2021 dapat tercapai sesuai target.

Tabel 2.7
Capaian Kinerja Tujuan 3
Meningkatkan jangkauan, ketersediaan pelayanan, dan kesetaraan dalam bidang kesehatan yang berkualitas

Indikator Sasaran		Satuan	2021		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase pelayanan kesehatan Goes To Banjar (Pusling)	(%)	100	100	100,00
2	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	(%)	7	6,99	100,14
3	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 KH	90	148,10	60,77
4	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	Per 1000 KH	8	7,11	112,52
5	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup	Per 1000 KH	8	5,04	158,73
6	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	(%)	95	96	101,05
Rata- rata capaian Kinerja					105,54

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 105,54% yang dikategorikan baik sekali.

Tabel 2.8
Capaian Kinerja Tujuan 4
Meningkatnya peran pelayanan aparatur sipil negara yang berkarakter, bersih, berwibawa dan profesional.

Indikator Sasaran		Satuan	2021		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawas Internal dan Eksternal yang ditindaklanjuti	%	90	100	111,11
2	Persentase penyelesaian kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS/aparatur	%	100	100	100
3	Persentase lelang jabatan untuk eselon tertentu sesuai dengan kebutuhan	%	70	100	142,86
4	Nilai evaluasi AKIP	Predikat	A	B	85,06
5	Persentase aparatur yang disiplin	%	100	99,97	99,97
6	Persentase desa yang terbina aparat pemerintah desanya	%	100	0	0
7	Jumlah aparatur desa yang menerima penghargaan	Orang	275	0	0
8	Jumlah desa yang melaksanakan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	desa	75	0	0
Rata-rata capaian Kinerja					67,37

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 67,37%, yang dikategorikan cukup.

Tabel 2.9
Capaian Kinerja Tujuan 5
Meningkatnya kualitas sikap mental dan kultur masyarakat dalam mendukung gerakan Karangasem Bersih dan Bermartabat.

Indikator Sasaran		Satuan	2021		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Jumlah organisasi tradisional (kelompok seni) yang ikut berpartisipasi dalam pagelaran seni budaya per tahun	sekaa	50	50	100

2	Jumlah penghargaan kepada lembaga tradisional dan organisasi kemasyarakatan yang mampu mengelola keuangan Daerah	lembaga	9	0	0
3	Jumlah tokoh masyarakat/kelompok masyarakat/lembaga pemerintah/lembaga adat yang diberikan penghargaan yang berprestasi dalam bidang lingkungan hidup	Orang/kelompok	8	49	612,5
Rata- rata capaian Kinerja					237,5

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 237,5% yang dikategorikan baik sekali.

Tabel 2.10
Capaian Kinerja Tujuan 6
Meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan

Indikator Sasaran	Satuan	2021			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Persentase tertatanya lingkungan sehat perumahan	%	10	10	100
2	Terbangunnya jalan kabupaten	Km	873,326	934,36	106,99
3	Jumlah keluarga miskin dan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi yang ditangani	Orang	6935	303	2,91
Rata- rata capaian Kinerja					69,97

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 69,97% yang dikategorikan cukup.

Tabel 2.11
Capaian Kinerja Tujuan 7
Meningkatnya produktivitas dan skala usaha hasil pertanian dalam arti luas.

Indikator Sasaran		Satuan	2021		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Jumlah produksi tanaman pangan (padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah)	Ton	283119,63	165.376,67	58,41
2	Jumlah prasarana yang disalurkan	Unit/	700	62	8,86
3	Jumlah sarana yang disalurkan	Ton	130.479	5.522,941	4,23
4	Persentase luas pertanaman aman dari serangan organisme pengganggu tumbuhan/dampak perubahan iklim dengan teknologi ramah lingkungan	%	97	95	97,94
5	Persentase Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	%	98,75	89,62	90,75
6	Jumlah produksi perikanan	Ton	28.660	26171	91,32
Rata-rata capaian Kinerja					58,59

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 58,59% yang dikategorikan cukup.

Tabel 2.12
Capaian Kinerja Tujuan 8
Meningkatnya investasi dan daya saing produk industri terutama agroindustri dan meningkatnya iklim perdagangan.

Indikator Sasaran		Satuan	2020		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Rata-rata lama pelayanan perizinan	hari	3	3	100,00
2	Jumlah Investasi Asing (PMA) US\$	US\$	2.661.052	2.661.052	100,00
3	Nilai investasi (juta Rp)	Juta Rp	170.065	171.765	101,00
4	Persentase Peningkatan Kualitas dan Kuantitas IKM	%	19,44	8,27	42,54
5	Persentase terpenuhinya stabilitas harga barang kebutuh pokok dengan berkembangnya tertib usaha perdagangan serta kepastian perlindungan	%	100	111,17	111,17

	terhadap konsumen				
6	Tingkat cakupan pelayanan PDAM	%	50,84	43,22	85,01
7	Rasio Pasar Tradisional yang memenuhi standar	%	100	100	100,00
					91,39

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 91,39%, yang dikategorikan Baik Sekali.

Tabel 2.13
Capaian Kinerja Tujuan 9
Meningkatnya produktivitas dan pengembangan usaha kecil, menengah dan koperasi.

	Indikator Sasaran	Satuan	2021		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase pembinaan koperasi yang berprestasi	%	100	0	0
2	Persentase koperasi aktif	%	90	70	77,78
3	Persentase penguatan kualitas dan pertumbuhan UMKM melalui pendampingan dan pelatihan	%	100	100	100
4	Cakupan perkembangan usaha mikro kecil menengah yang dibantu kredit perbankan	%	100	32	32
Rata- rata capaian Kinerja					52,44

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 52,44% yang dikategorikan Kurang.

Tabel 2.14
Capaian Kinerja Tujuan 10
Meningkatkan destinasi pariwisata dan kunjungan wisatawan.

	Indikator Sasaran	Satuan	2021		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Jumlah Daya Tarik Wisata yang dikembangkan	DTW	25	0	0,00
2	Jumlah daya tarik wisata yang tertata	DTW	17	5	29,41

3	Persentase tingkat kunjungan wisatawan ke Kabupaten Karangasem	%	25	-99	-3,96
Rata- rata capaian Kinerja					8,48

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 8,48% yang dikategorikan Kurang.

Tabel 2.15
Capaian Kinerja Tujuan 11
Meningkatnya kualitas pariwisata yang berbasis budaya dan kearifan lokal.

Indikator Sasaran	Satuan	2021			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Jumlah Desa wisata yang dikembangkan sebagai daerah tujuan alternatif	DTW	15	8	53,33
2	Jumlah kelompok wisata yang sadar wisata dan menjalankan sapta pesona	Kelompok	18	8	44,44
Rata- rata capaian Kinerja					48,89

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 48,89% yang dikategorikan Kurang.

Tabel 2.16
Capaian Kinerja Tujuan 12
Meningkatnya pengendalian ruang dan harmonisasi rencana tata ruang sesuai dengan perkembangan teknologi, sosial ekonomi masyarakat.

Indikator Sasaran	Satuan	2021			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Terpenuhinya penyelenggaraan penataan dan pengendalian penataan ruang	%	100	100	100,00
2	Indeks kualitas lingkungan hidup	indeks	68,5	66,27	96,74
3	Cakupan pengusaha bidang pertambangan bahan galian C yang terbina (pengusaha)	%	100	100	100,00
Rata- rata capaian Kinerja					98,91

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 98,91% yang dikategorikan Baik.

Tabel 2.17
Capaian Kinerja Tujuan 13
Meningkatnya pembangunan infrastruktur pedesaan.

Indikator Sasaran	Satuan	2021		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
1 Persentase terlaksananya pembangunan infrastruktur	%	90	Tidak dihitung	Tidak dihitung
Rata- rata capaian Kinerja				0

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja pada tahun 2021 tidak dapat disajikan dikarenakan kewenangan pembangunan infrastruktur pedesaan telah dikelola langsung oleh kedesaan masing-masing.

Tabel 2.18
Capaian Kinerja Tujuan 14
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana infrastruktur.

Indikator Sasaran	Satuan	2021		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
1 Persentase meningkatnya pengelolaan persampahan di kota Amalapura	%	89	70	78,65
2 Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Km/unit	1.482,36 Km / 232.203 unit	1.446.39 Km / 171,327 unit	97,57
Rata- rata capaian Kinerja				88,11

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 88,11% yang dikategorikan Baik.

Tabel 2.19
Capaian Kinerja Tujuan 15
Meningkatnya pembangunan dan kualitas sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pelayanan publik perdesaan.

	Indikator Sasaran	Satuan	2021		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas	Kasus	Tidak diukur	-	-

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja pada tahun 2021 tidak dapat disajikan dikarenakan kewenangan pembangunan dan kualitas sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pelayanan publik perdesaan telah dikelola langsung oleh kedesaan masing-masing.

Tabel 2.20
Capaian Kinerja Tujuan 16
Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama, pendidikan agama, serta sarana dan prasarana sosial dan keagamaan.

	Indikator Sasaran	Satuan	2021		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase lembaga agama dan adat yang terfasilitasi penerimaan bantuan keuangan	%	100	100	100
2	Jumlah pertemuan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	kali per tahun	2	2	100
3	Jumlah kawasan desa yang dibentuk/dibina	Desa	8	1	12,50
4	Jumlah perpustakaan dan taman bacaan	buah	10	14	140
Rata- rata capaian Kinerja					88,12

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 88,12% yang dikategorikan Baik.

Tabel 2.21
Capaian Kinerja Tujuan 17
Meningkatnya kualitas kehidupan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Indikator Sasaran		Satuan	2021		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMK5) yang mengalami peningkatan kualitas hidup,kemandirian dan keberfungsian sosial	Orang	900	-	0
		LKSA			
		unit			
2	Indeks Pemberdayaan Gender	%	61,98	63,91	103
3	Indeks Pembangunan Gender	Angka	76,92	88,93	116
4	Proporsi perempuan dan anak perempuan yang mengalami kekerasan	%	50	17	66
5	Angka Kelahiran pada Remaja 15-19 tahun (ASFR=Age Spesific Fertility Rate)	Per 1000 penduduk	30 per 1000	38 per 1000	127
6	Persentase penduduk Karangasem yang tertib administrasi kependudukan	%	95	99,02	104
Rata- rata capaian Kinerja					85,94

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 85,94% yang dikategorikan Baik.

Tabel 2.22
Capaian Kinerja Tujuan 18
Meningkatnya kualitas seni dan budaya masyarakat.

Indikator Sasaran		Satuan	2021		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase terpenuhinya perlindungan, pelestarian dan pengembangan nilai-nilai tradisinwarisan budaya dan pemanfaatan bidang kesenian	%	100	100	100
2	Persentase tercapainya penyelamatan Dokumen Arsip daerah	%	100	100	100
3	Jumlah gelar seni budaya yang dilaksanakan	kali per tahun	13	12	92
4	Jumlah peserta kelompok-kelompok seni budaya berbasis desa pakraman yang ikut pesta kesenian bali	sekaa	200	165	83
5	Jumlah seniman yang mendapat penghargaan	Seniman	112	0	0
Rata- rata capaian Kinerja					74,96

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 74,96% yang dikategorikan Cukup.

Tabel 2.23
Capaian Kinerja Tujuan 19
Terwujudnya peningkatan Wawasan Kebangsaan dan pemahaman demokrasi

Indikator Sasaran		Satuan	2021		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilukada	%	95	71,03	75
2	Persentase Terlaksananya Penyuluhan Politik Masyarakat	%	100	100	100
3	Persentase desa/kelurahan dengan keamanan dan kenyamanan lingkungan terkendali	%	80	-	0
Rata-rata capaian Kinerja					58,26

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 58,26% yang dikategorikan Cukup.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran diatas digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	> 100 %	Baik Sekali
2	> 75 % - 100 %	Baik
3	55 %- 75 %	Cukup
4	< 55 %	Kurang

c. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya

Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikelompokkan sesuai tujuan, sehingga disajikan ke dalam tabel sesuai jumlah tujuan yang ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 2.24
 Capaian Kinerja Tujuan 1
 Meningkatkan jangkauan, ketersediaan pelayanan, dan kesetaraan dalam
 memperoleh pendidikan yang berkualitas

Indikator Sasaran	Satuan	2020			2021			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Persentase Penduduk Buta Aksara	%	14	14,61	95,64	12	1,91	628,27
2	Persentase satuan pendidikan formal tingkat SD terakreditasi minimal B	%	100	8,3	8,3	100	53,37	53,37
3	Persentase satuan pendidikan formal tingkat SMP terakreditasi minimal B	%	85	2,08	2,45	85	31,25	36,76
4	Persentase kelulusan SD/MI paket A	%	100	100	100	100	100	100
5	Persentase kelulusan SMP/MTs paket B	%	100	100	100	100	100	100
6	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	100	99,71	99,71	100		0
7	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	%	99	83,95	105,5	99		0
Rata- rata capaian Kinerja					73,09			131,20

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 131,20%, meningkat jika dibandingkan rata - rata capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 73,09 %, sehingga menjadi kategori **Baik Sekali**. Peningkatan ini dipengaruhi oleh ini dipengaruhi oleh 2 (dua) indikator yang tidak mencapai target, yaitu: Persentase Penduduk Buta Aksara yang meningkat menjadi 1,91 %.

Tabel 2.25
Capaian Kinerja Tujuan 2
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM)

Indikator Sasaran	Satuan	2020			2021		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1 Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,41	12,41	100	12,42	12,42	100
Rata- rata capaian Kinerja				100			100

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 100 %, sama dengan tahun sebelumnya rata - rata capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 100 %, sehingga tetap dalam kategori **Baik**

Tabel 2.26
Capaian Kinerja Tujuan 3
Meningkatkan jangkauan, ketersediaan pelayanan, dan kesetaraan dalam bidang kesehatan yang berkualitas

Indikator Sasaran	Satuan	2020			2021		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1 Persentase pelayanan kesehatan Goes To Banjar (Pusling)	(%)	95	15	15,79	100	100	100,00
2 Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	(%)	7	6,43	108,14	7	6,99	100,14
3 Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 KH	90	107,34	80,73	90	148,10	60,77
4 Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	Per 1000 KH	8	0,58	192,75	8	7,11	112,52
5 Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup	Per 1000 KH	8	5,47	131,63	8	5,04	158,73
6 Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	(%)	95	93	97,89	95	96	101,05
Rata- rata capaian Kinerja				128,31			105,54

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 105,54%, turun jika dibandingkan rata - rata capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 128,31%, namun masih kategori **Baik Sekali**. Penurunan ini dipengaruhi oleh 1 (satu) indikator yang tidak mencapai target, yaitu:

- Angka Kematian Ibu (AKI) dari target 90 Per 100.000 KH namun meningkat dengan 148,10 Per 100.000 KH

Tabel 2.27
Capaian Kinerja Tujuan 4
Meningkatnya peran pelayanan aparatur sipil negara yang berkarakter, bersih, berwibawa dan profesional.

Indikator Sasaran	Satuan	2020			2021			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawas Internal dan Eksternal yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	90	100	111,11
2	Persentase penyelesaian kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS/aparatur	%	100	100	100	100	100	100
3	Persentase lelang jabatan untuk eselon tertentu sesuai dengan kebutuhan	%	65	25	38,46	70	100	142,86
4	Nilai evaluasi AKIP	Predikat	A	B	85,06	A	B	85,06
5	Persentase aparatur yang disiplin	%	100	99,97	99,97	100	99,97	99,97
6	Persentase desa yang terbina aparat pemerintah desanya	%	90	0	0	100	0	0
7	Jumlah aparatur desa yang menerima penghargaan	Orang	226	0	0	275	0	0
8	Jumlah desa yang melaksanakan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	desa	75	0	0	75	0	0
Rata- rata capaian Kinerja					52,94			67,37

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 67,37%, meningkat jika dibandingkan rata - rata capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 51,61%, sehingga dalam kategori **Cukup**. capain ini dipengaruhi oleh 4 (enam) indikator yang tidak mencapai target, yaitu:

- Nilai evaluasi AKIP
- Persentase desa yang terbina aparat pemerintah desanya
- Jumlah aparatur desa yang menerima penghargaan
- Jumlah desa yang melaksanakan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)

Sebagian besar indikator tidak mencapai target dikarenakan refocusing penanggulangan covid 19

Tabel 2.28
Capaian Kinerja Tujuan 5
Meningkatnya kualitas sikap mental dan kultur masyarakat dalam mendukung gerakan Karangasem Bersih dan Bermartabat.

Indikator Sasaran	Satuan	2020			2021		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1 Jumlah organisasi tradisional (kelompok seni) yang ikut berpartisipasi dalam pagelaran seni budaya per tahun	sekaa	50	0	0	50	50	100
2 Jumlah penghargaan kepada lembaga tradisional dan organisasi kemasyarakatan yang mampu mengelola keuangan Daerah	lembaga	3	0	0	9	0	0
3 Jumlah tokoh masyarakat/kelompok masyarakat/lembaga pemerintah/lembaga adat yang diberikan penghargaan yang berprestasi dalam bidang lingkungan hidup	Orang/kelompok	8 kelompok	8	100	8	49	612,5
Rata-rata capaian Kinerja				33,33			237,5

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 237,5%, meningkat jika dibandingkan rata-rata capaian kinerja

pada tahun 2020 sebesar 33,33%, sehingga dalam kategori **Baik Sekali**. Capaian ini dipengaruhi oleh 1 (Satu) indikator yang tidak mencapai target, yaitu: Jumlah organisasi tradisional (kelompok seni) yang ikut berpartisipasi dalam pagelaran seni budaya per tahun.

Tabel 2.29
Capaian Kinerja Tujuan 6
Meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan

Indikator Sasaran	Satuan	2020			2021			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Persentase tertatanya lingkungan sehat perumahan	%	10	6	60	10	10	100
2	Terbangunnya jalan kabupaten	Km	873.326	887.026	101,57	873,326	934,36	106,99
3	Jumlah keluarga miskin dan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi yang ditangani	Orang	6500	300	4,62	6935	303	2,91
Rata-rata capaian Kinerja					55,40			69,97

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 69,97%, meningkat jika dibandingkan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 55,40%, sehingga dalam kategori **Cukup**. capaian ini dipengaruhi oleh 1 (satu) indikator yang tidak mencapai target, yaitu:

- Jumlah keluarga miskin dan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi yang ditangani.

Tabel 2.30
Capaian Kinerja Tujuan 7
Meningkatnya produktivitas dan skala usaha hasil pertanian dalam arti luas.

Indikator Sasaran	Satuan	2020			2021			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Jumlah produksi tanaman pangan (padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah)	Ton	274610,89	106042,19	38,62	283119,63	165.376,67	58,41
2	Jumlah prasarana	Unit/	700	54	7,72	700	62	8,86

	yang disalurkan							
3	Jumlah sarana yang disalurkan	Ton	130.479	5.809,78	4,44	130.479	5.522,941	4,23
4	Persentase luas pertanaman aman dari serangan organisme pengganggu tumbuhan/dampak perubahan iklim dengan teknologi ramah lingkungan	%	97	97	100	97	95	97,94
5	Persentase Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	%	89	89,1	100	98,75	89,62	90,75
6	Jumlah produksi perikanan	Ton	27315	26224	96.01	28.660	26171	91,32
Rata-rata capaian Kinerja					50,16			58,59

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 58,59%, meningkat jika dibandingkan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 50,16%, sehingga dalam kategori **Cukup**. Capaian ini dipengaruhi oleh 4 (empat) indikator yang tidak mencapai target, yaitu:

- Jumlah produksi tanaman pangan (padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah)
- Jumlah prasarana yang disalurkan
- Jumlah sarana yang disalurkan
- Jumlah produksi perikanan

Tabel 2.31
Capaian Kinerja Tujuan 8
Meningkatnya investasi dan daya saing produk industri terutama agroindustri dan meningkatnya iklim perdagangan.

Indikator Sasaran	Satuan	2020			2021		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1 Rata-rata lama pelayanan perizinan	hari	3	7	42,86	3	3	100,00
2 Jumlah Investasi Asing (PMA) US\$	US\$	2634705	1255250	47,64	2.661.052	2.661.052	100,00
3 Nilai investasi (juta Rp)	Juta Rp	170065	142285	83,67	170.065	171.765	101,00
4 Persentase Peningkatan Kualitas dan Kuantitas IKM	%	19	8,42	62	19,44	8,27	42,54

5	Persentase terpenuhinya stabilitas harga barang kebutuhan pokok dengan berkembangnya tertib usaha perdagangan serta kepastian perlindungan terhadap konsumen	%	100	70,53	70,53	100	111,17	111,17
6	Tingkat cakupan pelayanan PDAM	%	50,7	34,32	67,69	50,84	43,22	85,01
7	Rasio Pasar Tradisional yang memenuhi standar	%	90	68,75	76,39	100	100	100,00
					69,15			91,39

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 91,39%, meningkat jika dibandingkan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 69,15%, sehingga dalam kategori **BAIK**. Peningkatan ini dipengaruhi oleh 6 (tiga) indikator yang mengalami Peningkatan capaian yang signifikan, yaitu:

- Rata-rata lama pelayanan perizinan
- Jumlah Investasi Asing (PMA) US\$
- Nilai investasi (juta Rp)
- Persentase terpenuhinya stabilitas harga barang kebutuhan pokok dengan berkembangnya tertib usaha perdagangan serta kepastian perlindungan terhadap konsumen
- Tingkat cakupan pelayanan PDAM
- Rasio Pasar Tradisional yang memenuhi standar

Tabel 2.32
Capaian Kinerja Tujuan 9
Meningkatnya produktivitas dan pengembangan usaha kecil, menengah dan koperasi.

Indikator Sasaran	Satuan	2020			2021			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Persentase pembinaan koperasi yang berprestasi	%	100	100	100	100	0	0
2	Persentase koperasi aktif	%	87	80	91,95	90	70	77,78

3	Persentase penguatan kualitas dan pertumbuhan UMKM melalui pendampingan dan pelatihan	%	100	100	100	100	100	100
4	Cakupan perkembangan usaha mikro kecil menengah yang dibantu kredit perbankan	%	100	100	100	100	32	32
Rata- rata capaian Kinerja					97,99			52,44

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 52,44%, mengalami penurunan jika dibandingkan rata - rata capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 97,99%, sehingga dalam kategori **Kurang**. Penurunan ini dipengaruhi oleh 3 (tiga) indikator yang tidak mencapai target, yaitu:

- Persentase pembinaan koperasi yang berprestasi
- Persentase koperasi aktif
- Cakupan perkembangan usaha mikro kecil menengah yang dibantu kredit perbankan

Adanya refocusing anggaran ke penanganan Covid mengakibatkan beberapa kegiatan tidak dilaksanakan sehingga mengakibatkan capaian indikator menurun.

Tabel 2.33
Capaian Kinerja Tujuan 10
Meningkatkan destinasi pariwisata dan kunjungan wisatawan.

Indikator Sasaran	Satuan	2020			2021		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1 Jumlah Daya Tarik Wisata yang dikembangkan	DTW	7	0	0	25	0	0,00
2 Jumlah daya tarik wisata yang tertata	DTW	5	18	360	17	5	29,41
3 Persentase tingkat kunjungan wisatawan ke Kabupaten Karangasem	%	25	16	64	25	-99	-3,96
Rata- rata capaian Kinerja					141,33		8,48

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 8,48%, mengalami Penurunan jika dibandingkan rata - rata capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 141,33%, sehingga dalam kategori **Kurang**. Hal ini ini dipengaruhi oleh indikator kinerja Jumlah daya tarik wisata yang tertata mengalami peningkatan yang signifikan.

Tabel 2.34
Capaian Kinerja Tujuan 11
Meningkatnya kualitas pariwisata yang berbasis budaya dan kearifan lokal.

Indikator Sasaran	Satuan	2020			2021			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Jumlah Desa wisata yang dikembangkan sebagai daerah tujuan alternatif	DTW	3	3	100	15	8	53,33
2	Jumlah kelompok wisata yang sadar wisata dan menjalankan sapta pesona	Kelompok	3	3	100	18	8	44,44
Rata- rata capaian Kinerja					100			48,89

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 48,89%, mengalami penurunan jika dibandingkan rata - rata capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 100%, dengan kategori **Kurang**. Penurunan ini dipengaruhi oleh 1 (satu) indikator yang mengalami penurunan capain kinerja, yaitu:

- Jumlah Desa wisata yang dikembangkan sebagai daerah tujuan alternatif.
- Jumlah kelompok wisata yang sadar wisata dan menjalankan sapta pesona.

Tabel 2.35
 Capaian Kinerja Tujuan 12
 Meningkatnya pengendalian ruang dan harmonisasi rencana tata ruang sesuai
 dengan perkembangan teknologi, sosial ekonomi masyarakat.

Indikator Sasaran	Satuan	2020			2021		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1 Terpenuhinya penyelenggaraan penataan dan pengendalian penataan ruang	%	100	100	100	100	100	100,00
2 Indeks kualitas lingkungan hidup	indeks	68	66,27	97,46	68,5	66,27	96,74
3 Cakupan pengusaha bidang pertambangan bahan galian C yang terbina (pengusaha)	%	100	100	100	100	100	100,00
Rata- rata capaian Kinerja				99,15			98,91

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 98,91%, mengalami Penurunan jika dibandingkan rata - rata capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 99,15%, masih dalam kategori **Baik**. Penurunan ini dipengaruhi oleh 1 (satu) indikator yang mengalami peningkatan capain kinerja, yaitu:

- Indeks kualitas lingkungan hidup yang tahun sebelumnya 97,46 % dan di tahun 2021 hanya mendapatkan indeks 66,27 yang ditargetkan 68,5 dengan capaian 96,74%

Tabel 2.36
Capaian Kinerja Tujuan 13
Meningkatnya pembangunan infrastruktur pedesaan.

Indikator Sasaran	Satuan	2020			2021			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Persentase terlaksananya pembangunan infrastruktur	%	89	Tidak dihitung	Tidak dihitung	90	Tidak dihitung	Tidak dihitung
Rata-rata capaian Kinerja				0			0	

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja pada tahun 2020 tidak dapat disajikan dikarenakan kewenangan pembangunan infrastruktur pedesaan telah dikelola langsung oleh kedesaan masing-masing.

Tabel 2.37
Capaian Kinerja Tujuan 14
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana infrastruktur.

Indikator Sasaran	Satuan	2020			2021			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Persentase meningkatnya pengelolaan persampahan di kota Amalapura	%	84,5	50,35	59,58	89	70	78,65
2	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Km/unit	1.479,36 Km/ 227.203	1.446,39 Km/ 211.821	95,50	1.482,36 Km / 232.203 unit	1.446,39 Km / 171,327 unit	97,57
Rata-rata capaian Kinerja				77,54			88,11	

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 88,11%, mengalami peningkatan jika dibandingkan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 77,54%, walaupun demikian masih dalam kategori **Baik**. Peningkatan ini dipengaruhi oleh 2 (dua) indikator yaitu:

- Persentase meningkatnya pengelolaan persampahan di kota Amalapura yang tercapai 78,65% di tahun 2021 mengalami Peningkatan sebesar 24,25% dimana pada tahun 2019 tercapai 59,58%

- Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dimana pada tahun 2021 tercapai 97,57% turun sebesar 2,13% dari tahun 2020 yang tercapai 95,50%

Tabel 2.38
Capaian Kinerja Tujuan 15
Meningkatnya pembangunan dan kualitas sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pelayanan publik perdesaan.

Indikator Sasaran	Satuan	2020			2021		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1 Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas	Kasus	Tidak diukur	-	-	Tidak diukur	-	-

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja pada tahun 2020 tidak dapat disajikan dikarenakan kewenangan pembangunan dan kualitas sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pelayanan publik perdesaan telah dikelola langsung oleh kedesaan masing-masing.

Tabel 2.39
Capaian Kinerja Tujuan 16
Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama, pendidikan agama, serta sarana dan prasarana sosial dan keagamaan.

Indikator Sasaran	Satuan	2020			2021		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1 Persentase lembaga agama dan adat yang terfasilitasi penerimaan bantuan keuangan	%	100	100	100	100	100	100
2 Jumlah pertemuan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	kali per tahun	2	2	100	2	2	100
3 Jumlah kawasan desa yang dibentuk/dibina	Desa	1	1	100	8	1	12,50
4 Jumlah perpustakaan dan taman bacaan	buah	14	14	100	10	14	140
Rata- rata capaian Kinerja				100			88,12

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 88,12%, mengalami Penurunan jika dibandingkan rata - rata

capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 100%, sehingga dalam kategori **Baik**. Capaian ini dipengaruhi oleh indikator yang mengalami penurunan capaian yaitu: Jumlah kawasan desa yang dibentuk/dibina.

Tabel 2.40
Capaian Kinerja Tujuan 17
Meningkatnya kualitas kehidupan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Indikator Sasaran	Satuan	2020			2021		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1 Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMKS) yang mengalami peningkatan kualitas hidup,kemandirian dan keberfungsian sosial	Orang	618	550	89	900	-	0
	LKSA	1	1	100			
	unit	78	78	100			
2 Indeks Pemberdayaan Gender	%	61,98	60,77	98,05	61,98	63,91	103
3 Indeks Pembangunan Gender	Angka	76,92	88,87	115,54	76,92	88,93	116
4 Proporsi perempuan dan anak perempuan yang mengalami kekerasan	%	50	70,58	58,84	50	17	66
5 Angka Kelahiran pada Remaja 15-19 tahun (ASFR=Age Specific Fertility Rate)	Per 1000 penduduk	30 per 1000	38 per 1000	73,33	30 per 1000	38 per 1000	127
6 Persentase penduduk Karangasem yang tertib administrasi kependudukan	%	93	97,00	104	95	99,02	104
Rata-rata capaian Kinerja				92,35			85,94

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 85,94%, mengalami penurunan jika dibandingkan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 92,35%, walaupun demikian masih dalam kategori **Baik**. Penurunan ini dipengaruhi oleh 1 (satu) indikator yaitu:

- Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMKS) yang mengalami peningkatan kualitas hidup,kemandirian dan keberfungsian sosial 0 %
- Adanya refocusing anggaran ke penanganan Covid mengakibatkan beberapa kegiatan tidak dilaksanakan sehingga mengakibatkan capaian

indikator menurun. Disamping itu Dana Pusat dari Kementerian Sosial tidak turun dikarenakan ada Pandemi Covid19

Tabel 2.41
Capaian Kinerja Tujuan 18
Meningkatnya kualitas seni dan budaya masyarakat.

Indikator Sasaran	Satuan	2020			2021			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Persentase terpenuhinya perlindungan, pelestarian dan pengembangan nilai-nilai tradisinwarisan budaya dan pemanfaatan bidang kesenian	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase tercapainya penyelamatan Dokumen Arsip daerah	%	100	0	0	100	100	100
3	Jumlah gelar seni budaya yang dilaksanakan	kali per tahun	12	9	75	13	12	92
4	Jumlah peserta kelompok-kelompok seni budaya berbasis desa pakraman yang ikut pesta kesenian bali	sekaa	200	60	30	200	165	83
5	Jumlah seniman yang mendapat penghargaan	Seniman	112	49	43,75	112	0	0
Rata- rata capaian Kinerja					49,75			74,96

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 74,96%, mengalami peningkatan jika dibandingkan rata - rata capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 49,75%, dalam kategori **Cukup**. peningkatan ini dipengaruhi ada 2 (dua) indikator mengalami peningkatan dan 1 (satu) indikator tidak dilaksanakan yaitu:

- Jumlah seniman yang mendapat penghargaan

Tabel 2.42
Capaian Kinerja Tujuan 19
Terwujudnya peningkatan Wawasan Kebangsaan dan pemahaman demokrasi

Indikator Sasaran	Satuan	2020			2021			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilukada	%	92	71,03	77,21	95	71,03	75
2	Persentase Terlaksananya Penyuluhan Politik Masyarakat	%	100	0	0	100	100	100
3	Persentase desa/kelurahan dengan keamanan dan kenyamanan lingkungan terkendali	%	75	75	100	80	-	0
Rata- rata capaian Kinerja					59,07			58,26

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 58,26%, mengalami penurunan jika dibandingkan rata - rata capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 59,07%, dalam kategori **Cukup**. Penurunan ini dipengaruhi oleh rasionalisasi anggaran dan refocusing pada penanganan Covid 19 sehingga ada 1 (satu) indikator mengalami penurunan dan 1 (satu) indikator tidak dilaksanakan yaitu:

- Persentase desa/kelurahan dengan keamanan dan kenyamanan lingkungan terkendali

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui kategori capaian kinerja dari 19 tujuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem sebagai berikut :

Tabel 2.43
Rata-Rata Capaian dan Kategori Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2021

No	Tujuan	Rata-Rata Capaian	Kategori
1	Tujuan 1	131,2	Baik Sekali
2	Tujuan 2	100	Baik
2	Tujuan 3	105,54	Baik Sekali
4	Tujuan 4	67,37	Cukup
5	Tujuan 5	237,5	Baik Sekali
6	Tujuan 6	69,97	Cukup
7	Tujuan 7	58,59	Cukup
8	Tujuan 8	91,39	Baik
9	Tujuan 9	52,44	Kurang

10	Tujuan 10	8,48	Kurang
11	Tujuan 11	48,89	Kurang
12	Tujuan 12	98,91	Baik
13	Tujuan 13	0	kurang
14	Tujuan 14	88,11	Baik
15	Tujuan 15	0	Kurang
16	Tujuan 16	88,12	Baik
17	Tujuan 17	85,94	Baik
18	Tujuan 18	74,96	Cukup
19	Tujuan 19	59,07	Cukup
	Rata-Rata Capaian	77,18	Baik

Hasil analisis Pengukuran Kinerja terhadap 19 tujuan diketahui bahwa ada 3 tujuan yang masuk kategori capaian Baik Sekali, 4 tujuan masuk ke dalam kategori capaian Baik, 5 tujuan baru mencapai kategori Cukup dan 5 tujuan masih masuk ke dalam kategori Kurang. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 77,18% dengan kategori **Baik**.

d. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disusun sedemikian rupa yang dibagi dalam periode 5 tahun untuk dilaksanakan secara bertahap sehingga dapat mencapai target akhir. Tahun 2020 merupakan tahun kelima dari periode RPJMD Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021, oleh karena itu seharusnya capaian kinerja sudah mendekati target akhir dalam RPJMD. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Karangasem pada Tahun 2021 dibandingkan dengan target akhir RPJMD disajikan pada tabel yang dibagi ke dalam 19 tabel berdasarkan jumlah tujuan yang ditetapkan.

Tabel 2.44
Capaian Kinerja Tujuan 1
Meningkatkan jangkauan, ketersediaan pelayanan, dan kesetaraan dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas

	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2021	Target Akhir	Capaian
1	Persentase Penduduk Buta Aksara	%	1,91	12	628,27
2	Persentase satuan pendidikan formal tingkat SD terakreditasi minimal B	%	53,37	100	53,37
3	Persentase satuan pendidikan formal tingkat SMP terakreditasi minimal B	%	31,25	100	36,76

4	Persentase kelulusan SD/MI paket A	%	100	100	100
5	Persentase kelulusan SMP/MTs paket B	%	100	100	100
6	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%		100	0
7	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	%		99	0

Tabel 2.45
Capaian Kinerja Tujuan 2
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM)

	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2021	Target Akhir RPJMD	Capaian
1	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,42	12,42	100

Tabel 2.46
Capaian Kinerja Tujuan 3
Meningkatkan jangkauan, ketersediaan pelayanan, dan kesetaraan dalam bidang kesehatan yang berkualitas

	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2021	Target Akhir RPJMD	Capaian
1	Persentase pelayanan kesehatan Goes To Banjar (Pusling)	(%)	100	100	100,00
2	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	(%)	6,99	7	100,14
3	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 KH	148,10	90	60,77
4	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	Per 1000 KH	7,11	8	112,52
5	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup	Per 1000 KH	5,04	8	158,73
6	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	(%)	96	95	101,05

Tabel 2.47
Capaian Kinerja Tujuan 4
Meningkatnya peran pelayanan aparatur sipil negara yang berkarakter, bersih, berwibawa dan profesional.

	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2021	Target Akhir RPJMD	Capaian
1	Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawas Internal dan Eksternal yang ditindaklanjuti	%	100	90	111,11
2	Persentase penyelesaian kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS/aparatur	%	100	100	100
3	Persentase lelang jabatan untuk eselon tertentu sesuai dengan kebutuhan	%	100	70	142,86
4	Nilai evaluasi AKIP	Predikat	B	A	85,06
5	Persentase aparatur yang disiplin	%	99,97	100	99,97

6	Persentase desa yang terbina aparat pemerintah desanya	%	0	100	0
7	Jumlah aparat desa yang menerima penghargaan	Orang	0	275	0
8	Jumlah desa yang melaksanakan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	desa	0	75	0

Tabel 2.48
Capaian Kinerja Tujuan 5
Meningkatnya kualitas sikap mental dan kultur masyarakat dalam mendukung gerakan Karangasem Bersih dan Bermartabat.

Indikator Sasaran		Satuan	Realisasi 2021	Target Akhir RPJMD	Capaian
1	Jumlah organisasi tradisional (kelompok seni) yang ikut berpartisipasi dalam pagelaran seni budaya per tahun	sekaa	50	50	100
2	Jumlah penghargaan kepada lembaga tradisional dan organisasi kemasyarakatan yang mampu mengelola keuangan Daerah	lembaga	0	9	0
3	Jumlah tokoh masyarakat/kelompok masyarakat/lembaga pemerintah/lembaga adat yang diberikan penghargaan yang berprestasi dalam bidang lingkungan hidup	Orang/kelompok	49	8	612,5

Tabel 2.49
Capaian Kinerja Tujuan 6
Meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan

Indikator Sasaran		Satuan	Realisasi 2021	Target Akhir RPJMD	Capaian
1	Persentase tertatanya lingkungan sehat perumahan	%	10	10	100
2	Terbangunnya jalan kabupaten	Km	934,36	873.326	106,99
3	Jumlah keluarga miskin dan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi yang ditangani	Orang	303	6935	2,91

Tabel 2.50
Capaian Kinerja Tujuan 7
Meningkatnya produktivitas dan skala usaha hasil pertanian dalam arti luas.

Indikator Sasaran		Satuan	Realisasi 2021	Target Akhir RPJMD	Capaian
1	Jumlah produksi tanaman pangan (padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah)	Ton	165.376,67	283119,63	58,41
2	Jumlah prasarana yang disalurkan	Unit/	62	700	8,86
3	Jumlah sarana yang disalurkan	Ton	5.522,941	130,479	4,23
4	Persentase luas pertanaman aman dari serangan organisme pengganggu tumbuhan/dampak perubahan iklim dengan teknologi ramah lingkungan	%	95	97	97,94
5	Persentase Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	%	89,62	98,75	90,75
6	Jumlah produksi perikanan	Ton	26171	28660	91,32

Tabel 2.51
Capaian Kinerja Tujuan 8
Meningkatnya investasi dan daya saing produk industri terutama
agroindustri dan meningkatnya iklim perdagangan.

Indikator Sasaran		Satuan	Realisasi 2020	Target Akhir RPJMD	Capaian
1	Rata-rata lama pelayanan perizinan	hari	3	3	100
2	Jumlah Investasi Asing (PMA) US\$	US\$	2.661.052	2.661.052	100
3	Nilai investasi (juta Rp)	Juta Rp	171.765	171.765	101
4	Persentase Peningkatan Kualitas dan Kuantitas IKM	%	8,27	19,44	42,54
5	Persentase terpenuhinya stabilitas harga barang kebutuhan pokok dengan berkembangnya tertib usaha perdagangan serta kepastian perlindungan terhadap konsumen	%	111,17	100	111,17
6	Tingkat cakupan pelayanan PDAM	%	43,22	50,84	85,01
7	Rasio Pasar Tradisional yang memenuhi standar	%	100	100	100,00

Tabel 2.52
Capaian Kinerja Tujuan 9
Meningkatnya produktivitas dan pengembangan usaha kecil, menengah
dan koperasi.

Indikator Sasaran		Satuan	Realisasi 2021	Target Akhir RPJMD	Capaian
1	Persentase pembinaan koperasi yang berprestasi	%	0	100	0
2	Persentase koperasi aktif	%	70	90	77,78
3	Persentase penguatan kualitas dan pertumbuhan UMKM melalui pendampingan dan pelatihan	%	100	100	100
4	Cakupan perkembangan usaha mikro kecil menengah yang dibantu kredit perbankan	%	32	100	32

Tabel 2.53
Capaian Kinerja Tujuan 10
Meningkatkan destinasi pariwisata dan kunjungan wisatawan.

Indikator Sasaran		Satuan	Realisasi 2021	Target Akhir RPJMD	Capaian
1	Jumlah Daya Tarik Wisata yang dikembangkan	DTW	0	25	0,00
2	Jumlah daya tarik wisata yang tertata	DTW	5	17	29,41
3	Persentase tingkat kunjungan wisatawan ke Kabupaten Karangasem	%	-99	25	-3,96

Tabel 2.54
Capaian Kinerja Tujuan 11
Meningkatnya kualitas pariwisata yang berbasis budaya
dan kearifan lokal.

Indikator Sasaran		Satuan	Realisasi 2020	Target Akhir RPJMD	Capaian
1	Jumlah Desa wisata yang dikembangkan sebagai daerah tujuan alternatif	DTW	3	15	
2	Jumlah kelompok wisata yang sadar wisata dan menjalankan sapta pesona	Kelompok	3	18	

Tabel 2.55
Capaian Kinerja Tujuan 12
Meningkatnya pengendalian ruang dan harmonisasi rencana tata ruang
sesuai dengan perkembangan teknologi, sosial ekonomi masyarakat.

Indikator Sasaran		Satuan	Realisasi 2021	Target Akhir RPJMD	Capaian
1	Terpenuhinya penyelenggaraan penataan dan pengendalian penataan ruang	%	100	100	100
2	Indeks kualitas lingkungan hidup	indeks	66,27	68,5	96,74
3	Cakupan pengusaha bidang pertambangan bahan galian C yang terbina (pengusaha)	%	100	100	100

Tabel 2.56
Capaian Kinerja Tujuan 13
Meningkatnya pembangunan infrastruktur perdesaan.

Indikator Sasaran		Satuan	Realisasi 2021	Target Akhir RPJMD	Capaian
1	Persentase terlaksananya pembangunan infrastruktur	%	Tidak dihitung	90	Tidak bisa dihitung

Tabel 2.57
Capaian Kinerja Tujuan 14
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana infrastruktur.

Indikator Sasaran		Satuan	Realisasi 2021	Target Akhir RPJMD	Capaian
1	Persentase meningkatnya pengelolaan persampahan di kota Amalapura	%	70	85	78,65
2	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Km/unit	1,446.39 Km / 171,327 unit	1.482,36 Km / 232.203 unit	97,57

Tabel 2.58
Capaian Kinerja Tujuan 15
Meningkatnya pembangunan dan kualitas sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pelayanan publik perdesaan.

Indikator Sasaran		Satuan	Realisasi 2021	Target Akhir RPJMD	Capaian
1	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas	Kasus	-	Tidak Diukur	-

Tabel 2.59
Capaian Kinerja Tujuan 16
Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama, pendidikan agama, serta sarana dan prasarana sosial dan keagamaan.

Indikator Sasaran		Satuan	Realisasi 2021	Target Akhir RPJMD	Capaian
1	Persentase lembaga agama dan adat yang terfasilitasi penerimaan bantuan keuangan	%	100	100	100
2	Jumlah pertemuan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	kali per tahun	2	2	100
3	Jumlah kawasan desa yang dibentuk/dibina	Desa	1	8	12,50
4	Jumlah perpustakaan dan taman bacaan	buah	14	10	140

Tabel 2.60
Capaian Kinerja Tujuan 17
Meningkatnya kualitas kehidupan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Indikator Sasaran		Satuan	Realisasi 2021	Target Akhir RPJMD	Capaian
1	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mengalami peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan keberfungsian sosial	Orang	0	900	0
		LKSA			
		unit			
2	Indeks Pemberdayaan Gender	%	63,91	61,98	103

3	Indeks Pembangunan Gender	Angka	88,93	76,92	116
4	Proporsi perempuan dan anak perempuan yang mengalami kekerasan	%	17	50	66
5	Angka Kelahiran pada Remaja 15-19 tahun (ASFR=Age Spesific Fertility Rate)	Per 1000 penduduk	38 per 1000	30 per 1000	127
6	Persentase penduduk Karangasem yang tertib administrasi kependudukan	%	99,02	95	102

Tabel 2.61
Capaian Kinerja Tujuan 18
Meningkatnya kualitas seni dan budaya masyarakat.

Indikator Sasaran		Satuan	Realisasi 2021	Target Akhir RPJMD	Capaian %
1	Persentase terpenuhinya perlindungan, pelestarian dan pengembangan nilai-nilai tradisi warisan budaya dan pemanfaatan bidang kesenian	%	100	100	100
2	Persentase tercapainya penyelamatan Dokumen Arsip daerah	%	100	100	100
3	Jumlah gelar seni budaya yang dilaksanakan	kali per tahun	12	13	92
4	Jumlah peserta kelompok-kelompok seni budaya berbasis desa pakraman yang ikut pesta kesenian bali	sekaa	165	200	83
5	Jumlah seniman yang mendapat penghargaan	Seniman	0	112	0

Tabel 2.62
Capaian Kinerja Tujuan 19
Terwujudnya peningkatan Wawasan Kebangsaan dan pemahaman demokrasi

Indikator Sasaran		Satuan	Realisasi 2021	Target Akhir RPJMD	Capaian %
1	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilukada	%	71,03	100	75
2	Persentase Terlaksananya Penyuluhan Politik Masyarakat	%	100	100	100
3	Persentase desa/kelurahan dengan keamanan dan kenyamanan lingkungan terkendali	%	-	80	0

e. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai.

Tingkat efisiensi penggunaan anggaran di tahun 2021 pada Pemerintah Kabupaten Karangasem disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.63
Tingkat Efisiensi Tujuan 1
Meningkatkan jangkauan, ketersediaan pelayanan, dan kesetaraan dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas

Indikator Sasaran		Target Output	Target Input	Standar Efisiensi	Capaian Output	Capaian Input	Indeks Efisiensi	Tingkat Efisiensi
1	Persentase Penduduk Buta Aksara	100	100	1	15,92	90,26	0,18	0,82
2	Persentase satuan pendidikan formal tingkat SD terakreditasi minimal B	100	100	1	53,37	78,92	0,68	0,32
3	Persentase satuan pendidikan formal tingkat SMP terakreditasi minimal B	100	100	1	31,25	68,28	0,46	0,54
4	Persentase kelulusan SD/MI paket A	100	100	1	100,00	83,07	1,20	0,20
5	Persentase kelulusan SMP/MTs paket B	100	100	1	100,00	98,92	1,01	0,01
6	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	100	100	1	0,00	93,85	0,00	1,00
7	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	100	100	1	0,00	85,52	0,00	1,00

Tabel 2.4
Tingkat Efisiensi Tujuan 2
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM)

	Indikator Sasaran	Target Output	Target Input	Standar Efisiensi	Capaian Output	Capaian Input	Indeks Efisiensi	Tingkat Efisiensi
1	Harapan Lama Sekolah	100	100	1	100,00	2,26	44,30	43,30

Tabel 2.65
Tingkat Efisiensi Tujuan 3
Meningkatkan jangkauan, ketersediaan pelayanan, dan kesetaraan dalam bidang kesehatan yang berkualitas

	Indikator Sasaran	Target Output	Target Input	Standar Efisiensi	Capaian Output	Capaian Input	Indeks Efisiensi	Tingkat Efisiensi
1	Persentase pelayanan kesehatan Goes To Banjar (Pusling)	100	100	1	100,00	71,91	1,39	0,39
2	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	100	100	1	99,86	75,73	1,32	0,32
3	Angka Kematian Ibu (AKI)	100	Tidak ada anggaran	-	-	-	-	-
4	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	100	Tidak ada anggaran	-	-	-	-	-
5	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup	100	Tidak ada anggaran	-	-	-	-	-
6	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	100	100	1	101,05	85,96	1,18	0,18

Tabel 2.66
Tingkat Efisiensi Tujuan 4
Meningkatnya peran pelayanan aparatur sipil negara yang berkarakter, bersih, berwibawa dan profesional.

	Indikator Sasaran	Target Output	Target Input	Standar Efisiensi	Capaian Output	Capaian Input	Indeks Efisiensi	Tingkat Efisiensi
1	Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawas Internal dan	100	100	1	111,11	1,92	57,72	56,72

	Eksternal yang ditindaklanjuti							
2	Persentase penyelesaian kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS/aparatur	100	100	1	100,00	100,00	1,00	0,00
3	Persentase lelang jabatan untuk eselon tertentu sesuai dengan kebutuhan	100	100	1	142,86	100,00	1,43	0,43
4	Nilai evaluasi AKIP	100	100	1	85,06	72,33	1,18	0,18
5	Persentase aparatur yang disiplin	100	100	1	99,97	100	1,00	0,00
6	Persentase desa yang terbina aparat pemerintah desanya	100	100	1	100,00	98,54	1,01	0,01
7	Jumlah aparatur desa yang menerima penghargaan	100	100	1	100,00	99,30	1,01	0,01
8	Jumlah desa yang melaksanakan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	100	100	1	100,00	78,19	1,28	0,28

Tabel 2.67
Tingkat Efisiensi Tujuan 5
Meningkatnya kualitas sikap mental dan kultur masyarakat dalam mendukung gerakan Karangasem Bersih dan Bermartabat.

Indikator Sasaran		Target Output	Target Input	Standar Efisiensi	Capaian Output	Capaian Input	Indeks Efisiensi	Tingkat Efisiensi
1	Jumlah organisasi tradisional (kelompok seni) yang ikut berpartisipasi dalam pagelaran seni budaya per tahun	100	100	1	100,00	68,39	1,46	0,46
2	Jumlah penghargaan kepada lembaga tradisional dan organisasi kemasyarakatan yang mampu mengelola keuangan Daerah	100	Tidak ada anggaran	-	-	-	-	-

3	Jumlah tokoh asyarakat/kelompok masyarakat/lembaga pemerintah/lembaga adat yang diberikan penghargaan yang berprestasi dalam bidang lingkungan hidup	100	100	1	100	98	1,02	0,02
---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----	---	-----	----	------	------

Tabel 2.68
Tingkat Efisiensi Tujuan 6
Meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan

	Indikator Sasaran	Target Output	Target Input	Standar Efisiensi	Capaian Output	Capaian Input	Indeks Efisiensi	Tingkat Efisiensi
1	Persentase tertatanya lingkungan sehat perumahan	100	100	1	60	98,6	0,61	-0,39
2	Terbangunnya jalan kabupaten	100	100	1	106,99	94,03	1,14	0,14
3	Jumlah keluarga miskin dan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi yang ditangani	100	100	1	4,62	98,76	0,05	-0,95

Tabel 2.69
Tingkat Efisiensi Tujuan 7
Meningkatnya produktivitas dan skala usaha hasil pertanian dalam arti luas.

	Indikator Sasaran	Target Output	Target Input	Standar Efisiensi	Capaian Output	Capaian Input	Indeks Efisiensi	Tingkat Efisiensi
1	Jumlah produksi tanaman pangan (padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah)	100	100	1	58,41	90,23	0,65	-0,35
2	Jumlah prasarana yang disalurkan	100	100	1	8,86	94,91	0,09	-0,91
3	Jumlah sarana yang disalurkan	100	100	1	4232,82	93,11	45,46	44,46
4	Persentase luas pertanaman aman dari serangan organisme pengganggu tumbuhan/dampak perubahan iklim dengan teknologi ramah lingkungan	100	100	1	97,94	93,20	1,05	0,05

5	Persentase Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	100	100	1	100	98,46	1,02	0,02
6	Jumlah produksi perikanan	100	100	1	91,32	92,40	0,99	-0,01

Tabel 2.70
Tingkat Efisiensi Tujuan 8
Meningkatnya investasi dan daya saing produk industri terutama agroindustri dan meningkatnya iklim perdagangan.

	Indikator Sasaran	Target Output	Target Input	Standar Efisiensi	Capaian Output	Capaian Input	Indeks Efisiensi	Tingkat Efisiensi
1	Rata-rata lama pelayanan perizinan	100	100	1	42,54	84,77	0,50	-0,50
2	Jumlah Investasi Asing (PMA) US\$	100	100	1	111,17	95,31	1,17	0,17
3	Nilai investasi dalam negeri (juta Rp)	100	100	1	83,67	85,20	0,98	-0,02
4	Persentase Peningkatan Kualitas dan Kuantitas IKM	100	100	1	42,54	84,77	0,50	-0,50
5	Persentase terpenuhinya stabilitas harga barang kebutuhan pokok dengan berkembangnya tertib usaha perdagangan serta kepastian perlindungan terhadap konsumen	100	100	1	111,17	95,31	1,17	0,17
6	Tingkat cakupan pelayanan PDAM	100	100	1	67,69			
7	Rasio Pasar Tradisional yang memenuhi standar	100	100	1	76,39	99,87	0,76	-0,24

Tabel 2.71
Tingkat Efisiensi Tujuan 9
Meningkatnya produktivitas dan pengembangan usaha kecil, menengah dan koperasi.

	Indikator Sasaran	Target Output	Target Input	Standar Efisiensi	Capaian Output	Capaian Input	Indeks Efisiensi	Tingkat Efisiensi
1	Persentase pembinaan koperasi yang berprestasi	100	100	1	100,00	96,49	1,04	0,04
2	Persentase koperasi aktif	100	100	1	77,78	81,26	0,96	-0,04
3	Persentase penguatan kualitas dan pertumbuhan UMKM melalui pendampingan dan pelatihan	100	100	1	100,00	95,29	1,05	0,05

4	Cakupan perkembangan usaha mikro kecil menengah yang dibantu kredit perbankan	100	100	1	32,00	95,37	0,34	-0,66
---	-------------------------------------------------------------------------------	-----	-----	---	-------	-------	------	-------

Tabel 2.72
Tingkat Efisiensi Tujuan 10
Meningkatkan destinasi pariwisata dan kunjungan wisatawan.

	Indikator Sasaran	Target Output	Target Input	Standar Efisiensi	Capaian Output	Capaian Input	Indeks Efisiensi	Tingkat Efisiensi
1	Jumlah Daya Tarik Wisata yang dikembangkan	100	Tidak ada anggaran	-	-	-	-	-
2	Jumlah daya tarik wisata yang tertata	100	100	1	29,41	70,15	0,42	-0,58
3	Persentase tingkat kunjungan wisatawan ke Kabupaten Karangasem	100	100	1	-396,00	71,94	-5,50	-6,50

Tabel 2.73
Tingkat Efisiensi Tujuan 11
Meningkatnya kualitas pariwisata yang berbasis budaya dan kearifan lokal.

	Indikator Sasaran	Target Output	Target Input	Standar Efisiensi	Capaian Output	Capaian Input	Indeks Efisiensi	Tingkat Efisiensi
1	Jumlah Desa wisata yang dikembangkan sebagai daerah tujuan alternatif	100	100	1	53,33	39,42	1,35	0,35
2	Jumlah kelompok wisata yang sadar wisata dan menjalankan sapta pesona	100	100	1	44,44	39,42	1,13	0,13

Tabel 2.74
Tingkat Efisiensi Tujuan 12
Meningkatnya pengendalian ruang dan harmonisasi rencana tata ruang sesuai dengan perkembangan teknologi, sosial ekonomi masyarakat.

	Indikator Sasaran	Target Output	Target Input	Standar Efisiensi	Capaian Output	Capaian Input	Indeks Efisiensi	Tingkat Efisiensi
1	Terpenuhinya penyelenggaraan penataan dan pengendalian penataan ruang	100	100	1	100,00	99,23	1,01	0,01
2	Indeks kualitas lingkungan hidup	100	100	1	96,74	97,85	0,99	-0,01
3	Cakupan pengusaha bidang pertambangan	100	100	1	100	88	1,14	0,14

bahan galian C yang terbina (pengusaha)							
-----------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Tabel 2.75
Tingkat Efisiensi Tujuan 13
Meningkatnya pembangunan infrastruktur perdesaan.

Indikator Sasaran	Target Output	Target Input	Standar Efisiensi	Capaian Output	Capaian Input	Indeks Efisiensi	Tingkat Efisiensi
1 Persentase terlaksananya pembangunan infrastruktur	100	Tidak ada anggaran	1	Tidak dihitung	-	-	-

Tabel 2.76
Tingkat Efisiensi Tujuan 14
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana infrastruktur.

Indikator Sasaran	Target Output	Target Input	Standar Efisiensi	Capaian Output	Capaian Input	Indeks Efisiensi	Tingkat Efisiensi
1 Persentase meningkatnya pengelolaan persampahan di kota Amalpura	100	100	1	82,35	97,71	0,84	-0,16
2 Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	100	100	1	97,57	81,25	1,20	0,20

Tabel 2.77
Tingkat Efisiensi Tujuan 15
Meningkatnya pembangunan dan kualitas sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pelayanan publik perdesaan.

Indikator Sasaran	Target Output	Target Input	Standar Efisiensi	Capaian Output	Capaian Input	Indeks Efisiensi	Tingkat Efisiensi
1 Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas	Tidak diukur	-	-	Tidak diukur	-	-	-

Tabel 2.78
Tingkat Efisiensi Tujuan 16
Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama, pendidikan agama, serta sarana dan prasarana sosial dan keagamaan.

Indikator Sasaran	Target Output	Target Input	Standar Efisiensi	Capaian Output	Capaian Input	Indeks Efisiensi	Tingkat Efisiensi
1 Persentase lembaga agama dan adat yang terfasilitasi penerimaan bantuan keuangan	100	100	1	100,00	84,15	1,19	0,19

2	Jumlah pertemuan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	100	100	1	100,00	80,09	1,25	0,25
3	Jumlah kawasan desa yang dibentuk/dibina	100	100	1	0,00	99,73	0,00	-1,00
4	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	100	-	-	Blm ada data dr BPS	-	-	-
6	Jumlah perpustakaan dan taman bacaan	100	100	1	100	96,28	1,04	0,04

Tabel 2.79
Tingkat Efisiensi Tujuan 17
Meningkatnya kualitas kehidupan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Indikator Sasaran		Target Output	Target Input	Standar Efisiensi	Capaian Output	Capaian Input	Indeks Efisiensi	Tingkat Efisiensi
1	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mengalami peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan keberfungsian sosial	100	100	1	96,33	32,44	2,97	1,97
2	Indeks Pemberdayaan Gender	100	100	1	103,11	99,86	1,03	0,03
3	Indeks Pembangunan Gender	100	100	1	115,61	98,97	1,17	0,17
4	Proporsi perempuan dan anak perempuan yang mengalami kekerasan	100	100	1	34,00	97,24	0,35	-0,65
5	Angka Kelahiran pada Remaja 15-19 tahun (ASFR=Age Specific Fertility Rate)	100	100	1	126,67	56,41	2,25	1,25
6	Persentase penduduk Karangasem yang tertib administrasi kependudukan	100	100	1	104,23	86,53	1,20	0,20

Tabel 2.80
Tingkat Efisiensi Tujuan 18
Meningkatnya kualitas seni dan budaya masyarakat.

Indikator Sasaran		Target Output	Target Input	Standar Efisiensi	Capaian Output	Capaian Input	Indeks Efisiensi	Tingkat Efisiensi
1	Persentase terpenuhinya perlindungan, pelestarian dan pengembangan nilai-nilai tradisinwarisan budaya dan pemanfaatan bidang kesenian	100	100	1	10000,00	95,98	104,19	103,19
2	Persentase tercapainya penyelamatan Dokumen Arsip daerah	100	100	1	0	88,57	0,00	-1,00
3	Jumlah gelar seni budaya yang dilaksanakan	100	100	1	92,31	94,57	0,98	-0,02
4	Jumlah peserta kelompok-kelompok seni budaya berbasis desa pakraman yang ikut pesta kesenian bali	100	100	1	82,50	68,39	1,21	0,21
5	Jumlah seniman yang mendapat penghargaan	100	Tidak ada anggaran	-	-	-	-	-

Tabel 2.81
Tingkat Efisiensi Tujuan 19
Terwujudnya Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan pemahaman demokrasi

Indikator Sasaran		Target Output	Target Input	Standar Efisiensi	Capaian Output	Capaian Input	Indeks Efisiensi	Tingkat Efisiensi
1	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilukada	100	100	1	74,77	88,84	0,84	-0,16
2	Persentase Terlaksananya Penyuluhan Politik Masyarakat	100	100	1	100,00	88,49	1,13	0,13
3	Persentase desa/kelurahan dengan keamanan dan kenyamanan lingkungan terkendali	100	100	1	100,00	68,20	1,47	0,47

f. Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja.

Tabel 2.82
Program yang mendukung capaian Kinerja

NO	Sasaran/ Indikator Sasaran		Program Kegiatan yang mendukung	Keuangan			
				Anggaran	Realisasi	Capaian	SiLPA
1	Meningkatnya angka melek huruf dan tuntasnya wajib belajar 9 (sembilan) tahun.						
	1.1	Persentase Penduduk Buta Aksara	Tidak ada				
2	Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur pendidikan SD sampai dengan SMP yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal.						
	2.1	Persentase satuan pendidikan formal tingkat SD terakreditasi minimal B	Tidak ada				
	2.2	Persentase satuan pendidikan formal tingkat SMP terakreditasi minimal B	Penyiapan Akreditasi SMP	2.456.000	2.453.000	99,88	3.000
3	Menurunnya angka putus sekolah dan meningkatnya tingkat kelulusan SD-SMP dan SMA/SMK atau sederajat.						
	3.1	Persentase kelulusan SD/MI paket A	Ujian Akhir Sekolah SD/MI/SDLB	150.770.000	148.570.000	98,54	2.200.000
	3.2	Persentase kelulusan SMP/MTs, Paket B	Tidak ada				
4	Meningkatnya prestasi murid SD dan SMP serta meningkatnya angka partisipasi sekolah.						
	4.1	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	Pemberian Beasiswa SD	4.569.516.897	4.518.591.630	98,89	50.925.267
	4.2	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	Beasiswa SMP	1.645.000.050	1.606.099.050	97,64	38.901.000
5	Meningkatnya lulusan perguruan tinggi di Kabupaten Karangasem.						
	5.1	APK Perguruan Tinggi	Bukan kewenangan				
6	Meningkatnya rata-rata lama sekolah dan derajat pendidikan.						
	6.1	Harapan Lama Sekolah	Tidak ada				
10	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan masyarakat						
	10.1	Persentase pelayanan kesehatan Goes To Banjar (Pusling)	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	30.000.000	7.800.000	26,00	22.200.000
11	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.						
	11.1	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	173.275.000	72.535.000	41,86	100.740.000
	11.2	Angka Kematian Ibu (AKI)	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	1.504.812.000	628.333.600	41,75	876.478.400

	11.3	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	393.779.000	41.226.000	10,47	352.553.000
	11.4	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	591.190.000	46.675.000	7,90	544.515.000
12	Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang memenuhi standar kesehatan						
	12.1	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	1.209.601.751	1.209.147.643	99,96	454.108
13	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik perangkat daerah.						
	13.1	Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawas Internal dan Eksternal yang ditindaklanjuti	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	25.055.900	24.415.250	97,44	640.650
14	Meningkatnya disiplin PNS						
	14.1	Persentase penyelesaian kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS/Aparatur	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur / Kegiatan Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS	4.579.800	4.565.200	99,68	14.600
15	Meningkatnya kompetensi dan profesional PNS						
	15.1	Persentase lelang jabatan untuk eselon tertentu sesuai dengan kebutuhan	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur/ Kegiatan Penempatan PNS	412.472.550	232.925.681	56,47	179.546.869
16	Meningkatnya kinerja laporan keuangan perangkat daerah						
	16.1	Nilai Evaluasi AKIP	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan/Kegiatan Penyusunan dan Penilaian LAKIP Kabupaten Karangasem	11.459.900	11.459.900	100	0
17	Meningkatnya prestasi PNS dan menurunnya jumlah penerima sanksi						
	17.1	Persentase aparatur yang disiplin	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH/ Kegiatan Pembinaan Gerakan Disiplin Nasional	5.159.700	5.159.701	100	0
7	Meningkatnya kualitas aparatur desa melalui bintek dan pelatihan						
	7.1	Persentase desa yang terbina aparat pemerintah desanya	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	0	0	0	0
8	Meningkatnya kesejahteraan aparatur desa sesuai peraturan perundang-undangan.						
	8.1	Jumlah aparatur desa yang menerima penghargaan	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	0	0	0	0
9	Meningkatnya pendampingan teknis pengelolaan pembangunan bagi Desa						

	Pekraman.						
	9.1	Jumlah desa yang melaksanakan BBGRM	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	0	0	0	0
18	Meningkatnya partisipasi Desa Pekraman dan organisasi tradisional dan kemasyarakatan dalam pengembangan budaya yang mendukung Karangasem Bersih dan Bermartabat						
	18.1	Jumlah organisasi tradisional (kelompok seni) yang ikut berpartisipasi dalam pagelaran seni budaya per tahun	Program Pengembangan Kreatifitas Seni dan Budaya/ Kegiatan Pelaksanaan Event Seni Budaya	79.000.000	32.937.600	41,69	46.062.400
19	Meningkatnya kompetensi lembaga tradisional dan organisasi kemasyarakatan yang mampu mengelola keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku						
	19.1	Jumlah penghargaan kepada lembaga tradisional dan organisasi kemasyarakatan yang mampu mengelola keuangan Daerah	Tidak ada				
20	Meningkatnya partisipasi para tokoh masyarakat lembaga pemerintah, lembaga adat dan kelompok lainnya yang mendukung gerakan Karangasem Bersih dan Bermartabat						
	20.1	Jumlah tokoh masyarakat/kelompok masyarakat/lembaga pemerintah/lembaga adat yang berprestasi dalam bidang lingkungan hidup	Program Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup/ Kegiatan Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	93.216.700	93.216.700	98	1.323.250
21	Meningkatnya pemerataan pemenuhan kebutuhan pangan dan rumah layak huni bagi keluarga miskin						
	21.1	Persentase tertatanya lingkungan sehat perumahan	Program Lingkungan Sehat Perumahan/ Kegiatan Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan	28.986.100	28.581.100	98,6	405.000
	21.2	Rasio rumah layak huni	Program Pengembangan Perumahan	83.736.300	83.548.100	99,78	182.200
22	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana utilitas umum, panjang jalan dalam kondisi baik						
	22.1	Terbangunnya Jalan Kabupaten (Km)	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan/ Kegiatan Pembangunan Jalan	2.983.244.700	2.902.440.857	98,66	39.508.843
			Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan/ 1. Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten 2. Kegiatan Peningkatan Jalan Kabupaten	10.446.286.618 5.573.536.800	9.838.849.885 5.045.987.692	94,19 90,53	607.436.733 527.549.108

	22.2	Jumlah Desa Rawan Air (Desa)	Tidak ada				
23	Meningkatnya usaha ekonomi produktif bagi keluarga miskin.						
	23.1	Jumlah keluarga miskin dan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi yang ditangani	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya/Kegiatan Pelatihan Keterampilan Bagi Keluarga Miskin	24.041.400	23.743.100	98,76	298.300
24	Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan/pertanian (produksi sektor pertanian).						
	24.1	Jumlah produksi tanaman pangan (padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah)	Pengembangan Intensifikasi Tanaman Pangan	13.630.500	12.718.208	93,31	912.292
25	Meningkatnya sarana produksi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan						
	25.1	Jumlah prasarana yang disalurkan	Pembinaan Alsintan	2.751.000	2.603.000	94,62	148.000
			Pengelolaan lahan dan air	5.627.500	5.498.500	97,71	129.000
			Penanganan Pasca panen dan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan	3.631.700	3.457.700	95,21	174.000
			Penanganan Pasca panen dan pengolahan hasil pertanian tanaman hortikultura	3.631.300	3.497.350	96,31	133.950
			Penanganan Pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan	2.993.000	2.765.650	92,4	227.350
	25.2	Jumlah sarana yang disalurkan	Pembibitan dan perawatan ternak	13.948.200	13.209.200	94,7	739.000
			Pendampingan Simantri	6.016.000	5.696.100	94,68	319.900
			Pengembangan Intensifikasi Tanaman Pangan	13.630.500	12.718.208	93,31	912.292
			Peningkatan kualitas bahan baku tanaman tembakau	372.621.880	354.736.500	95,2	17.885.380
26	Meningkatnya pengembangan menghasilkan varietas baru tanaman pertanian						
	26.1	Persentase luas pertanaman aman dari serangan organisme pengganggu tumbuhan/dampak perubahan iklim dengan teknologi ramah lingkungan	Pengendalian Organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman hortikultura	4.408.000	4.214.050	95,6	193.950
			Pengendalian Organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan	6.005.500	4.832.114	80,46	1.173.386
27	Meningkatnya angka kecukupan pangan						
	27.1	Persentase Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan/ Kegiatan Pengembangan ketersediaan pangan daerah	16.293.500	16.043.150	98,46	250.350
28	Meningkatnya produksi perikanan						
	28.1	Jumlah produksi perikanan	1.1 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan	11.111.800	10.908.122	98,17	203.678

		1. Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Perikanan Budidaya				
			1.2. Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit	226.150.366	38.180.000	16.88	187.970.366
			1.3. Pembangunan Pengembangan Pembenuhan Ikan	8.243.500	8.003.800	97.09	239.700
			1.4. Pembangunan Pengembangan Kawasan Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar	32.006.400	30.015.350	93.78	1.991.050
		2. Program Pengembangan Perikanan Tangkap	2.1 Kegiatan Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	13.970.700	11.714.700	83.85	2.256.000
			2.2. Kegiatan Pendampingan pada Kelompok Nelayan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	17.400.700	16.633.650	95.59	767.050
29		Meningkatnya kemudahan pelayanan perizinan					
	29.1	Rata-rata lama pelayanan perizinan (hari)	Program Bidang Pelayanan Bidang Perizinan	513.353.617	485.082.950	94.49	28.270.667
			Program Penyampaian Informasi dan Pengaduan Masyarakat	44.301.246	41.562.400	93.82	2.738.846
30		Meningkatnya jumlah investasi.					
	30.1	Jumlah Investasi Asing (PMA) US\$	Program Peningkatan koordinasi dan kerjasama investasi	54.678.250	51.563.000	94.30	3.115.250
	30.2	Nilai investasi dalam negeri	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	8.735.900	7.443.150	85.20	1.292.750
31		Meningkatnya industri kecil menengah dan kerajinan rumah tangga					
	31.1	Persentase Peningkatan Kualitas dan Kuantitas IKM	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	76.211.800	73.301.250	96	2.910.550
32		Meningkatnya perdagangan dalam negeri.					
	32.1	Persentase terpenuhinya stabilitas harga barang kebutuhan pokok dengan berkembangnya tertib usaha perdagangan serta kepastian perlindungan terhadap konsumen	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	140.285.800	137.435.950	98	2.849.850
33		Meningkatnya kinerja pengelolaan BUMD					
	33.1	Tingkat cakupan pelayanan PDAM					
34		Meningkatnya daya saing pasar tradisional					
	34.1	Rasio Pasar Tradisional yang memenuhi standar	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	5.931.418.215	5.923.729.095	99,87	7.689.120
35		Meningkatnya modal usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi					
	35.1	Persentase Pembinaan Koperasi yang Berprestasi	Pembinaan Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	162.162.000	133.055.900	82,05	29.106.100

36	Meningkatnya koperasi yang aktif.						
	36.1	Persentase Koperasi aktif	Monev Laporan Koperasi	4.400.000	4.261.700	96,86	138.300
37	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi						
	37.1	Persentase penguatan kualitas dan Pertumbuhan UMKM melalui pendampingan dan pelatihan	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	4.003.800	3.995.000	99	8.800
38	Meningkatnya penyaluran kredit perbankan pada petani, nelayan, dan pedagang kecil						
	38.1	Cakupan perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi yang dibantu kredit perbankan	Monev Usaha Mikro	4.620.150	4.620.150	99	38.450
39	Meningkatnya daya tarik wisata yang sedang berkembang		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata/ Kegiatan Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	4.935.085.500	1.605.077.490	32	3.330.008.010
	39.1	Jumlah daya tarik wisata yang dikembangkan					
40	Meningkatnya penataan kawasan pariwisata dan daya tarik wisata						
	40.1	Jumlah daya tarik wisata yang tertata					
41	Meningkatnya promosi pariwisata baik dalam negeri maupun luar negeri.						
	41.1	Persentase tingkat kunjungan wisatawan ke Kabupaten Karangasem	Pengembangan Pemasaran Pariwisata/ Kegiatan Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara didalam dan di luar negeri	1.387.032.500	1.198.092.247	86	188.940.253
42	Meningkatnya pengembangan pariwisata spiritual						
	42.1	Jumlah Desa Wisata yang dikembangkan sebagai daerah tujuan wisata alternatif	Pengembangan Kemitraan / Kegiatan Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	1.079.399.667	1.069.732.050	99	9.667.617
43	Meningkatnya pengembangan pariwisata yang berwawasan lingkungan						
	43.1	Jumlah kelompok wisata yang sadar wisata dan menjalankan sapta pesona	Pengembangan Pariwisata Alternatif/ Kegiatan Pembinaan dan pengembangan desa wisata	124.124.667	117.886.700	95	6.237.967
44	Meningkatnya ketersediaan perencanaan tata ruang						
	44.1	Terpenuhinya penyelenggaraan penataan dan pengendalian penataan ruang	Program Perencanaan Tata Ruang, Kegiatan Penetapan Kebijakan RDTRK, RTRK	17.843.000	15.670.593	87,82	2.172.407
45	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup, dan perlindungan sumber daya alam						
	45.1	Indeks kualitas lingkungan hidup	Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	239.224.400	235.168.160	98,30	4.056.240

46	Meningkatnya efektivitas pengelolaan konservasi dan rehabilitasi eks galian C						
	46.1	Cakupan pengusaha bidang pertambangan bahan galian C yang terbina (pengusaha)	Kegiatan Pengawasan Penaatan dokumen lingkungan	52.786.800	46.245.520	88	6.541.280
47	Meningkatnya infrastruktur jalan, jembatan, air bersih, listrik, sanitasi, irigasi terutama kawasan perdesaan						
	47.1	Persentase terlaksananya pembangunan Infrastruktur	Kegiatan Pengawasan Penaatan dokumen lingkungan	52.786.800	46.245.520	88	6.541.280
48	Meningkatnya pengelolaan persampahan						
	48.1	Persentase meningkatnya pengelolaan persampahan di Kota Amlapura	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan/ Kegiatan Pelayanan angkutan persampahan	1.673.535.408	1.617.879.550	97	55.655.858
			Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	5.724.516.800	5.720.486.950	100	4.029.850
			Kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Pengelolaan Akhir Sampah	889.472.650	842.759.450	95	44.853.200
			Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	5.724.516.800	5.720.486.950	100	48.883.050
			Kegiatan Pemungutan Retribusi	93.482.750	79.762.850	85	13.719.900
49	Meningkatnya kualitas ruas jalan yang mendukung kegiatan ekonomi produktif						
	49.1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	245.818.650	152.126.000	61,89	93.692.650
50	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor desa/kelurahan.						
	50.1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	Tidak ada				
51	Meningkatnya kualitas trotoar, penerangan jalan dan taman						
	51.1	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas	Tidak diukur				
52	Meningkatnya bantuan keuangan kepada lembaga agama dan adat						
	52.1	Persentase lembaga agama dan adat yang terfasilitasi penerimaan bantuan keuangan	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya/ Kegiatan Fasilitasi Bantuan kepada Lembaga adat/ tradisional	41.243.200	23.519.626	57,03	17.723.574
53	Meningkatnya kualitas dan peranan lembaga agama dan adat melalui pembinaan dan penyuluhan						
	53.1	Persentase pembinaan sekaa truna di tingkat kecamatan, kabupaten dan propinsi	Tidak ada				

54	Meningkatnya koordinasi serta peran Forum Komunikasi Antar Umat Beragama dalam mewujudkan Karangasem yang Bermartabat						
	54.1	Jumlah pertemuan FKUB	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	2.461.900	1.250.000	50,77	1.211.900
55	Meningkatnya kapasitas lembaga pesraman di masing-masing Desa Pekraman						
	55.1	Jumlah kawasan desa yang dibentuk/dibina	Program Pemberdayaan Kawasan Perdesaan	4.698.000	4.685.400	99,73	12.600
56	Meningkatnya sarana dan prasarana tempat ibadah						
	56.1	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	Tidak ada data capaian dari BPS				
57	Meningkatnya sarana dan prasarana sosial kemasyarakatan						
	57.1	Jumlah perpustakaan dan taman bacaan	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 1.1 Operasional mobil/motor pintar	2.326.500	2.305.500	99,10	21.000
			1.2 Operasional perpustakaan keliling	2.600.500	2.430.400	93,46	170.100
58	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dan kesejahteraan kepada fakir miskin, anak terlantar dan kaum lansia						
	58.1	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMKS) yang mengalami peningkatan kualitas hidup,kemandirian dan keberfungsian sosial	1.1 Pelatihan dan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	24.041.400	23.743.100	100%	298.300
		1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan PMKS Lainnya	1.2 Koordinasi dan Sosialisasi Program Keluarga Harapan	51.734.050	51.726.422	99,98	7.628
			1.3 Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	32.230.800	30.051.350	88,80	2.179.450
		2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	2.1 Penanganan Masalah - Masalah Strategis yang menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa	128.377.900	73.625.675	67,22	54.752.255
59	Meningkatnya kualitas layanan terhadap kaum perempuan						
	59.1	Indeks Pemberdayaan Gender	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	43.104.800	34.964.050	81,11	8.140.750
	59.2	Indeks Pembangunan Gender	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	21.734.800	19.643.750	90,38	2.091.050
60	Meningkatnya kualitas perlindungan terhadap perempuan dan anak						

	60.1	Proporsi perempuan dan anak perempuan yang mengalami kekerasan	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	39.058.600	34.980.100	90	4.078.500
61	Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan, generasi muda, kepemudaan dan keolahragaan						
	61.1	Angka Kelahiran pada Remaja 15-19 tahun (ASFR=Age Spesific Fertility Rate)	Program keluarga Berencana	2.745.298.000	2.404.692.571	87,58	340.605.429
	61.2	Persentase penduduk Karangasem yang tertib administrasi kependudukan	Program Penataan Administrasi Kependudukan	2.117.546.050	1.809.724.728	85,46	307.821.322
62	Meningkatnya kualitas dan pengembangan seni dan budaya yang hampir punah						
	62.1	Persentase terpenuhinya perlindungan, pelestarian dan pengembangan nilai-nilai tradisi warisan budaya dan pemanfaatan bidang kesenian	Program Pengembangan Nilai Budaya/ Kegiatan Pelestarian dan Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda	53.450.400	51.853.750	97,01	1.596.650
63	Meningkatnya perlindungan aset-aset pusaka dan kearifan lokal yang ada di masyarakat						
	63.1	Persentase tercapainya penyelamatan Dokumen Arsip daerah	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah / Penelusuran Dokumen Arsip Daerah	669.000	592.500	88,57	76.500
64	Meningkatnya kreativitas dan atraksi seni dan budaya						
	64.1	Jumlah gelar seni budaya yang dilaksanakan	Program Pengembangan Kreatifitas Seni dan Budaya/ Kegiatan Pelaksanaan Event Seni Budaya	79.000.000	32.937.600	41,69	46.062.400
65	Meningkatnya seni budaya berbasis Desa Pekraman dalam rangka mendukung PKB						
	65.1	Jumlah peserta kelompok-kelompok seni budaya berbasis Desa Pekraman yang ikut Pesta Kesenian Bali	Program Pengelolaan Keragaman Budaya/ Kegiatan Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	5.473.900	5.473.900	100	0
66	Meningkatnya penghargaan terhadap para seniman, budayawan dan penggiat seni lainnya						
	66.1	Jumlah seniman yang mendapat penghargaan	Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Bidang Kebudayaan / Kegiatan Pemberian Dukungan/ Penghargaan Kepada Seniman dan Budayawan	0	0	0	0
67	Meningkatnya wawasan kebangsaan dan demokrasi						
	67.1	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilukada	Pendidikan Politik Masyarakat	143716000	130338100	90,69	13377.900
68	Meningkatnya advokasi dan pendidikan politik masyarakat.						
	68.1	Persentase Terlaksananya Penyuluhan Politik Masyarakat	Tidak ada				

69	Meningkatnya ketertiban dan keamanan berbasis kearifan lokal						
	69.1	Persentase desa/kelurahan dengan keamanan dan kenyamanan lingkungan terkendali	Patroli Wilayah dan Trantibum	166.235.450	150.130.400	90,31	16.105.050

BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten

Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk Tahun Anggaran 2021, tidak menerima Tugas Pembantuan dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah Pusat, jadi pelaksanaan tugas pembantuan tahun 2021 nihil.

3.1.1 Target Kinerja

3.1.2 Realisasi

Tabel 3.1
Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat
yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten Karangasem

NO.	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUPUT, DAN RINCIAN KEGAIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	NIHIL										
2.											

3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten

Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk Tahun Anggaran 2021, tidak menerima Tugas Pembantuan dari Pemerintah Provinsi Bali, jadi pelaksanaan tugas pembantuan tahun 2021 nihil.

3.2.1 Target Kinerja

3.2.2 Realisasi

Tabel 3.2

Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat
yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten Karangasem

NO.	BIDANG URS	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUPUT, DAN RINCIAN KEGAIATAN	KAB/KOTA	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	NIHIL										
2.											

3.3 Permasalahan dan Kendala

-

3.4 Saran dan Tindak Lanjut

-

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 Urusan Pendidikan

Penerapan SPM Bidang Urusan Pendidikan di Kabupaten Karangasem dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karangasem sebagai implementasi dari kebijakan dan strategi penanganan masalah-masalah Pendidikan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan dijadikan acuan dalam target pencapaiannya.

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan

SPM Bidang Urusan Pendidikan merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.

SPM Pendidikan di dalamnya mencakup penerima pelayanan dasar, jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar, dan tata cara pemenuhan pelayanan dasar.

Adapun Penerima pelayanan dasar terdapat pada:

1. SPM pendidikan anak usia dini merupakan peserta didik berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
2. SPM pendidikan dasar merupakan peserta didik berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.
3. SPM pendidikan kesetaraan merupakan peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

4. SPM pendidikan menengah merupakan peserta didik yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.
5. SPM pendidikan khusus merupakan peserta didik penyandang disabilitas yang berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

Sedangkan Jenis pelayanan dasar pada SPM pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

4.1.2 Target Capaian SPM Serta Realisasi Urusan Pendidikan

Tabel 4.1

Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Pendidikan
Kabupaten Karangasem Tahun 2021

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Indikator capaian /Output			Total Pencapaian
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD/MI,SMP/MTs)			84.25 %
		<i>jumlah total yang harus dilayani</i>	<i>jumlah total yang Terlayani</i>	<i>yang belum Terlayani</i>	
	Jumlah yang Harus Dilayani	60.700 orang	56.753 orang	3947 orang	93.50 %
		<i>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan</i>	<i>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia</i>	<i>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia</i>	
	Buku Teks Pelajaran	0 buah	0 buah	0 buah	100%
	Perlengkapan Belajar	0 buah	0 buah	0 buah	100%
	Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	404 orang	404 orang	0 rombel	100%
	Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga	615 orang	615 orang	0 rombel	100%

	lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat				
	jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	2.952 rombel	2952 rombel	0 rombel	100%
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	1.829.724.850 Rupiah	1.829.724.850 Rupiah	0 rupiah	100%
	Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	3.557 orang	3557 orang	0 orang	100%
	satuan pendidikan yang berakreditasi minimal c	404 satuan pendidikan	404 satuan pendidikan	0 satuan pendidikan	100%
2.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan			28.19 %
		<i>jumlah total yang harus dilayani</i>	<i>jumlah total yang Terlayani</i>	<i>yang belum Terlayani</i>	
	Jumlah yang Harus Dilayani	22.090 orang	17.090 orang	5000 orang	77.37%
		<i>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan</i>	<i>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia</i>	<i>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia</i>	
	Modul Belajar	3855 modul	1216 modul	2639 modul	0%
	jumlah rombongan belajar di PKBM	10 rombel	10 rombel	0 rombel	0%
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	2.760.853.600 rupiah	2.760.853.600 rupiah	0 rupiah	100%
	Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	155 orang	115 orang	40 orang	74.19%
	Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	13 orang	13 orang	0 orang	100%
	Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	26 orang	26 orang	0 orang	100%

	Perengkapan Belajar	0 buah	0 buah	0 buah	0%
	PKBM Terakreditasi minimal C	13 sekolah	10 sekolah	3 sekolah	76.92%
3.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD			100.00 %
		<i>jumlah total yang harus dilayani</i>	<i>jumlah total yang Terlayani</i>	<i>yang belum Terlayani</i>	
	Jumlah yang Harus Dilayani	7.137 orang	7137 orang	0 orang	100.00 %
		<i>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan</i>	<i>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia</i>	<i>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia</i>	
	Buku Gambar	2.602 buah	2.602 buah	0 buah	100%
	Alat Mewarnai	794 buah	794 buah	0 buah	100%
	satuan pendidikan yang berakreditasi minimal c	73 satuan pendidikan	73 satuan pendidikan	0 satuan pendidikan	100%
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	3.275.264.600 rupiah	3.275.264.600 rupiah	0 rupiah	100%
	Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	259 orang	259 orang	0 orang	100%
	Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	87 orang	87 orang	0 orang	100%
	jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	279 rombel	279 rombel	0 rombel	100%

4.1.3 Alokasi Anggaran Urusan Pendidikan

Alokasi anggaran yang mendukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karangasem adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Alokasi Anggaran Yang Mendukung Pencapaian SPM
Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Karangasem

No.	Kegiatan	Jumlah Anggaran
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	63.314.885.299
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	45.910.270.756
3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	10.006.494.627
4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2.968.454.000
JUMLAH		122.200.104.682

4.1.4 Dukungan Personil Urusan Pendidikan

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM

- a. PNS = 94 orang
- b. Non PNS = 87 orang

4.1.5 Permasalahan dan Solusi Urusan Pendidikan

Beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam rangka mewujudkan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karangasem adalah sebagai berikut.

- Terlambatnya petunjuk teknis (Juknis) dan petunjuk pelaksanaan (Juklak) kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat, yang menyebabkan terhambatnya perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi kegiatan DAK.
- Kurangnya konsistensi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan anggaran kas yang telah direncanakan, sehingga masih relative banyak kegiatan yang baru direalisasikan pada akhir tahun anggaran atau bahkan tidak direalisasikan.
- Relatif banyaknya sekolah dan letak geografis sekolah yang sulit dan saling berjauhan, yang menjadi sasaran lokasi kegiatan, memerlukan tenaga dan waktu yang lebih banyak.

- Sumber daya manusia yang relatif masih kurang baik jumlah maupun kualitasnya.
- Banyaknya masalah-masalah yang harus diselesaikan yang muncul dari tenaga pendidik dan kependidikan pada tingkat satuan pendidikan baik dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, di seluruh wilayah Kabupaten Karangasem, menyita waktu dan perhatian yang cukup banyak untuk menyelesaikannya

Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang begitu kompleks, beberapa strategi yang telah diambil selama tahun 2021 adalah sebagai berikut.

1. Setiap kepala bidang mempresentasikan rencana kegiatan pada tahun anggaran pada awal tahun dihadapan seluruh karyawan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga untuk lebih memahami kegiatan di masing-masing bidang.
2. Menyusun jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan bidang-bidang bersama-sama sebagai pedoman evaluasi.
3. Melaksanakan evaluasi rutin setiap saat terhadap perkembangan realisasi keuangan dan fisik dari masing-masing bidang melalui rapat rutin mingguan dan bulanan.
4. Mengadakan pelatihan-pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi karyawan, seperti pelatihan pengelolaan keuangan, diklat sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP).
5. Menyepakati tata nilai, komitmen, dan semboyan organisasi dalam rangka meningkatkan efektivitas organisasi.
6. Menumbuhkan budaya organisasi dan pembelajaran organisasi melalui arahan-arahan dalam rapat-rapat dan kegiatan apel pagi.
7. Mengundang pimpinan (Bupati, Wakil Bupati, Sekda) dalam silahturami bersama untuk meningkatkan semangat dan motivasi kerja seluruh karyawan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karangasem.

4.2 Urusan Kesehatan

4.2.1 Jenis Layanan Dasar Urusan Kesehatan

- a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
- b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
- c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
- d. Pelayanan Kesehatan Balita
- e. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar
- f. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif
- g. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
- h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
- i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
- j. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat
- k. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
- l. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human immunodeficiency virus = HIV)

4.2.2 Target Pencapaian dan Realisasi SPM Urusan Kesehatan

Tabel 4.3
Target dan Realisasi SPM bidang kesehatan oleh
Pemerintah Kabupaten Karangasem tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Pencapaian SPM oleh Daerah Satu Tahun	Realisasi Capaian sd semester II		
				Realisasi/ pembilang	Sasaran/ penyebut	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	100%	6.204	6.915	89,72
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan bersalin	100%	6.716	6.451	104,11
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan	100%	6.531	6.088	107,28

		peayanan kesehatan bayi baru lahir				
4	Pelayanan kesehatan balita	Cakupan pelayanan kesehatan Balita sesuai standar	100%	22.853	24.411	93,62
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	57.006	61.773	92,28
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	211.918	253.300	83,66
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	45.055	68.468	65,80
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	3.816	6.320	60,38
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	4.044	4.427	91,35
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	1.140	1.255	90,84
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Persentase Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100%	895	2.865	31,24
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	100%	5.960	7.699	77,41

mmunodeficiency virus = HIV)					
------------------------------	--	--	--	--	--

4.2.3 Alokasi Anggaran Urusan Kesehatan

Anggaran dalam rangka pelayanan dan pencapaian SPM bidang kesehatan bersumber dari DAK BOK, Kapitasi JKN, DAK Fisik dan APBD Kabupaten yang ditetapkan dalam APBD dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.4
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM
Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Anggaran
1	2	3	4
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	798.183.730
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan bersalin	848.908.890
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	460.984.746
4	Pelayanan kesehatan balita	Cakupan pelayanan kesehatan Balita sesuai standar	392.763.600
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	231.030.000
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	147.871.100
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan kringing kesehatan sesuai standar	147.380.000
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	72.767.500
9	Pelayanan kesehatan penderita	Persentase penyandang	62.047.500

	diabetes melitus	DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	114.000.600
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Persentase Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	624.397.725
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human mmunodeficiency virus = HIV)	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	112.210.800
Jumlah			4.012.546.191

4.2.4 Dukungan Personil Urusan Kesehatan

Sumber daya manusia/dukungan personil dalam penerapan dan pencapaian SPM bidang kesehatan tahun 2021 berdasarkan jenis pelayanan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5
Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Urusan Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Dukungan Personil yang terlibat Dalam penerapan/ pencapaian SPM
1	2	3
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Dokter SPOG, dr Interna, Bidan, Perawat, Nutrizionis, analis, promkes, kader
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Dokter SPOG, dokter SPA, Anastesi dr Interna Bidan, Perawat, analis.
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Dokter Spesialis, dokter umum, Bidan, Perawat, Nutrizionis, , kader
4	Pelayanan kesehatan balita	Dokter Spesialis, dokter umum, Bidan, Perawat, Nutrizionis, , kader
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Dokter, bidan perawat, perawat gigi, Promkes, Petugas Gizi, Guru sekolah, Kader
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Seluruh Nakes di Puskesmas

7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Dokter, bidan perawat, perawat gigi, Promkes, Petugas Gizi, analis kader
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Seluruh Nakes di Puskesmas
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Seluruh Nakes di Puskesmas
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa	Seluruh Nakes di Puskesmas
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	TIM TB DOTS puskesmas yang terdiri dari pemegang program, klinisi, laboratorium, promkes dan kader kurang lebih sebanyak 80 orang
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Pemegang program, konselor, klinisi, laboratorium dan kader kurang lebih sebanyak 63 orang

4.2.5 Permasalahan dan Solusi Urusan Kesehatan

Beberapa permasalahan yang ada dalam penerapan dan pencapaian SPM bidang kesehatan di Kabupaten Karangasem tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Masa pandemi Covid-19 sehingga kegiatan pelayanan tidak berjalan optimal
2. Target penduduk yang perlu diskriming dan penduduk yang diberikan pelayanan relatif tinggi.
3. Alat dan bahan untuk skrining terbatas
4. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri lebih awal.
5. Kurangnya Dukungan sumber daya manusia
6. Masih ada stigma yang kurang baik dari masyarakat untuk penderita HIV
7. Karangasem tidak mempunyai data riil untuk sasaran SPM dan kita masih menggunakan data sasaran dari Pusdatin Kementerian Kesehatan

Solusi yang dilakukan untuk mengurangi permasalahan yang timbul antara lain :

1. Melakukan pelayanan melalui kunjungan rumah
2. Berkoordinasi dengan pusat dan Provinsi terkait alat dan bahan untuk pelayanan SPM
3. Melakukan validasi data sasaran

4. Meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi serta meningkatkan peran serta lintas sector dan lintas program
5. Mengoptimalkan sumber daya manusia yang tersedia
6. Melakukan pendampingan bagi penderita HIV
7. Penyesuaian data sasaran yang disampaikan oleh Pusdatin

4.3 Urusan Pekerjaan Umum

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten/ Kota terdiri atas :

- a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic

4.3.2 Target Pencapaian dan Realisasi SPM Urusan Pekerjaan Umum

Tabel 4.6
Target dan Capaian SPM Dinas PUPR Kabupaten Karangasem

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran/Indikator Kinerja	Tahun	Target SPM	Capaian Tahun 2021		
					Target	Realisasi	Capaian
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari (KK)	2021	100%	141.281	132.022	93,44
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (Jiwa)	2021	100%	471.820	438.050	92,84

Target pencapaian SPM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karangasem Tahun 2021 adalah target yang ditetapkan oleh

Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem dalam mencapai SPM selama kurun waktu 1 (satu) Tahun yaitu sebesar 100%.

Capaian SPM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karangasem Tahun 2021 merupakan perbandingan antara realisasi kegiatan dengan target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Dari Target RENJA TA. 2021 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum sebesar 92,5 % terealisasi 93,44%. Sedangkan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah sebesar 90,00% terealisasi 92,84%.

4.3.3 Alokasi Anggaran Urusan Pekerjaan Umum

Alokasi anggaran yang mendukung penerapan dan pencapaian SPM Tahun 2021 Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

Tabel 4.7
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang PU tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran/Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Keterangan
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari (KK)	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	11.114.208.700,00	
			Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota	11.114.208.700,00	
			Sub Kegiatan Pembangunan SPAM jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	11.114.208.700,00	

2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (Jiwa)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	324.864.529,00	APBD
			Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/kota	259.159.729,00	
			Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	259.159.729,00	

4.3.4 Dukungan Personil Urusan Pekerjaan Umum

Dalam Penerapan dan Pencapaian SPM bidang urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karangasem Tahun 2021 dukungan personil terdiri dari pegawai ASN dan Non ASN dengan jumlah sebagai berikut:

- a. ASN= 13 Orang
- b. Non ASN = 19 Orang

Dari jumlah 32 orang tersebut, 4 orang ASN adalah pejabat struktural, 3 orang ASN dan 3 orang non ASN staf teknis, 4 orang ASN dan 4 Orang non ASN staf administrasi, 2 Orang ASN dan 12 orang non ASN staf lapangan.

4.3.5 Permasalahan dan Solusi Urusan Pekerjaan Umum

a. Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karangasem antara lain :

1. Belum tercapainya target akses 100% air minum dalam layanan pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari sesuai target nasional.
2. Belum adanya data base air minum secara menyeluruh sebagai acuan pembangunan lebih lanjut
3. Belum tercapainya target layanan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik sesuai target nasional.
4. Keterbatasan SDM dalam melaksanakan program dan kegiatan.
5. Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung penanganan akhir limbah domestik untuk pelayanan di permukiman pada jalan sempit dan peralatan petugas operasional (APD, pompa genset) serta gedung petugas pengelola IPLT
6. Terbatasnya anggaran untuk pembangunan prasarana dan sarana air minum dan sanitasi untuk mendukung capaian target kabupaten

b. Solusi

1. Membuat data base kebutuhan layanan pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari di kabupaten sehingga memudahkan untuk memetakan kegiatan setiap tahunnya.
2. Berkoordinasi lebih intens dengan instansi yang mendukung pemenuhan SPM air minum dan sanitasi untuk selalu memperbaharui (*update*) data sehingga dapat meningkatkan prosentase layanan.
3. Bekerjasama dengan instansi terkait seperti Dinas Kesehatan, dan PDAM untuk mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya sarana dan prasarana air minum dan sanitasi untuk meningkatkan pola hidup sehat untuk membangun sarana dan prasarana air minum dan sanitasi.
4. Berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam permohonan bantuan pendanaan untuk pembangunan infrastruktur air minum dan sanitasi di pemerintahan kabupaten.

5. Mengadakan pelatihan cepat tanggap kepada personil lapangan dan berinovasi sehingga dapat melaksanakan tugas dengan efektif dan efisien

4.4 Urusan Perumahan Rakyat

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat

Indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif di bidang perumahan rakyat yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat yang tercantum dalam Peraturan Menteri Menteri Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten/Kota mencakup 2 (dua) jenis pelayanan dasar, terdiri dari :

- 1) Rumah layak huni dan terjangkau.
- 2) Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).

4.4.2 Target Pencapaian dan Realisasi SPM Urusan Perumahan Rakyat

Tabel 4.8
Target dan Realisasi Pemenuhan SPM
Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2021

No	Uraian IKU	Target		Capaian Tahun	
		Volume	Satuan	2020	2021
1	Terbangunnya Rumah Tinggal Layak Huni bagi MBR di Kabupaten Karangasem	694	Unit	Dirasionalisasi	183
2	Persentase berkurangnya luas kawasan	16,07	Kawasan	203 M	-

	permukiman kumuh di Kab.Karangasem				
3	Meningkatnya Sistem Drainase di kawasan permukiman perkotaan	328,8	M1	214 M	-

4.4.3 Alokasi Anggaran Urusan Perumahan Rakyat

Tabel 4.9
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM
Bidang Urusan Perumahan Rakyat

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran	Realisasi Anggaran	Perentase (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12 bulan	1.884.025,00	1.330.200,00	100
			Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12 bulan	1.884.025,00	1.330.200,00	100
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	12 bulan	1.871.650,00	760.500,00	100
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perubahan perangkat daerah	12 bulan	1.871.650,00	1.320.300,00	100
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	12 bulan	1.708.150,00	1.132.800,00	100
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan Tunjangan PNS	12 bulan	2.485.509.376,00	2.246.074.996,00	100
			Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Terlaksananya laporan keuangan SKPD	12 bulan	65.462.075,00	64.541.700,00	100
		Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	5.106.000,00	5.106.000,00	100
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	34.629.500,00	17.687.000,00	100

			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik Kantor	12 bulan	93.282.530,00	50.787.300,00	95
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	12 bulan	10.389.875,00	8.662.700,00	100
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	4.200.000,00	4.200.000,00	100
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	-	-	0
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 bulan	87.929.200,00	85.288.000,00	100
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan listrik	12 bulan	59.999.000,00	37.023.525,00	97
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	13.365.600,00	-	0
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional atau lapangan	12 bulan	161.065.625,00	151.308.350,00	95
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	12 bulan	40.765.600,00	38.877.525,00	100
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	12 bulan	31.000.000,00	14.223.100,00	90
2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Perbaiki Rumah Tinggal Layak Huni	12 bulan	182.134.130,00	177.613.000,00	100
3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Pembentukan /Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Masing-Masing Desa dan Kelurahan	78 Kelompok	82.029.800,00	66.323.650,00	100

		(sepuluh) Ha						
			Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Penyuluhan/Sosialisasi Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	8 Kecamatan	65.625.700,00	51.759.450,00	100
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah tidak Layak Huni	Perbaikan Rumah Tinggal Layak Huni	12 bulan	994.500,00	994.500,00	100
4	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Perda dan Perencanaan PSU	12 bulan	75.300.650,00	71.322.250,00	100
			Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Terbangunnya Prasarana, sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi	12 bulan	676.089.450,00	640.240.242,00	100
			Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Terlaksananya Pengembangan Infrastruktur sosial Ekonomi Wilayah	12 bulan	31.513.600,00	16.497.800,00	100
5	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kab/Kota	Perbaikan Rumah Tinggal Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh Diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10Ha	Terbangunnya rumah tinggal layak huni	183 Unit	5.786.214.720,00	5.429.832.270,00	96
			TOTAL			10.001.826.431,00	9.185.551.158,00	97,38

4.4.4 Dukungan Personil Urusan Perumahan Rakyat

Tabel 4.10
Rekapitulasi Klasifikasi Pegawai DPKP Kab. Karangasem

No	Klasifikasi	Jumlah
1	2	3
A	Golongan (Jumlah)	21 orang
	Golongan IV	4 orang
	Golongan III	7 orang
	Golongan II	5 orang
	Golongan I	5 orang
B	Eselon (Jumlah)	13 orang
	Eselon V	0
	Eselon IV	5 orang
	Eselon III	3 orang
	Eselon II	1 orang
	Eselon I	0
C	Pendidikan (Jumlah)	22 orang
	S3	0
	S2	5 orang
	S1	6 orang
	Diploma	0 orang
	SLTA	4 orang
	SLTP	1 orang
	SD	5 orang

4.4.5 Permasalahan dan Solusi Urusan Perumahan Rakyat

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai tugas pokok dan fungsi, urusan serta solusi pemecahannya. Permasalahan yang dihadapi dan solusi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

No	Permasalahan	Solusi
1.	<p>Perumahan dan Kawasan Permukiman.</p> <p>a. Besarnya jumlah rumah yang tidak layak huni</p> <p>b. Permukiman kumuh masih banyak yang perlu ditangani</p> <p>c. Rendahnya partisipasi masyarakat untuk memelihara lingkungan permukimannya sehingga nampak kumuh</p>	<p>a. Pembangunan Rumah Tinggal Layak Huni</p> <p>b. Tetap menjadi prioritas usulan tahunan.</p> <p>c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memelihara lingkungan dikawasan Permukiman</p>

4.5 Urusan Ketenteraman, Ketertinan Umum dan Perlindungan Masyarakat

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar urusan Trantibumlinmas

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kabupaten Karangasem terdiri atas :

- a. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum
- b. Pelayanan informasi rawan bencana
- c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
- d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
- e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Pelayanan dasar tersebut diatas dilaksanakan oleh tiga perangkat daerah, yaitu :

Sub Trantibumlinmas dilaksanakan oleh Satpol PP

Sub Kebencanaan dilaksanakan oleh BPBD

Sub Kebakaran dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran

4.5.2 Target Pencapaian dan Realisasi SPM urusan Trantibumlinmas

Taget pencapaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Karangasem belum mencapai target Nasional yang telah ditetapkan berdasarkan Permendagri Nomor 62 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten/Kota. Hal ini dikarenakan belum terbangunnya sinkronisasi antara perencanaan dengan pelaksanaan teknis di lapangan dan semoga di tahun-tahun berikutnya dapat ditingkatkan.

Di tahun 2021 ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem berupaya melaksanakan Standar Pelayanan Minimal bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan amanat dari Permendagri dengan segala keterbatasan yang ada.

Berikut tabel indikator kinerja SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, target dan realisasinya.

Tabel 4.11
Target dan Realisasi SPM Satpol PP Karangasem Tahun 2021

NO	JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN					
	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Cakupan Penegakan Perda dan Perkada					
		Penerima layanan dasar			Mutu minimal layanan dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu	Target	Batas Waktu	KET.
		Jumlah warga yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum perda dan perkada		Setiap Tahun	100% (sesuai dengan jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum perda dan perkada yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	
		5.784	100%	Triwulan I 2021	5.784 (100%)	Triwulan I 2021	
		2.002	100%	Triwulan II 2021	2.002 (100%)	Triwulan II 2021	
		2.330	100%	Triwulan III 2021	2.330 (100%)	Triwulan III 2021	
		2.246	100%	Triwulan IV 2021	2.246 (100%)	Triwulan IV 2021	
		2. Cakupan Patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat					
			a. Banyaknya kelompok patroli di kalikan tiga	45			

		kali patroli dalam sehari				
	b.	Banyaknya kelompok kecamatan (jumlah kecamatan)	8			
	3. Cakupan rasio petugas Sat Linmas					
	a.	Jumlah Satuan Linmas	2.353 Orang			
	b.	Jumlah RT/ Br.Dinas	529 Br. Dinas			

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karangasem, Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Sub Urusan Bencana, telah memasukan target SPM pada RPJMD dan RKPD namun dalam penganggarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Karangasem. Target capaian indikator kinerja dan keuangan Badan Penanggulan Bencana Daerah Kabupaten Karangasem disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.12
Target dan Realisasi SPM BPBD Kab. Karangasem Tahun 2021

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Kegiatan ini belum mendapat alokasi anggaran dari APBD
2	Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	535.357.625
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	1.506.887.596

Di Tahun 2021 ini Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Karangasem berupaya melaksanakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran sesuai dengan amanah dari Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 dengan segala keterbatasan yang ada.

Target SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.13
Target dan Realisasi SPM
Dinas Pemadam Kebakaran Kab. Karangasem Tahun 2021

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target	Realisasi	Ket.
1	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	79,73%	

4.5.3 Alokasi Anggaran urusan Trantibumlinmas

Tabel 4.14
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Satpol PP
Kabupaten Karangasem Tahun 2021

NO	NAMA KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	TERCAPAIAN
1	Penegakan PERDA Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati	Rp. 509.061.975	100%
2	Pembinaan SATLINMAS	-	-

Secara umum alokasi anggaran dalam rangka pencapaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Karangasem Tahun 2021 sangat terbatas dibandingkan dengan kebutuhan Operasional di Lapangan. Namun Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terus diupayakan secara optimal

dengan memperhatikan tingkat keseriusan gangguan yang terjadi. Alokasi anggaran dalam rangkaian pencapaian SPM bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat akan terus ditingkatkan di tahun-tahun berikutnya sehingga sesuai dengan target yang direncanakan.

Tabel 4.15
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM
BPBD Kabupaten Karangasem Tahun 2021

NO.	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI		
							Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	persentase peringatan dini bencana yang terlaksana	100%	100%	403.387.125,00	390.432.015,00	97
		2	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Persentase bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi yang tersalur	100%	100%	131.970.500,00	127.467.400,00	97
2	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi	3	Respon cepat darurat bencana	Persentase penanganan bencana	100%	100%	1.506.887.596,00	1.385.366.910,00	92
TOTAL						2.042.245.221,00	1.903.266.325,00	93	

Alokasi anggaran untuk Badan Penanggulangan Bencana secara umum berkurang dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan masih berlanjutnya penanganan covid-19 yang memerlukan alokasi anggaran yang cukup besar sehingga dilaksanakan refocusing anggaran bagi semua OPD. Adapun alokasi anggaran yang dialokasikan dalam program penanggulangan bencana di Kabupaten Karangasem dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana

Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan dilaksanakan melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota yang mendapatkan pagu anggaran Rp. 403.387.125,00, dengan realisasi sebesar Rp. 390.432.015,00 atau sebesar 97%. Pelaksana teknis dari sub kegiatan ini adalah Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Karangasem.

Sub kegiatan kedua yaitu Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 131.970.500,00 dengan realisasi sebesar Rp. 127.467.400,00 atau sebesar 97%. Pelaksana teknis sub

kegiatan ini adalah Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Karangasem.

2. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Pada Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana hanya pada Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana yang teralokasi anggarannya yaitu sebesar Rp.1.506.887.596,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.385.366.910,00 atau sebesar 92%. Bidang Kedaruratan BPBD Kabupaten Karangasem sebagai pelaksana teknis kegiatan ini.

Alokasi anggaran untuk kegiatan menunjang penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Sub Urusan Kebakaran adalah belanja langsung dan belanja tidak langsung yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021. seperti pada tabel berikut :

Tabel 4.16
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM
Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Karangasem Tahun 2021

No.	Program Kegiatan	Pagu Dana (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
I.	BELANJA LANGSUNG	3.428.169.919	3.241.545.887	94,56
1.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	3.428.169.919	3.241.545.887	94,56
	1 Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.316.493.969	3.135.268.647	94,54
	a. Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.574.559.250	1.537.750.070	97,66
	b. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	1.741.934.719	1.597.518.577	91,71
	2 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	111.675.950	106.277.240	95,17
	a. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	111.675.950	106.277.240	95,17

4.5.4 Dukungan Personil urusan Trantibumlinmas

a. Satpol PP

Adapun dukungan personil/pegawai aktif pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem terhitung 31 Desember 2021 adalah 165 orang, terdiri dari 92 orang PNS, dan 73 orang Pegawai Tidak Tetap (Tenaga Kontrak).

Menurut jenjang pendidikan dapat dibagi sebagai berikut:

1. Pasca Sarjana (S2) : 4 orang
2. Sarjana (S1) : 26 orang
3. Diploma (DIII) : - orang
4. SLTA : 135 orang
5. SMP : 1 orang
6. SD : 1 orang

Jumlah tenaga PNS menurut golongan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pegawai golongan IV : 4 orang
2. Pegawai golongan III : 37 orang
3. Pegawai golongan II : 48 orang
4. Pegawai golongan I : 2 orang

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan Personil/Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem didominasi oleh tingkat SLTA 81,8%, kemudian S1 sebanyak 15,75% dan S2 sebanyak 2,42%.

b. BPBD

BPBD Kabupaten Karangasem pada tahun 2021 didukung oleh Personil sebanyak 84 orang yang terdiri dari 15 orang PNS dan 69 orang pegawai kontrak. Dari jumlah personil sebanyak 15 orang tersebut. 5 orang adalah pejabat struktural, 10 orang pelaksana administrasi.

c. Dinas Pemadam Kebakaran

Adapun dukungan personil/ pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Karangasem Tahun 2021 adalah 58 orang, terdiri dari 5 orang ASN, dan 53 orang Pegawai Non ASN (tenaga kontrak). Dari jumlah 58 orang tersebut, 51 orang diantaranya adalah petugas pemadam kebakaran.

4.5.5 Permasalahan dan Solusi urusan Trantibumlinmas

a. Satpol PP

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat antara lain:

1. Masih kurangnya personil PPNS

Solusi:

Memberikan kesempatan kepada PNS Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengikuti pelatihan PPNS guna mengoptimalkan Penindakan, Penyelidikan dan Penyidikan Pelanggaran PERDA.

2. Untuk optimalisasi tugas SATLINMAS dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sangat didukung oleh bidang yang mewadahi SATLINMAS, guna memonitoring tugas kegiatan SATLINMAS.

Solusi :

- Perlu di bentuk Bidang Yang Mewadahi (SATLINMAS)

b. BPBD

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karangasem tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut secara umum adalah :

1. Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana, hal tersebut dikarenakan masih terbatasnya kuantitas dan

kualitas sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana penanggulangan bencana.

2. Masih rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan masih rendahnya pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Permasalahan ini dikarenakan : (1) Keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat, (2) Belum terintegrasinya pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan secara efektif dan konperhensif, (3) Keterbatasan alokasi anggaran dari APBD.
3. Belum adanya koordinasi yang efektif baik antar unit/institusi pemerintah/ Pemerintah Pusat, antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan koordinasi antar pemangku kepentingan lainnya seperti badan usaha swasta, lembaga swadaya masyarakat (LSM), perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, media masa dan masyarakat.

Beberapa Solusi yang sudah dan akan ditempuh antara lain:

1. Dengan tersedianya landasan hukum tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana dan peraturan daerah tentang pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah maka diharapkan Badan Penanggulangan Bencana dapat secara optimal melaksanakan fungsi koordinator, komando dan pelaksanaan dalam penanggulangan bencana.
2. Peningkatan pelayanan pencegahan dan penanggulangan bencana yang berbasis masyarakat.
3. Segera disusun SOP Penanggulangan Bencana sehingga menjadi acuan pelaksanaan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan memanfaatkan perkembangan teknologi;
5. Upaya sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;

6. Peningkatan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan bekerja sama dengan instansi lain baik vertikal maupun horizontal;
7. Pembangunan pusat data dan informasi bencana melalui pemanfaatan teknologi;
8. Penyediaan dana kontigensi dengan dukungan kebijakan dari Pemerintah Pusat.
9. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama di daerah rawan bencana mengenai pengurangan resiko bencana;
10. Pemaduan upaya-upaya penanganan dan pengurangan resiko bencana komperhensif dan sistematis ke dalam kebijakan dan program pembangunan daerah.

c. Dinas Pemadam Kebakaran

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran antara lain :

1) Sarana dan prasarana perkantoran

Saat ini Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan belum memiliki gedung perkantoran yang representatif, pegawai administrasi dan pejabat struktural masih terpisah dengan petugas teknis pemadam kebakaran

2) Sarana dan prasarana pemadaman dan penyelamatan

- ✓ Dengan luas wilayah yang ada, minimal ada 5 pos pemadam kebakaran. Tapi saat ini baru ada 2 pos pemadam kebakaran.
- ✓ Saat ini baru memiliki 6 unit kendaraan pemadam dan 1 unit kendaraan pendukung operasional. Asumsinya terbangun 5 pos dengan masing-masing pos dengan 2 kendaraan pemadam, masih kekurangan 4 unit kendaraan pemadam.
- ✓ APD pemadam kebakaran yang ada saat ini usianya sudah lebih dari 5 tahun sehingga perlu pengadaan baru.
- ✓ Dengan bertambahnya tugas pokok dan fungsi Damkar di bidang penyelamatan dan evakuasi, maka diperlukan pengadaan APD evakuasi dan penyelamatan.

- 3) SDM (jumlah petugas pemadam terbatas)
 - ✓ Saat ini memiliki 51 orang petugas pemadam kebakaran, idealnya masing-masing pos pemadam kebakaran memiliki 21 orang petugas. Apabila dibangun 5 pos pemadam kebakaran, masih kekurangan 54 orang petugas pemadam kebakaran.
- 4) Peningkatan keterampilan (teknis pemadam dan inspeksi)
 - ✓ Kualifikasi petugas teknis pemadam kebakaran saat ini baru memiliki Diklat Teknis Pemadam I, sehingga masih diperlukan Diklat Pemadam II dan III.
 - ✓ Saat ini belum memiliki tenaga inspeksi sehingga perlu diadakan Diklat Teknis Inspeksi Kebakaran.
- 5) Kerjasama dengan kabupaten/kota
 - ✓ Saat ini belum adanya perjanjian kerjasama dengan kabupaten lain yang berbatasan dengan Kabupaten Karangasem tentang kerjasama penanganan kejadian kebakaran di wilayah perbatasan antar kabupaten.
 - ✓ Kerjasama di bidang peningkatan SDM dengan kabupaten/kota.
- 6) Sosialisasi dan edukasi
 - ✓ Masih rendahnya pemahaman masyarakat, dunia usaha, instansi pemerintah tentang pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran
 - ✓ Masih kurangnya edukasi kepada anak-anak sekolah tentang pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran
 - ✓ Belum terbentuknya relawan kebakaran (Redkar) di masing-masing kecamatan sampai pada tingkat desa/kelurahan
 - ✓ Kurangnya pemahaman pengguna jalan terhadap urgensinya mobil pemadam kebakaran pada saat melaksanakan tugas.

Solusi.

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka solusi yang dilakukan adalah :

- 1) Membuat telaahan staf kepada Bpk Sekda agar diberikan gedung kantor yang representatif yang bisa ditempati oleh pasukan dan sekretariat (pegawai administrasi dan pejabat struktural)

- 2) Membentuk pos pemadam kebakaran secara bertahap sehingga bisa terwujud 5 Pos Pemadam Kebakaran
- 3) Pengadaan sarana prasarana pemadam kebakaran secara bertahap sehingga kekurangan yang ada bisa terpenuhi
- 4) Membuat formasi secara bertahap penyediaan petugas pemadam kebakaran sehingga terpenuhi untuk 5 Pos Pemadam Kebakaran dengan 105 petugas pemadam kebakaran
- 5) Melakukan koordinasi dengan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri untuk memberikan kesempatan petugas Pemadam Kebakaran Kabupaten Karangasem mengikuti Diklat pemadam sehingga memiliki kualifikasi yang disyaratkan
- 6) Membuat perjanjian kerja sama penanganan kejadian kebakaran di wilayah perbatasan dengan kabupaten lain dan kerja sama dengan kabupaten/kota dalam bidang peningkatan SDM pemadam kebakaran
- 7) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dunia usaha, instansi pemerintah, anak-anak sekolah tentang pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran
- 8) Membentuk relawan kebakaran (Redkar) di masing-masing kecamatan sampai pada tingkat desa/kelurahan

4.6 Urusan Sosial

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar Urusan Sosial

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial maka, jenis pelayanan dasarnya antara lain:

1. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial;
2. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial;
3. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial;
4. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial; dan

5. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota.

4.6.2 Target dan Realisasi SPM Urusan Sosial

Di Tahun 2021 ini Dinas Sosial Kabupaten Karangasem berupaya melaksanakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial sesuai dengan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 dengan segala keterbatasan yang ada. Target dan realisasi SPM Bidang Sosial Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.17

Realisasi SPM Bidang Sosial Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Indikator Pencapaian/Output			Total Capaian (%)
			jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani	yang belum terlayani	
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial - Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	25	21	4	84%
2	Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlantar di luar Panti Sosial - Penyediaan Sandang	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	20 orang	20 orang	0 orang	100%
3	Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti Sosial - Penyediaan Permakanan	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	210	0	210	0%
4	Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	200 orang	112 orang	88 Orang	56 %

5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota	200 Orang	124 Orang	76 Orang	62%
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	----------	-----

4.6.3 Alokasi Anggaran Urusan Sosial

Alokasi anggaran untuk kegiatan menunjang penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial adalah belanja langsung dan belanja tidak langsung yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.18
Alokasi Anggaran Dinas Sosial
Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2021

N O	PROGRAM	KEGIATAN	SUB. KEGIATAN	PAGU DANA (Rp)	REALISASI KEUANGAN (RP)	REALISASI FISIK (%)
1	Program Rehabilitasi Sosial	- Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Alat Bantu	94.565.600	77.821.350	91,69 %
			Penyediaan Sandang	44.365.600	35.292.800	92,76 %
			Penyediaan Permakanan	663.365.600	62.886.700	84,44 %
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	48.000.000	62.848.300	95,22 %
2	Program Penanganan Bencana	- Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten /Kota	Penyediaan makanan	82.385.400	65.286.700	80 %

4.6.4 Dukungan Personil Urusan Sosial

Adapun dukungan personil/ pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM pada Dinas Dinas Sosial Kabupaten Karangasem Tahun 2021 adalah 25 orang, terdiri dari 10 orang PNS, dan 15 orang Pegawai Non PNS (tenaga kontrak).

4.6.5 Permasalahan dan Solusi Urusan Sosial

Beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam rangka mewujudkan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut.

1. Belum semua Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dapat tertangani;
2. Terkait hal-hal teknis pelayanan terhadap PMKS dimana SDM dan sarana prasarana kurang mendukung sehingga pelayanan tidak berjalan optimal.

Solusi

1. Memberikan pemenuhan kebutuhan dasar secara bertahap kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
2. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, lintas daerah dengan masalah penanganan PMKS;
3. Untuk mempercepat pelayanan terhadap pencapaian Standar Pelayanan Minimal dengan mengoptimalkan seluruh tenaga administrasi Non ASN yang ada di Dinas Sosial;
4. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang telah ada sehingga kegiatan yang mendukung pencapaian Standar Minimal bisa berjalan normal.

4.7 Program dan Kegiatan

4.7.1 Bidang Urusan Pendidikan

Mengacu pada amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun sebagai tindak lanjut penyelesaian permasalahan pembangunan dan pelayanan sektor Pendidikan di Kabupaten Karangasem, disusunlah Program dan Kegiatan yang secara rutin setiap tahun anggaran yang sumber dananya baik dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun dananya dari APBN.

Program adalah himpunan dari beberapa kegiatan yang nyata, terpadu dan sistematis yang akan dilaksanakan oleh elemen-elemen yang terdapat dan menjadi bagian dari suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam penyusunan program untuk mendukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karangasem menetapkan beberapa kriteria sebagai landasan pertimbangan, antara lain :

1. Memperhatikan Tupoksi dari masing-masing bidang;
2. Memperhatikan program Pemerintah Kabupaten Karangasem, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat;
3. Mempertimbangkan hasil evaluasi program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya, saat ini dan akan datang;

4. Memperhatikan skala prioritas dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi, baik Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga maupun Pemerintah Kabupaten Karangasem

Berikut adalah Program Kegiatan Tahun Anggaran 2021 yang mendukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karangasem :

Tabel 4.19

Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian SPM
Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2021

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
A	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	12,019,983,725	8,121,394,425	67.57 %
	1. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	945,875,050	15,565,400	1.65 %
	2. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	4,678,295,925	4,147,036,925	88.64 %
	3. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	6,395,812,750	3,958,792,100	61.90 %
B	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	11,401,070,500	4,497,686,918	39.45 %
	1. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	42,530,300	24,015,625	56.47 %
	2. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	682,085,500	666,758,000	97.75 %
	3. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	8,999,725	4,564,625	50.72 %
	4. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1,951,213,125	1,652,133,025	84.67 %
	5. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	65,730,950	23,115,600	35.17 %
	6. Penambahan Ruang Kelas Baru	3,912,790,900	839,604,564	21.42 %
	7. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	4,737,720,000	1,287,495,479	27.18 %
C	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	4,003,800,875	2,440,081,375	60.94 %
	1. Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	100,270,000	14,350,000	14.31 %
	2. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	294,061,000	227,919,500	77.51 %
	3. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	3,609,469,875	2,303,747,300	63.83 %
D	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2,863,454,000	954,789,302	33.34 %
	1. Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	2,406,545,125	1,021,492,182	42.45 %
	2. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	102,600,400	28,542,000	27.82 %

4.7.2 Bidang Urusan Kesehatan

Program dan Kegiatan serta anggaran dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian SPM bidang kesehatan tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 4.20
Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian SPM
Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2021

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Anggaran	Realisasi
A	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		4.012.546.191	1.951.448.090
I	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		4.012.546.191	1.951.448.090
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan dan 12 Puskesmas	798.183.730	493.046.080
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dinas Kesehatan dan 12 Puskesmas	848.908.890	192.302.475
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dinas Kesehatan dan 12 Puskesmas	460.984.746	352.211.760
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Dinas Kesehatan dan 12 Puskesmas	392.763.600	102.027.400
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Dinas Kesehatan dan 12 Puskesmas	231.030.000	93.015.050
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Dinas Kesehatan dan 12 Puskesmas	147.871.100	60.783.000
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Dinas Kesehatan dan 12 Puskesmas	147.380.000	83.692.400
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Dinas Kesehatan dan 12 Puskesmas	72.767.500	15.184.000
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Dinas Kesehatan dan 12 Puskesmas	62.047.500	10.136.000
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa	Dinas Kesehatan dan 12 Puskesmas	114.000.600	48.908.350

	Berat			
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan dan 12 Puskesmas	624.397.725	451.980.125
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan dan 12 Puskesmas	112.210.800	48.161.450
Jumlah			4.012.546.191	1.951.448.090

4.7.3 Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM, dilengkapi dengan anggaran serta realisasinya.

Tabel 4.21
Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian SPM
Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran/ Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Anggaran		
				Target APBD (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari (KK)	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	11.114.208.700,00	8.126.283.900,00	73,12
			Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota	11.114.208.700,00	8.126.283.900,00	73,12
			Sub Kegiatan Pembangunan SPAM jaringan Perpipaan di Kawasan	11.114.208.700,00	8.126.283.900,00	73,12

			Perdesaan			
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (Jiwa)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	324.864.529,00	300.816.725,00	92,60
			Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/kota	324.864.529,00	300.816.725,00	92,60
			Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	259.159.729,00	241.069.650,00	93,02

4.7.4 Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman bertugas melaksanakan otonomi daerah urusan dibidang perumahan dan kawasan permukiman, pengembangan ruang terbuka hijau dan pertamanan dengan tujuan mewujudkan Karangasem yang bersih, dan teduh.

Lingkungan bersih dan teduh (clean and green) telah menjadi permasalahan dan kebutuhan masyarakat secara nasional sehingga pengelolaannya dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir untuk memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta berubahnya perilaku masyarakat menjadi peduli lingkungan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, menentukan Visi dan misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karangasem menentukan Visi dan misi yaitu untuk “ **Terwujudnya Perumahan dan**

Kawasan Permukiman yang Nyaman, Aman, Damai dan Indah Berdasarkan Tri Hita Karana.

Untuk dapat mengidentifikasi arah dan kebijakan dalam mewujudkan **Visi** maka DPKP Kabupaten Karangasem mengemban **Misi** yaitu :

1. Meningkatkan ketersediaan perumahan
2. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan perumahan dan kawasan permukiman
3. Mempertahankan kualitas lingkungan perumahan dan kawasan permukiman yang bersih dan teduh (*Clean and Green*)

Visi diatas merupakan suatu keadaan yang ingin dicapai dimasa depan melalui program dan kegiatan yang dilakukan secara sinergis antar pelaku kepentingan yang terkait langsung maupun tidak dalam pengelolaan Pembangunan rumah tinggal layak huni. Sasaran program dan kegiatan sampai tahun 2021 masih terkonsentrasi pada pelayanan kekumuhan di Kawasan Permukiman. Dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Karangasem, implementasi pembangunan bidang pelayanan Infrastruktur tahun anggaran 2021 dilaksanakan melalui 4 program dan 9 kegiatan yaitu :

I Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota

- 1 Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3 Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

II. Program Pengembangan Perumahan

- 1 Penerbitan ijin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

III. Program Kawasan Permukiman

- 1 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha
- 2 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) Ha

IV. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

4.7.5 Bidang Urusan Trantibumlinmas

1. POL PP

Dalam meningkatkan dan mempercepat pelaksanaan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem telah menetapkan program dan kegiatan yang sejalan dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati. Adapun program dan kegiatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam program ini dilaksanakan kegiatan pembinaan Pencegahan Pelanggaran Ketertiban Umum di tempat usaha. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah:

- a. Mengawasi dan memberikan pembinaan kepada para pelaku usaha untuk melengkapi usaha yang dijalani dengan IMB, SITU, SIUP dan ijin lingkungan serta melengkapi data identitas pramusaji.
- b. Mencegah terjadinya Gangguan Ketertiban Umum di tempat usaha berupa prostitusi, pekerja di bawah umur, miras dan narkoba.

2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Dalam program ini dilaksanakan kegiatan:

a. Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban, Kamtramtibmas

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah:

- Mengawasi dan menjamin kegiatan pemerintahan maupun kegiatan masyarakat agar berlangsung aman dan kondusif.
- Melakukan Penertiban atas Pelanggaran Peraturan Daerah.

b. Penyelidikan Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran Perda

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah:

- Mengawasi dan memantau pelaksanaan Peraturan Daerah
- Melakukan Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan atas indikasi pelanggaran Peraturan Daerah
- Memberikan informasi dini atas gejolak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

3. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.

Dalam program ini dilaksanakan kegiatan mobilisasi dan pendataan Satuan Perlindungan Masyarakat.

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah :

- a. Memperkuat fungsi perlindungan masyarakat di desa-desa pada tiap Kecamatan.
- b. Menambah jumlah anggota Linmas khususnya di daerah yang rawan bencana dan konflik.
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat untuk menjaga kondisi yang aman dan kondusif.

2. BPBD

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana memiliki Sub kegiatan yang terbanyak yang harus dipenuhi. Diantara sub kegiatan yang ada di SPM, hanya sub kegiatan pengelolaan risiko bencana kabupaten/kota yang terakomodir pada APBD Kabupaten Karangasem. Kegiatan ini memiliki indikator persentase peringatan dini bencana yang terlaksana. BPBD Kabupaten Karangasem telah memiliki Tim Peringatan Dini yang menyebar di seluruh kecamatan. Berbagai media dipergunakan untuk penyampaian informasi peringatan dini antara lain melalui media radio, grup whatsapp, telegram, facebook dan instagram. Dengan media yang ada informasi akan secepatnya dapat tersampaikan ke masyarakat.

Terbatasnya anggaran untuk melaksanakan semua sub kegiatan di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, tidak menyurutkan niat dalam pemenuhan SPM Kebencanaan. Maka dari itu BPBD Kabupaten Karangasem berinovasi melalui Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dengan melaksanakan kegiatan Non-budgeter seperti:

- a. Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten Karangasem.

Berdasarkan surat undangan BPBD Provinsi Bali B.15.005/7679/PK/BPBD mengundang para penggiat penanggulangan bencana dari unsur pentahelix. Dalam rapat tersebut tercetus ide untuk membentuk FPRB Kabupaten Karangasem. Selanjutnya dilakukan pemilihan pengurus FPRB Kabupaten Karangasem melalui surat dari BPBD Kabupaten Karangasem Nomor 360/267/PK/BPBD/2021, Tanggal 04 Agustus 2021, Agenda Pertemuan Pembentukan FPRB Kabupaten Karangasem. Selanjutnya kepengurusan dan keanggotaan FPRB Kabupaten Karangasem sedang diajukan penetapan melalui Surat Keputusan Bupati Karangasem.

- b. Kerjasama dengan Instansi Pusat/Vertikal dalam hal pengurangan risiko bencana.

Berdasarkan *Memorandum of Understanding (MoU)* dengan Nomor PKS.87/BPDASHL.UA/TU/SET.1/7/2021 dan 075/242/SET/BPBD/2021, BPBD Kabupaten Karangasem dan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Unda Anyar (BPDASHL Unda Anyar) melakukan kerjasama dalam kegiatan mitigasi bencana longsor di Kabupaten Karangasem melalui kegiatan penguatan struktur dengan penghijauan. Tahun 2021 kegiatan mitigasi sudah dilaksanakan dengan menanam 3000 bibit rumput Vetiver dan Jambu Biji Merah di Desa Bunutan.

- c. Kerjasama dengan Pertamina Depo Manggis.

Dalam upaya membina dan meningkatkan kapasitas masyarakat binaannya terkait penanggulangan bencana, Pertamina melalui surat Nomor Q25042/2021-SO tanggal 10 Nopember 2021 perihal memohon narasumber untuk melakukan pelatihan dan simulasi mitigasi gempa dan mitigasi penyebaran covid-19.

- d. Kerjasama dengan dunia usaha Mitraelkom dalam mitigasi longsor. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 360/372/PK/2020 tercantum bahwa Mitraelkom menyerahkan barang berupa alat Landslide Early Warning System (LEWS) untuk mendeteksi pergerakan tanah. Alat tersebut pada tahun 2021 diperuntukkan untuk kesiapsiagaan masyarakat di Dusun Sega, Desa Bunutan.

Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota memiliki indikator persentase bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang tersalurkan. Kegiatan ini memfasilitasi masyarakat korban bencana mengusulkan permohonan bantuan sosial stimulan untuk perbaikan sarana dan prasarana perekonomian, perbaikan rumah masyarakat dan fasilitas umum dengan klasifikasi kerusakan termasuk dalam kategori rusak berat. Kegiatan ini juga memfasilitasi permohonan bantuan pascabencana untuk korban bencana berupa santunan uang duka cita (meninggal), santunan kecacatan fisik/mental, dan santunan luka berat. Pada tahun 2021 jumlah laporan kejadian bencana yang diterima dan tercatat sebanyak 171 (seratus tujuh puluh satu) laporan, sedangkan kerusakan akibat bencana dengan klasifikasi kerusakan kategori rusak berat dan dapat difasilitasi untuk diusulkan permohonan bantuan sosial pascabencana sebanyak 13 (tiga belas) proposal telah tersalurkan. Untuk bantuan santunan korban bencana, laporan yang diterima/tercatat sebanyak 20 (dua puluh) korban, sedangkan kriteria kondisi korban yang dapat difasilitasi sebanyak 14 (empat belas) korban telah terealisasi/tersalurkan.

Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana dilaksanakan dengan tanpa pendanaan dari APBD Kabupaten Karangasem. Dokumen kajian resiko bencana (KRB) sebenarnya sudah dimiliki oleh Kabupaten Karangasem. Penyusunan kajian risiko bencana (KRB) tersebut dilaksanakan oleh BNPB dengan masa berlaku dari tahun 2019-2023 namun belum ditetapkan sehingga menjadi dokumen yang sah karena

masih ada beberapa hal yang belum sesuai dengan kondisi dilapangan sehingga perlu dilaksanakan update.

Komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana menyasar terselenggaranya

komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kepada masyarakat per jenis ancaman. Dengan target seluruh penduduk di kawasan rawan bencana memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencananya. Hal ini dilaksanakan oleh bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan melalui Tim Peringatan Dini Kabupaten Karangasem yang ada disetiap kecamatan dan desa. Serta melalui Forum Pengurangan Resiko Bencana. Penyampaian informasi ini dilaksanakan melalui media sosial yang ada seperti melalui gerup whatsapp, face book, instagram, siaran radio, interaktif dan sebagainya. Dengan bantuan media-media yang ada maka dapat diasumsikan bahwa informasi dan edukasi kebencanaan tersampaikan kepada seluruh warga yang berada di kawasan rawan bencana. Sehingga pencapaian kinerja sub kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana tersebut 100%.

2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana memiliki Sub kegiatan yang terbanyak yang harus dipenuhi. Diantara sub kegiatan yang ada di SPM, hanya sub kegiatan pengelolaan risiko bencana kabupaten/kota yang terakomodir pada APBD Kabupaten Karangasem. Kegiatan ini memiliki indikator persentase peringatan dini bencana yang terlaksana. BPBD Kabupaten Karangasem telah memiliki Tim Peringatan Dini yang menyebar di seluruh kecamatan. Berbagai media dipergunakan untuk penyampaian informasi peringatan dini antara lain melalui media radio, grup whatsapp, telegram, facebook dan instagram. Dengan media yang ada informasi akan secepatnya dapat tersampaikan ke masyarakat.

Terbatasnya anggaran untuk melaksanakan semua sub kegiatan di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, tidak menyurutkan niat dalam

pemenuhan SPM Kebencanaan. Maka dari itu BPBD Kabupaten Karangasem berinovasi melalui Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dengan melaksanakan kegiatan Non-budgeter seperti:

a. Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten Karangasem.

Berdasarkan surat undangan BPBD Provinsi Bali B.15.005/7679/PK/BPBD mengundang para penggiat penanggulangan bencana dari unsur pentahelix. Dalam rapat tersebut tercetus ide untuk membentuk FPRB Kabupaten Karangasem. Selanjutnya dilakukan pemilihan pengurus FPRB Kabupaten Karangasem melalui surat dari BPBD Kabupaten Karangasem Nomor 360/267/PK/BPBD/2021, Tanggal 04 Agustus 2021, Agenda Pertemuan Pembentukan FPRB Kabupaten Karangasem. Selanjutnya kepengurusan dan keanggotaan FPRB Kabupaten Karangasem sedang diajukan penetapan melalui Surat Keputusan Bupati Karangasem.

b. Kerjasama dengan Instansi Pusat/Vertikal dalam hal pengurangan risiko bencana.

Berdasarkan *Memorandum of Understanding (MoU)* dengan Nomor PKS.87/BPDASHL.UA/TU/SET.1/7/2021 dan 075/242/SET/BPBD/2021, BPBD Kabupaten Karangasem dan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Unda Anyar (BPDASHL Unda Anyar) melakukan kerjasama dalam kegiatan mitigasi bencana longsor di Kabupaten Karangasem melalui kegiatan penguatan struktur dengan penghijauan. Tahun 2021 kegiatan mitigasi sudah dilaksanakan dengan menanam 3000 bibit rumput Vetiver dan Jambu Biji Merah di Desa Bunutan.

c. Kerjasama dengan Pertamina Depo Manggis.

Dalam upaya membina dan meningkatkan kapasitas masyarakat binaannya terkait penanggulangan bencana, Pertamina melalui surat Nomor Q25042/2021-SO tanggal 10 Nopember 2021 perihal memohon

narasumber untuk melakukan pelatihan dan simulasi mitigasi gempa dan mitigasi penyebaran covid-19.

d. Kerjasama dengan dunia usaha Mitraelkom dalam mitigasi longsor.

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 360/372/PK/2020 tercantum bahwa Mitraelkom menyerahkan barang berupa alat Landslide Early Warning System (LEWS) untuk mendeteksi pergerakan tanah. Alat tersebut pada tahun 2021 diperuntukkan untuk kesiapsiagaan masyarakat di Dusun Sega, Desa Bunutan.

Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota memiliki indikator persentase bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang tersalurkan. Kegiatan ini memfasilitasi masyarakat korban bencana mengusulkan permohonan bantuan sosial stimulan untuk perbaikan sarana dan prasarana perekonomian, perbaikan rumah masyarakat dan fasilitas umum dengan klasifikasi kerusakan termasuk dalam kategori rusak berat. Kegiatan ini juga memfasilitasi permohonan bantuan pascabencana untuk korban bencana berupa santunan uang duka cita (meninggal), santunan kecacatan fisik/mental, dan santunan luka berat. Pada tahun 2021 jumlah laporan kejadian bencana yang diterima dan tercatat sebanyak 171 (seratus tujuh puluh satu) laporan, sedangkan kerusakan akibat bencana dengan klasifikasi kerusakan kategori rusak berat dan dapat difasilitasi untuk diusulkan permohonan bantuan sosial pascabencana sebanyak 13 (tiga belas) proposal telah tersalurkan. Untuk bantuan santunan korban bencana, laporan yang diterima/tercatat sebanyak 20 (dua puluh) korban, sedangkan kriteria kondisi korban yang dapat difasilitasi sebanyak 14 (empat belas) korban telah terealisasi/tersalurkan.

3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana teranggarkan hanya pada sub kegiatan respon cepat darurat bencana. Dengan anggaran yang terbatas, pelaksanaan kegiatan penyelamatan dan evakuasi dapat terpenuhi standar pelayanan minimumnya, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas

Sub kegiatan ini memiliki sasaran terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam dengan indikator kinerja persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB (%). Pada tahun 2021 penanganan pandemi Covid-19 masih menjadi prioritas. BPBD Kabupaten Karangasem menjadi pengampu kegiatan pemakaman jenazah terdampak Covid-19.

b. Respon cepat darurat bencana kabupaten/kota.

Sub kegiatan ini memiliki sasaran terespon secara cepat setiap hasil penetapan status darurat bencana kurang dari 24 jam. Indikator kinerjanya adalah persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana (%). Namun dalam indikator kinerja pada DPA - SKPD tahun 2021 mencantumkan persentase penanganan bencana. Hal ini dibuat berbeda karena semua kegiatan pemenuhan SPM Penyealamatan dan evakuasi hanya bertumpu pada satu sub kegiatan yang dapat didanai.

Pada tahun 2021 terjadi satu kejadian yang ditetapkan sebagai bencana yaitu bencana Gempa Bumi yang terjadi pada tanggal 16 Oktober 2021 pukul 04:18:23 Wita pada Episenter terletak di koordinat 8,32° LS; 115,45° BT. Jarak 8 Km Barat Laut Karangasem. Yang mengakibatkan dampak luas di Kabupaten Karangasem. Kerusakan terparah terjadi di desa Ban Kecamatan Kubu dan Desa Pempatan Kecamatan Rendang.

Pada hari yang sama diadakan rapat koordinasi dan diputuskan penetapan tanggap darurat oleh Bupati Karangasem dengan Surat Keputusan Bupati Karangasem Nomor 328/HK/2021 tentang Penetapan Status Keadaan Tanggap Darurat Penanganan Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Karangasem tanggal 16 Oktober 2021. Serta dibuat pula pernyataan Bupati Karangasem 360/351/BPBD/SETDA/2021 tanggal 16 Oktober 2021 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi mulai Tanggal 16 Oktober 2021 sampai 22 Oktober 2021. Dan Pernyataan Bupati Nomor 360 / 366 /BPBD/SETDA/2021 tanggal 22

Oktober 2021 tentang perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi terhitung mulai 23 Oktober 2021 sampai dengan 1 Nopember 2021.

Dari uraian tersebut dapat disampaikan bahwa pelaksanaan pemenuhan SPM respon cepat darurat bencana telah dapat terpenuhi 100% dengan ditetapkan status tanggap darurat kurang dari 24 jam.

Selama tahun 2021 semua bencana yang dilaporkan oleh masyarakat dapat tertangani dengan baik sehingga target capaian penanganan bencana 100%.

c. **Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana**

Sasaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana dengan indikator kinerja persentase (%) jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana.

Pusdalops PB BPBD Kabupaten Karangasem merespon dengan cepat setiap laporan kejadian yang disampaikan oleh masyarakat melalui call centre (0363) 22173 dan nomor 08123711174. Semua laporan kejadian yang masuk telah dapat diselesaikan. Ada satu kejadian yang ditetapkan status tanggap darurat yaitu kejadian gempa bumi tanggal 16 Oktober 2021. Aktivasi sistem komando penanganan darurat telah diaktifkan. Dibentuk posko penanganan gempa bumi di Desa Ban Kecamatan Kubu juga pos lapangan di Desa Peampatan Kecamatan Rendang.

Semua pegawai BPBD Kabupaten Karangasem aktif dalam penanganan darurat bencana. Dilaksanakan piket secara bergilir baik di kantor induk BPBD maupun di Posko dan pos lapangan, sehingga penanganan darurat oleh semua komponen baik dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media terkoordinasi dengan baik serta penyaluran bantuan dapat berjalan dengan baik pula.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja pada sub kegiatan ini tercapai 100% dengan aktifnya seluruh petugas dalam penanganan darurat bencana.

d. Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana

Sasaran dari sub kegiatan ini adalah pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana dengan indikator kinerja persentase (%) jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana.

Dalam pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana, BPBD Kabupaten Karangasem senantiasa berkoordinasi dengan para pihak seperti dengan BASARNAS, TNI, dan POLRI. Dalam bencana gempa bumi 16 Oktober 2021 tercatat 125 orang korban terdiri dari 1 orang korban meninggal, 9 orang korban luka berat dan 115 orang luka ringan. Seluruh warga yang terdampak gempa telah dapat dievakuasi. Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban dilaksanakan tidak hanya pada kejadian yang telah ditetapkan status daruratnya. Namun setiap laporan yang masuk seperti misalnya pencarian, pertolongan dan evakuasi orang di laut dan di gunung.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa sasaran dan indikator dari sub kegiatan ini dapat terpenuhi 100%.

3. Dinas Pemadam Kebakaran

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM, anggaran serta realisasinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.22
Program, Kegiatan, Anggaran dan Realisasi
Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Karangasem
Tahun Anggaran 2021

No.	Program Kegiatan	Pagu Dana (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
I.	BELANJA LANGSUNG	3.428.169.919	3.241.545.887	94,56
1.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan	3.428.169.919	3.241.545.887	94,56

Non Kebakaran				
1	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.316.493.969	3.135.268.647	94,54
	c. Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.574.559.250	1.537.750.070	97,66
	d. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	1.741.934.719	1.597.518.577	91,71
2	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	111.675.950	106.277.240	95,17
	b. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	111.675.950	106.277.240	95,17

4.7.6 Bidang Urusan Sosial

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM, anggaran serta realisasinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.23
Program, Kegiatan, Anggaran dan Realisasi
Dinas Sosial Kabupaten Karangasem
Tahun Anggaran 2021

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB. KEGIATAN	PAGU DANA (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI FISIK (%)
1	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Alat Bantu	94.565.600	77.821.350	91,69 %
			Penyediaan Sandang	44.365.600	35.292.800	92,76 %
			Penyediaan Permakanan	663.365.600	62.886.700	84,44 %
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	48.000.000	62.848.300	95,22 %
2	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	Penyediaan makanan	82.385.400	65.286.700	80 %

BAB V PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah disajikan pada bagian-bagian awal laporan ini, secara umum penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karangasem pada tahun anggaran 2021 sudah dapat berjalan dengan baik. Hal ini dapat terlihat dari capaian program dan kegiatan dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah baik urusan wajib (24 urusan dan 4 bidang urusan penunjang pemerintahan) maupun urusan pilihan (7 urusan) yang terlihat dari capaian kinerja pada masing-masing Indikator Kinerja Kunci urusan pemerintahan, capaian kinerja makro, capaian akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, dan capaian penerapan standar pelayanan minimal.

Dengan kondisi pandemi Covid-19 yang melanda sepanjang tahun 2021, penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Karangasem menyesuaikan dengan kondisi tersebut, dengan perubahan penjabaran APBD sebanyak tiga kali juga merupakan salah satu strategi guna menangani pandemi Covid-19 dan menyiapkan jaring pengaman sosial (JPS) untuk masyarakat.

Dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang telah disusun tentunya tidak terlepas dari hambatan-hambatan dan tantangan, namun itu semua bisa dilalui dengan upaya dan kerja keras seluruh jajaran aparat Pemerintah Kabupaten Karangasem dengan dukungan masyarakat dan arahan dari Bupati/Wakil Bupati sebagai nahkoda pemerintahan. Berbagai solusi dan upaya perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan, pada akhirnya bermuara pada harapan terwujudnya masyarakat Karangasem yang sejahtera.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 disampaikan agar dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun-tahun mendatang. Disamping itu, Laporan ini diharapkan dapat menyajikan

sebuah data yang bisa dimanfaatkan sebagai alat ukur kinerja Pemerintahan Daerah serta sebagai referensi oleh berbagai stakeholder yang memerlukan informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Karangasem.